

FINAL REPORT

Contract : 7157202

Effective Targeting of Anti-Poverty Programs II



MITRA SAMYA

Lembaga Studi Partisipasi dan Demokrasi
Institute Study for Participation and Democracy
Jl. Sultan Salahudin No 17 Tanjung Karang Mataram Lombok NTB
Telp/Fax. 0370-624232

PENGANTAR

Selama ± 3 bulan, terhitung sejak 3 Januari 2011 s/d 4 April 2011 **Mitra Samya**¹ telah melaksanakan kegiatan “*Effective Targeting of Anti-Poverty Programme-II*” di 3 provinsi (Jawa Tengah, Sumatera Selatan, Lampung). Secara umum kegiatan ini dilakukan dalam rangka menyikapi kebijakan pemerintah yang telah meluncurkan berbagai program anti kemiskinan skala besar seperti bantuan langsung tunai (BLT), jaminan kesehatan masyarakat (Jamkesmas), dan program nasional pemberdayaan masyarakat (PNPM).

Mengingat ketersediaan sumber daya program yang sangat terbatas, maka memastikan bantuan efektif menjangkau rumah tangga miskin menjadi tantangan tersendiri. Karena itu kegiatan yang juga merupakan proyek penelitian kolaborasi Kantor Bank Dunia Jakarta (WBOJ), Badan Pusat Statistik (BPS), Peneliti the Innovations for Poverty Action (IPA), dan Kementerian Sosial (Kemensos) RI ini bertujuan membandingkan pengorbanan dan akurasi proses sebagai bahan informasi tentang pendekatan yang paling efisien dalam situasi berbeda kepada Pemerintah. Penelitian ini juga berpotensi sebagai alat belajar sangat berharga terkait penyaluran program-program anti kemiskinan di seluruh dunia.

Lokasi studi meliputi 6 kabupaten, antara lain; Wonogiri, Pemalang, Lampung Tengah, Bandar Lampung, Palembang, dan Ogan Komering Ilir. Secara keseluruhan jumlah lokasi kegiatan atau wilayah pencacahan (wilcah) mencakup 620 desa/kelurahan. Dalam implementasinya, studi yang mengujicoba sebanyak 12 treatment/perlakukan metode ini sekaligus dalam rangka menyeleksi calon peserta Program Keluarga Harapan (PKH), sebuah program bantuan sosial yang disalurkan melalui Kemensos RI dalam bidang pendidikan dan kesehatan bagi rumah tangga sangat miskin. Khusus untuk metode pendaftaran, dilaksanakan secara kolaboratif oleh berbagai pihak di Kabupaten yaitu Dinas Sosial beserta tim pendamping PKH, Tim BPS dan Tim Fasilitator Mitra Samya. Kerjasama dan komunikasi yang baik antarpihak menjadi kunci kesuksesan pelaksanaan studi ini. Kesuksesan juga tidak lepas dari dukungan parapihak di tingkat RT, Dusun/ Lingkungan, Desa/Kelurahan maupun Kecamatan.

Proses dan Hasil studi yang dituangkan dalam summary report ini, meliputi tahapan persiapan dan pelaksanaan serta analisis terhadap proses dan hasil. Semoga laporan ini bisa menjadi referensi dan sumber pembelajaran untuk pelaksanaan program sejenis di masa yang akan datang. Akhirnya, kami sampaikan ucapan terimakasih kepada parapihak atas segala dukungan yang sudah diberikan sehingga studi ini dapat berjalan dengan baik.

Mataram, April 2011

Mitra Samya

¹ Lembaga Studi Partisipasi dan Demokrasi, Jl Sultan Salahudin 17 Mataram NTB, Email; mitrasamya@indo.net.id

DAFTAR ISI

	Halaman
Pengantar	i
Daftar Isi	ii
I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Tujuan dan Keluaran	2
C. Lokasi	2
II. PERSIAPAN STUDI	3
A. Mengembangkan Manual	3
B. Training of Trainer	4
C. Rekrutmen Calon Fasilitator	4
D. Training of Facilitator (ToF)	5
E. Training of Trainer (ToT) bagi Asisten Supervisor	6
F. Training of Trainer (ToT) bagi Fasilitator Tambahan	7
F.1. ToF Fasilitator Tambahan Jawa Tengah	7
F.2. ToF Fasilitator Tambahan Sumatera Selatan dan Lampung	8
G. Refresh dan Persiapan Akhir	9
G.1. Refresh dan Persiapan Akhir Tim Fasilitator Jawa Tengah	9
G.2. Refresh dan Persiapan Akhir Tim Fasilitator Lampung	11
G.3. Refresh dan Persiapan Akhir Tim Fasilitator Sumatera Selatan	12
III. PROSES DAN HASIL STUDI	13
A. Koordinasi dengan Stakeholders	13
A.1. Jawa Tengah	13
A.2. Lampung	16
A.3. Sumatera Selatan	22
B. Pelaksanaan Metode Hybrid	23
B.1. Jawa Tengah	23
B.2. Lampung	27
B.3. Sumatera Selatan	33

C. Metode Pendaftaran	37
C.1. Jawa Tengah	37
C.2. Lampung	42
C.3. Sumatera Selatan	50
D. Debriefing	52
D.1. Jawa Tengah	53
D.2. Lampung	54
D.3. Sumatera Selatan	55
IV. ANALISIS	56
A. Pelaksanaan Studi	56
B. Manfaat dan Dampak	68
C. Tantangan dan Strategi	69
C.1. Jawa Tengah	69
C.2. Lampung	71
C.3. Sumatera Selatan	73
V. REKOMENDASI	75
Lampiran-lampiran	
<input checked="" type="checkbox"/> Lampiran 1. Sebaran Lokasi Studi (Wilayah) Per Metode	
<input checked="" type="checkbox"/> Lampiran 2. Daftar Nama Dan ID Fasilitator Effective Targeting Of Anti-Poverty Targeting II	
<input checked="" type="checkbox"/> Lampiran 3.a. Hasil Review Refleksi Jawa Tengah	
<input checked="" type="checkbox"/> Lampiran 3.b. Hasil Diskusi Debriefing Lampung	
<input checked="" type="checkbox"/> Lampiran 3.c. Hasil Tabulasi Review Refleksi Sumatra Selatan	

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Target MDGs yang harus dicapai oleh pemerintah Indonesia, angka kemiskinan pada tahun 2015 sebesar 7,5%. Secara khusus, pemerintah Indonesia telah meluncurkan beberapa program anti-kemiskinan skala besar, seperti Bantuan Langsung Tunai (BLT), Asuransi Kesehatan bagi Masyarakat (Jamkesmas), dan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM). Namun program-program tersebut belum dapat menurunkan angka kemiskinan secara signifikan di Indonesia.

Dalam dua dekade terakhir, penargetan transfer sosial kepada masyarakat miskin telah menjadi prioritas pemerintah Indonesia, sebagai respon terhadap kendala fiskal dan sebagai sarana untuk meningkatkan efektivitas program penanggulangan kemiskinan.

Mengakui kebutuhan untuk meningkatkan kinerja penargetan, proyek penelitian "*Effective Targeting of Anti Poverty Programs*" telah dimulai dalam rangka untuk menginformasikan cara terbaik untuk sasaran rumah tangga miskin untuk program bantuan di masa mendatang kepada Pemerintah Indonesia.

Proyek "*Effective Targeting of Anti Poverty Programs*" yang pertama telah dilakukan dari bulan November 2008 hingga April 2009, membandingkan pengorbanan (sumberdaya yang harus dikeluarkan) yang terkait dengan penggunaan metode Proxy Mean Test (PMT), metode penargetan masyarakat, atau metode hibrida yang merupakan kombinasi dari kedua metode.

Penelitian ini merupakan upaya kolaborasi antara Kantor Bank Dunia Jakarta (WBOJ), Biro Pusat Statistik (BPS), dan peneliti akademis berafiliasi dengan Jameel Poverty Action Lab (J-PAL) di Institut Teknologi Massachusetts (MIT).

Hasil percobaan pertama ini menunjukkan bahwa pendekatan PMT memberikan perkiraan yang lebih akurat konsumsi rumah tangga secara keseluruhan, khususnya bagi hampir miskin, sedangkan pendekatan berbasis masyarakat lebih akurat untuk mengidentifikasi rumah tangga konsumsi terendah. Namun, metode hibrida spesifik yang digunakan memberikan perkiraan yang lebih buruk dibandingkan metode PMT atau penargetan masyarakat.

Hasil ini memunculkan sejumlah pertanyaan kebijakan, termasuk: haruskah masyarakat diizinkan untuk melakukan penargetan sendiri, apakah ada metode hibrida lainnya yang lebih efektif menggabungkan keunggulan dari kedua pendekatan; haruskah pendekatan yang berbeda diterapkan untuk lokasi yang berbeda.

Pada bulan Mei sampai Juli 2010, proyek penelitian "*Effective Targeting of Anti Poverty Programs*" yang kedua dilakukan lagi di 2 provinsi yaitu Propinsi Banten dan Propinsi Sulawesi Selatan. Proyek percontohan dilakukan di 2 kabupaten yaitu Kabupaten Lebak - Banten, dan Kota Makassar - Sulawesi Selatan, dan masing-masing tersebar di 2 kecamatan. Aplikasi dalam penelitian ini dirancang sedemikian rupa sehingga lebih mudah bagi masyarakat miskin untuk menerapkan dan, sebaliknya, sulit bagi non-miskin untuk melakukan hal yang sama.

Penelitian, yang merupakan kerjasama antara Kantor Bank Dunia Jakarta (WBOJ), Departemen Sosial, Biro Pusat Statistik (BPS), Mitra Samya dan Survey Meter menunjukkan, untuk self-

targeting, metode 1 tahap dan sistem digital lebih efektif daripada metode 3 tahap dan sistem manual. Selain itu, penerapan metode hibrida juga terbukti menunjukkan hasil yang positif.

Setelah melalui proyek percontohan, studi *“Effective Targeting of Anti Poverty Programs-II”* telah dilaksanakan pada bulan Nopember 2010 sampai dengan April 2011 dengan skala yang lebih luas. Studi dilakukan di 3 propinsi yaitu propinsi Jawa Tengah, Lampung dan Sumatera Selatan. Dalam implementasinya, penelitian yang mengujicoba sebanyak 12 treatment/perlakuan metode ini sekaligus dalam rangka menyeleksi calon peserta Program Keluarga Harapan (PKH), sebuah program bantuan sosial yang disalurkan melalui Kemensos RI dalam bidang pendidikan dan kesehatan bagi rumah tangga sangat miskin. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi pemerintah, khususnya dalam pelaksanaan berbagai program pengentasan kemiskinan di masa depan.

B. Tujuan dan Keluaran

Tujuannya adalah untuk membandingkan pengorbanan (sumberdaya yang harus dikeluarkan) dan akurasi setiap proses dalam rangka menginformasikan kepada Pemerintah tentang pendekatan yang paling efisien dan biaya-efektif dalam situasi yang berbeda.

Selain menginformasikan kebijakan di Indonesia, penelitian ini memiliki potensi untuk menjadi alat belajar yang sangat berharga untuk banyak program transfer – anti kemiskinan di seluruh dunia.

1. Tujuan

- Untuk membandingkan pengorbanan (sumberdaya yang harus dikeluarkan) dan keakuratan setiap pendekatan proses yang paling efisien dan hemat biaya.
- Untuk menyusun pedoman sebagai panduan bagi para pemangku kepentingan terkait

2. Keluaran

- Manual disusun dari pelaksanaan program dan prosesnya
- Ancaman dan peluang dari setiap pendekatan
- Rekomendasi Proses yang tepat untuk Pemerintah

C. Lokasi

Lokasi pelaksanaan ujicoba meliputi 6 kabupaten di 3 propinsi, yaitu kabupaten Wonogiri dan Pemalang Propinsi Jawa Tengah; kabupaten Lampung Tengah dan kota Bandar Lampung propinsi Lampung; kabupaten Ogan Komering Ilir dan kota Palembang propinsi Sumatra Selatan. Secara keseluruhan jumlah lokasi kegiatan atau wilayah pencacahan (wilcah) mencakup 620 desa/kelurahan, 200 desa/kelurahan diantaranya menggunakan metode self targeting dan 200 desa/kelurahan lainnya menggunakan metode hybrid. Sebaran lokasi (wilcah) untuk metode hybrid dan self targeting, terlampir

II. PERSIAPAN STUDI

Proses persiapan studi dilakukan oleh Mitra Samya bersama Tim Pusat. Persiapan yang dilakukan meliputi Review Metode dan Pengembangan Manual, TOT dan mengembangkan Kurikulum serta Modul TOF, Rekrutment Calon Fasilitator, TOF dan Seleksi Fasilitator, ToT Asisten Supervisor, ToF Fasilitator Tambahan dan Refresh Fasilitator.

A. Mengembangkan Manual

Metode hybrid dan metode Pendaftaran yang digunakan dalam studi ini, merupakan penyempurnaan dari metode hybrid dan metode pendaftaran yang digunakan pada saat pilot studi yang telah dilaksanakan sebelumnya di Propinsi Banten dan Sulawesi Selatan. Proses pengembangannya diawali dengan melakukan review metode yang digunakan sebelumnya dan melakukan perbaikan berdasarkan input yang diberikan oleh tim pusat. Pengembangan metode dan manual dilakukan bersama oleh Mitra Samya dan Tim Pusat / konsultan The World Bank. Komunikasi dilakukan melalui email serta pembahasan bersama dan simulasi di kantor Mitra Samya.

Mitra Samya diwakili oleh 2 orang yaitu Wiji JS dan Husnuzzoni - yang juga terlibat aktif dalam pilot studi sebelumnya – sebagai tim penyusun dan penulis manual. Namun dalam proses-proses simulasi metode melibatkan team leader Mitra Samya serta staf Mitra Samya lainnya. Pengembangan form dan flipchart PKH yang juga menjadi bagian metodologi dilakukan oleh Tim Pusat.

Proses pengembangan manual menghasilkan 10 manual metodologi targeting. Ke-10 manual tersebut terdiri dari 6 manual treatment metode self targeting (pendaftaran) dan 4 manual treatment metode hybrid. Secara garis besar, manual metode disini merupakan hasil revisi dari manual metodologi targeting sebelumnya berdasarkan berbagai catatan dan pengalaman pilot di Provinsi Banten dan Makasar.

Tabel 3. Manual Metodologi Effective Targeting-II

SELF TARGETING/ PENDAFTARAN	HYBRID
1. Manual Pendaftaran Suami Istri di Dusun/RW	1. Manual Hybrid Tambahan Tokoh
2. Manual Pendaftaran Suami Istri di Desa/Kelurahan	2. Manual Hybrid Perbaikan Tokoh
3. Manual Pendaftaran Suami Istri di Kecamatan	3. Manual Hybrid Tambahan Masyarakat
4. Manual Pendaftaran Siapapun di Dusun/RW	4. Manual Hybrid Perbaikan Masyarakat
5. Manual Pendaftaran Siapapun di Desa/Kelurahan	
6. Manual Pendaftaran Siapapun di Kecamatan	

Dalam pelaksanaan targeting semua manual metodologi tersebut telah dipakai sebagai panduan bagi fasilitator di lapangan. Semua fasilitator yang melaksanakan studi ini menyatakan manual yang diberikan sangat mudah dipahami, simpel dan praktis serta sangat membantu dalam proses

fasilitasi metode. Hingga diakhir pelaksanaan targeting tidak terdengar adanya keluhan fasilitator yang terkait dengan manual metodologi.

B. Training of Trainer (ToT)

Proses TOT dilaksanakan selama 5 hari di Mataram. Partisipan dalam kegiatan ToT sebanyak 9 orang, yaitu 1 Team Leader dan 3 Supervisor (Prov Jateng, Palembang dan Lampung), 3 orang tim pusat dan 2 orang supporting. Fasilitasi dilakukan oleh Nyoman Oka, anggota tim pusat yang selama ini terlibat aktif dalam pengembangan metode.

Kegiatan 2 hari pertama difokuskan pada penjelasan dan simulasi metode, termasuk form dan flipchart; hari ke-3 difokuskan pada pengembangan kurikulum dan modul ToF; hari ke-4 dilakukan tryout modul lapangan di Desa Kopang Rembiga Kecamatan Kopang Kabupaten Lombok Tengah NTB; dan hari kelima difokuskan pada perbaikan manual metode, kurikulum dan modul ToF berdasarkan input-input dan pembelajaran yang didapatkan dari proses tryout.

Selain manual metodologi, dalam proses TOT juga berhasil didokumentasikan 9 Modul TOF, yaitu; Modul-1 (Pretest dan Orientasi Training), Modul-2 (Konsep dan Gambaran PKH), Modul-3 (Gambaran Umum Effective Targeting-II), Modul-4 (Konsep Dasar, Prinsip Metode Self Targeting dan Hybrid), Modul-5 (Fasilitasi Targeting), Modul-6 (Format Self Targeting dan Hybrid), Modul-7 (Tahapan Metode Self Targeting dan Hybrid), Modul-8 (Gambaran Umum Metode PPLS dan Teknik Sosialisasi), Modul-9 (Evaluasi dan Pos Test).

Manual Metode dan Modul TOF tersebut telah melalui proses ujicoba dalam pelaksanaan tryout yang termasuk rangkaian TOT. Dengan didampingi konsultan pusat, proses ujicoba difasilitasi bergantian oleh 3 supervisor yang selanjutnya menjadi trainer di 3 provinsi (Jateng, Palembang dan Lampung). Hampir semua modul TOF terpakai saat training, dari 9 modul yang disiapkan hanya Modul-8 yang tidak disampaikan. Hal ini karena hingga akhir proses training bahannya tidak kunjung diperoleh dari Pusat.

C. Rekrutment Calon Fasilitator

Tahap persiapan selanjutnya adalah proses rekrutment calon fasilitator. Melalui jaringan yang ada di 3 provinsi lokasi studi, Mitra Samya menginformasikan kebutuhan fasilitator studi self targeting, diutamakan yang berasal dari kota/kabupaten lokasi studi atau bersedia ditempatkan di lokasi studi; memiliki pengalaman memfasilitasi dan tidak terikat pekerjaan dengan pihak lain. Pelamar diminta mengirimkan CV ke Mitra Samya. Pengutamaan orang setempat dilakukan dengan pertimbangan efisiensi pembiayaan, aspek penguasaan medan studi serta aspek komunikasi dan adat sitedat setempat.

Sampai dengan awal Desember 2010, jumlah lamaran yang masuk (long list) untuk calon fasilitator Provinsi Jawa Tengah sebanyak 36 pelamar; Lampung sebanyak 35 pelamar; dan Sumatera Selatan sebanyak 36 pelamar. Sebagian besar pelamar berlatarbelakang pendidikan sarjana (S-1) lulusan beberapa universitas/ perguruan tinggi setempat. Umumnya para pelamar berdomisili di kota/ kabupaten sekitar calon lokasi targeting.

Selanjutnya dilakukan seleksi administrasi pada pelamar yang masuk dalam daftar longlist. Seleksi administrasi dilakukan dengan mencermati kesesuaian latar belakang pendidikan dan pengalaman kerja yang dicantumkan pada curriculum vitae masing-masing. Mitra Samya juga melakukan verifikasi informasi yang disampaikan dalam CV via telepon, termasuk juga menanyakan komitmen pelamar terkait dengan kesediaan mengikuti ToF sebagai proses seleksi lanjutan serta komitmen menyediakan waktu (full time) untuk mengikuti proses studi.

Dari proses seleksi administrasi diputuskan sejumlah calon fasilitator yang masuk daftar shortlist dan akan diundang mengikuti ToF sebagai proses seleksi selanjutnya. Jumlah calon fasilitator yang masuk dalam shortlist di masing-masing propinsi bervariasi, didasarkan pada jumlah kebutuhan fasilitator ditambah dengan 3 orang cadangan. Di Jawa Tengah sebanyak 20 orang; Lampung 21 orang dan Sumatera Selatan 19 orang.

D. Training of Facilitator (ToF)

Training of Facilitators (ToF) dilaksanakan dalam 2 tahap. ToF tahap pertama dilaksanakan pada tanggal 13-18 Desember 2011 di Hotel Semesta Jl KH. Wachid Hasyim Semarang. ToF diikuti oleh 20 orang calon fasilitator self targeting propinsi Jawa Tengah, dan difasilitasi oleh 5 orang fasilitator, Purnama Sidhi dan Wiji JS dari Mitra Samya; Nyoman Oka, Jurist Tan dan Ben Olken dari tim pusat.

ToF tahap kedua dilaksanakan pada tanggal 19-23 Desember 2010 bertempat di Hotel Sanjaja, Jalan A. Rifai no 03 Palembang Sumatera Selatan. ToF diikuti oleh 19 orang calon fasilitator self targeting propinsi Sumatera Selatan dan 21 orang calon fasilitator self targeting propinsi Lampung. Kegiatan training difasilitasi oleh 3 orang dari Mitra Samya yaitu Purnama Sidhi, Suyono dan Husnuzzonni serta 2 orang dari tim pusat yaitu I Nyoman Oka dan Jurist Tan.

Kegiatan training berlangsung efektif selama 6 hari, dimana 5 hari pertama difokuskan pada peningkatan pengetahuan, sikap dan keterampilan calon fasilitator. Secara garis besar materi yang disampaikan meliputi; Konsep dan Gambaran Umum PKH dan Effective Targeting (*Kelas Gabungan*), serta Teknis Pelaksanaan Targeting (*Kelas Terpisah*). Proporsi materi yang disampaikan adalah 75% peningkatan keterampilan dan 25% terkait dengan pengetahuan dan sikap, dengan pertimbangan bahwa fasilitator self targeting harus mahir dalam memfasilitasi FGD ditingkat masyarakat dan tokoh sesuai dengan metode yang digunakan dalam studi. Metode yang digunakan selama proses training adalah penjelasan, brainstorming, games, demonstrasi dan simulasi.

Strategi yang digunakan dalam pelaksanaan ToF ini adalah strategi kelas umum dan kelas khusus. Materi-materi umum seperti pengantar studi, Penjelasan PKH, Kefasilitatoran dan Gambaran Umum metode dilaksanakan dalam 1 kelas. Sedangkan materi yang terkait dengan metode studi dilaksanakan secara simultan dalam 2 kelas terpisah. Strategi ini cukup efektif untuk mengoptimalkan waktu yang tersedia dan meningkatkan keterampilan peserta, karena mereka hanya fokus kepada metode yang akan mereka gunakan dalam studi.

Karena proses training sebagai bagian seleksi, penilaian dilakukan melalui pre-post test, pengamatan harian dan interview. Hasil akhir penilaian merupakan akumulasi rata-rata hasil pre-post test (bobot total 25) + hasil pengamatan harian (bobot total 40) + hasil interview (bobot total 35). Total nilai pre-post test adalah rata-rata nilai pre test (bobot 30) + nilai post test (bobot 70), total nilai pengamatan harian diperoleh dari rata-rata hasil pengamatan tim trainer, dan total nilai interview diperoleh dari jumlah rata-rata penilaian tim trainer saat wawancara.

Nilai pengamatan harian memiliki bobot tertinggi, didalamnya mengamati 1). proses kelas meliputi; tingkat kehadiran, kemampuan adaptasi, keberanian bertanya, mulai bicara dan mencoba, serta keseriusan menyimak dan berdiskusi; 2). proses simulasi, yaitu; kejelasan cara menyampaikan maksud, sistematika/ prosedur dalam mengantar setiap tahapan, memberikan kesempatan secara merata, kemampuan merangkum pendapat, berusaha mengatasi perbedaan pendapat, kenetralan/ tidak berpihak, materi simulasi dijelaskan dengan baik, menggunakan bahasa yang mudah dimengerti, penggunaan alat bantu, kesopanan dalam memfasilitasi.

Hari ke-6 dilakukan wawancara. Waktu wawancara yang di butuhkan untuk 1 orang calon fasilitator berkisar antara 15 - 25 menit. Hasil wawancara juga menentukan karena peserta diminta

menyampaikan beberapa hal; motivasi melamar, kesiapan bekerja, strategy jika terjadi kasus di lapangan, pandangan tentang kemiskinan, manajemen waktu, dan strategi kelancaran tugas. Saat wawancara juga digunakan untuk memastikan komitmen peserta. Hal ini sangat penting, sehingga bagi yang tidak serius atau tidak bersedia memberikan komitmen tegas untuk bergabung dalam kegiatan ini maka dalam grafik penilaian diberi catatan (tanda merah). Standar nilai kelulusan atau yang dianggap layak bekerja harus mencapai minimal 55. Capaian nilai di bawah angka tersebut dianggap kurang memenuhi syarat untuk bekerja dalam kegiatan targeting ini.

Setelah wawancara diputuskan peserta ToF yang lulus sebagai fasilitator studi self targeting. Hasil test ini menggunakan jumlah hasil kumulatif dari 3 variabel yaitu; nilai post test, Nilai harian selama pelatihan, dan Interview. Kemudian hasil kumulatif tersebut dirata-ratakan. Standar kelulusan yang ditetapkan oleh tim Mitra Samya adalah diatas 65.

Di Jawa Tengah, dari 12 calon fasilitator hybrid yang mengikuti training diputuskan 11 orang (4 perempuan, 7 laki-laki) menjadi fasilitator, dan 1 orang (laki-laki) sebagai cadangan. Sementara dari 8 calon fasilitator self targeting yang dilatih, ditetapkan 6 orang (1 perempuan, 5 laki-laki) menjadi fasilitator, 1 orang sebagai fasilitator cadangan, dan 1 orang tidak lulus karena sedang bekerja di proyek lain. Selanjutnya ke-17 fasilitator yang dinyatakan lulus didistribusikan ke 2 wilayah; 9 fasilitator (6 hybrid, 3 self targeting) untuk Kab Wonogiri, dan 8 fasilitator (5 hybrid, 3 self targeting) untuk Kabupaten Pemalang.

Untuk provinsi Lampung, dari 21 orang peserta ToF yang dinyatakan lulus sebanyak 18 orang. Jumlah ini masih kurang 1 orang jika dibandingkan dengan kebutuhan fasilitator lapangan di provinsi lampung yaitu sebanyak 19 orang. Kekurangan ini adalah untuk fasilitator metode pendaftaran. Sedangkan untuk propinsi Sumatera Selatan, dari 19 orang yang mengikuti ToF, yang dinyatakan lulus sebanyak 9 orang. Artinya, masih terdapat kekurangan 7 orang fasilitator dari jumlah yang dibutuhkan, 3 orang fasilitator pendaftaran dan 4 orang fasilitator Hybrid.

Sementara itu, 1 orang fasilitator hybrid Wonogiri mengundurkan diri karena lulus PNS, dan 1 orang fasilitator lainnya ditunjuk menjadi assistant supervisor di Wonogiri karena perubahan strategi pelaksanaan studi. Sedangkan di Pemalang, karena wilcahnya cukup banyak diputuskan menambah 2 fasilitator hybrid.

Berdasarkan kondisi ini diputuskan untuk melakukan rekrutmen calon fasilitator baru, yang nanti akan ditraining secara khusus oleh Mitra Samya. Di Jawa Tengah, penajakan calon fasilitator tambahan dilakukan dengan rekomendasi beberapa fasilitator, sehingga diperoleh 2 fasilitator secara cepat. Sedangkan di Sumatera Selatan dan Lampung kembali menggunakan jaringan yang ada. Bahkan beberapa fasilitator untuk Sumatera Selatan direkrut dari propinsi Lampung.

E. Training of Trainer (ToT) bagi Asisten Supervisor

Pada awalnya, pelaksanaan studi akan dilaksanakan dengan strategi menyelesaikan studi di 1 kabupaten terlebih dahulu sebelum pindah ke kabupaten lainnya. Strategi ini dipilih dengan pertimbangan lebih memudahkan supervisor untuk melakukan koordinasi, supervisi dan mentoring. Selain itu, memudahkan dalam mengatur mobilisasi dan akomodasi bagi tim pelaksana. Namun dalam kontrak BPS dengan Bank Dunia dinyatakan bahwa studi akan dilaksanakan secara serentak di seluruh kabupaten lokasi studi, sehingga tim Mitra Samya harus menyesuaikan strategi, karena BPS tidak bisa memulai jika belum dilakukan FGD di desa-desa dengan metode pendaftaran.

Sebagai dampak penyesuaian, maka diputuskan bahwa akan direkrut 3 orang asisten supervisor yang akan melaksanakan tugas supervisor di 1 kabupaten. Asisten Supervisor direkrut dari fasilitator Self Targeting-1 tahun 2008 yang dinilai memiliki kemampuan oleh Mitra Samya. Ketiga

asisten supervisor tersebut adalah 1). Yeni Susanti Siregar, sebagai asisten supervisor di kabupaten Lampung Tengah; 2). Asisjah, sebagai asisten supervisor di kabupaten Ogan Komering Ilir; dan 3). Badiul Hadi, sebagai asisten supervisor di kabupaten Wonogiri. Badiul Hadi sebelumnya juga menjadi fasilitator self targeting-2 di kabupaten yang sama.

Pembekalan terhadap asisten supervisor dilakukan melalui Training of Trainer (ToT) yang dilaksanakan selama 3 hari di Jakarta. Proses ToT difasilitasi oleh Purnama Sidhi, team leader Mitra Samya. Materi yang diberikan difokuskan pada pemahaman tentang pemahaman tentang PKH, dan metode studi termasuk form serta flipchart. Dalam ToT tersebut lebih banyak dilakukan simulasi, sehingga peserta siap untuk melaksanakan peran sebagai asisten supervisor. Pasca ToT, asisten supervisor langsung dimobilisasi ke wilayah kerja masing-masing.

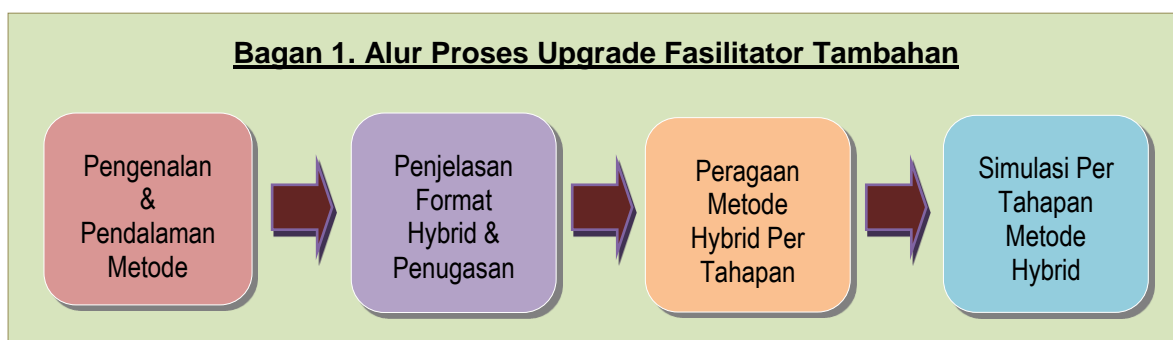
F. Training of Facilitator (ToF) bagi Fasilitator Tambahan

F.1. ToF Fasilitator Tambahan Jawa Tengah

ToF yang dimaksud adalah melatih fasilitator tambahan secara cepat dan memastikan mereka benar-benar siap bekerja dengan metode hybrid. Hal ini dilakukan karena berbagai keterbatasan terutama waktu yang sangat terbatas. Rekrutment bagi fasilitator tambahan juga tidak sama seperti fasilitator lain, yaitu tanpa melalui pre-post test, pengamatan harian ataupun wawancara. Mereka direkrut berdasarkan rekomendasi fasilitator dan kemudian dilatih melalui proses upgrade.

Mengingat kekurangan fasilitator Jawa Tengah hanya terjadi di Pemalang, maka upgrade fasilitator tambahan hanya dilakukan di kabupaten ini. Prosesnya dilakukan pada tanggal 9 Januari 2011 di Hotel Pemalang Jl Jendral Sudirman Timur No 5 dengan diikuti oleh 2 peserta yaitu; Akhmad Hardi, S.Pd.T dan Edy Gunawan, SP. Secara umum persiapan dan proses pelaksanaannya difasilitasi supervisor Mitra Samya.

Sesi pertama proses upgrade fasilitator dimulai pukul 12.00 siang hingga sore dengan menyampaikan beberapa materi seperti; pengenalan konsep umum effective targeting, dan penjelasan tentang metode hybrid. Mengingat waktu yang sangat terbatas, maka proses upgrade fasilitator tambahan ini harus dilaksanakan dengan strategi dan pendekatan khusus. Prosesnya tidak sama dengan training fasilitator, sehingga secara garis besar alurnya mengikuti skema sbb:



Pengenalan dan pendalaman metode hybrid dalam proses upgrade ini dibingkai dengan penjelasan tentang konsep targeting yaitu dengan mengilustrasikan latar belakang pelaksanaan effective targeting-II. Penjelasan metode disampaikan dengan menguraikan secara detail apa itu metode hybrid dengan 4 treatment yang akan dilaksanakan. Sebagai bahan pendukung fasilitator mendapatkan manual metodologi, yang ternyata diantaranya sudah memperoleh dan belajar dari fasilitator sebelumnya. Proses pendalaman metode dilanjutkan dengan menjelaskan semua tahapan per metode hybrid yang disertai dengan filosofi masing-masing secara rinci.

Sesi pada malam hari diisi dengan memperagakan per tahapan metode, penjelasan format, tata cara pengisian format, dan bagaimana melakukan matching. Setelah itu masing-masing fasilitator diberikan tugas untuk membuat resume per tahapan yang keesokan paginya akan digunakan sebagai bahan simulasi. Proses simulasi tahapan metode kemudian dilakukan pada hari kedua, mulai pukul 08.00 pagi hingga pukul 15.00 sore. Adapun simulasi yang dilakukan pada saat upgrade, antara lain:

- Koordinasi Kepala Desa; pembagian tugas 1 orang memerankan fasilitator dan yang lain sebagai Kades secara bergantian. Kasusnya ada yang bisa bertemu langsung dan ada yang tidak bertemu.
- Pertemuan Semua Ketua RT; pembagian tugas 1 orang memerankan fasilitator dan yang lain sebagai peserta secara bergantian.
- Pertemuan Masyarakat; pembagian tugas 1 orang memerankan fasilitator dan yang lain sebagai peserta masyarakat.
- Pertemuan Tokoh; pembagian tugas 1 orang memerankan tugas fasilitator dan yang lain sebagai peserta tokoh.
- Matching setelah diskusi tokoh/masyarakat; pembagian tugas 1 orang berperan fasilitator dan yang lain sebagai tokoh.

Setiap akhir simulasi langsung dilakukan review antar fasilitator bersama supervisor. Hal ini dilakukan untuk saling memberikan masukan, disertai tanya jawab dan penegasan-penegasan oleh supervisor. Dengan demikian semua fasilitator menjadi jelas sehingga diharapkan tidak ada lagi persoalan yang menghambat ketika di lapangan.

F.2. ToF Fasilitator Tambahan Sumatera Selatan dan Lampung

ToF dilaksanakan selama 4 hari mulai dari tanggal 5 s/d 8 Januari 2011 bertempat di Hotel Budi Palembang. Peserta ToF berjumlah 8 orang, terdiri dari 7 orang calon fasilitator yang akan bekerja di Kota Palembang dan Kabupaten Ogan Komering Ilir, dan 1 orang fasilitator tambahan untuk propinsi Lampung. ToF difasilitasi oleh Nyoman Oka, Husnuzzonni dan dibantu oleh Asisjah, asisten supervisor Sumatera Selatan.

ToF Fasilitator Tambahan bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan fasilitator terkait program PKH, metode hybrid dan metode pendaftaran. Yang berbeda dengan ToF sebelumnya adalah pada ToF ini tidak dilakukan proses penilaian sehingga memang tidak dipersiapkan calon fasilitator cadangan. Jadi fasilitator yang mengikuti proses ToF sudah dipastikan akan bekerja di lapangan bersama fasilitator yang sudah diseleksi sebelumnya.

Proses dan strategi ToF ini tidak jauh berbeda dengan proses dan strategi yang dikembangkan saat proses proses ToF sebelumnya. Fasilitator di bagi sesuai dengan kebutuhan fasilitator pada setiap metode. Pembagian fasilitator berdasarkan kebutuhan adalah antara lain;

No	Nama fasiltator	Metode
1	Irkhamiawan Ma'ruf	Hybrid
2	Eko Putra Kusuma	Hybrid
3	Intan Sriwedari	Pendaftaran
4	Eka Chandra	Hybrid
5	Ade Rameyeni	Pendaftaran
6	Dani Krismanto	Pendaftaran
7	Iwan Ferosika	Pendaftaran
8	Wihangga Trisunu	Pendaftaran (Bandar Lampung)

G. Refresh dan Persiapan Akhir

Setelah proses training, tim fasilitator harus kembali ke tempat masing-masing dahulu dan menjalani jeda selama ± 2 minggu. Mengingat masih adanya berbagai persiapan yang perlu dimatangkan ditingkat pusat dan daerah, tim fasilitator belum bisa dimobilisasi ke lokasi masing-masing.

Persiapan yang harus dilakukan tim pusat antara lain; menyesuaikan jadwal kerja (master schedule), penyediaan data preprinted, mengurus perizinan, mempersiapkan alat dan bahan seperti flipchart PKH dan GPS (Global Positioning System). Selain itu Tim Mitra Samya juga harus menyiapkan alternatif strategy (plan A, plan B) untuk pelaksanaan di lapangan, termasuk membahas keperluan ATK dan logistik. Sebelum fasilitator terjun ke lokasi semua itu harus sudah dipersiapkan terlebih dahulu.

Dengan kondisi jeda waktu selama ± 2 minggu tersebut, sangat dimungkinkan fasilitator mengalami mis-understanding. Sebelum bekerja di lapangan mereka perlu mendapatkan penyegaran kembali, khususnya terkait dengan pemahaman terhadap konsep dan teknis pelaksanaan metode. Sehingga dilakukanlah proses refresh fasilitator di setiap kabupaten yang tujuan utamanya untuk penyamaan persepsi antar tim fasilitator terkait konsep targeting dan meningkatkan keterampilan teknis dalam pelaksanaan targeting.

G.1. Refresh dan Persiapan Akhir Tim Fasilitator Jawa Tengah

G.1.1. Refresh Tim Fasilitator Wonogiri

Informasi waktu refresh disampaikan pada fasilitator sejak tanggal 2 Januari 2011. Namun karena persiapan harus simultan, khusus tim Wonogiri tempat refresh diinformasikan tanggal 4 Januari 2011. Refresh tim Wonogiri dilaksanakan di Hotel Arini Jl Slamet Riyadi Solo dengan pertimbangan tempat ini strategis dan mudah dijangkau. Selain itu, untuk penyediaan ATK, fotocopy bahan dan pengadaan alat bahan juga lebih mudah.

Pelaksanaan refresh tim Kabupaten Wonogiri berlangsung selama 2 hari, mulai tanggal 5-6 Januari 2011. Secara umum prosesnya difasilitasi supervisor dengan dibantu oleh assistant. Peserta check in tanggal 5 Januari (pagi) dan semua hadir tepat waktu. Proses **kelas hari pertama** dimulai pukul 13.00-17.30 siang dengan materi informasi hasil seleksi fasilitator. Untuk Kabupaten Wonogiri, terpilih 3 fasilitator self targeting (2 laki, 1 perp) dan 4 fasilitator hybrid (2 laki, 2 perp). Proses dilanjutkan dengan menyampaikan informasi wilayah kerja (wilcah) dan pembagian manual kepada semua fasilitator.

Proses penyegaran fasilitator dilakukan dengan menegaskan kembali konsep metode targeting. Secara kelompok fasilitator diminta mendesain flowchart tahapan umum setiap metode (pendaftaran dan hybrid) dan mencantumkan point-point terpenting dari setiap tahapan metode. Setelah itu proses dilanjutkan dengan pembahasan detail dan tanya jawab berbagai hal yang belum difahami. Sessi ini diakhiri dengan menugaskan fasilitator untuk membuat resume per tahapan metode.

Setelah ishoma, sessi malam dimulai pukul 19.30-22.00 dengan simulasi tahapan per metode. Proses dilanjutkan dengan melakukan tanya jawab berbagai kemungkinan yang terjadi di lapangan. Sharing disini dilakukan berdasarkan pemahaman terhadap konsep metode dan pengalaman pilot sebelumnya.

Proses **kelas hari ke-2** tanggal 6 Januari 2011 dimulai pukul 08.00-12.00. Sessi diawali dengan praktik GPS (di luar kelas) untuk memastikan fasilitator bisa mengoperasikan GPS, memilih

fitur untuk titik ordinat/ lokasi, setting konversi ke satuan meter/feet, dll. Proses selanjutnya membahas format, praktik mengisi format, tanya jawab hal-hal yang belum jelas, serta update informasi pembaharuan format. Sesi ini disambung dengan pembahasan mekanisme kerja, strategi lapangan, pembagian kode fasilitator, pemilihan koordinator tim fasilitator, dan distribusi lokasi kerja.

Setelah ishoma, proses siang pukul 13.00-17.00 dimulai dengan penjelasan jadwal kerja secara rinci meliputi; waktu kegiatan (per-tanggal), kapan koordinasi, sosialisasi hingga proses diskusi atau pertemuan masyarakat/ tokoh di desa. Proses ini dilanjutkan dengan menugaskan fasilitator menjabarkan master schedule menjadi jadwal personal. Hasilnya berupa lembar kerja fasilitator yang berisi “Waktu/Tanggal, Desa/ Lokasi, Metode dengan Keterangan” yang selanjutnya dijadikan sebagai panduan kerja di lapangan.

Sesi sore hari diisi dengan mempersiapkan berbagai keperluan lapangan, seperti alat dan bahan, ATK, pengadaan serta distribusi format dan data-data preprinted. Proses ini dilanjutkan hingga malam hari hingga semua bahan dan ATK serta kebutuhan lapangan lainnya benar-benar siap, menandatangani kontrak kerja, dan pendistribusian logistik/ personal use setiap fasilitator.

G.1.2. Refresh Tim Fasilitator Pemalang

Refresh Tim Fasilitator di Kabupaten Pemalang dilaksanakan selama 2 hari, mulai tanggal 11-12 Januari 2011. Kegiatan ini diikuti 10 peserta yaitu; 3 fasilitator self targeting dan 7 fasilitator hybrid. Secara umum prosesnya difasilitasi supervisor di Hotel Pemalang Jl Jenderal Sudirman Timur No 5 Pemalang. Peserta check in hotel pada tanggal 11 Januari 2011 pagi pukul 10.00 Wib, dan berdasarkan catatan semua hadir tepat waktu.

Proses **kelas hari pertama** dimulai pukul 13.00-17.30 dengan sesi pembukaan dan informasi hasil seleksi fasilitator. Di Pemalang terpilih 3 fasilitator self targeting (laki-laki), dan 7 fasilitator hybrid (2 perp, 5 laki), termasuk 2 fasilitator tambahan. Sesi *kedua* diisi dengan informasi wilayah kerja, meliputi; kode provinsi, kabupaten, kecamatan, wilcah dan kontak person BPS khusus bagi tim self targeting. Sesi ini bertujuan memastikan semua fasilitator memahami kode-kode yang dipakai. Karena waktu targeting terbatas dengan sebaran lokasi sangat luas, diharapkan tidak ada fasilitator yang salah persepsi dengan lokasi tugasnya.

Setelah itu sesi *ketiga*, dilakukan proses penentuan nomer kode fasilitator, yaitu dengan diundi. Ketentuan yang disepakati semua peserta harus menerima keputusan lokasi tugas masing-masing. Proses disambung dengan pemilihan koordinator tim fasilitator. Hasilnya terpilih koordinator tim fasilitator hybrid (Mitradi Dwi Wibowo), dan koordinator tim self targeting (Rudhito). Proses selanjutnya distribusi manual, alat bahan, ATK dan GPS.

Sesi *ke-4* diisi dengan membagi tugas; tim hybrid refleksi dan pendalaman metode hingga penjelasan dan mengisi format, sedangkan tim self targeting bersama koordinator mendesain flowchart tahapan umum dan tahapan rinci metode, termasuk pesan-pesan pentingnya. Proses ini berlangsung hingga ishoma pada pukul 18.00 Wib.

Sesi *malam* dimulai pukul 19.30-21.00 dengan berbagi tugas; tim self targeting refleksi dan pendalaman metode hingga penjelasan dan mengisi format, sementara tim hybrid meringkas 4 treatment metode per tahapan dan menyiapkan simulasi. Tugas simulasi: Fas-1 (Perbaikan Tokoh Quota 5 diperlihatkan 3), Fas-2 (Tambahan Tokoh Quota 15 diperlihatkan 10), Fas-3 (Perbaikan masyarakat Quota 8 diperlihatkan 5), dan Fas-4 simulasi (Quota Nol). Fasilitator yang tidak memfasilitasi berperan sebagai peserta.

Proses **kelas hari ke-2** dimulai pukul 08.00 pagi hingga pukul 21.00 malam. Kegiatan dimulai dengan sesi *ke-5*, praktik GPS (di luar kelas) selama ± 20 menit. Tujuannya agar semua fasilitator mahir menggunakan GPS mulai dari bagaimana menghidupkan/ mematikan, memilih fitur-fitur

untuk penentuan titik ordinat/ lokasi, dan setting konversi ke satuan meter/feet, dll. Setelah itu fasilitator masuk kelas dan mulai simulasi per kelompok sesuai pembagian tugas yang disepakati sebelumnya. Di setiap akhir simulasi, dilakukan refleksi apa yang sudah baik dan apa yang perlu ditingkatkan. Secara umum proses ini dipandu Koordinator Tim bersama Supervisor hingga pukul 15.00 Wib.

Sessi ke-6 yaitu membahas kalender, identifikasi lokasi kerja dan mendesain agenda tim fasilitator. Proses ini dilanjutkan dengan breakdown master schedule menjadi jadwal personal, dilanjutkan dengan distribusi format dan data preprinted. Sessi ke-7 diisi dengan membahas kontrak kerja, diskusi tugas/kewajiban fasilitator, merumuskan tanggungjawab koordinator dan mekanisme kerja. Sessi ini diakhiri dengan diskusi rencana kerja, strategi lapangan, persiapan alat bahan dan keperluan ATK.

G.2. Refresh dan Persiapan Akhir Tim Fasilitator Lampung

Kegiatan refresh Fasilitator dilaksanakan dengan tujuan untuk menyegarkan serta membekali kembali fasilitator lapangan tentang metodologi dan ketrampilan fasilitasi sebelum diturunkan kelapangan. Disamping itu juga ditujukan untuk memberi pemahaman manajemen administrasi kegiatan dan persiapan data-data yang dibutuhkan selama kegiatan studi berlangsung. Output dari kegiatan refresh adalah fasilitator memiliki ketrampilan dan bekal fasilitasi dan mampu meningkatkan motivasi kenyakinannya tentang teknik fasilitasi dan metodologi di lapangan ketika berhadapan dengan stakeholder tingkat kecamatan maupun kelurahan dan desa. Disamping itu juga untuk meningkatkan kesadaran akan peran, hak dan kewajiban fasilitator terhadap studi ini.

Kegiatan refresh untuk Fasilitator di provinsi Lampung dilaksanakan pada tanggal 4-6 Januari 2011 di Hotel Andalas Permai kota Bandar Lampung. Peserta yang mengikuti refresh sebanyak 18 orang, yang terdiri dari 12 orang fasilitator metode hybrid dan 6 orang fasilitator metode pendaftaran. Fasilitator yang melakukan refresh dua orang yang berasal dari Mitra Samya, yaitu Suyono dan Husnuzjoni.

Sequen penggunaan dari seluruh waktu untuk refresh ini adalah hari 1,5 hari pertama untuk pendadaran/refresh metodologi hybrid dan pendaftaran bagi para fasilitator, kemudian 0,5 hari berikutnya untuk memahami administrasi studi seperti; kewajiban membuat laporan, mematuhi prosedur metodologi dan waktu studi, memahami kontrak kerja terkait dengan hak, kewajiban serta peran fasilitator selama studi, dan 1 hari berikutnya digunakan untuk persiapan pelaksanaan studi seperti; mendistribusikan kebutuhan ATK, uang transportasi fasilitator lapangan, mendistribusikan data kebutuhan studi yang diperlukan seperti ; data survey meter, data quota masing masing satuan lingkungan setempat (SLS), form dan cara pengisiannya sehabis memfasilitasi, membuat jadwal studi lapangan oleh masing-masing fasilitator.

Untuk fasilitator yang ditugaskan di kabupaten Lampung Tengah, waktu pelaksanaan kegiatan studi di lapangan lebih dahulu kurang lebih satu minggu dibandingkan dengan tim fasilitator dari kota Bandar Lampung. Oleh karena itu seluruh distribusi perbekalan persiapan data diupayakan lebih dahulu bagi tim Lampung Tengah. Sedangkan untuk Tim fasilitator Bandar Lampung, maka untuk distribusi data dilakukan pada hari berikutnya setelah tim Lampung Tengah selesai kebutuhan ATK dan perbekalannya.

Setelah semua tim fasilitator siap perbekalannya, maka tim Lampung Tengah pada tanggal 7 Januari 2011 berangkat menuju lokasi di kecamatan pertama yaitu Selagai Lingga untuk memulai kegiatan studi yang pertama. Dikarenakan fasilitator pendaftaran di Lampung Tengah masih kurang satu orang lagi, maka satu orang fasilitator pendaftaran Bandar Lampung ditugaskan sementara di Lampung Tengah sampai satu orang fasilitator yang ditugaskan di wilayah tersebut selesai mengikuti ToF di Palembang.

G.3. Refresh dan Persiapan Akhir Tim Fasilitator Sumatera Selatan

Pelaksanaan refreshing dengan tim dilakukan di masing-masing propinsi, untuk koordinasi tim di Propinsi Sumatera Selatan dilaksanakan selama 2 hari mulai dari tanggal 09-10 Januari 2011 yang bertempat di Hotel Budi kompleks Pertokoan 8 Ilir Kota Palembang.

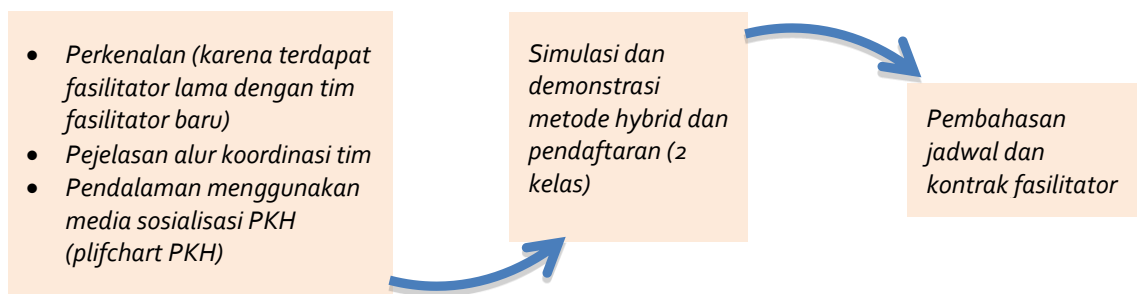
Secara umum kegiatan refresh fasilitator ini bertujuan untuk mempersiapkan fasilitator di Sumatera Selatan agar supaya benar-benar siap bekerja di lapangan menggunakan metode hybrid dan metode self targeting.

Sebagai fasilitator utama dalam kegiatan refreshing fasilitator adalah supervisor dan Tim Pusat juga membantu fasilitasi proses refreshing fasilitator sekaligus melakukan supervisi kegiatan.

Materi yang disampaikan saat melakukan refresh dengan tim fasilitator antara lain, materi PKH, pendalaman masing-masing metode (hybrid dan pendaftaran) serta penyepakatan jadwal kerja lapangan.

Khususnya materi terkait dengan metode, fasilitator di bagi menjadi 2 tim yaitu tim Hybrid dan tim pendaftaran. Untuk tim hybrid di fasilitasi oleh I Nyoman Oka sedangkan untuk tim pendaftaran di fasilitasi oleh Husnuzzonni.

Alur proses selama melakukan koordinasi dengan tim fasilitator adalah sebagai berikut;



Teknik fasilitasi yang interaktif, panduan yang simpel dan praktis, penggunaan media/alat bantu secara kreatif, ice breaker dan tempat pelatihan yang memadai diakui sangat mendukung terhadap proses belajar dan memudahkan peserta memahami topik materi yang disampaikan dalam pelatihan. Proses belajar dikelas ditekankan untuk penguasaan konsep dan teknik memfasilitasi kegiatan Self Targeting.

Kegiatan selanjutnya adalah menyusun rencana kerja oleh masing-masing fasilitator. Sesuai dengan pembagian tugas masing-masing pendamping mendapatkan 4-6 Kelurahan yang harus difasilitasi. Sebelum pembahsaan jadwal masing-masing fasilitator diberikan kode fasilitator sendiri-sendiri baik kode fasilitator dalam jadwal atau kode fasilitator yang akan dimasukkan dalam format isian fasilitator. Hal ini dilakukan untuk mempermudah fasilitator melihat jadwalnya sendiri dalam master schedule.

Setelah pembagian tugas dilanjutkan dengan pembahasan dan penyepakatan surat kerjasama antara Mitra Samya masing-masing fasilitator. Kemudian proses dilanjutkan dengan pembagian logistik berupa ATK yang akan dipergunakan oleh masing-masing fasilitator dilapangan.

III. PROSES DAN HASIL STUDI

A. Koordinasi dengan Stakeholders

A.1. Jawa Tengah

Ada 2 hal penting tujuan koordinasi dengan stakeholders ditingkat lapangan, *pertama* dalam rangka sharing metode targeting dan *kedua* sebagai upaya legalitas pelaksanaan kegiatan di wilayah. Tujuan pertama khusus ditujukan kepada BPS, mengingat staf instansi ini berperan sebagai bagian tim pelaksana metode self targeting. Sedangkan kedua kepada Dinsos dan Transmigrasi, karena instansi ini sebagai pelaksana program keluarga harapan ditingkat kabupaten yang menjadi target ujicoba.

A.1.1. Koordinasi di Kabupaten Wonogiri

Berdasarkan master schedule koordinasi lapangan (kecamatan, desa) untuk proses targeting di Kabupaten Wonogiri harus dimulai tanggal 7 Januari 2011. Karena itu pasca kegiatan refresh 6 Januari 2011 di Solo, semua tim fasilitator langsung berkoordinasi ke BPS Kabupaten Wonogiri.

Di Kantor BPS Wonogiri Tim Fasilitator Mitra Samya langsung bertemu Koordinator Tim Pelaksana dari BPS (Sarwo Eddy). Beliau banyak memberikan input/masukan kepada tim fasilitator, terutama terkait dengan kultur dan perilaku masyarakat di lokasi ujicoba. Dengan demikian diharapkan tim fasilitator memahami kondisi masyarakat, sehingga siap memfasilitasi dan tidak terkejut saat berhadapan di lapangan.

Dari Kantor BPS Wonogiri, tim fasilitator langsung menuju Kecamatan Giritontro untuk berkoordinasi dengan Camat. Tetapi Pak Camat saat itu tidak berada di tempat sehingga tim fasilitator hanya diterima Staf Kecamatan. Proses koordinasi dilanjutkan ke Kecamatan Giriwoyo, namun di kecamatan ini Pak Camat juga tidak berada di kantornya. Setelah disambungkan oleh staf kecamatan, Pak Camat meminta tim fasilitator untuk langsung berkoordinasi dengan Pendamping PKH.

Hari berikutnya tim fasilitator sudah mulai berkoordinasi dengan para Kepala Desa di Kecamatan Giritontro dan Kecamatan Giriwoyo. Berdasarkan catatan dari asistent supervisor, secara umum proses koordinasi telah berjalan dengan cukup lancar.

B.2.1. Koordinasi di Kabupaten Pemalang

Sesuai jadwal koordinasi di lapangan (kecamatan, desa) untuk pelaksanaan targeting di Kabupaten Pemalang harus dimulai tanggal 14 Januari 2011. Sehingga pasca kegiatan refresh tanggal 13 Januari 2011, semua tim fasilitator langsung menuju ke lokasi masing-masing. Selanjutnya proses koordinasi ditingkat kabupaten diwakilkan oleh supervisor bersama Tim Pusat.

Koordinasi Dengan BPS Pemalang

Koordinasi dengan BPS Pemalang dilakukan pada tanggal 14 Januari 2011 di Kantor BPS Jl. Tentara Pelajar. Koordinasi dilakukan bersama Koordinator Tim Data Entry, dengan peserta hadir meliputi; Kepala BPS (Marsudijono), Korlap BPS (Tati Rosyda), Wakorlap (Masyur

Mansyur Tolkhah), Tim Pewawancara BPS, Koordinator PKH Dinsos (Indarto) beserta Tim Pendamping.



Gambar 0. Tim BPS Mengikuti Proses Penjelasan Konsep Targeting Saat Koordinasi

Proses diawali dengan pengenalan, dilanjutkan dengan penjelasan konsep targeting serta tujuan studi oleh Supervisor. Penjelasan konsep targeting disampaikan secara umum, sedang penjelasan metode self targeting disampaikan secara rinci. Mengingat Tim BPS sudah mendapatkan pelatihan khusus, penjelasan disini dilakukan tanpa disertai simulasi. Prosesnya dipertegas melalui tanya jawab perihal-perihal

penting yang masih dianggap belum jelas oleh peserta.

Proses tanya jawab terus berjalan sampai muncul persepsi beberapa peserta bahwa studi akan dilaksanakan di 14 kecamatan. Selain informasi tentang metode study, ternyata strategy/mekanisme kerja dan pembagian tugas tim pewawancara dengan tim pendamping banyak menjadi pertanyaan. Tim BPS juga mempertanyakan perihal logistik serta keamanan saat melakukan proses wawancara di lapangan.

Dalam rangka mengklarifikasi beberapa pertanyaan tersebut proses dilanjutkan dengan menjelaskan lokasi studi untuk metode hybrid dan self targeting. Penjelasan disini menggunakan daftar treatment per kecamatan yang meliputi 96 desa yang tersebar di 6 kecamatan Kabupaten Pemalang. Proses disambung dengan penjelasan jadwal, menginformasikan pihak-pihak yang akan terlibat, informasi fasilitator Mitra Samya (hybrid, self targeting), penjelasan mekanisme kerja dan pembagian tugas masing-masing tim pelaksana targeting.

Tim hybrid (7 fasilitator) akan memfasilitasi sebanyak 4 treatment di semua lokasi hybrid, dan masing-masing akan menerapkan 1 treatment di setiap satuan lingkungan setempat (SLS) per lokasi desa. Sedangkan Tim Self Targeting bertugas melakukan koordinasi ke Camat dan Kepala Desa/Lurah, memfasilitasi pertemuan tokoh di tingkat desa/kelurahan dan melakukan sosialisasi kepada masyarakat. Tim BPS bertugas untuk memfasilitasi proses wawancara di desa/ kelurahan lokasi self targeting. Dalam proses wawancara, Tim BPS akan bekerjasama dengan Pendamping PKH setempat yang membantu persiapan tempat dan meregistrasi calon peserta.

Proses disambung dengan penjelasan program entry data oleh Team Leader Data Entry, dan dilanjutkan dengan memastikan versi software yang akan digunakan. Setelah itu melakukan diskusi/ tanya jawab tentang alat registrasi dan cara menggunakannya, termasuk berbagai persiapan lapangan lainnya.

Sejak awal BPS sudah mempertanyakan bagaimana memastikan hanya RTSM saja yang mendaftar, dan seringkali menyanksikan akurasi metode yang akan diterapkan. Dalam hal ini klarifikasi yang disampaikan; *metode pendaftaran memiliki tahapan identifikasi kriteria RTSM*

yang membreakdown 3 faktor utama kemiskinan setempat. Hasilnya diharapkan bisa menjadi panduan tim pelaksana atau para tokoh untuk menghimbau siapa yang harus mendaftar dan sebaliknya siapa yang tidak boleh mendaftar. Selanjutnya masing-masing diminta konsisten melaksanakan tahapan metode dan berupaya maksimal dalam sosialisasi di masyarakat. Mengenai hasil/keluaran pasca ujicoba kita serahkan kepada tim pusat untuk menganalisis dan memutuskan kelayakan dari setiap metode.

Penjelasan tentang kelengkapan alat bahan, support logistik, dan mekanisme kerja cukup dipahami semua peserta. Sedangkan klarifikasi usulan BPS untuk menyiapkan keamanan saat proses pendaftaran dipandang tidak perlu. Hal ini mengingat saat pilot juga tidak sampai menyiapkan komponen tersebut.

Sessi ke-2 koordinasi di BPS berlangsung sesuai sholat Jum'at. Prosesnya lebih banyak menegaskan bahwa selama kalender kerja ada beberapa tim yang berpeoses. Semua bekerja dengan waktu yang terjadwal, sehingga konsistensi masing-masing tim sangat diperlukan. Jadwal yang sudah disusun sulit diubah terutama karena kesepakatan dengan masyarakat akan sangat mahal harganya. Selain itu, diakhir Maret 2011 semua proses lapangan diharapkan final. Langkah untuk memastikan pendaftar benar-benar RTSM tentu terus didorong, karena dari pengalaman pilot selain melalui sosialisasi juga lewat penjelasan saat registrasi. Cara-cara lain sepanjang tidak menyimpang dari metodologi juga bisa dikembangkan di lapangan.

Koordinasi Dengan Dinsos Pemalang

Koordinasi dengan Pihak Dinas Sosial Kabupaten Pemalang dilakukan Supervisor bersama Tim Pusat pada tanggal 17 Januari 2011. Koordinasi berlangsung di Kantor Dinas Sosial Pemalang, dengan peserta : Koordinator PKH Bappeda (Pak Supriyadi), Kadinsos (Pak Maryoto), Sekretariat PKH (Ibu Lela dan Pak Aditya), Koordinator PKH (Pak Indarto), dan BPS (Ibu Tati Rosyda).

Diskusi dipimpin langsung oleh Kadinsos (Bapak Maryoto), dengan meminta informasi perkembangan di lapangan. Selaku pimpinan instansi terkait, beliau menghendaki proses berjalan dengan lancar dan aman. Beliau juga menyampaikan pesan Bupati, terutama karena masa pemilu baru saja berlalu sehingga masing-masing pihak harus mengedepankan stabilitas di lapangan. Karena kegiatan ini melibatkan komponen pemerintah dan masyarakat, sangatlah dimungkinkan di lapangan timbul berbagai persoalan. Tetapi beliau menyampaikan setiap masalah pasti ada solusi, sehingga kerjasama para pihak sangat dibutuhkan.

Secara bergantian peserta menyampaikan yang sudah dilakukan, sekaligus dengan informasi sejauh mana perkembangan yang dicapai. Diskusi berlangsung dinamis, diselingi tanya jawab untuk penegasan hal-hal yang belum jelas. Berbagai hambatan/ kendala



Gambar. Proses Koordinasi di Dinsos Pemalang Yang Dilakukan Supervisor dan Tim Pusat

yang terungkap didiskusikan dan diupayakan solusinya. Seperti saat BPS kewalahan menghadapi pendaftar yang banyak, muncul ide menambah petugas karena BPS telah melatih

personil tambahan. Gagasan ini sempat diamini Kadinsos dengan menjanjikan anggaran pendukung. Tetapi karena semua prosedur harus melalui pusat, akhirnya tim tambahan hanya bersifat substitusi.

Ketika mendengar informasi bahwa tim fasilitator sedikit mengalami kendala ketika masuk ke kecamatan dan desa/kelurahan, Dinsos langsung meminta jajarannya untuk mengeluarkan surat kepada setiap Camat berdasarkan surat Kemensos yang dilampiri dengan surat tugas tim fasilitator. Di akhir proses Kadinsos juga mengajak segenap komponen yang terlibat untuk selalu berkoordinasi dan bekerjasama dalam mensukseskan pelaksanaan studi ini. Jika di lapangan menemui kendala/hambatan atau masalah maka jangan segan-segan untuk menyampaikan kepada Pihak Dinas Sosial Kabupaten Pematang Jaya.

A.2. Lampung

A.2.1. Pra Koordinasi Dinsos dan Badan Pusat Statistik Kota Bandar Lampung dan Kabupaten Lampung Tengah.

Kegiatan Koordinasi untuk pertama kali di Kota Bandar Lampung dilakukan tanggal 13 - 17 Desember 2010. Kegiatan koordinasi yang pertama dilakukan dengan Dinas Sosial Kota Bandar Lampung di kantor Dinas Sosial bersama Bapak Akuan Effendy selaku Kepala Dinas dan Ibu Netty Selaku Satker Program Keluarga Harapan. Disamping itu kegiatan koordinasi ini juga dilakukan bersama Kepala Badan Pusat Statistik Kota Bandar Lampung di kantor BPS. Sementara untuk koordinasi Dinas Sosial dan Badan Pusat Statistik Kabupaten Lampung Tengah dilakukan pada awal minggu pertama bulan Januari 2011. Pada waktu melakukan koordinasi di dua instansi pemerintah kota tersebut, maka yang dibahas meliputi : metodologi studi, jadwal studi, rekrutmen Calon Fasilitator Lapangan Mitra Samya dan kegiatan pelaksanaan Study Effective Targeting of Anti Poverty Program II.



Gambar. Koordinasi Dinsos, Bank Dunia, Mitra Samya BPS, Pendamping PKH di Dinas Sosial Bandar Lampung

Supervisor Mitra Samya menjelaskan tentang metodologi Studi yaitu Metode Hybrid dengan 4 kombinasi. Metode ini sepenuhnya akan dilaksanakan oleh fasilitator Mitra Samya. Metode Pendaftaran dengan 6 kombinasi. Diawali dengan koordinasi Kades/Lurah, kemudian pertemuan tokoh seluruh SLS dan sosialisasi di seluruh satuan terkecil setempat (SLS) di tiap-tiap Kelurahan/ Desa oleh Fasilitator Lapangan. Kemudian setelah

kegiatan tersebut selesai, maka Tim dari Badan Pusat Statistik yang melakukan Wawancara untuk menjangkau calon peserta program PKH dengan menggunakan hasil klasifikasi tingkat kesejahteraan RTSM yang telah dihasilkan oleh Fasilitator Mitra Samya ketika diskusi dengan seluruh tokoh SLS di tingkat kelurahan atau Desa. Sedangkan metode Proxy Main Test (PMT) sepenuhnya dilakukan oleh tim dari Badan Pusat Statistik setempat.

Keseluruhan kegiatan studi ini akan dilaksanakan selama 3 bulan dengan total sampling sebanyak 23 Kecamatan dan 203 Desa/ kelurahan. Kota Bandar Lampung jumlah sampling lokasi seluruh kecamatan (tiga belas kecamatan) dan 87 Kelurahan di kota Bandar Lampung. Sementara itu, untuk kabupaten Lampung Tengah terdiri dari 10 Kecamatan dan 116. Desa di Kabupaten Lampung Tengah.

Beberapa kesepakatan yang dihasilkan dari koordinasi awal ini adalah :

Pertama, Kepala Dinas Sosial dan Kepala Badan Pusat Statistik mendukung penuh atas dipilihnya Bandar Lampung dan Lampung Tengah sebagai lokasi studi. Bagaimanapun studi ini merupakan program dari pemerintah pusat, sehingga pemerintah daerah berkewajiban untuk mendukung pelaksanaannya program ini di daerah masing-masing. Oleh karena itu, segala sesuatu yang terkait dengan kegiatan dilapangan akan didukung penuh. Apalagi ini adalah upaya untuk menjangkau peserta program yang benar-benar sesuai dengan sasaran yang diinginkan.

Kedua, Masing-masing pihak disepakati untuk terus melakukan koordinasi yang rutin agar segala sesuatu yang terkait dengan study, bila ada permasalahan-permasalahan yang dihadapi dilapangan agar segera bisa diselesaikan. Oleh karena itu, Mitra Samya, Dinas Sosial dan BPS harus saling berkomunikasi dan menginformasikan tentang kegiatannya satu sama lain.

Dinas Sosial menginformasikan bahwa mereka juga punya pendamping PKH yang direkrut oleh Kementrian Sosial Republik Indonesia di Jakarta, dan saat ini sudah dilatih di Padang. Kepala Dinas mempertanyakan bagaimana peran pendamping PKH tersebut dalam studi ini ? Tentang hal tersebut Kepala Dinas Sosial akan menanyakan langsung ke Kementrian Sosial di Jakarta.

Sedangkan BPS, menurut Bapak Paulus belum memperoleh jadwal kepastian kapan kegiatan ini akan dilakukan dari BPS Pusat. BPS Kota Bandar Lampung masih menunggu informasi dan perintah dari pusat tentang kepastian jadwal pelaksanaan kegiatan study ini.

A.2.2. Koordinasi Tingkat Kecamatan

Kegiatan Koordinasi ditingkat Kecamatan dilakukan oleh Supervisor dan Asisten Supervisor di kedua lokasi studi di Provinsi Lampung. Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk meminta ijin akan dilakukannya serangkaian kegiatan studi di desa/kelurahan di masing-masing kecamatan, dan membangun pemahaman tentang metodologi bersama terhadap para camat dan kepala desa atau Lurah. Selain itu adalah untuk menjelaskan strategi kegiatan yang melibatkan masyarakat dengan melakukan serangkaian



Gambar Koordinasi dan sosialisasi dengan Camat, seluruh lurah, BPS, pendamping PKH, dan Mitra Samya

diskusi bersama masyarakat maupun tokoh dan tidak ada insentif apapun yang disediakan oleh pelaksana kegiatan. Seluruh kegiatan ini diharapkan menjadi dukungan penuh dari pemerintah ditingkat kabupaten/kota, desa/kelurahan.

Output yang dihasilkan dari kegiatan koordinasi ini adalah para pihak ditingkat kecamatan dan desa / kelurahan memahami skenario implementasi metodologi ini di tingkat lapangan.

Koordinasi dengan Camat ini telah dilaksanakan 23 kecamatan di dua wilayah kabupaten/kota di Provinsi Lampung. Koordinasi awal dengan para Camat di kota Bandar Lampung, Supervisor didampingi oleh Ibu Taulina Anggraeni dari Badan Pusat Statistik kota Bandar Lampung. Konten dari koordinasi dengan para camat ini menjelaskan tujuan studi, metodologi, sampling dan partisipannya. Umumnya pasca pertemuan, Camat meminta untuk memberikan pemaparan hal yang sama kepada para Lurah dilingkungan masing-masing dan mengundang para lurah untuk hadir pada hari tanggal yang telah ditentukan.

Koordinasi yang kedua ini diikuti juga oleh Fasilitator Lapangan Mitra Samya, pendamping PKH dan BPS. Di Kota Bandar Lampung apresiasi Camat dan Lurah umumnya sangat baik. Mereka rata-rata meminta penjelasan detail tentang proses implementasi di lapangan.

Sedangkan di Kabupaten Lampung Tengah, koordinasi dilakukan oleh asisten supervisor hanya ditingkat kecamatan saja, untuk mohon izin dan menjelaskan studi tersebut kepada Camat. Sementara itu, koordinasi dengan Kepala Desa dilakukan oleh Fasilitator Lapangan Mitra Samya. Di Lampung Tengah untuk melakukan pemaparan secara detail dengan Kepala Desa umumnya mengalami kendala yang cukup berarti, karena Kades umumnya lebih suka untuk berkonsultasi atau berkoordinasi langsung dengan Bupati.

Beberapa hal yang sering ditemui pada waktu koordinasi ini adalah anggapan bahwa kegiatan studi ini sama dengan program Bantuan Tunai Langsung (BLT) dari pemerintah pusat, sehingga Camat atau Kepala Desa/Lurah merasa kejadian-kejadian pada waktu BLT lalu terulang lagi dan para pamong akan menjadi sasaran kemarahan warga yang tidak mendapatkan BLT.

Di kota Bandar Lampung, terdapat 3 kelurahan yang jaraknya cukup jauh dari kecamatan, sehingga Camat dan Lurah di tiga kelurahan ini mengajukan permohonan agar metode pendaftaran kecamatan dipindahkan lokasi pendaftarannya dari kantor kecamatan ke kantor lurah masing-masing. Alasannya adalah RTSM dari ketiga kelurahan tersebut kemungkinannya hadir kecil karena mereka tidak memiliki biaya transport untuk datang mengikuti wawancara di kantor kecamatan setempat.

Camat dan Lurah di Kota Bandar Lampung yang terkena lokasi tempat pendaftaran dan wawancara meminta agar disediakan uang kebersihan. Hal ini dikarenakan umumnya masyarakat yang datang dengan beramai-ramai mendaftar dan wawancara bersama anak-anaknya dan membuat kotor lokasi kantor kelurahan maupun kantor kecamatan. Disamping itu alasannya adalah karena Wali Kota Bandar Lampung memiliki program kebersihan dan sering melakukan sidak ke kantor kelurahan sehingga bila kantor kotor akan kena teguran.

A.2.3. Koordinasi Stake Holder Tingkat Kota dan Kabupaten (Mitra Samya, BPS, Dinsos, Pendamping PKH)

Kegiatan koordinasi dengan para stake holder ditingkat kota dan kabupaten dilokasi studi bertujuan untuk melakukan sinergi kegiatan antara para pihak terkait dengan pelaksanaan studi. Disamping itu juga untuk mensikapi kejadian-kejadian ditingkat lapangan yang sesegera mungkin untuk dicarikan solusinya. Output dari kegiatan ini adalah adanya perbaikan proses

kegiatan ditingkat lapangan dengan bersandar pada solusi yang dihadapi oleh masing-masing pihak. Kegiatan ini dilakukan secara periodik dan terjadwal. Selama kegiatan studi ini berlangsung, koordinasi dilakukan sebanyak 4 kali.

Koordinasi pertama; dihadiri oleh Mitra Samya, BPS, Dinsos dan Pendamping PKH. Topik yang dibicarakan adalah penjelasan tentang studi, metodologi dan implementasinya ditingkat lapangan. Hal ini dilakukan agar semua pihak memahami bersama bagaimana prosedur dan proses studi, karena studi ini melibatkan empat pihak sebagaimana tersebut diatas terutama pihak Dinsos dan pendamping PKH. Sampai dengan kegiatan Studi ini akan dimulai, Pendamping PKH masih belum mengetahui jika lokasi kerja mereka menjadi sampling studi, dan masih beranggapan bahwa mereka tidak perlu terlibat dalam studi ini. Alasannya adalah pelatihan yang telah diikutinya di Pandang telah menyepakati beberapa agenda yang harus segera dilaksanakan oleh pendamping PKH. Sementara itu dari pihak Kemensos RI belum memberikan informasi yang memadai tentang peran pendamping PKH pada lokasi studi.

Peran pendamping PKH menjadi jelas setelah adanya pertemuan dengan pihak Bank Dunia, Pendamping PKH, BPS, Dinsos dan Mitra Samya pada tanggal 12 Januari 2011 di kantor Dinas Sosial Bandar Lampung. Pihak Bank Dunia yang diwakili oleh ibu Thalita Chaerunisa, menjelaskan bahwa pendamping PKH selama lokasinya dijadikan ujicoba metodologi berkewajiban membantu proses pelaksanaan ujicoba metodologi tersebut ditingkat lapangan dan belajar metodologi. Misalnya, ketika terjadi diskusi ditingkat masyarakat, baik metode hybrid, pendaftaran dan PMT, maka pendamping bisa belajar tentang metodologi tersebut. Karena kemungkinannya adalah untuk penargetan peserta PKH berikutnya akan menggunakan salah satu dari metodologi tersebut. Pada pertemuan tersebut belum dibahas secara detail tentang peran pendamping PKH dalam membantu kelancaran proses studi, sehingga pada akhir pertemuan direkomendasikan untuk diadakan pertemuan untuk membahas lebih mendalam peran pendamping PKH.

Koordinasi Kedua; dilakukan untuk menindaklanjuti hasil pertemuan sebelumnya. Koordinasi dihadiri oleh Dinsos, BPS, Mitra Samya dan pendamping PKH, dilaksanakan pada tanggal 18 Januari 2011 di Kantor Dinas Sosial Bandar Lampung. Agenda yang dibahas adalah : **Pertama**, pada metode pendaftaran fasilitator Mitra Samya sebagaimana perannya hanya melakukan kegiatan koordinasi dan sosialisasi program PKH kepada seluruh satuan Lingkungan setempat di wilayah Kelurahan atau Desa yang telah disepakati. Peran pihak BPS sebatas wawancara, mereka datang ke lokasi wawancara dengan ruangan yang sudah disiapkan dan diatur sedemikian rupa. Persoalannya, siapakah yang akan memanager kegiatan tersebut, sehingga dalam proses estafet tugas dari Mitra Samya ke pihak BPS disepakati sebagai berikut;



Gambar. Koordinasi Mitra Samya, Satker Dinsosnaker dan Koordinator PKH di Kantor Dinsos Lampung Tengah

- a. Dalam pelaksanaan pendaftaran dan wawancara, pendamping PKH menyiapkan ruangan, membuat layout skema pendaftaran dan wawancara.
- b. Pendamping PKH melakukan wawancara awal untuk memastikan apakah RTSM yang hadir sesuai dengan kriteria PKH yang telah dibuat oleh fasilitator dari Mitra Samya bersama seluruh tokoh SLS.
- c. Pendamping PKH memberikan nomor antrian setelah melakukan wawancara awal kepada RTSM.
- d. Pendamping PKH mengatur RTSM yang telah memegang kartu antrian untuk mengikuti wawancara dengan BPS sesuai dengan nomor urut antriannya.
- e. Pendamping PKH mengisi form data S1 setiap hari sesuai dengan petunjuk cara pengisian dan menyerahkan form tersebut kepada tim BPS setelah selesai kegiatan pendaftaran.
- f. Pendamping PKH melakukan pengumuman yang berulang-ulang tentang program PKH pada saat pendaftaran berlangsung.
- g. Tim yang bertugas disetiap pendaftaran dan wawancara minimal 2-3 orang, dengan tugas 2 orang berperan sebagai pewawancara awal, dan 1 orang berperan sebagai pengawas antrian masyarakat yang akan wawancara dengan BPS.
- h. Tim yang bertugas diutamakan dari pendamping PKH yang bertugas dilokasi pendaftaran dan wawancara, jika terjadi kekurangan tenaga maka bisa dibantu oleh tim dari pendamping PKH dari kecamatan lainnya dalam satu wilayah kota atau kabupaten yang bersangkutan.
- i. Pendamping PKH harus datang lebih awal dilokasi pendaftaran dan wawancara setiap harinya.
- j. Selama Kegiatan pendaftaran dan wawancara berlangsung pendamping PKH dilarang meninggalkan tempat sebelum kegiatan tersebut berakhir.

Kedua, untuk metode hybrid dan PMT, maka peran pendamping PKH adalah belajar berproses dengan cara mengikuti pertemuan musyawarah yang dilakukan oleh fasilitator Mitra Samya kepada tokoh atau masyarakat, mencatat hasil diskusi tentang siapa RTSM yang direkomendasikan oleh hasil musyawarah tokoh atau masyarakat di tiap pertemuan. Sedangkan untuk metode PMT pendamping PKH juga mengikuti tim PMT yang melakukan check langsung kepada RTSM dengan mengajukan sejumlah pertanyaan dan observasi langsung di rumah RTSM yang dijadikan sampling dalam metode tersebut.

Koordinasi ketiga: dilaksanakan pada tanggal 23 Januari 2011 di kantor Dinas Sosial. Agenda yang dibahas adalah mengevaluasi terhadap pelaksanaan tugas pendamping PKH yang telah membantu proses pendaftaran dan wawancara di kecamatan pertama baik di Bandar Lampung maupun Lampung Tengah yang dilakukan secara paralel. Pada pelaksanaan pendaftaran kecamatan pertama, ternyata menjadi sangat berharga sekali, karena sebagai input bagi pembelajaran atas penanganan pelaksanaan pendaftaran dan wawancara pada lokasi kecamatan berikutnya. Karena ini yang pertama kali maka disana sini terjadi kekurangan dan kelemahan yang dilakukan oleh tim pendamping dalam handle acara tersebut yang belum efektif baik secara tim, peran, dan apa yang harus dilakukan serta bagaimana cara mengatasi ketika pendaftar yang datang jumlahnya membludak. Hal lain yang terjadi yaitu untuk lokasi pendaftaran menjadi sangat kotor sehingga dampak dari kegiatan tersebut, pihak kecamatan dan kelurahan yang ketempatan lokasi pendaftaran mengkomplain agar diberikan kompensasi biaya kebersihan. Berdasarkan atas hal tersebut, maka beberapa hal yang diputuskan adalah ;

- a. Pihak Mitra Samya dalam hal ini Fasilitator Pendaftaran diharuskan menyerahkan kriteria tingkat kesejahteraan lokal bagi RTSM yang boleh mendaftar dan wawancara dengan tim dari BPS.
- b. Pihak Mitra Samya harus membuat jadwal yang sistematis perwilayah RT atau Dusun, agar RTSM yang datang untuk mendaftar dan wawancara tidak datang secara bersamaan dari semua RT atau dusun, sehingga pendaftar membludak dan tidak terkendali serta menyerahkannya ke Tim BPS dan pendamping PKH.
- c. Pihak Mitra Samya diminta untuk konsultasi ke Bank Dunia dan Dinas Sosial untuk memecahkan keluhan dari pihak kecamatan dan kelurahan tersebut.
- d. Pihak Pendamping PKH dengan hasil pelaksanaan kegiatan di kecamatan pertama yaitu Teluk Betung Barat, maka agar bisa berperan maksimal diharuskan dari Dinsos menerbitkan surat tugas tim yang akan bertugas di setiap lokasi pendaftaran.
- e. Untuk pendamping PKH yang tidak sedang bertugas mengawal proses pendaftaran dan wawancara, maka dipersilahkan untuk melakukan proses PKH pada lokasi yang tidak terkena sampling PMT dengan cara berkunjung ke lokasi RTSM yang telah ditunjuk dari pusat.
- f. Untuk lokasi kelurahan atau desa yang tidak terkena sampling studi, maka dilakukan metode PKH murni sebagaimana hasil pelatihan di Padang. Namun demikian waktunya disesuaikan dengan intruksi dari tim Kemensos RI tentang hal tersebut.

Koordinasi keempat; dilaksanakan pada tanggal 20 Februari 2011 dengan agenda untuk mengantisipasi pelaksanaan PKH pada lokasi non sampling di wilayah masing-masing pendamping PKH. Sebagaimana diketahui, bahwa pada lokasi studi di kota dan kabupaten di Provinsi Lampung ada kelurahan dan desa yang tidak terkena lokasi studi. Oleh karena itu, maka terhadap lokasi ini harus dilakukan kegiatan PKH sesuai prosedur hasil pelatihan di Padang oleh pendamping PKH. Dalam koordinasi yang keempat ini, maka agenda yang dibahas adalah menyangkut strategi pelaksanaan pendaftaran yang tinggal beberapa wilayah lagi berakhir dan juga teknis pelaksanaan mengundang dan memverifikasi data RTSM yang berasal dari pusa bagi kelurahan atau desa non sampling studi.

Hal yang diputuskan dalam koordinasi ini adalah;

- a. Menyusun jadwal waktu tim pendamping PKH yang tidak bertugas lagi melaksanakan proses pendaftaran dan wawancara.
- b. Melakukan klasifikasi data RTSM sesuai dengan data per kecamatan, Kelurahan atau desa dan kemudian per rukun tangga (RT) yang berasal dari data pusat PKH.
- c. Mengintruksikan kepada pendamping yang tidak bertugas untuk sesegera mungkin turun lapangan melakukan pendataan RTSM di metode PMT dan non sampling studi.
- d. Dalam melakukan verifikasi kepada RTSM, maka dilaksanakan dengan cara mengunjungi door to door,
- e. Mengingat waktu yang semakin pendek, maka sebaiknya dalam melakukan hal tersebut dilakukan secara berkelompok agar cepat selesai. Oleh karena itu, agar pekerjaan tersebut efektif, maka Dinsos diminta untuk membuat surat tugas.

A.3. Sumatera Selatan

A.3.1. Koordinasi dengan BPS dan Dinas Sosial

Koordinasi dengan BPS dan Dinas Sosial di ke 2 kabupaten di lakukan pertama kali oleh supervisor Sumatera Selatan. Koordinasi dengan BPS dan Dinas Sosial Kota Palembang dilaksanakan pada tanggal 13-14 Desember 2010, sedangkan koordinasi dengan BPS dan Dinas Sosial di Kabupaten Ogan Komering Ilir dilaksanakan pada tanggal 15-16 Desember 2010.

Secara umum kegiatan koordinasi ini bertujuan untuk menginformasikan kepada pihak BPS dan Dinas Sosial bahwa akan ada kegiatan study di 2 Kabupaten yang terdapat di propinsi Sumatera Selatan serta membangun komunikasi awal antara Mitra Samya dengan BPS dan Dinas Sosial di ke 2 kabupaten kota tersebut.

Dari ke 2 kabupaten tersebut sebagian besar menyambut baik keberadaan Mitra Samya yang bekerja di propinsi Sumatera Selatan. Beberapa hal yang menarik pada saat melakukan koordinasi dengan BPS dan dinas sosial di ke 2 Kabupaten antara lain;

1. Antara tim Mitra Samya dan BPS diharapkan dapat menjalin kerjsamanya dengan baik agar hasil yang didapatkan dalam proses dilapangan lebih baik.
2. Ada pembagian peran yang jelas antara Mitra Samya, Pendamping PKH/Dinas Sosial dan BPS dalam proses study.
3. Komunikasi yang lebih intensip antara mitra samya, BPS dan pendamping PKH/Dinas Sosial.



Gambar. Koordinasi dengan Dinas Sosial dan BPS

Koordinasi ke 2 dilakukan bersama-sama dengan fasilitator Palembang dan Fasilitator Kabupaten Ogan Komering Ilir. Kegiatan koordinasi dengan BPS dan Dinas Sosial di ke 2 Kabupaten adalah 11 Januari 2011. Kegiatan koordinasi ini dilakukan secara simultan di ke 2 Kabupaten didampingi oleh supervisor.

Kegiatan koordinasi dengan sosialisasi ke BPS dan Dinas Sosial bertujuan untuk menginformasikan kepada

BPS dan Dinas Sosial terkait dengan rencana study. Selain pengenalan tim Fasilitator Mitra Samya juga menginformasikan kepada BPS dan Dinas Sosial tentang jadwal study selama 3 bulan untuk kedua Kabupaten.

Selama melakukan koordinasi dengan BPS, fasilitator Mitra Samya disambut dengan baik oleh Bapak Aris Krismanto, Kepala BPS Kabupaten Ogan Komering Ilir. Beliau sangat senang karena fasilitator Mitra Samya mau membantu BPS maupun Dinsos untuk mensukseskan program PKH. Selain itu masing-masing fasilitator Mitra Samya memperkenalkan diri dan dilanjutkan dengan pengenalan dari BPS. Kepala BPS menegaskan kembali bahwa di masing-masing

kecamatan terdapat mitra BPS dan jika mendapat kesulitan maka fasilitator Mitra Samya bisa minta bantuan kepada mereka.

Selain melakukan koordinasi dengan BPS, fasilitator yang didampingi oleh supervisor melakukan koordinasi dengan Dinas Sosial Kabupaten Ogan Komering Ilir. Pertemuan dilaksanakan di aula kantor Dinas Sosial yang dihadiri oleh Kepala Dinas Sosial Ibu Hj. Syaukiyah Mekki, 2 orang tim pusat, Bapak Didik selaku penanggungjawab program dari Dinas Sosial dan Taufik Hidayat beserta asistennya dari BPS selaku coordinator lapangan serta pendamping dari dinsos. Pada pertemuan ini membahas jadwal dan metode yang digunakan selama study ini. Selain itu tujuan dari kegiatan ini adalah koordinasi dan sosialisasi serta menyamakan persepsi antara fasilitator Mitra Samya, BPS dan Dinas Sosial serta Pendamping PKH.

Hasil koordinasi dengan BPS dan Dinas Sosial antara lain adanya pembagian tugas yang jelas antara pendamping PKH dengan fasilitator Mitra Samya terutama bagi pendamping di lokasi study. Selain itu pendamping menyepakati jadwal dengan para fasilitator Mitra Samya.

Selain melakukan koordinasi dengan BPS, fasilitator mitra Samya juga melakukan koordinasi dengan pendamping PKH yang difasilitasi oleh UPPKH Kota Palembang Bapak Bambang. Beberapa agenda yang dibahas saat melakukan koordinasi dengan para pendamping antara lain;

Tujuan dari kegiatan koordinasi dengan para pendamping adalah agar masing-masing pendamping dan fasilitator Mitra samya faham dengan tugas dan tanggungjawabnya. Dapat membangun kerjasama yang baik antara fasilitator Mitra Samya dengan Pendamping PKH di lapangan.

1. Peran fasilitator Mitra Samya adalah melakukan sosialisasi dengan Camat, lurah, dan di masyarakat.
2. Sedangkan peran dari pendamping PKH adalah membantu proses pendaftaran dengan menggunakan self targeting.
3. Pendamping PKH membantu mengisi format S1 pada saat proses wawancara sedang berjalan.
4. Pendamping mengatur antrian warga ketika proses pendaftaran.
5. Pendamping PKH diharapkan untuk dapat mengikuti proses sosialisasi di masyarakat bersama fasilitator Mitra Samya.

B. Pelaksanaan Metode Hybrid

Salah satu metode yang digunakan dalam proses self targeting-2 yaitu *metode hybrid*; sebuah metode untuk melengkapi daftar keluarga calon peserta PKH dari Pusat (BPS) dengan mengundang warga dari SLS yang bersangkutan ke pertemuan masyarakat/ tokoh. Ada 4 perlakuan (*treatment*) dalam pelaksanaan metode hybrid ini, yaitu; hybrid tambahan tokoh, hybrid tambahan masyarakat, hybrid perbaikan tokoh, dan hybrid perbaikan masyarakat.

B.1. Jawa Tengah

B.1.1. Pelaksanaan Metode Hybrid di Wonogiri

Musyawarah untuk penyelesaian konflik di masyarakat merupakan keniscayaan, sehingga dengan itu diharapkan kata mufakat bisa tercapai. Secara konseptual begitulah metode hybrid yang dalam implementasinya mengedepankan prinsip kebersamaan. Metode ini telah memposisikan masyarakat sebagai subyek yang akan menentukan RTSM di SLS-nya. Masyarakat diajak menentukan indikator kemiskinan lokal, kemudian melakukan perankingan sejumlah RTSM yang akan diusulkan sebagai calon peserta PKH.

Pelaksanaan metode hybrid di Wonogiri mencakup 33 desa, masing-masing tersebar di 8 kecamatan. Proses fasilitasi metode ini dilakukan oleh 4 orang fasilitator, sehingga lokasi kerja setiap fasilitator rata-rata 8 desa. Targetnya adalah RTSM di setiap SLS yang akan diusulkan menjadi calon peserta PKH.

Dinamika Metode Hybrid di Wonogiri

Proses ujicoba telah memberikan gambaran yang cukup nyata betapa dinamisnya kondisi di lapangan. Hal ini tampak dari respon dan partisipasi masyarakat dalam setiap tahapan pelaksanaan metode. Dinamika yang terjadi sekalaigus menjadi tantangan bagi fasilitator, karena faktanya tidak semua elemen masyarakat bisa menerima kegiatan ini.

Saat mulai proses ujicoba tercatat beberapa desa dengan serta merta menerima. Namun ada beberapa diantaranya yang enggan bahkan menolak pelaksanaan ujicoba. Beberapa hal yang mewarnai pelaksanaan ujicoba metode hybrid, antara lain:

- Adanya struktur pemerintahan yang tidak lazim, karena di beberapa desa ditemukan ada RW yang membawahi dusun.
- Data pusat menyatakan SLS dusun, tetapi di lapangan RW (Kasus Desa Pucanganom Kec. Giritontro). Kesalahan data pusat juga terjadi pada jumlah SLS, ini berpengaruh terhadap rencana jadwal diskusi/pertemuan (Kasus Desa Tirtomoyo Kec. Tirtomoyo, Desa Conto dan Desa Geneng Kec. Bulukerto).
- Di wilah yang quota nol-nya banyak terutama yang SLS berdekatan, proses diskusi kurang kondusif. Banyak warga yang menebak dengan mengatakan *“paling yang diambil cuman dua”* (Kasus Desa Pucanganom Kecamatan Giritontro).
- Pada waktu perankingan di salah satu SLS Desa Girirejo seorang peserta pergi dari forum. Ketika dikonfirmasi dia menyatakan, *“untuk apa kita dikumpulkan begini kalau hanya untuk mencari kelemahan tetangga, itu kan tidak baik jadi mending kita pulang saja”*. Akan tetapi hal tersebut tidak berdampak terhadap keputusan hasil diskusi.
- Data PPLS Desa Pule Kec. Jatisrono ternyata lebih sedikit dari data SM yang hanya 1 SLS. Namun di beberapa wilah data SM juga tidak valid karena terdapat daftar rumah tangga dari luar SLS baseline (Kasus Desa Sidorejo Kec. Jatisrono).
- Di Kel Giritontro Kec Wonogiri, terdapat 3 SLS yang tidak mengusulkan PKH yaitu RT-01, RT-02 RW-01 (Komplek Pecinan dan KODIM) semua warganya pengusaha/ pedagang dan TNI, serta RT-04 RW-10 (Kompleks Perumahan POLRI).



Gambar Tingkat Kehadiran Peserta dalam Setiap Pertemuan Yang Difasilitasi di Wonogiri

Hasil dari lapangan menunjukkan meskipun secara metodologi, kegiatan ini merupakan kegiatan baru namun tingkat pemahaman masyarakat cukup bagus ini terbukti ketika masyarakat terlibat dalam proses diskusi, bukti lain adalah adanya pemahaman masyarakat terhadap program PKH itu sendiri.

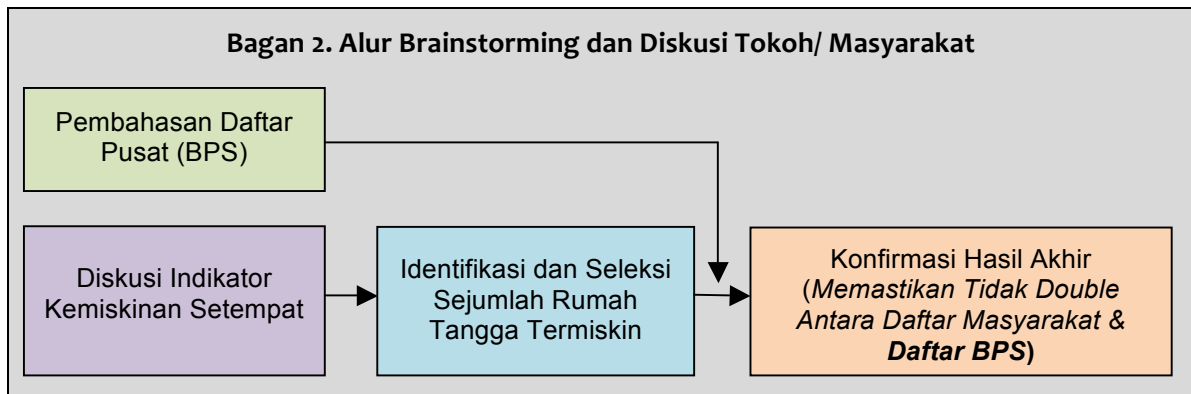
Respon yang cukup baik juga ditunjukkan oleh masyarakat dengan partisipasi yang baik dalam setiap tahapan kegiatan dan dukungan yang masyarakat berikan baik moril maupun matriil. Tentu respon ini tidak dapat disama ratakan ada juga di beberapa tempat kendala kecil muncul terutama ketika pelaksanaan teknis (diskusi) akan terjadi perang kepentingan baik antara aparat, tokoh maupun masyarakat itu sendiri.

Keterlibatan pihak lain dalam kegiatan ini seperti BPS dan Dinsos tidak begitu berpengaruh karena masyarakat menjadi subyek kegiatan sehingga mereka akan lebih memiliki kearifan dalam menyelesaikan problem di lapangan. Kegiatan ini juga tidak bisa lepas dari pihak lain guna menunjang baik secara moril maupun matrial.

B.1.2. Pelaksanaan Metode Hybrid di Pemalang

Proses targeting di Pemalang yang menggunakan metode hybrid telah difasilitasi oleh 7 Fasilitator Mitra Samya. Dari 96 lokasi desa/ kelurahan di 6 kecamatan yang menjadi lokasi ujicoba, sebanyak 32 desa/ kelurahan diantaranya memakai metode ini. Total jumlah SLS yang difasilitasi dengan metode hybrid adalah 767 SLS. Target ini harus diselesaikan dalam waktu 10 minggu, sehingga segala sesuatu yang diperlukan untuk pelaksanaan di lapangan harus dirorganisir dengan baik.

Pelaksanaan metode hybrid dalam proses ujicoba metode targeting calon peserta PKH per desa/kelurahan dilakukan secara terpisah. Artinya desa/kelurahan yang menjadi lokasi ujicoba metode ini tidak akan diintervensi dengan metode yang lain baik metode self targeting maupun proxy main test (PMT). Tahapan metode hybrid juga berbeda dengan ke-2 metode yang tadi. Secara garis besar tahapan pelaksanaan metode hybrid mengikuti alur sebagai berikut.



Tahapan proses dari ke-4 treatment metode hybrid sendiri memiliki beberapa perbedaan mendasar dalam implementasinya, antara lain; menyangkut *peserta diskusi* yaitu peserta tokoh atau peserta masyarakat SLS, dan *proses melengkapi data pusat* yaitu tambahan jika data pusat tidak boleh diubah, atau perbaikan jika data pusat boleh diperbaiki menurut hasil diskusi tokoh/ masyarakat. Jumlah quota calon peserta PKH yang ditentukan pusat juga mempengaruhi tahapan proses metode hybrid.

Proses diskusi di lokasi (SLS) dengan quota nol berbeda dengan lokasi lain (SLS) yang memiliki quota pusat. Karena tidak memiliki quota tentu tidak ada daftar pusat yang akan dibahas, sehingga proses diskusi di SLS seperti ini diawali dengan pertanyaan kepada peserta, “Apakah benar di SLS ini tidak ada masyarakat yang sangat miskin seperti yang dinyatakan oleh data pusat?”. Jika Ketua SLS menyatakan tidak benar



Gambar Fasilitator Menjelaskan PKH Dengan Flipchart Kepada Peserta Diskusi Tokoh

dan itu dibenarkan oleh seluruh peserta diskusi, maka proses dimulai dengan membahas indikator kemiskinan setempat, identifikasi dan seleksi sejumlah RTSM, dst. Tetapi jika Ketua SLS menyatakan benar dan didukung oleh seluruh peserta diskusi, maka proses harus dihentikan sampai disitu. Proses targeting calon peserta PKH ini tidak boleh dilakukan di lokasi-lokasi yang sudah tidak terdapat rumah tangga sangat miskin, karena hasilnya nanti bisa bertentangan dengan tujuan dan filosofi program.

B.1.3. Catatan Pelaksanaan Metode Hybrid

Selama pelaksanaan metode hybrid di lapangan, Tim Mitra Samya berhasil mencatat beberapa pointer dengan kasus yang spesifik untuk Kabupaten Pematang dan Wonogiri, sebagai berikut:

- **Quota yang terbatas** menyulitkan peserta diskusi dalam memilih, menumbuhkan rasa kekhawatiran apabila RTSM yang ada (dengan kondisi kehidupan sama) lebih dari quota akan timbul kecemburuan sosial.

- **Dalam proses hybrid perbaikan**, jika warga mengetahui namanya sudah diusulkan pusat namun dalam diskusi gugur, ini akan berakibat tidak baik (inharmonis). Masalah begini bagi sebagian masyarakat sangat sensitif (Kasus di Desa Pegongsoran).
- **Di lingkungan kecil**, dimana RT yang hanya terbatas gang, quota lokasi tetangga seringkali dapat diketahui dan menjadi pertanyaan ketika quota mereka lebih sedikit, apalagi jika kondisi sosial ekonominya sama.
- **Quota bermasalah**, terutama jika melebihi jumlah RTSM versi warga setempat. Jika ada Rmh Tangga Bukan RTSM harus diusulkan karena harus sesuai quota, maka yang lain juga ingin dapat sehingga menjadi permasalahan.
- **Mental/Kesadaran**; baru ada satu RTSM yang yang menolak diusulkan warga, yaitu Ketua RT 72 Desa Kajene (Quota Nol). Saat diranking beliau menyatakan, *“saya lebih mampu dari dia, masih ada yang lebih miskin dari saya, dan jangan mengusulkan saya”*. Padahal menurut peserta diskusi yang lain, kondisi Ketua RT tersebut memang sangat miskin dan memenuhi kriteria PKH.
- Kasus di RW7 RT4 Danasari (Q=4); **tokoh menolak data pusat karena yang tertera tidak tergolong miskin**. Namun karena usulan harus menurut metodologi, mereka memutuskan untuk menolak PKH. Kesimpulannya, peserta menolak hasil metodologi karena menurut mereka tidak valid dan bisa menimbulkan gejolak.
- **Data kependudukan ditingkat RT tidak jelas**, kasus di RW4 (RT3&RT4) Wilcah 545, RTSM (Warsan-Rumiyati) diusulkan di 2 tempat (Mertua-Ortu), beruntung tempat diskusi berdekatan dan ada peserta yang mendengar/menginformasikan sehingga salah satu fasilitator memutuskan untuk mencoret nama tersebut.
- Kasus Wilcah 535 Ketua RW02 **menyarankan tidak perlu ada ranking**, data pusat tidak ditampilkan, jangan ada pembatasan/ quota.
- RW02 RT01, RT02; **tokoh tidak bersedia meranking**, data pusat tidak ditampilkan, tidak memakai quota.
- **Dasar Penentuan Quota Tidak Jelas**, quota yang berbeda di RT yang berdekatan menyebabkan RTSM dengan kondisi sama ada yang masuk dan sebaliknya ada yang tidak terdaftar. Aparat ditingkat RT jadi tidak bisa menjelaskan hal ini.
- **Hybrid tambahan**; kasus di Wanamulya RT06 RW02 “Pak Daeng” dengan sangat keras menuduh data pusat yang “tidak valid dan tidak transparan” sebagai hasil dari rekayasa pihak desa. Kata pusat disini selanjutnya diterjemahkan sebagai “titipan”, karena kebetulan salah satu nama pada data pusat ada yang keluarga perangkat desa. Sampai-sampai dalam hal ini Pak Tabi’in (Kadus-2) harus bersumpah bahwa mereka tidak tahu menahu soal data pusat. Beliau terus berupaya meyakinkan peserta diskusi yang lain agar tidak terpengaruh. Pak Daeng juga mengancam, kalau data pusat tidak memuaskan masyarakat nanti akan melakukan demo ke balai desa.
- Pada metode hybrid tambahan, **adanya quota lebih berat daripada quota nol**. Sedangkan proses pada hybrid perbaikan adalah yang paling kondusif.
- Di Wonogiri peserta perempuan lebih tegas daripada laki-laki memutuskan siapa yang diusulkan karena mereka lebih tahu keadaan sebenarnya. Laki-laki lebih banyak sungkan antar sesama, tetapi bilamana dalam diskusi campuran kalau ada satu dua laki-laki disitu perempuan takut mengeluarkan pendapat, apalagi yang jumlahnya berimbang/heterogen.
- Di Pemalang (Daerah Perkotaan), peserta diskusi masyarakat kebanyakan dihadiri perempuan. Laki-laki jarang hadir karena kebanyakan bekerja, dan tingkat kehadiran tokoh dalam diskusi (peserta masyarakat) sangat jarang. Hal ini mempengaruhi ekspektasi peserta

diskusi, mereka tanpa malu berlomba mengusulkan diri sendiri. Tidak ada tokoh yang hadir yang bisa memberikan pandangan kepada peserta.

- Di Pemalang, peserta diskusi laki-laki dirasakan lebih rasional dalam mengambil keputusan. Tetapi secara umum (di perkotaan) tingkat kehadiran tokoh laki-laki dalam diskusi peserta masyarakat sangat rendah. Meskipun sudah diundang, mereka gengsi karena beranggapan lebih baik tidak datang dengan alasan PKH itu bukan untuk diri mereka, padahal mereka juga diharapkan bisa memberikan masukan-masukan dalam pengambilan keputusan tentang siapa yang harus diusulkan.
- Kasus di Desa Ambokulon (RT05 RW03), ada RTSM (Sodikin-Aisyah) yang namanya terdaftar dari pusat dan juga diusulkan warga meninggal beberapa jam sebelum pertemuan. Menurut peserta diskusi nama tersebut memang layak sebagai peserta PKH.
- **Tingkat kehadiran** tokoh pendidikan rata-rata ada guru, tetapi tokoh kesehatan (pertemuan peserta tokoh) umumnya dihadiri kader, bidan kebanyakan hanya datang jika kebetulan tinggal di RT tersebut.
- Rata-rata Kades meminta perangkat desa terus mendampingi proses. Di Kebagusan Ampelgading ada perangkat desa (Kadus I) yang ikut terus, dengan sepeda dayung beliau terus berupaya datang di setiap pertemuan padahal wilayahnya cukup luas.
- Kasus di Desa Jatisari Kec Jatisrono RT04 RW04, data pusat dinyatakan sudah tidak RTSM. Dulu memang miskin, tetapi sekarang sudah tidak dan masih banyak RTSM lain yang kondisinya lebih susah. Peserta (ibu-ibu) lalu menyatakan nanti kalau nama tersebut menjadi peserta PKH, mereka akan menyuruh warga melakukan demo.

B.2. Lampung

Targeting dengan metode hybrid di provinsi Lampung telah dilaksanakan di 68 kelurahan dan desa yang terdiri dari 29 kelurahan di Kota Madya Bandar Lampung dan 39 Desa di Kabupaten Lampung Tengah. Jumlah musyawarah ditingkat SLS baik itu SLS RT maupun SLS RW atau Dusun sebanyak 1.330 kali musyawarah, dengan sebaran di Kotamadya Bandar Lampung terdiri dari 617 kali musyawarah ditingkat RT dan ditingkat RW. Sedangkan di kabupaten Lampung Tengah terdiri dari 713 kali musyawarah ditingkat RT dan dusun.

Jumlah ini mengalami perubahan dari yang direncanakan sebelumnya, dikarenakan terjadinya pemekaran atau penggabungan SLS di lapangan. Secara rinci seperti tabel berikut :

Implementasi Pelaksanaan Diskusi Musyawarah Hybrid
di Provinsi Lampung

Perubahan Wilayah	RENCANA		REALISASI		PERBEDAAN			
	RT	Dusun /Lingk	RT	Dusun /Lingk	RT		DUSUN	
					Tambah	Kurang	Tambah	Kurang
Bandar Lampung	615	2	561	2	54	0	0	0
Lampung Tengah	616	97	668	62	73	125	8	43
TOTAL	1.231	99	1.229	64	127	125	8	43

Hybrid masyarakat dilaksanakan di 34 desa/kelurahan dan 34 desa/kelurahan menggunakan pendekatan peserta diskusi musyawarah bersama tokoh. Untuk Kota Madya Bandar Lampung maka kelurahan yang ditetapkan metode musyawarah tokoh sebanyak 14 kelurahan dan 15 kelurahan lainnya menggunakan metode musyawarah masyarakat. Sedangkan untuk Kabupaten Lampung Tengah Desa yang ditetapkan menggunakan pendekatan peserta diskusi tokoh sebanyak 20 desa dan lainnya menggunakan peserta diskusi masyarakat sebanyak 19 desa. Lokasi studi targeting dengan Metode hybrid di Provinsi Lampung dapat dilihat pada lampiran.

Proses studi targeting dengan metode hybrid dilakukan oleh 12 orang fasilitator lapangan, 6 orang fasilitator untuk Kabupaten Lampung Tengah dan 6 orang fasilitator untuk kota Bandar Lampung. Pelaksanaan studi di kabupaten Lampung Tengah lebih dahulu dilaksanakan, karena jumlah desa lokasi yang lebih banyak dibandingkan dengan Bandar Lampung. Studi di Kabupaten Lampung Tengah dilaksanakan di 10 kecamatan dan 39 desa, dan dimulai pada tanggal 7 Januari 2011 sampai dengan tanggal 29 Maret 2011. Sedangkan studi di Kota Bandar Lampung dilakukan di 13 kecamatan dan 29 Kelurahan, dimulai pada tanggal 17 Januari 2011 sampai dengan 29 Maret 2011.

Respon masyarakat dan tokoh atas penyelenggaraan metode ini serta penyampaian materi PKH terkait dengan tahapannya cukup bagus dari hasil diskusi dengan masyarakat ketika sehabis kegiatan fasilitasi dilapangan. Mereka umumnya mengatakan puas dengan cara-cara menentukan calon peserta PKH dengan bermusyawarah langsung, karena menghasilkan calon yang benar-benar menurut mereka yang sesuai dengan fakta lapangan RTSM yang dihendaki oleh program. Hal ini yang membedakan dengan program BLT oleh pemerintah sebelumnya menurut masyarakat dan tokoh. Dimana untuk program BLT dari pemerintah dahulu tidak pernah ada musyawarah di tokoh atau masyarakat, tetapi tahu-tahu program cair dan aparat

yang menjadi sasaran kemarahan masyarakat yang tidak puas.

Namun demikian proses-proses fasilitasi selama dilapangan juga diperoleh fakta bahwa untuk memfasilitasi PKH bagi masyarakat suku lampung asli para fasilitator menghadapi tantangan yang lebih besar, seperti : berkaitan dengan jumlah penerima calon PKH, kendala penguasaan bahasa lokal pada suku asli ini. Walaupun sebagian besar para fasilitator ini berasal dari Lampung, ternyata karena mayoritas ditingkat desa/kerlurahan menggunakan 2 bahasa besar, yaitu lampung dan jawa terkadang mereka juga mengalami kesulitan untuk menangkap makna harfiahnya bahasa yang terucapkan oleh tokoh maupun masyarakat. Tantangan lainnya adalah kesulitan memberikan pemahaman bahwa program ini berbeda dengan program BLT sebelumnya, kesulitan untuk

SURAT PERNYATAAN WARGA MASYARAKAT
RT-02/LK-I KETEGUHAN KEL: KETEGUHAN

Kami yang bertanda tangan terlampir adalah warga masyarakat sangat miskin RT-02/LK-I Keteguhan dengan ini menyatakan tidak sepakat menerima bantuan program keluarga harapan dengan alasan

1. Hanya dibatasi 9 (sembilan) keluarga
2. Kami yang bertanda tangan terlampir termasuk keluarga sangat miskin semua.

Demikian pernyataan kami atas perhatian Bapak - Bapak yang berwenang kami ucapkan banyak terima kasih.

Bandar Lampung, 21 Januari 2011
Perwakilan warga RT-02
Sekretaris

Ketua RT-02/LK-I KT
SAHRI

PENGURUS RT-02
LINGKUNGAN I
KEL. KETEGUHAN
KABUPATEN LAMPUNG TENGAH

Mengetahui:
Kepala Lingkungan I KTG.
CHAI RUDDIN. RSR

elaborasi secara detail tingkat kesejahteraan, karena masyarakat baik di Bandar Lampung maupun di Kabupaten Lampung Tengah juga didapati ada yang tidak transparan dalam memberikan data, begitu juga terkait perankingan untuk penentuan siapa yang berhak dicalonkan terkadang ada motive untuk lebih mendahulukan keluarga terdekat bahkan mengusulkan namanya sendiri.

Hasil dari seluruh prose fasilitasi di metode hybrid, maka terdapat fakta bahwa ada sebanyak 58 wilayah RT dari musyawarah dengan masyarakat dan tokoh yang tidak mengusulkan calon peserta PKH, baik di Bandar Lampung maupun Lampung Tengah. Untuk jelaskan dapat dilihat pada tabel dibawah ini

**Jumlah RT yang tidak mengusulkan Calon RTSM
Di Provinsi Lampung**

Wilayah Diskusi	Tingkatan Lokasi		
	Kecamatan	Desa/Kelurahan	RT/RW/Dusun
Bandar Lampung	10	16	46
Lampung Tengah	4	4	6
TOTAL	14	20	52

Pada tabel diatas terlihat bahwa kasus fasilitasi dinama peserta yang hadir dipertemuan baik tokoh maupun masyarakat yang tidak mengusulkan RTSM terjadi di 14 lokasi kecamatan yang tersebar di 20 kelurahan/desa dan 52 SLS RT/Dusun baik di Lampung Tengah maupun di Bandar Lampung. Untuk kejadian kasus di Bandar Lampung lebih banyak dengan proptorsi 88,50 % dibanding dengan 14.50 % dengan kasus di Lampung Tengah. Apabila dilihat dari kasus kasusnya per metode maka dapat dilihat pada tabel berikut ini.

**Kasus Per Diskusi Hybrid yang tidak mencalonkan RTSM
Di Provinsi Lampung**

Wilayah Diskusi	Metode Hybrid			
	Tambahan Masyarakat	Tambahan Tokoh	Perbaikan Tokoh	Perbaikan Masyarakat
Bandar Lampung	7	10	8	21
Lampung Tengah	1	2	0	3
TOTAL	8	12	8	24

Pada tabel diatas dapat diilustrasikan bahwa diskusi hybrid perbaikan masyarakat berkontribusi sebesar 46,15 %, diikuti oleh diskusi hybrid tambahan masyarakat 23,08 % dan kemudian untuk diskusi hybrid tambahan tokoh dan hybrid perbaikan tokoh masing-masing berkontribusi 15,08 terhadap ketidak mampuan mengusulkan RTSM diwilayah SLSnya. Fakta yang terjadi dilapangan ini penyebabnya ada dua alasan yaitu; **Pertama**, di wilayah RT tersebut memang tidak ada warga yang miskin pada waktu diselenggarakan diskusi dengan masyarakat ataupun tokoh. Hal ini disebabkan karena lokasi tempat tinggal warga seperti ; perumahan elit para Pejabat daerah, DPRD, Ruko, komplek Brimob, dan perumahan BTN, Perumnas, wilayah publik speace seperti pertokoan, dan stasiun kereta api. **Kedua**, masyarakat atau tokoh tidak

mau mengusulkan karena mereka yang hadir meminta untuk didaftar semua warga yang terkategori miskin sampai hampir miskin dengan cara survey langsung di tiap rumah RTSM. Latar belakangnya karena semasa program BLT baik dari pemerintah pusat maupun daerah menurut mereka selalu dibagi rata bantuannya. Ini yang disebut dengan kemanjaan perilaku masyarakat yang selalu dibantu sehingga menimbulkan ketergantungan yang tinggi pada bantuan.

Hal ini tentunya sangat menarik untuk dicermati, karena pada hakekatnya bila dilihat dari tingkat pendidikan, maka secara teoritis masyarakat kota dengan akses pendidikan dan akses informasi lebih baik dibanding masyarakat di pedesaan seharusnya menimbulkan tingkat kesadaran yang tinggi namun yang terjadi justru sebaliknya. Pertanyaannya kenapa hal tersebut terjadi? Apa yang bisa menjelaskannya? Sebagaimana diketahui faktor kemiskinan perkotaan dan pedesaan yang berbeda. Secara kasuistik ditemukan fakta bahwa tingkat kemiskinan di masyarakat perkotaan lebih parah, karena ditunjang tingkat kehidupan sosial yang materialistik dan hedonis serta ikatan sosial yang sangat longgar atau individualis. Masyarakat miskin perkotaan pendapatan yang diperoleh hari ini menurut penuturannya habis dikonsumsi hari itu juga. Sementara itu, tingkat kemiskinan masyarakat pedesaan sangat dipengaruhi oleh sistem pertanian setempat. Pada pedesaan yang mayoritas mata pencahariannya adalah pertanian, maka untuk kasus Lampung Tengah telah terjadi awig-awig bahwa untuk setiap panen padi, maka dilakukan dengan cara bagi hasil antara petani dan buruh tani. Bagi hasil tersebut yaitu setiap hasil padi 7 kwintal maka para buruh mendapatkan 1 kwintal padi. Sehingga kasus kemiskinan pedesaan seperti di desa Astomulya Kecamatan Punggur misalnya kehidupan para buruh sangat tertolong dimusin panen padi. Setiap panen satu keluarga bisa mendapatkan lebih dari 5 kwintal padi, sehingga ketahanan pangan lebih terjamin. Disamping itu antar rumah tangga ikatan sosialnya sangat kental. Mereka masih mempertahankan adat saling memberi ketika tetangganya membutuhkan.

Bagi fasilitator hybrid dan pendamping PKH maka secara umum mereka lebih suka dengan metode hybrid. Menurut pendamping PKH metode hybrid prosesnya lebih transparan, demokratis, dan bisa dipertanggung jawabkan. Hal ini disebabkan karena yang memutuskan siapa RTSM yang paling layak untuk dicalonnya, maka merupakan hasil musyawarah dari masyarakat itu sendiri. Hal lain, maka kemungkinan terjadinya protes ketika hari realisasi yang akan datang kecil.

Metode Hybrid yang paling nyaman difasilitasi adalah metode hybrid perbaikan masyarakat dan perbaikan tokoh. Bagi fasilitator yang bertugas di Lampung Tengah, mereka memilih hybrid perbaikan masyarakat. Alasan adalah :

- Data dari BPS pusat bisa akan diranking bersama data usulan masyarakat untuk menentukan siapa calon peserta PKH yang akan diusulkan ke Kemensos RI.
- Kasus yang terjadi kebanyakan data RTSM BPS pusat dibandingkan usulan masyarakat tingkat kehidupannya jauh lebih baik menurut penilaian masyarakat setempat.
- Semua masyarakat yang hadir dalam diskusi bisa mengetahui secara langsung bagaimana proses mulai dari pengusulan nama pasangan sampai dengan proses perengkingan dilakukan secara terbuka dan demokratis pengambilan keputusannya.
- Disebagian daerah/desa tidak banyak yang memiliki tokoh sehingga yang hadir juga perwakilan dari masyarakat bukan tokoh karena kesulitan mencari tokoh setempat yang benar-benar tokoh.

- Pamong desa lebih tenang dan lebih menerima karena prosesnya dilakukan sendiri oleh masyarakat baik dari penentuan criteria RTSM, proses seleksi dan semua hasil disepakati oleh masyarakat.
- Interaksi dengan masyarakat dalam proses musyawarah lebih kuat dan benar-benar partisipatif dan kesadaran masyarakat melalui proses rasionalisasi.
- Memiliki partisipasi dan nilai tawar yang kuat dalam memperbaiki data kemiskinan dengan kondisi objektif diwilayahnya
- Penilaian lebih meluas dan bagi masyarakat yang tidak jujur akan ketahuan oleh masyarakat yang lain dan ketika diperbaiki data juga akan lebih akurat

Sedangkan menurut fasilitator yang bertugas di Bandar Lampung mereka lebih memilih metode hybrid perbaikan tokoh, alasannya adalah :

- Data dari BPS pusat dapat dilakukan perengkingan bersama data usulan masyarakat
- Diskusi relative lebih lancar karena tidak banyak kepala dan mulut hadir, lebih tertib, lebih obyektif dan fair.
- Lebih akurat untuk sosialisasi dan imendapatkan data serta lebih efisien waktu
- Hambatan komunikasi dari faktor bahasa lebih bisa diminimalisir, tidak butuh ruangan besar.
- Ketika proses pengusulan RTSM lebih mudah karena tidak akan mengusulkan masyarakat yang tidak memenuhi kriteria RTSM yang sudah disepakati
- Dalam proses perengkingan akan lebih mudah karena sudah memahami tingkat perbedaan RTSM

Namun demikian kasus-per kasus yang terjadi terhadap kenyamanan fasilitasi ini antara memfasilitasi tokoh dan masyarakat baik di Bandar Lampung maupun di Lampung Tengah terdapat beberapa temuan antara lain;

- Untuk fasilitasi Tokoh maka terkadang para tokoh agak gamang untuk menentukan usulan calon peserta PKH. Faktor penyebabnya adalah karena trauma kasus BLT dari program sebelumnya dimana para tokoh menjadi sasaran massa yang merasa tidak puas atau tidak mendapat BTL. Kasus di RT 6 lingkungan 2. Kelurahan Gunungsari Kecamatan Tanjung Karang Timur, misalnya sangking ketakutan tokoh tersebut, maka yang diundang dalam pertemuan malah seluruh masyarakat diwilayahnya oleh bapak RT-nya. Alasannya karena biar masyarakat saja yang mendengar dan berdiskusi, walupun pada akhirnya diskusi dilaksanakan dua kali yaitu untuk masyarakat yang hadir hanya disosialisasikan tentang PKH dan setelah itu baru diundang para tokohnya untuk berdiskusi lagi. Hal yang lebih tragis justru diskusi tokoh di RT 001 Lingkungan 1 Kelurahan Pelita kecamatan Tanjung Karang Pusat dimana diskusi hybrid tambahan tokoh maka yang diundang oleh bapak RT adalah tokoh dan masyarakat RTSM diwilayahnya. Sedangkan untuk kasus di Lampung Tengah maka kejadian ini terjadi di
- Untuk fasilitasi diskusi masyarakat maka hal yang ditemui dilapangan bila waktunya pagi hari-siang, maka lebih banyak yang hadir adalah ibu-ibu dan anak-anak yang hadir, namun bila waktu sore masyarakat yang hadir campuran laki dan perempuan serta anak-anak, dan malam hari lebih banyak laki-laki . Faktor penyebabnya adalah dipagi sampai siang para lelaki mereka umumnya mencari nafkah untuk keluarga. Sedangkan didalam hari

perempuan kurang terlibat dibanding laki karena mereka lebih banyak berdiam diri dirumah dan bila datang juga kontribusi dalam diskusi rendah sekali bahkan sering tidak bersuara.

Kasus ditingkat lapangan ditemukan bahwa dalam menetapkan usulan calon peserta PKH, maka dijumpai bila yang hadir ibu-ibu cenderung berada dalam blok-blok mendukung salah satu peserta yang hadir. Seperti diskusi yang diselenggarakan di RT 002 Lingkungan 01. kelurahan Way Kandis kecamatan Tanjung Seneng dimana ibu-ibu yang hadir cenderung mengusulkan dirinya sendiri, walaupun fasilitator telah meminta dan menginformasikan bahwa warga yang tidak hadir dalam pertemuan ini juga memiliki kesempatan yang sama untuk dicalonkan menjadi peserta PKH, namun ibu-ibu menjawab sudah tidak ada lagi selain yang hadir ini yang termasuk RTSM. Atau kasus di RT 2 Lingkungan 2 Kelurahan Keteguhan kecamatan Teluk Betung Barat dimana para ibu – ibu yang hadir tidak mau mengusulkan nama-nama RTSM yang diusulkan menjadi peserta PKH. Alasannya karena mereka semua orang miskin, rumahnya rata-rata numpang ditanah orang lain atau tanah Pemda, bila ada program dari pemerintah mereka selalu dibagi rata. Mereka tidak mau bila hanya sedikit yang diusulkan dan minta semua diusulkan, karena bila sedikit yang diusulkan maka akan terjadi kecemburuan sosial menurut masyarakat dan Kepala Lingkungan, Ketua RT dan Sekretaris RT. Oleh karena itu lebih baik tidak mengusulkan bila sedikit.



Gambar Proses Diskusi Metode Hybrid di Lampung

Kasus yang terjadi di Lampung Tengah terjadi di desa Tanjung Ratu RT 001 Dusun 01 Kecamatan Selagai Lingga dimana masyarakat tidak bersedia untuk mengusulkan nama-nama RTSM yang memenuhi syarat PKH, mereka malah minta bahwa masyarakat yang hadir untuk didaftar semuanya. Karena dibawah intimidasi maka fasilitator untuk mencari amannya

melakukan pendaftaran semuanya terhadap warga yang hadir. Hal yang sama juga terjadi di desa Negeri Ratu Dusun 01 Kecamatan Pubian.

Selama proses fasilitasi metode hybrid dengan tokoh maupun masyarakat berlangsung, maka resistensi yang sering terjadi pada data RTSM yang berasal dari pusat. Resistensi ini secara kasus perkasus dipicu kondisi ekonomi yang lebih baik saat ini. Saat monitoring ditemukan fakta bahwa masyarakat beranggapan, data dari pusat memang memiliki persyaratan PKH dan akurasi, namun demikian tingkat kehidupan lebih sejahtera bila dibandingkan dengan data usulan masyarakat maupun tokoh. Oleh karena itu masyarakat meminta bahwa data tersebut diganti saja dengan yang lebih sesuai kondisinya dimasyarakat. Kasus yang terjadi ditingkat lapangan di Bandar Lampung misalnya ketika diskusi di RT 006 Lingkungan 02 kelurahan Keteguhan kecamatan Teluk Betung Barat, dimana nama-nama RTSM yang masuk nominasi kondisinya saat ini menurut masyarakat yang hadir adalah telah memiliki prahu motor,

memiliki sepeda motor dan kios. Atas dasar fakta ini, maka keluarga RTSM tersebut tidak layak diusulkan menurut masyarakat. Hal yang sama juga terjadi di Lampung Tengah, dimana ketika fasilitasi metode tambahan tokoh maupun masyarakat juga mengalami resistensi, misalnya adalah yang terjadi di RT 6 lingkungan 6 kelurahan Keteguhan. Masyarakat menolak dengan alasan ekonomi yang lebih baik dibanding data usulan masyarakat, masyarakat menilai ketika didata maka pendatannya masih ada unsur hubungan keluarga dengan RTSM yang diusulkan. Hal yang sama terjadi juga di dusun 2 UPT Way Terusan SP I kecamatan Bandar Mataram, Desa Sidoharjo RT 010 dusun 05 Kecamatan Selagai Lingga Lampung Tengah.

Tahapan-tahapan metode dalam proses fasilitasi oleh fasilitator dari hasil monitoring yang paling sulit adalah memfasilitasi menemukan indikator tingkat kesejahteraan bila menyangkut angka-angka. Secara kasus ditemukan bahwa ketika berdiskusi dengan masyarakat maupun tokoh, mereka sering kali kurang jujur dalam mengungkapkan besarnya pendapatan. Apabila diminta untuk menghitung secara pasti pendapatannya, mereka selalu berkira tidak pasti, sedangkan bila dibuatkan rata-rata mereka terkadang menolak, karena bila bekerja sebagai buruh lepas maka penghasilannya tidak tentu. Sementara itu bagi fasilitator, juga dipengaruhi kurang menguasai psikologis mereka yang hadir, bila bertemu dengan peserta yang vokal baik masyarakat maupun tokoh ada fasilitator yang down mentalnya. Akibatnya tidak fokus dalam memfasilitasi. Tahapan meranking juga menjadi tingkat kesulitan tersendiri. Kasus yang terjadi bahwa ketika masyarakat atau tokoh membuat 3 faktor utama tingkat kesejahteraan dan mendetailkan terkadang kurang detail informasinya, sehingga faktor-faktor yang tertulis perlu ditambahkan dengan keterangan diluar yang tertulis di metaplan. Walaupun dengan cara ini masyarakat maupun tokoh akhirnya juga bisa mengusulkan calon ketika menggunakan tambahan ciri indikator tersebut. Kasus-kasus ini dialami oleh beberapa fasilitator baik yang ada di Bandar Lampung maupun Lampung Tengah.

B.3. Sumatera Selatan

Total jumlah kelurahan yang menggunakan metode hybrid di Propinsi Sumatera Selatan adalah 67 desa/kelurahan dengan jumlah SLS adalah 585 SLS. Total jumlah SLS tersebut akan diselesaikan selama \pm 120 hari dengan jumlah fasilitator sebanyak 8 orang, 5 orang fasilitator hybrid di kota Palembang dan 3 orang fasilitator hybrid di Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI).

Di Kota Palembang jumlah kelurahan yang menggunakan 4 kombinasi metode hybrid adalah 17 Kelurahan. Sedangkan jumlah SLS yang terdapat di kota Palembang adalah 439 SLS, yang terbagi menjadi 231 SLS menggunakan metode hybrid Tambahan masyarakat dan tokoh serta 196 SLS menggunakan metode hybrid Perbaikan masyarakat dengan tokoh. Dari 439 SLS yang tersebar di 17 kelurahan dan 7 kecamatan tersebut akan dikerjakan oleh 5 orang fasilitator hybrid.

Sementara total jumlah SLS di Kabupaten Ogan Komering Ilir yang menggunakan metode hybrid adalah 275 SLS yang tersebar di 50 desa/kelurahan. Total SLS yang terdapat di Kabupaten Ogan Komering Ilir tersebut tergabung dalam 146 SLS menggunakan metode Hybrid Tambahan Masyarakat dan Tokoh serta 146 SLS menggunakan metode Perbaikan Masyarakat dan Tokoh.

Secara umum tahapan metode hybrid yang dilaksanakan oleh masing-masing fasilitator adalah antara lain; **(1) Koordinasi dengan Lurah, (2) Pertemuan dan sosialisasi dengan Tokoh dan ketua SLS, (3) Pertemuan masyarakat di SLS.** Proses koordinasi dengan Lurah dapat dilakukan

selama 1 hari sedangkan untuk pertemuan dengan tokoh dan ketua RT dilakukan 1 hari dengan durasi waktu 1-3 jam. Rata-rata setiap desa dilakukan pertemuan dengan warga di 2 (SLS) dalam sehari, sehingga semakin banyak jumlah SLS maka semakin banyak pula hari yang digunakan. Untuk satu kali pertemuan rata-rata waktu yang digunakan 2-3 jam tergantung jumlah quota.

Daftar dan nama desa lokasi study di Kota Palembang dan Kabupaten Ogan Komering Ilir terlampir.

Secara umum proses yang dibangun di masyarakat oleh fasilitator Mitra Samya cukup baik, hal ini dapat dilihat dari respon dari beberapa tokoh dan ketua RT di lingkungan SLS yang cukup baik. Meskipun demikian masih terdapat ketua dan tokoh masyarakat yang menolak kegiatan ini karena melihat quota yang di berikan oleh pusat cukup sedikit seperti quota 0 dan qouta 2.



Gambar Proses perangkingan gabungan antara daftar dari BPS dengan daftar dari masyarakat

Seperti yang terjadi di Kelurahan Karang Anyar RT 35, tokoh beserta ketua RT yang hadir menolak untuk melanjutkan pertemuan karena quotanya terlalu sedikit (quota nol). Menurut ketua RT setempat jika pertemuan ini akan dilanjutkan maka dianggap terjadi kecemburuan sosial bagi masyarakatnya dan dianggap akan mengadu domba masyarakat yang ada di lingkungan RT

tersebut. Meskipun demikian fasilitator berupaya untuk lanjut dan menjelaskan kepada kepada tokoh dan ketua RT sampai dengan mendapatkan rangking Rumah Tangga.

Permasalahan yang sama terjadi pada salah seorang fasilitator hybrid, Elya Fransiska. Para tokoh menolak untuk melakukan pertemuan karena quota nol. Meskipun sudah di jelaskan berulang kali namun masyarakat dan tokoh menganggap bahwa di lokasi mereka masih banyak masyarakat miskin yang perlu dibantu. Para tokoh kemudian melampiaskan kekesalannya kepada fasilitator dengan cara marah dan membentak fasilitator. Fasilitator merasa shock dengan respon masyarakat dan perlakuan yang diterima, sehingga memutuskan untuk mengundurkan diri. Namun proses dilapangan tidak terganggu, karena setelah proses pengunduran diri tersebut supervisor langsung memutuskan untuk mengganti perannya sebagai fasilitator hybrid dengan fasilitator cadangan.

Terkait dengan peserta diskusi, di RT 35 kelurahan Karang Anyar yang semestinya pertemuan di RT tersebut adalah pertemuan tokoh, namun pada saat itu Ketua RT (Bapak Rasyid) mengundang seluruh masyarakat yang ada di lingkungan RT 35, dengan alasan agar masyarakat mendengarkan hasil pertemuan tokoh secara langsung dan tidak menyalahkan ketua RT.

Saat fasilitator melakukan koordinasi dan sosialisasi di Kelurahan, sebagian besar aparat desa/kelurahan menerima dengan baik kegiatan studi di program PKH. Namun masih ada juga aparat desa/kelurahan yang menolak kegiatan studi dengan alasan trauma dengan pengalaman buruk terhadap program-program sosial sebelumnya di wilayahnya. Seperti yang terjadi di kelurahan 29 Ilir, Lurah setempat tidak merespon sama sekali kegiatan studi

meskipun fasilitator sudah mendatangi lurah tersebut beberapa kali, dengan alasan kesibukan. *“Tidak ada tempat pertemuan di kantor saya ini”* ungkap Lurah tersebut. Lurah tidak mengijinkan untuk melakukan pertemuan di kantor lurah dengan alasan tidak ada tempat yang memadai, padahal setelah dicek oleh fasilitator kondisi kantor lurah cukup memadai. Karena tidak diberikan izin oleh Lurah 29 Ilir akhirnya pertemuan dengan SLS dibatalkan. Namun tim fasilitator mengembangkan strategi lain, yaitu melakukan sosialisasi ke semua ketua RW dan RT serta menyusun jadwal pertemuan dengan warga masyarakat di masing-masing RT. Pertemuan dengan warga tetap dapat dilaksanakan meskipun tanpa dukungan lurah. Berdasarkan hasil diskusi dengan masyarakat bahwa Lurah setempat memiliki track record yang buruk dalam pemanfaatan bantuan raskin dan BLT.

Terkait dengan quota calon peserta PKH, tidak sedikit pengalaman fasilitator di Palembang dan Kabupaten Ogan Komering Ilir menemukan quota yang tidak sesuai kondisi kemiskinan setempat. Seperti di SLS 31 Kelurahan 1 Ulu Kecamatan Seberang Ulu 1, jumlah quota tidak sebanding dengan tingkat kesejahteraan masyarakat. Jumlah quota 69 RTSM, namun sampai dengan akhir diskusi jumlah quota tidak terpenuhi dan hanya mendapatkan 29 daftar calon penerima bantuan. Tingkat kesejahteraan masyarakat di wilayah RT 31 tersebut lebih bagus di banding dengan SLS lainnya. Selain tingkat kesejahteraan masyarakatnya lebih mapan, nama-nama warga dalam list quota tidak dikenal oleh ketua RT dan masyarakat peserta diskusi. Masyarakat di SLS tersebut sebagian besar merupakan masyarakat pendatang dengan sistim pindah sementara.

Pada saat pertemuan masyarakat untuk menentukan daftar calon penerima bantuan peserta banyak yang mengusulkan diri, atau keluarganya yang lain meskipun tidak memenuhi syarat. Bahkan ada di beberapa tempat nama warga yang disulkan tersebut banyak dari janda yang sudah tidak memiliki tanggungan anak atau cucu. Meskipun demikian fasilitator menerima usulan dari masyarakat dengan memberikan saran atau himbauan *“bagi janda, nenek yang sudah tidak memiliki tanggungan ini mudahan bisa diusulkan dalam program lainnya”*.

Cerita lain tentang akurasi data PPLS yang digunakan juga ditemukan di RT 33A Kelurahan 36 Ilir. Dalam daftar rumah tangga tercantum sebanyak 41 RTSM yang masuk quota, namun setelah dilakukan akurasi ternyata hanya ada 8 rumah tangga yang masih berada di RT tersebut. Sedangkan Rumah Tangga yang lainnya masih terdaftar di RT 33. Lingkungan RT 33 sudah mengalami pemecahan RT semenjak tahun 2000. Menurut pendapat beberapa warga, Daftar PPLS 2008 yang digunakan tersebut tidak akurat, karena nama-nama warga yang terdapat di daftar BPS tidak semuanya ada.

Respon positif tentang metode hybrid disampaikan oleh peserta. Seperti yang didapatkan di RT 35 kelurahan 36 Ilir Kota Palembang. Proses koordinasi yang dilakukan di Musholla Al Amin diawali dengan pengenalan, penjelasan PKH dan pengertian Rumah Tangga. Pertemuan dihadiri oleh sebagian besar Kepala Rumah Tangga (KRT), jika KRTnya tidak hadir maka akan diwakili oleh istri atau anaknya. Selama proses banyak pertanyaan terkait dengan PKH dan proses studi yang akan dilakukan di kelurahan tersebut. Awalnya semua peserta menolak proses ini, karena dianggap kegiatan ini akan dilakukan dengan cara mencari dan mendatangi Rumah Tangga Sangat Miskin di lingkungan RT. *“Jika demikian maka yang akan menjadi sasaran adalah Ketua RT. Lebih baik keputusan tentang siapa rumah tangga tersebut kami sebutkan sekarang dengan kata lain kami akan berikan daftar rumah tangga sangat miskin kepada fasilitator biar tidak menimbulkan kemarahan warga di lingkungan kami”* kata ketua RT 03. Meskipun demikian fasilitator tetap menjelaskan dan akhirnya semua RT mengerti. Ada satu pernyataan menarik dari Bapak Sultan, ketua RT setempat: *“Kalau metode penentuannya seperti ini maka pihak ketua RT akan aman, karena tidak ada sangkut pautnya dengan RT, RT tidak ikut menentukan warga yang akan masuk dalam daftar, RT hanya meminta masyarakatnya untuk berkumpul saja untuk berdiskusi”*.

Pertemuan juga dilakukan di 2 RT di desa Suka Pulih Kabupaten Ogan Komering Ilir. Desa Suka Pulih merupakan daerah transmigrasi sosial dimana masyarakatnya adalah rata-rata penderita kusta, gepeng bahkan daerah mantan pereman. Proses penjelasan cukup lancar, para tokoh merasa puas terhadap apa yang mereka hasilnya karena masyarakat diberikan kesempatan untuk memberikan masukan terhadap data yang sudah ada, terlebih lagi RTSM yang mereka usulkan adalah memang layak mendapatkan bantuan. Pernyataan Kadus RT 2 Desa Suka Pulih *“selama ini bantuan yang masuk tidak tepat sasaran karena sebagian besar yang mendapatkan bantuan dari tingkat kehidupan yang lebih baik atau dengan kata lain tingkat ekonomi mampu”*. Menurut pangakuan Bapak Kadus, *“Program ini sangat baik karena memang diperuntukkan untuk kesehatan dan pendidikan. Selama ini hanya ada program untuk orang jompo dari Dinsos yang masuk ke desa kami”*.

Beberapa kendala yang di hadapi oleh fasilitator Mitra Samya ketika melakukan pertemuan dengan masyarakat antara lain;

- a. Dukungan dari Lurah yang terdapat di Kota Palembang kurang maksimal. Sebagian besar Lurah menganggap kegiatan studi tidak ada dana sehingga terkadang Lurah yang bersangkutan malas mengundang tokoh atau ketua RT.
- b. Batasan wilayah RT atau RW yang belum jelas serta mobilisasi masyarakat yang cukup tinggi menyebabkan fasilitator dan masyarakat kesulitan mengidentifikasi nama warga yang masuk dalam daftar RTSM.
- c. Pembagian wilayah terutama wilayah RT /RW yang tidak terdaftar di PPLS, menyebabkan fasilitator perlu memastikan kembali batasan wilayah tersebut.
- d. Daftar PPLS yang tidak siap di beberapa desa di kabupaten Ogan Komering Ilir sehingga fasilitator harus mendata terlebih dahulu nama-nama rumah Tangga di setiap dusun atau RT.
- e. Belum adanya sosialisasi secara menyeluruh di beberapa kecamatan sehingga beberapa Camat tidak mengetahui tentang kegiatan PKH dan studi yang sedang dilaksanakan.
- f. Warga masyarakat tidak memahami sistim quota dalam program PKH, biasanya warga masyarakat membandingkan dengan quota pada saat menerima bantuan sosial lainnya seperti raskin dan BLT. Jumlah warga yang menerima pada saat Raskin dan BLT cukup banyak bila dibandingkan dengan jumlah PKH.

Di daerah perkotaan jadwal pertemuan yang disepakati bersama masyarakat lebih banyak dilakukan pagi atau siang hari, tergantung waktu luang masyarakat/tokoh setempat. Jika dilakukan pertemuan pada malam hari, fasilitator masih bisa melakukan diskusi tanpa menginap di lokasi. Namun di daerah perkotaan, tempat pertemuan terkadang menjadi kendala. Tidak adanya tempat yang cukup representatif untuk pertemuan. di daerah perkotaan, tempat untuk FGD terkadang menjadi kendala karena biasanya tidak ada Fasilitator sering menggunakan rumah warga sebagai lokasi pertemuan dan bersifat sukarela. Berbeda dengan di pedesaan, masyarakat sangat membantu mulai dari menyediakan tempat, konsumsi sampai dengan tempat menginap fasilitator.

C. Metode Pendaftaran

Self Targeting atau juga disebut dengan *Metode Pendaftaran* adalah proses penentuan calon peserta PKH melalui proses pendaftaran di Dusun/RW, Desa/Kelurahan atau di Kecamatan oleh suami istri atau siapapun diantara anggota rumah tangga yang berusia > 18 tahun. Proses metode pendaftaran ini meliputi beberapa tahapan, yaitu: Persiapan dan Sosialisasi (Koordinasi Camat, Kades/Lurah), Pertemuan Tokoh Desa/Kelurahan, Pertemuan Masyarakat, dan Pendaftaran/ Wawancara.

“PKH hanya untuk RTSM yang memenuhi salah satu dari 3 kriteria PKH, yaitu; memiliki Anak usia 0-6 tahun, memiliki anak usia dibawah 18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar, dan memiliki ibu hamil/nifas. Bagi rumah tangga yang mampu dimohon kesadarannya untuk tidak mendaftar karena akan sia-sia”. Begitulah kata kunci yang sering diungkapkan oleh fasilitator self targeting di setiap akhir pertemuan.

Jika dibandingkan dengan metode lain, perbedaan prinsip metode self targeting terletak pada proses pendaftaran. Dalam hal ini warga diminta datang ke tempat pendaftaran dan diwawancara, dimana dalam proses studi ini tempatnya ada yang ditingkat Dusun/RW, Desa dan Kecamatan. Metode pendaftaran lebih mengutamakan pembelajaran tentang pentingnya kesadaran dan kejujuran. Kesadaran masyarakat untuk memberi kesempatan bagi rumah tangga yang lebih miskin, dan kejujuran untuk mengakui dirinya lebih mampu dengan bercermin pada lingkungan di sekitarnya.

C.1. Jawa Tengah

C.1.1. Pelaksanaan Self Targeting di Wonogiri

Sama dengan metode yang lain, respon masyarakat terhadap pelaksanaan metode self targeting juga sangat beragam. Hal ini dapat dilihat pada saat koordinasi, sosialisasi atau ketika proses pendaftaran. Respon yang beragam tersebut menunjukkan bahwa di setiap lokasi kendati masih dalam satu wilayah desa/ kecamatan/ kabupaten memiliki tingkat kearifan yang bervariasi.

Beberapa catatan penting dinamika lapangan yang berhasil didokumentasikan selama pelaksanaan metode self targeting di Wonogiri, sebagai berikut:

- Di Desa Ngancar Kec Giriwoyo, para tokoh dan Ketua SLS serta perangkat desa hampir menolak pelaksanaan sosialisasi. Program ini dikhawatirkan membawa kasus seperti BLT yang dulu menjadikan mereka sebagai sasaran kemarahan warga. Namun setelah melalui proses diskusi yang cukup alot, akhirnya para pihak di desa tersebut bisa menerima dan mengizinkan proses sosialisasi.
- Di Kelurahan Giriwoyo, sempat terhembus data calon penerima bantuan PKH sudah diumumkan di Kantor Pos. Hal ini membuat tim fasilitator kerepotan, dan setelah dilakukan cross check ternyata tidak ada pengumuman yang dipasang.
- Jadwal seringkali berubah sehingga seperti di Kelurahan Giriwoyo, Minggu 30 Januari 2011 wawancara tidak libur, tetapi fasilitator menyesuaikan dengan jadwal sebelum/ sesudahnya yang hari minggu libur. Akibatnya jadwal wawancara yang mestinya hanya sampai tanggal 31 Januari 2011 menjadi sampai tanggal 01 Februari 2011.
- Beberapa data SLS seperti di Dusun Pokoh tercatat ganda, sehingga merepotkan bagi tim fasilitator.

- Telah terjadi beberapa insiden saat pendaftaran di Desa Tlogosari, yaitu:
 - Pada hari pertama 18 Januari 2011, Tim Pewawancara BPS dan Pendamping terlambat datang sementara sudah banyak warga yang menunggu.
 - Pada hari kedua diinformasikan terjadi pembludakan pendaftar, namun hasil cross check lapangan ternyata tidak benar. Pembludakan terjadi hanya karena masih ada sisa dari hari pertama yang tidak terwawancara sehingga harus didahulukan oleh pewawancara.
 - Petugas BPS terlambat lagi datang ke tempat wawancara tetapi tidak separah di hari pertama.
 - Disinyalir banyak warga yang mampu juga ikut mendaftar.
 - Pembludakan pendaftar juga karena gabungan 5 dusun, namun jika melihat data pendaftar masih kurang dari 200 orang.
- Aparat desa yaitu Kadus dan Kaur Kesra di Desa Pideksa ternyata ada yang ikut wawancara. Menyikapi informasi itu tim mencoba klarifikasi, dan ternyata pihak desa menyatakan *“kedua aparat itu suka begitu dan memang sulit dipahami”*. Selain itu juga terjadi rekayasa data form-S1 dimana tim pewawancara dan pendamping datang diatas Jam 08.00 WIB tetapi ditulis Jam 08.00 WIB.
- Masukan dari Tim Pewawancara, saat sosialisasi perlu menghimbau warga untuk mendaftar lebih awal (mengambil nomer antrian dulu). Hal ini supaya pendamping dan pewawancara bisa mengetahui berapa jumlah pendaftar perhari, sehingga bisa membagi waktu sampai pukul 17.00 WIB.
- Telah terjadi pemadatan jadwal oleh petugas wawancara di Desa Hargosari Kec Tirtomoyo. Wawancara Dusun Jajar dan Beji yang seharusnya tanggal 4 Februari 2011 ternyata digabung ke Dusun Plumbon, Pucang dan Sob pada tanggal 3 Februari 2011.
- Kasus di Kec Jatipurno saat petugas wawancara hendak meninggalkan tempat wawancara sebelum pukul 14.00 WIB, masih ada warga yang datang mendaftar. Ketika warga itu ditanya *“kenapa baru datang?”*, beliau menjawab *“Lho, bukannya wawancara dimulai jam 08.00 s/d 17.00 WIB?”*.
- Pada hari kedua wawancara di Desa Pelem, petugas BPS baru tiba pada pukul 09.45 WIB, sementara sudah banyak warga yang antri di tempat.
- Saat sosialisasi di Kec Jatisrono, fasilitator menyampaikan untuk pelaksanaan kegiatan ini tidak ada biaya konsumsi/ akomodasi dan semua bisa menyepakati. Ternyata saat wawancara di pendopo staf kecamatan memintai dana kebersihan Rp. 5000 perhari. Namun ketika diminta kwitansi bukti pembayaran, pihak kecamatan tersebut menolak dan memilih tidak minta dana kebersihan.
- Saat pendaftaran di kantor Camat Jatisrono juga terjadi kasus warga mendaftar tetapi petugas sudah pergi. Kebetulan pendaftar tersebut adalah seorang Pelajar SMA yang mewakili salah satu RTSM dari Desa Watangsono. Saat ditanya dia mengatakan baru bisa datang sepulang sekolah (sekitar pukul 14.45 WIB).
- Pada tanggal 28 Februari 2011 para pendamping tidak bisa membantu Tim BPS di lapangan. Ternyata pendamping lebih memilih mengikuti acara penyerahan SK di kabupaten daripada menjalankan tugasnya sebagai pendaftar dalam proses wawancara di lapangan.
- Pada tanggal 21-25 Maret 2011, semua Tim BPS yang menjadi pewawancara harus mengikuti pelatihan yang diselenggarakan BPS Pusat. Pihak BPS meminta pemadatan jadwal agar bisa selesai sebelum tanggal tersebut, atau mereka minta ada perubahan jadwal di lapangan.

Proses di lapangan terkait metodologi, respon dan hasil merupakan hal penting yang ingin digali. Semua diramu sedemikian rupa sehingga bisa menjadi bahan untuk perbaikan baik secara konsep maupun materi metodologi. Secara konseptual, implementasi metode self targeting telah berjalan dengan lancar, dan partisipasi masyarakat cukup tinggi. Contoh saat sosialisasi dan pendaftaran, meskipun ada beberapa kendala berupa; provokasi warga dengan menyatakan bantuan ini hibah sehingga semua disuruh datang mendaftar, pemerintah setempat mencari aman karena tidak mau disalahkan seperti kasus BLT, ada kendala di lokasi pedesaan dan perkotaan masalah perbedaan persepsi masyarakat, dsb. Kendala lain juga masalah perubahan jadwal yang terjadi berkali-kali. Masalah kapasitas dan kemampuan fasilitator dalam menterjemahkan substansi metodologi juga terasa.

Di beberapa lokasi studi fasilitator mengalami kendala yang cukup berat. Mereka seperti dihadapkan pada tuntutan untuk melakukan recovery thrust sosial, sehingga tidak mudah mensosialisasikan kegiatan ini karena masyarakat sedang trauma akibat kekacauan dari program sebelumnya. Dalam situasi seperti ini fasilitator harus berjuang dengan keras memulihkan kepercayaan masyarakat yang sudah terlanjur curiga dengan berbagai bentuk bantuan ataupun sistem yang ada.

Cara ketua RT mengundang tidak sama, ada kasus seperti di Simpur Kec belik (Hybrid) yang mengundang dengan kata-kata akan diberi uang. Kata Ketua RT kalau tidak seperti itu mereka tidak akan pernah mau datang. Akibatnya saat usai pertemuan, fasilitator ditodong bayaran oleh peserta diskusi karena mereka menyangka dalam tas fasilitator ada uang yang akan dibagi-bagikan.



Masalah pemahaman masyarakat yang umumnya sangat beragam juga turut mewarnai. Artinya jika tingkat kesadaran masyarakat tinggi, maka sebenarnya tidak perlu banyak yang mendaftar. Tetapi jika kesadarannya kurang, tentu pendaftar membanjir. Untuk meningkatkan pemahaman masyarakat dipandang penting memasang pengumuman di tempat-tempat yang strategis.

Keterlibatan pihak lain (stakeholder) seperti BPS dan Dinsos, memiliki dampak positif dan negative. Keberadaan

pihak lain ini menjadi penting dalam proses wawancara karena tim BPS lebih memiliki kapasitas, tetapi juga tidak sedikit diantaranya yang menjadi masalah terutama ketika tidak memiliki persepsi yang sama dengan tim yang lain.

B.1. Pelaksanaan Metode Self Targeting di Pemalang

Proses seleksi calon peserta PKH dengan Metode Pendaftaran di Pemalang difasilitasi oleh Tim Fasilitator Mitra Samya (3 orang), Tim Pendamping PKH setempat (3-9 orang per kecamatan), dan Tim Pewawancara BPS (10 orang). Dari 96 desa/ kelurahan lokasi studi, tim gabungan tersebut bekerja secara simultan di 32 desa/ kelurahan yang terpilih sebagai lokasi pelaksanaan metode self targeting.

Proses persiapan dan koordinasi serta sosialisasi kepada aparat desa/kelurahan hingga pertemuan di masyarakat difasilitasi Tim Mitra Samya. Sedangkan proses wawancara calon peserta difasilitasi oleh Tim BPS. Dalam pelaksanaan tugasnya Tim Mitra Samya bekerjasama dengan Pendamping PKH. Demikian pula pada pelaksanaan interview oleh Tim BPS, proses registrasi calon peserta menjadi tugas Pendamping PKH. Pembagian tugas ini telah dikoordinasikan sejak persiapan, sehingga di lapangan masing-masing bisa berproses sesuai tanggungjawabnya.

Catatan Pengalaman Lapangan

Dalam proses atau kegiatan di lapangan, terlebih untuk suatu studi atau ujicoba, maka terjadinya kasus atau kejadian apapun mesti kita pandang sebagai sebuah proses pembelajaran yang harus kita ambil hikmahnya. Saya tidak ingin melihatnya hitam putih atau mengatakan yang ini salah, yang itu benar, dsb. Semuanya harus kita posisikan sebagai bagian dari pembelajaran bersama, sehingga semua komponen harus sadar diri untuk berubah menjadi lebih baik. Cerita kasus disini juga saya maksudkan sebagai proses pembelajaran, sehingga secara partisipatif kita bisa menilai bersama siapa dan pada posisi mana yang perlu perbaikan. Semoga cerita ini bermanfaat.

3 Feb 2011 :

Sore itu sebelum ke Desa Kramat, saya singgah di Posko teman-teman tim Mitra Samya di Pemalang. Hanya ada Rudi dan Haris disana, karena satu anggota Tim Pendaftaran masih ofname di rumah sakit Semarang (terserang Demam Berdarah dan Gejala Tyfus), sementara yang lainnya (Tim Hybrid) masih proses di Kec Randu Dongkal.

Seperti biasa kami diskusi informal sharing kegiatan lapangan, dan yang sangat mengejutkan Rudi mengatakan **“tadi, wawancara ke-2 Desa Banjaranyar Kec Randu Dongkal dipindah ke Balai Desa”**. Anda tau dari mana cerita itu? tanya saya. Tadi saya disms Ibu RT 09 Desa Banjar Anyar (Ibu Baitun), beliau menanyakan “kenapa wawacara dipindah ke Balai Desa, koq tidak sesuai dengan yang disampaikan saat sosialisasi?”. Lalu untuk lebih meyakinkan, Rudi menghubungi Azis (Koordinator Pendamping Kecamatan tsb) dan kebetulan tersambung.

Dari pembicaraan dengan Azis yang dikeraskan volumenya lewat speaker Hp, saya menyimpulkan bahwa di lapangan ada masalah dengan Pak Camat yang tidak mengizinkan wawancara di kecamatan. Saya tanya kembali, bagaimana koordinasi camat. Rudi menjelaskan bahwa waktu itu teman-teman mendesak untuk bertemu langsung Pak Camat. Tetapi Pak Sekcam mencegah karena Pak Camat sedang istirahat, dan beliau memastikan akan menyampaikan kepada Pak Camat. Akhirnya koordinasi dilakukan dengan Sekcam, dan masalah izin tempat wawancara dsb dilakukan bersama Pak Sekcam. Saat sosialisasi, selain 3 fasilitator pendaftaran juga ikut serta tim pendamping PKH. Semua kesepakatan waktu itu cukup jelas, sehingga tidak ada yang diragukan lagi.

Dari cerita tsb saya mengambil kesimpulan bahwa masalah ini karena anggota tim yang tidak memahami “wawancara di kecamatan sebagai bagian treatment”. Saya sangat menyesal karena Fasilitator sudah bekerja keras sosialisasi di lapangan, tetapi begitu ada sedikit masalah dengan bbrp pihak di lapangan, mereka langsung mengambil keputusan sendiri. Teman-teman fasilitator yang sudah bersusah payah koordinasi dan sosialisasi juga sangat marah, merasa sangat kecewa. Lebih-lebih dalam kasus begini mereka selalu yang dipojokkan, dituduh salah dalam melakukan sosialisasi, tidak bekerja secara maksimal, dsb.

Saya mencoba menghubungi Koordinator Tim Pewawancara dan Wakilnya (Tim BPS). Tetapi upaya saya tidak berhasil karena sepertinya sedang off dan satunya lagi sedang istirahat. Lalu agar komunikasi lebih efektif “menjadi pembelajaran bersama semua tim studi”, saya memutuskan melalui

sms saja dan men-cc-kan kepada tim pusat serta Kabid Sosial BPS Provinsi. Setelah itu saya menghubungi Pak Indarto (Koordinator PKH Dinsos), dan beliau langsung menyanggupi akan membantu koordinasi dengan Pak Camat.

Saya lalu berangkat ke Desa Kramat untuk memfasilitasi proses pertemuan masyarakat malam itu. Sepulang dari Desa Kramat, Rudi menyampaikan sms Koordinator Pendamping, bahwa; masalah di kecamatan sudah dikoordinasikan. Dinsos juga langsung koordinasi dengan Pak Camat, dan pendamping sudah bertemu Kepala Desa. Besok pagi Kepala Desa bersama pendamping akan mengarahkan warga untuk kembali wawancara di Kecamatan.

Paginya saya menghubungi Azis, dan dari ceritanya mendengar kasus di lapangan sebenarnya tidak se-bombastis informasi kemarin. Dia juga sudah mengkoordinasikan dengan Kepala Desa, dan Kades sebenarnya juga tidak ada masalah. Kemarin itu hanya sedikit mis komunikasi, karena tidak difahaminya wawancara di kecamatan sebagai bagian tretament. Pak Camat sebenarnya juga tidak masalah, beliau hanya sedikit kesal karena tidak diberitahu oleh Pak Sekcam. Lalu kepada Mas Azis saya tanya kembali, apakah perlu ke Randu Dongkal untuk masalah tsb. Mas Azis menegaskan kepada saya bahwa itu tidak perlu. Masalah di lapangan sudah bisa dikondisikan, dan hari ini wawancara bisa dipastikan ke kecamatan lagi. Saya mengucapkan terima kasih dan menutup pembicaraan karena akan segera ke Kantor Camat Pemalang untuk memastikan koordinasi yang sudah dilakukan tim Mitra Samya beberapa hari yang lalu.

3 Feb 2011;

Sepulang pertemuan masyarakat di Desa Kramat, sekitar pukul 22.00 WIB kami tiba di Kelurahan Bojongbata Kec Pemalang. Sebelum ke posko kami memutuskan ke warung dulu membeli makan malam. Sembari membungkus nasi pesanan kami, ibu pedagang bercerita kepada beberapa pembeli dan temannya. Selain saya dan Haris, disana juga ada 2 orang lelaki paroh baya. Kebetulan kami mendengar Ibu menyebut-nyebut kata punya balita, ibu hamil, anak sekolah, dan bantuan 600-2200 ribu pertahun.

Kami mencoba bertanya, “bantuan apa sih yang ibu ceritakan?”. Dari penjelasannya kami menyimpulkan bahwa beliau cukup faham tentang apa itu PKH, dan bagaimana proses pendaftaran menjadi peserta. Kami bertanya kembali “ibu tau darimana?, memangnya ada kegiatan apa di sini?”. Beliau menjawab, “lho, ini tadi kita baru kumpulan di sekolah, pokoknya yang merasa sangat miskin seperti *kerjanya susah, rumahnya jelek, sakit-sakitan, dan punya anak kecil, anak sekolah atau ibu hamil*, boleh mendaftar di kelurahan, katanya akan mendapatkan bantuan. Begitu terang beliau dengan penuh semangat.

Sementara itu, si bapak yang juga mendengar cerita ibu itu mengatakan berkali-kali, bahwa “ala yang begitu-begitu itu cuma taktik. Nanti kalau batuan sudah turun, itu pasti dipakai untuk membuat proposal oleh para oknum. Jadi itu sama saja dengan dana bos, raskin, BLT dsb yang rata-rata hanya dimainkan oleh para oknum. Lihat saja nanti, pungkas si bapak bersungut-sungut.

Kami hanya tersenyum mendengar celoteh si Bapak, dan mencoba bertanya “apakah bapak juga ikut pertemuan?. Beliau menjawab, “sebenarnya tadi ingin ikut, tetapi kebetulan tidak sempat”. Kami coba tanya lagi, “lho, apakah bapak juga mengetahui informasi detail mengenai bantuan itu?. Saya ya tahu sedikit saja, itu cerita dari teman-teman dan juga dari orang-orang di kelurahan.

Tiba-tiba ibu si pedagang nasi menyodorkan bungkus nasi pesanan kami. Karena ruangan kedai sangat sempit, kami lalu berpamitan. Kami juga berpesan agar si Ibu dan Bapak yang di warung itu mengikuti terus perkembangan bantuan yang diceritakan.

Secara umum pelaksanaan metode self targeting (pendaftaran) di Kabupaten Pemalang dimulai tanggal 14 Januari 2011 dan selesai tanggal 26 April 2011. Sebenarnya dalam pelaksanaan metode self targeting, terdapat 2 tahapan penting yaitu *proses verifikasi* dan *make up day* (melengkapi persyaratan). Sedianya proses verifikasi akan difasilitasi Tim BPS sedangkan make up day akan difasilitasi selama sehari oleh tim fasilitator Mitra Samya bersama Pendamping dan Tim BPS di Kantor Camat. Namun karena waktu yang terbatas,

nampaknya kedua tahapan tersebut tidak terlaksana baik oleh Tim Mitra Samya maupun Tim BPS.

B.2. Catatan Pelaksanaan Metode Self Targeting

Beberapa catatan dari pelaksanaan metode self targeting antara lain:

- **Pembatalan metode** pendaftaran di kecamatan Pemalang oleh Dinsos berdasarkan permintaan aparat “Camat & Kades Bojongnangka” yang menyatakan kalau ada apa-apa angkat tangan. Disini ada persoalan non teknis yang berimbas pada masalah politis ditingkat elit.
- **Kemampuan BPS wawancara** rata-rata 25-28 responden per hari (8 jam), sering dijadikan patokan dan konstan
- **Penyebaran leaflet “Pengumuman”** yang berisi himbauan sangat membantu dalam sosialisasi.
- Ada **dampak negatif terhadap kegiatan sosial**, misalnya; karena warga tidak menjadi peserta “kecemburuan sosial” akhirnya tidak mau gotong royong, dsb.
- **Penerapan metodologi** tidak diimbangi persiapan yang memadai terutama secara waktu yang sangat terbatas.
- BPS kurang disiplin dalam menggunakan waktu wawancara. Di Pemalang (Banglarangan) Jam 16.00 sudah pulang. BPS kurang disiplin dalam menggunakan waktu wawancara. Di Wonogiri (Kec. Jatisrono) bahkan jam 12.00 sudah bubar.
- **Kriteria PKH cukup efektif** menghambat untuk mendaftar, bahkan yang sangat miskin sekalipun tidak mendaftar karena mengetahui harus memenuhi syarat tersebut untuk mendaftar.
- Di Desa Sendangmoyo Kec Tirtomoyo, ditemukan kasus sentimen peserta diskusi pada seorang calon peserta. Alasannya meskipun orang yang bersangkutan RTSM, tetapi karena berperilaku buruk sebaiknya tidak diakui sebagai warga desa saja, sehingga dalam PKH ini juga tidak perlu dihibau mendaftar.
- Rata-rata ongkos ojek/becak untuk treatment pendaftaran di Kecamatan Ampel Gading antara 5-10 ribu per trips
- Di Banglarangan total pendaftar 257, rata-rata 60-70 per hari. Di Desa Wonogiri Kec Ampelgading, pendaftar 279, rata-rata antara 50-60 per hari.
- Di Jatirejo pendamping memakai daftar hadir dalam pendaftaran. Mereka juga memasang lembar persyaratan yang mencantumkan KTP serta KK sebagai syarat pendaftaran (waktu itu saya langsung jelaskan filosofinya, bahwa itu bukan syarat wajib melainkan bila ada saja). Memang agak repot karena dalam wawancara BPS butuh info ini akan mempercepat proses. Tetapi disini lain ada kepentingan memudahkan RTSM mendaftar.
- Penjaringan form N2 cukup banyak, rata-rata beralasan pasangan bekerja sebagai kuli bangunan di Jakarta

C.2. Lampung

Para pihak yang terlibat ditingkat lapangan dalam studi dengan metode pendaftaran adalah Mitra Samya, Badan Pusat Statistik dan Pendamping PKH. Masing-masing pihak memiliki peran dalam proses ditingkat lapangan. Mitra Samya, perannya adalah: **pertama** melakukan koordinasi dengan Kades/Lurah. **Kedua**, menyelenggarakan pertemuan Seluruh tokoh SLS ditingkat desa/kelurahan untuk membuat klasifikasi tingkat kesejahteraan dan menentukan jadwal hari pendaftaran dan wawancara bagi RTSM. **Ketiga**, melakukan sosialisasi atas hasil-hasil keputusan musyawarah tersebut kepada masyarakat di tiap-tiap SLS ditingkat

desa/kelurahan bersangkutan dan siapa yang berhak boleh mendaftar dan wawancara. Kemudian menyerahkan data tersebut kepada BPS dan Pendamping PKH untuk dijadikan acuan dalam proses pendaftaran dan wawancara terhadap RTSM.



Gambar Salah satu rumah tengah sedang wawancara dengan tim BPS pada metode pendafatara suami istri

Badan Pusat Statistik berperan melakukan wawancara kepada rumah tangga sangat miskin yang datang ketempat wawancara sesuai kriteria yang telah disepakati pada waktu sosialisasi oleh fasilitator Mitra Samya. Sedangkan peran dari pendamping PKH dalam proses ini adalah mempersiapkan dan membantu BPS mengorganisir kegiatan wawancara, diantaranya adalah mempersiapkan tempat wawancara, mengorganisir kegiatan pendaftaran, pemberian nomor antrian,

melakukan wawancara awal peserta yang datang apakah memenuhi kriteria RTSM, mengatur lalu lintas RTSM yang akan diwawancarai oleh BPS, mencatat situasi pendaftaran dan wawancara kedalam form S1 pendafatar dari RTSM, serta mengorganisir jalannya proses wawancara.

Jumlah desa atau kelurahan lokasi studi di Provinsi Lampung sebanyak 68 desa/kelurahan, di Kota Bandar Lampung sebanyak 29 kelurahan dan 39 desa di Kabupaten Lampung Tengah. Berdasarkan metode yang digunakan, lokasi pendaftaran suami istri tingkat dusun sebanyak 10 desa, pendaftaran tingkat desa/kelurahan sebanyak 16 desa/kelurahan, dan pendaftaran tingkat kecamatan sebanyak 8 desa/kelurahan. Sedangkan untuk metode pendaftaran dan wawancara siapa saja lokasi dusun sebanyak 9 desa, lokasi pendaftaran dan wawancara tingkat desa/kelurahan 18 desa/kelurahan dan lokasi pendaftaran dan wawancara tingkat kecamatan sebanyak 7 kelurahan.

Jumlah fasilitator dari Mitra Samya yang bertugas melaksanakan studi metodologi ini sebanyak 7 orang dengan komposisi 4 orang bertugas di Kabupaten Lampung Tengah dan 3 orang yang bertugas di Kota Bandar Lampung. Karena jumlah desa di Lampung Tengah lebih banyak dibanding Bandar Lampung, jadwal pelaksanaan studi dengan metode pendaftaran tidak dilakukan secara bersamaan di 2 kabupaten/kota. Studi di wilayah Kabupaten Lampung Tengah dilaksanakan mulai tanggal 7 Januari 2011 dan berakhir pada tanggal 22 Maret 2011. Sedangkan studi di Kota Bandar Lampung dimulai pada tanggal 17 Januari 2011 dan berakhir tanggal 18 Maret 2011. Daftar lokasi studi targetting dengan metode pendaftaran di provinsi Lampung terlampir.

Untuk metode pendaftaran maka diskusi yang telah diselenggarakan terkait dengan tahapan metode yang utama yaitu, diskusi dengan seluruh SLS dan Sosialisasi ditiap-tiap SLS di masing-masing desa/kelurahan sampling. Jumlah diskusi dan sosialisasi yang dilaksanakan untuk keseluruhan sebanyak 403 kali diskusi, dimana sebanyak 175 kali di selenggarakan di Bandar Lampung dan 228 kali diskusi di Lampung Tengah. Selama menyelenggarakan kegiatann diskusi di tingkat lapangan, maka untuk metode pendaftaran tidak banyak terpengaruh, karena adanya penambahan jumlah SLS per kelurahan atau desa maka penyelenggaraannya tetap konsisten mengikuti jadwal yang telah diberikan tim pusat untuk hari sosialisasinya.

Pelaksanaan metode pendaftaran di provinsi Lampung

Wilayah Diskusi	Kegiatan Diskusi dan Sosialisasi SLS	
	Tokoh SLS	Sosialisasi SLS
Bandar Lampung	29	146
Lampung Tengah	39	189
Total	68	335

Tempat pendaftaran dan wawancara untuk lokasi dusun dan kantor desa dari hasil monitoring lapangan cenderung terjangkau oleh masyarakat. Hal ini disebabkan karena tempat tersebut umumnya tidak jauh dari rumah-rumah RTSM. Faktor jarak ini bila dikaitkan dengan waktu pendaftaran dan wawancara secara kasus perkasus akan mendapatkan informasi yang beragam. Untuk proses pendafataran dan wawancara di Kabupaten Lampung Tengah hampir seratus persen tempat pendaftaran dan wawancara dilaksanakan di dusun dan kantor Desa. Para pendaftar untuk desa di kecamatan pertama yaitu Selagai Lingga, jumlahnya relatif lebih banyak sampai lebih dari 750 orang berdasarkan hasil pemantauan. Hal serupa juga dialami di kecamatan pertama di Teluk Betung Barat Bandar lampung jumlah yang mendaftar sampai kurang lebih 900 orang yang terbesar. Hal ini disebabkan; bahwa kedua kecamatan pertama diatas umumnya para fasilitator masih baru belajar memfasilitasi pertama kali tentang tingkat kesejahteraan / tiga indikator utamanya kurang mendekati yang sebenarnya. Kasus di Bandar Lampung ditemukan warga masyarakat karena ketidak tahuannya bahwa keluruhannya Negeri Oloh Gading sebenarnya terkena metode hybrid perbaikan tokoh, tetapi ada juga sebanyak lebih dari 10 orang ikut mendaftar di kecamatan, tetapi hal ini setelah diberikan pemahaman oleh pendamping PKH akhirnya mereka tidak jadi mendaftarkan diri. Sehingga waktu pendaftaran diperpanjang dua hari. Kedekatan pendaftaran dan wawancara ini juga menjadi penyebab masyarakat yang mendaftar terkadang lebih banyak. Banyaknya masyarakat yang mendaftar ini fakta dilapangan menunjukkan bahwa mereka mendaftarkan diri karena diajak oleh tetangganya seperti yang terjadi di Gunung Haji Kecamatan Pubian dimana salah seorang mendatangi tempat tersebut karena diajak tetangganya, padahal secara ekonomi dia memiliki kios cukup besar. Sementara itu, wilayah perkotaan ternyata jarak lokasi pendaftaran dan wawancara menjadi persoalan, terutama untuk tempat-tempat pendaftaran yang tempatnya pusatkan dikecamatan. Masyarakat RTSM yang mendaftar umumnya lebih sedikit dibandingkan dengan yang mendaftar di kantor.

Jumlah pendaftar yang lebih sedikit ini fakta dilapangan alasannya adalah RTMS yang



Gbr 8. RTSM yang hadir dalam pendaftaran dan wawancara

benar-benar miskin untuk datang ke kantor kecamatan umumnya tidak punya biaya, untuk lokasi kelurahan yang terjauh dari kantor kecamatan seperti di kota madya Bandar Lampung yaitu dari kelurahan Serengsem Kecamatan Panjang, Kelurahan Sukadana Ham kecamatan Tanjung Karang Barat dan kelurahan Batu Putuk kecamatan Teluk Betung Utara untuk bisa sampai di kantor kecamatan mereka harus mengeluarkan biaya transport antara Rp 30.000-Rp 50.000,- oleh karena itu, mereka cenderung bahwa uang tersebut mereka digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari keluarganya. Hal lain ada kecenderungan bahwa masyarakat yang mendaftar ini bila dilihat dari tampilan sewaktu datang, mereka terkesan bukan RTSM yang sebenarnya, karena ketika saat mendaftar dan wawancara cenderung lebih glamor pakaian, menggunakan perhiasan emas dan sepeda motor, bahkan ada yang pakai mobil seperti kasus di Kabupaten Lampung Tengah disalah satu desa terakhir lokasi studi uji coba.

Sementara itu, pemerintah kecamatan melalui Camat dimasing-masing lokasi dari baik di Bandar Lampung maupun Lampung Tengah rata-rata memberikan dukungan yang sangat baik. Untuk Kasus di Bandar Lampung misalnya, para Camat sebelum kegiatan ujicoba dilaksanakan di wilayahnya biasanya dihubungi langsung oleh Advisor dan koordinator BPS tingkat Kota melalui tatap muka langsung di kantor kecamatan. Camat, Supervisor dan Koordinator BPS umumnya melakukan koordinasi awal dengan menjelaskan maksud dan tujuan program serta tahapan-tahapan ujicoba metodologi. Pada koordinasi pertama ini umumnya para Camat meminta kepada advisor dan koordinator BPS untuk dilakukan sosialisasi kepada seluruh Lurah. Oleh karena itu, koordinasi dan sosialisasi dengan pihak kecamatan umumnya dilakukan rata-rata 2 kali pertemuan, pertama dengan Camat dan atau sekcab, kemudian dengan Camat, sekcab dan seluruh Lurah di wilayah kecamatan bersangkutan guna memberikan pemahaman tentang ujicoba metodologi tersebut. Selama proses diskusi, maka umumnya mereka memberikan informasi tentang permasalahan yang dihadapi kaitannya dengan BLT, kegagalan ataupun kecemasan bila nantinya ada protes-protes warga, menanyakan tentang pembiayaan pertemuan ketika di kantor kelurahan/desa sampai pertemuan masyarakat. bahkan ketika kegiatan ujicoba berlangsung para Lurah atau kades ini tidak segan-segan juga ikut turun memonitor tentang pelaksanaannya sekali tempo begitu juga dengan para Camat.

Dukungan yang biasa diberikan oleh para Camat ini adalah menyediakan tempat pendaftaran dan wawancara. Menyurati para Lurah atau Kades tentang rencana studi yang akan diselenggarakan di kelurahan atau desa masing-masing kepada bapak Lurah atau Kades. Disamping itu, maka dukungan Pak Camat pada kegiatan ini yang ditemui ditingkat lapangan adalah meminta kepada para fasilitator apabila ada Pak Kades atau Lurah yang menghambat terjadinya proses pertemuan mohon untuk diinformasikan ke mereka. Hal ini semata-mata untuk menyukseskan kegiatan ini ditingkat lapangan menurut Pak Camat.

Ditingkat lapangan ketika dukungan Camat kurang maksimal terhadap penyelenggaraan kegiatan ini di desa/kelurahan biasanya, ketika ujicoba ini dilakukan banyak menghadapi kendala. Hal ini dialami tidak hanya di Bandar Lampung maupun di Lampung Tengah. Kasus yang terjadi misalnya ketika kegiatan ujicoba ini memasuki wilayah kecamatan kemiling, dimana Pak Camat karena kesibukannya sehingga kurang menginformasikan rencana kegiatan ini kepada para Lurah dibawahnya, maka banyak terjadi miskomunikasi seperti yang dialami di fasilitator pendaftaran di kelurahan Sumber Agung yang kesulitan untuk menentukan jadwal pertemuan seluruh tokoh SLS. Hal yang sama juga terjadi di Kelurahan Gedong Air dimana fasilitator juga mengalami kesulitan untuk menentukan jadwal pertemuan seluruh SLS karena bapak Lurahnya yang memiliki kesibukan yang padat. Akibat dari keterlambatan ini, maka jadwal menjadi mundur penyelenggaraannya.

Dukungan para Lurah dan Kades yang telah terjadi selama proses berlangsung di lapangan baik di Bandar Lampung maupun di Lampung Tengah adalah berupa menyediakan tempat

pertemuan baik untuk pertemuan SLS seluruh tokoh maupun tempat pendaftaran dan wawancara. Mengundang para tokoh formal dan informal untuk hadir dalam pertemuan seluruh tokoh SLS di desa/kelurahan masing-masing. Para Lurah dan Kades ini juga memberikan dukungan dengan melakukan monitoring kelapangan ketika proses berlangsung seperti yang dilakukan oleh Lurah di kelurahan Gotong Royong kecamatan Tanjung Karang Pusat, dan juga bapak Kades di desa Sidorejo Kecamatan Selagai Lingga, dan desa Sinar Banten dan Desa Goras Jaya Kecamatan Bekri Lampung Tengah.

Dukungan para Kadus/lingkungan dan RT, Tokoh Agama, selama ini berupa, penyediaan tempat musyawarah, menyediakan tarup seperti salah satu tokoh di desa astomulya, Punggur, Kadus Desa payung makmur Kecamatan Pubian, desa Sendang Agung Kecamatan Sedang Agung Lampung Tengah, juga snack dan minuman bahkan umumnya memfasilitasi tempat menginap bagi fasilitator maupun advisor dan asisten supervisor ketika melakukan monitoring khususnya untuk Kades, tokoh se Kabupaten Lampung Tengah.

Sementara itu, pihak BPS sebagai pelaku inti juga berusaha menyukseskan setiap kegiatan pendaftaran dan wawancara secara bertanggung jawab sampai kegiatan disuatu tempat tersebut para pendaftar bisa seluruhnya diselesaikan wawancaranya. Tidak jarang pulan kasus di Bandar Lampung pihak BPS juga terlibat aktif melakukan sosialisasi kepada para camat, pihak lain bersama supervisor setiap kegiatan berlangsung. Bahkan tidak jarang dari BPS ketika pihak Advisor dari Mitra Samya (Supervisor) tidak bisa melakukan koordinasi dengan pihak kecamatan maupun lurah mereka melakukan koordinasi pendahuluan bersama tim fasilitator yang akan bertugas dilokasi yang baru tersebut. Dan sering kali pihak BPS Bandar Lampung turun langsung menengahi permasalahan miskomunikasi antara pihak pendamping PKH, Fasilitator Mitra Samya dengan pihak aparat kecamatan maupun Kelurahan.

Pihak pendamping PKH di provinsi Lampung umumnya juga memberikan kontribusi yang sangat baik sekali terhadap pelaksanaan kegiatan ujicoba metodologi ditingkat lapangan. Peran mereka yang sangat luar biasanya yaitu membantu memfasilitasi setiap kegiatan pendaftaran dan wawancara yang dilakukan oleh pihak BPS. Peran yang dijalankan selama proses studi yaitu, mengatur lay out tempat pendaftaran dan wawancara, melakukan pendaftaran dengan menerbitkan nomor antrian, mengatur lalu lintas orang yang akan wawancara sesuai kartu antrian, mengisi form S1 sebagai informasi kegiatan pendaftaran dan wawancara di setiap tempat pendaftaran dan wawancara, sebagai tim penyeleksi awal kepada RTSM yang datang kelokasi pendaftaran mulai jam 08.00-17.00 setiap hari. Bahkan mereka terkadang tidak jarang harus bekerja diatas jam 17.00 karena situasi faktor tanggung jawab ketika pendaftar yang membludak.

Kenyamanan fasilitasi dari para pihak yang terlibat dalam studi seperti ; fasilitator Mitra Samya, BPS, dan Pendamping PKH memberikan respon yang beragam. Dari hasil diskusi dengan pihak BPS dan Fasilitator Mitra Samya yang bertugas memfasilitasi pendaftaran, mereka secara umum mengatakan lebih suka memfasilitasi metode pendaftaran.

Kegiatan sosialisasi yang dilakukan oleh fasilitator Mitra Samya, dalam setiap kegiatan berlangsung selalu dihadiri oleh masyarakat yang jumlah cukup banyak. Masyarakat yang datang umumnya sangat antusias mengiuti dan mendengarkan informasi yang disampaikan. Dialog-dialog yang terjadi ditingkat lapangan misalnya saja pertanyaan seputar :

- a. *Kenapa harus orang sangat miskin dan memiliki anak balita dan usia sekolah?*
- b. *Apakah jumlah bantuan itu untuk anak sekolah dalam satu keluarga ada 5 orang mereka dapat semua?*

- c. Kenapa pendaftarannya ditempatkan ditingkat kecamatan?
- d. Kalau program ini untuk membantu masyarakat maka sebaiknya tidak perlu ada syarat-syarat yang sulit?
- e. Kalau datang wawancara membawa syarat-syarat apa saja?

Pada tahapan ini umumnya masyarakat bisa memahami materi sosialisasi tersebut, karena disamping fasilitator melakukannya melalui sosialisasi juga menggunakan media tambahan untuk membuat masyarakat paham atas materi tersebut misalnya untuk kasus di provinsi Lampung menggunakan tambahan media leaflet, lembar klasifikasi kesejahteraan bagi RTSM yang ditempat di tempat tempat umum, memberikan konsultasi tambahan via SMS maupun handphone.

Metode pendaftaran merupakan metode yang cukup kompleks permasalahannya ketika diujicobakan ditingkat lapangan baik di Bandar Lampung maupun di Lampung Tengah. Hampir tiap kegiatan pendaftaran dan wawancara selalu dipenuhi oleh masyarakat yang datang untuk mengikuti proses tersebut. Pertanyaannya adalah apakah orang-orang yang datang ke tempat pendaftaran dan wawancara tersebut atas inisiatif sendiri untuk atau sebabliknya. Untuk keperluan tersebut, maka Supervisor dan Asisten supervisor mencoba untuk turun lapangan pada kelurahan dan desa yang diambil secara random untuk mendapatkan informasi apakah mereka mengikuti tahapan proses pendaftaran dan wawancara tersebut.

Untuk keperluan tersebut diatas, maka desa yang terpilih untuk dijadikan sampling random adalah kelurahan Batu Putuk, Kelurahan Sukabumi Indah, Kelurahan Surabaya di Bandar Lampung ,Desa Gunung Sugih dan Desa Terbanggi Mulya di lampung Tengah. Jumlah orang yang didatangi sebanyak 28 orang didua kabupaten/ kota tersebut. Hasil dari pencarian fakta lapangan ini dapat dilihat pada tabel berikut;

Hasil Pencarian Fakta Pengakuan Masyarakat Pasca Wawancara dan Pendaftaran di Desa/Kelurahan Di provinsi Lampung

Pertanyaan Lokasi	Bandar Lampung	Lampung Tengah	Jumlah
Pekerjaan			
a. Buruh	a.8	a.16	a.24
b. Tani	b.0	b. 2	b. 2
c. Penjaga Malam	c.1	c. 0	c. 1
d. Pegawai Negeri	d.1	d. 0	d. 1
Sosialisasi			
a. Hadir	a.6	a. 10	a.16
b. Tidak	b.4	b. 8	b.12
Mendaftar & Wawancara			
a.ya	a.5	a.10	a.15
b. tidak	b.5	b. 8	b. 13
Kondisi rumah			

a. Geribik	a.5	a. 14	a.19
b. Semi Permanen	b.1	b. 4	b. 5
c. Permanen	c.4	c. 0	c. 4
Status Rumah			
a. Milik Sendiri/warisan	a.8	a. 12	a.20
b. Sewa	b.1	b. 0	b. 1
c. Mumpang	c.1	c. 6	c. 7

Dari data diatas, ditemukan bahwa mayoritas para pendaftar yang mengikuti wawancara adalah dengan status pekerjaan sebagai buruh (85,71%) dan sisanya adalah sebagai penjaga malam dan pengawai negeri sipil. Para buruh ini menurut pengakuannya ketika dikunjungi dirumahnya menyatakan bahwa mereka bekerja rata-rata sebagai buruh lepas, seperti; buruh gudang, buruh kebun, buruh sekop pasir, buruh serabutan, buruh tani.

Penghasilan para buruh ini tidak menentu karena tergantung ada dan tidaknya pekerjaan diwilayahnya tersebut. Untuk buruh gudang, misalnya mereka sangat tergantung dengan situasi bongkar muat barang ditingkat pergudangan. Sedangkan untuk buruh sekop pasir sangat tergantung pada tersediaanya aktivitas bongkar muat pasir disungai. Apabila aktivitas muat pasir dimusim hujan biasanya sepi, karena para penambang pasir tidak berani turun ke sungai terutama waktu banjir besar. Untuk buruh serabutan, mereka umumnya bekerja apa saja yang bisa menghasilkan uang. Apabila waktu pertanian, maka sebagai tani, musim bangunan mereka bekerja sebagai kuli bangunan. Rata-rata pendapatan mereka antara Rp 20.000.- Rp 30.000.-

Kondisi fisik rumah mereka rata-rata adalah geribik (rumah dengan dinding dari kulit bambu yang dianyam) 67,86% yang bukan rumah geribik 32,14% berupa rumah semi permanen dan permanen. Sementara itu status ada rumah mereka, sebanyak 71,43% adalah milik sendiri ataupun warisan dari orang tuanya atau menempati rumah keluarga yang ditempati bersama karena belum dibagi warisnya oleh orang tuanya. Sedangkan sebanyak 28,57% memiliki rumah dengan status numpang dan sewa.

Masyarakat yang disurvei ini ternyata pada saat dilakukan sosialisasi ditingkat SLS masing-masing ada yang hadir 57.14% dan sisanya 42,86% tidak hadir. Ketidakhadiran mereka dalam sosialisasi ditingkat SLS masing alasannya karena waktu sosialisasi sedang bekerja di kebun, atau ada keperluan lain bahkan tidak tahu sama sekali karena tidak mendapatkan informasi dari pejabat setempat. Sementara yang hadir dalam sosialisasi, mereka mendapatkan informasi ini dari tokoh setempat seperti pak RT, atau diberitahu oleh pendamping PKH, Bidan desa atau kades.

Hal yang menarik apabila kehadiran masyarakat dikaitkan dengan kegiatan sosialisasi dengan pendaftaran dan wawancara maka diperoleh angka 53,57% menyatakan ikut mendaftarkan diri dan wawancara, sedangkan sisanya yaitu 46,43 % menyatakan tidak ikut mendaftarkan diri dan wawancara. Bagi masyarakat yang mengikuti pendaftaran dan wawancara ini, disamping mereka mendapatkan pemahaman waktu disosialisasi, tetapi ada juga ditemui ditingkat lapangan bahwa mereka yang tidak hadir dalam sosialisasi juga mendaftar karena disuruh oleh pak RT-nya. Menurut pengakuan masyarakat, bahwa yang hadir pada saat pendaftaran dan wawancara ini umumnya telah ditentukan oleh pak RT yang termasuk sangat miskin yang

memenuhi sarat PKH dilingkungannya seperti penuturan ibu Rita/Apriadi dari kelurahan Sukabumi Indah Bandar Lampung.

Sementara itu, bagi masyarakat sangat miskin yang tidak mendaftarkan diri walaupun pada saat sosialisasi hadir, disebabkan berapa faktor seperti; waktu pendaftaran suaminya tidak bisa pulang dan jam pendaftarannya sangat mepet untuk pendaftaran dusun yang sampai jam 12.00 waktu setempat, anak-anak dikeluarganya sudah sekolah SMA, tidak punya kartu identitas, seperti KTP ataupun KK karena untuk mengurusnya perlu biaya di kelurahan ataupun kecamatan.

Keluarga Pasangan Kasman/Usiah



Kelurga pasangan Bapak Kasman/ Usiah adalah keluarga yang tinggal di RT 07 Kelurahan Batu Putu Kecamatan Teluk Betung Utara. Keluarga ini tinggal di rumah berukuran 4x6 m dengan dinding geribik lantai semen, atap genteng lokal, terdiri dari satu ruang tamu dan satu ruang tidur, terlihat ada TV 14” warna, tempat duduk dari kayu dan tidak terlihat perabotan lain yang tampak dirumahnya. Tanah tempat tinggalnya ini merupakan pemberian tanah orang tuannya. Pasangan ini memiliki anak balita umur 3 tahun. Bapak Kasman bekerja sebagai buruh dikebun tetangganya setiap

harinya. Memang tempat tinggal pasangan ini juga dilingkungan kebun kakao.

Pasangan keluarga ini tidak hadir pada saat sosialisasi, tetapi mereka mendaftarkan diri bersama suaminya di kantor kecamatan Teluk Betung Utara dengan cara meminjam sepeda motor ke tengga dan mengganti uang bensin sebesar Rp 15.000,- Mereka mendaftar karena disuruh oleh Pak RT dan membaca selebaran PKH yang diberikan oleh pak RT tersebut. Menurut pengakuannya mereka mendaftar karena kondisi rumah tangganya memenuhi sarat PKH seperti dalam selebaran tersebut. Disamping itu menurut pengakuannya kami mendaftar karena disamping disuruh oleh Pak RT, juga termotivasi oleh oleh orang yang lebih mampu dari dirinya ternyata juga ikut mendaftarkan diri, padahal menurut pengakuannya tetangganya tersebut memiliki sepeda motor, dan kios rumahnya juga permanen.

Pengakuannya lainnya adalah mereka mendaftar juga coba-coba kalo mendapatkan bantuan ya syukur tetapi kalo tidak dapat yang tidak apa-apa. Tetapi kalo tetangga yang lebih mampu dari mereka mendapat bantuan yang ikut mendaftar diatas, maka tidak setuju. Oleh karena itu, mereka berharap akan bantuan langsung tunai untuk pendidikan ini benar-benar sesuai dengan sarat program, dan pelaksanaan dilapangan perlu diawasi dengan ketat oleh para pamong.

Keluarga Wasiah

Ibu Wasiah adalah salah satu rumah tangga miskin yang tinggal di RT 07 Kelurahan Batu Putu Kecamatan Teluk Betung Utara. Ibu ini seorang janda dan tinggal bersama dua orang anak laki-lakinya. Pekerjaan mereka adalah sebagai buruh serabutan, anaknya samino bekerja sebagai buruh bangunan dan baru lulus STM setahun lalu. Keluarga ini mendiami rumah 4 x 6 m dengan lantai tanah, dinding geribuk, atap

genteng lokal.

Keluarga ini mengetahui informasi PKH ketika ada pertemuan di sekitarnya, bahwa program ini diperuntukkan bagi rumah tangga sangat miskin yang memiliki anak balita, usia sekolah dasar, dan ibu hamil/nifas. Keluarga ini tidak ikut mendaftarkan diri karena di rumah mereka sudah tidak ada lagi sarat-sarat yang seperti di PKH menurut penuturan Samino.

Menurutnya program ini bagus, karena tujuannya jelas tidak seperti BLT yang tidak terkontrol penggunaannya. Oleh karena itu, menurutnya dalam pengawasannya nanti harus ketat. Bila ada yang mendapat bantuan tetapi tidak sesuai maka harus dicabut dan dialihkan kepada orang yang sangat membutuhkan.



C.3. Sumatera Selatan

Total jumlah kelurahan/desa yang menggunakan metode pendaftaran adalah 66 yang tersebar di 26 kecamatan Kota Palembang dan Kabupaten Ogan Komering Ilir. Kelurahan/desa yang menggunakan metode pendaftaran siapa saja di Sumatera Selatan adalah 33 kelurahan desa dan 33 kelurahan/desa yang menggunakan metode pendaftaran suami isteri.

Di Kota Palembang, metode pendaftaran siapa saja dilaksanakan di 8 kelurahan, sedangkan metode pendaftaran suami isteri sebanyak 8 kelurahan. Di Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI), metode pendaftaran siapa saja dilaksanakan di 25 desa, sedangkan metode pendaftaran oleh suami isteri di 25 desa. Daftar lokasi studi pendaftaran di Kota Palembang dan Kabupaten Ogan Komering Ilir terlampir.

Dukungan dalam pelaksanaan metode pendaftaran sepenuhnya diberikan oleh pihak BPS kota Palembang. Hal ini terlihat dari keaktifan Bapak Fahurrozi, koordinator tim BPS sejak tahapan sosialisasi sampai dengan pendaftaran/wawancara. Kekompakan tim dan etos kerja yang baik selalu di tunjukkan oleh tim pewawancara meskipun terkadang tim BPS harus bekerja sampai malam hari. Hal ini juga tidak terlepas dari dukungan yang diberikan oleh Kepala BPS Kota Palembang, yang selalu memonitoring proses wawancara dilapangan. Koordinasi dengan tim selalu dilakukan pada saat di lapangan maupun di kantor. Namun hal yang berbeda di tunjukkan oleh pihak Dinsos, UPKH jarang melakukan pemantauan untuk melihat proses sosialisasi di masyarakat

Umumnya aparat Desa/Lurah dan para staf sangat mendukung pelaksanaan metode pendaftaran di lapangan. Meskipun di beberapa lokasi awalnya banyak Kades/Lurah yang mempersoalkan tidak adanya support logistik, tetapi akhirnya semua bisa diajak kompromi. Hal ini karena kesempatan memperoleh bantuan bagi masyarakat miskin di wilayahnya dipandang jauh lebih penting. Sementara dukungan pihak kecamatan masih sebatas ijin kegiatan, dan mereka jarang ke lokasi. Setelah proses koordinasi, para Kades/Lurah turut mensosialisasikan rencana kegiatan kepada Kadus/Kepala Lingkungan dan Ketua RT/RW. Dalam proses pertemuan tokoh, mereka selalu memberikan pengantar dan himbauan pada tokoh untuk mendukung pelaksanaan kegiatan. Namun masih ada beberapa Lurah/Kepala

Desa yang kurang respon dengan kegiatan studi, disebabkan masih kurangnya informasi yang diberikan oleh pihak PKH di daerah.

Fasilitator mampu mengatur dengan baik pertemuan untuk sosialisasi. Jika jumlah KRT yang hadir lebih dari 100, pertemuan akan dilakukan tersendiri. Tetapi jika jumlah KRT yang hadir di bawah 100, pertemuan akan digabung dengan peserta dari RT lainnya.

Keluhan yang sering disampaikan oleh masyarakat adalah, lokasi pendaftaran yang terlalu jauh dari tempat tinggal mereka. Terlebih jika suami istri harus datang bersama, sehingga banyak warga terutama di perkotaan mensiasatinya dengan meminta keterangan Ketua RT (Form N2). Apalagi menurut mereka, waktu siang hari adalah waktu untuk bekerja. Pak Kemas, warga Kelurahan 17 Ilir mengatakan *“Kalo memang ikhlas membantu masyarakat kenapa harus dipersulit oleh pemerintah?”*. Beliau menganggap bahwa cara ini memang bagus namun warga miskin tidak harus diminta datang ke kantor lurah atau kantor camat untuk mendaftar. *“Kan butuh biaya juga”* tambahnya.

Berbagai dinamika yang terjadi pada saat pendaftaran/wawancara memberikan pembelajaran menarik bagi pelaksanaan kedepan. Proses pendaftaran dan wawancara di Kota Palembang dan Kabupaten Ogan Komering Ilir secara umum berjalan dengan baik, sesuai dengan hasil sosialisasi di masyarakat. Adanya pembagian waktu pendaftaran membantu warga untuk tidak menunggu/antri terlalu lama. Di beberapa desa pendaftar yang hadir sangat banyak dibandingkan dengan jumlah pewawancara, sehingga seringkali proses wawancara dilakukan sampai dengan tengah malam.



Gambar Proses Wawancara

Cerita menarik terjadi di desa Pademaran 1 Kabupaten Ogan Komering Ilir. Proses wawancara dimulai dari jam 08.00, situasi wawancara tertib karena warga yang hadir hanya sedikit. Nomor antrian yang terbagi hari sebelumnya dilanjutkan untuk wawancara. Ternyata dari 137 nomor yang terbagi untuk dusun II, hanya ± 60an yang ikut wawancara, sehingga pukul 11.00 dusun II sudah selesai dan dilanjutkan ke dusun III. Warga Dusun III cukup tertib dan aman, jumlah antrean warga tidak terlalu

banyak. Pukul 15.10 seorang ibu beserta tiga anaknya yang masih kecil datang dan meminta nomor antrian. Sementara nomor tidak mungkin dibuat lagi karena waktu sudah terlalu sore. Atas kesepakatan warga yang hadir, warga meminta kepada pendamping PKH untuk mendahulukan si ibu ini karena menurut mereka si ibu sangat layak untuk mendaftar dan menjadi peserta PKH.

Perbedaan pendapat antarpihak yang terlibat juga bisa terjadi di lapangan, seperti di kelurahan 2 Ulu Kecamatan seberang Ulu I. Pihak BPS menginginkan bahwa kegiatan wawancara selesai sampai dengan jam 15.00, dan meminta Pendamping PKH untuk membatasi jumlah pendaftar yang akan diwawancara dari 4 SLS. Pendamping memperkirakan, sampai jam 15.00 jumlah warga yang dapat diwawancara ± 100 orang, namun menurut pihak BPS jumlah tersebut terlalu tinggi dan terjadi debat antara pendamping dan pewawancara. Situasi ini bisa

dikendalikan setelah pertemuan yang di fasilitasi oleh Lurah setempat. Situasi ini memberi pelajaran bahwa dibutuhkan saling memahami dan pengertian antar pihak yang berkolaborasi.

Wawancara secara manual menjadi pilihan ketika jumlah pendaftar cukup banyak, seperti di Desa Pademaran I Kecamatan Pademaran Kabupaten Ogan Komering Ilir. Wawancara sudah berjalan 1 hari, jumlah pendaftar hari I adalah sebanyak 187 warga untuk dusun TJ. Remas dan jumlah warga yang diwawancarai oleh 3 orang sebanyak 29 orang. Karena waktu sudah hampir jam 18.00 maka proses wawancara di hentikan dan akan dilanjutkan hari ke 2. Namun pada hari ke 2 ternyata yang diwawancara bukan lanjutan antrian hari pertama untuk dusun TJ. Remas, namun dilanjutkan dengan wawancara dusun I Ribonebeng dan dimulai dari nomor antrian 30. Alasannya, jadwal wawancara dusun TJ. Remas sudah lewat. Agar masyarakat yang sudah mengantri hari sebelumnya tidak kecewa, Supervisor Mitra samya, Asisten Koordinator BPS, Kadus dan Kades menyepakati untuk melanjutkan wawancara bagi warga dusun RT TJ. Rames (nomor antrian 30 – 187) dengan menggunakan wawancara manual yang akan dilakukan oleh Mitra BPS. Hal yang sama juga terjadi pada saat wawancara warga dusun I Ribonebeng.

Berbeda dengan metode pendaftaran biasanya jarak akan berpengaruh terhadap jumlah pendaftar. Jika jaraknya jauh dengan tempat pendaftarana maka jumlah masyarakat yang melakukan pendaftaran dan wawancara lebih sedikit bila dibandingkan dengan pendaftaran dan wawancara di dusun atau RW. Sebagian besar lokasi dengan metode pendaftaran di RW/Dusun atau Kantor lurah waktunya molor karena biasanya semua RTSM atau Non RTSM akan mendaftar bahkan tim BPS melakukan wawancara sampai dengan tengah malam. Pada saat pendaftaran terkadang masyarakat mengeluarkan biaya untuk transport agar dapat mendaftar, hal ini dianggap berat oleh sebagian besar masyarakat.

Peran masing-masing instansi masih terkesan berjalan sendiri-sendiri, BPS hanya fokus pada proses wawancara sedangkan pendamping relatif hanya membantu pada saat wawancara saja. Hal ini disebabkan karena kurangnya koordinasi antar instansi mulai dari daerah sampai dengan pusat.

Tingkat kehadiran masyarakat pada saat pertemuan cukup baik, perbandingan antara laki dan perempuan pun berimbang. Jika dilakukan pertemuan malam maka yang banyak hadir adalah laki-laki namun jika dilakukan pertemuan siang hari maka yang lebih banyak menghadiri pertemuan adalah kaum ibu. Hal ini disebabkan karena laki-laki lebih banyak bekerja pada siang hari. Di Kota Palembang dukungan yang diberikan oleh sebagian besar pemerintah lokal cukup baik. Hal ini dapat dilihat dari fasilitas dan logistik yang disediakan oleh masing-masing RT dan RW. Namun hal berbeda ditunjukkan oleh aparat desa yang terdapat di Kabupaten Ogan Komering Ilir. Dukungan yang diberikan hanya 50% , bahkan terkadang aparat desa meminta fasilitator untuk mempersingkat proses dan tahapan study.

D. Debriefing

Yang dimaksud *debriefing* adalah diskusi bersama antar Tim Mitra Samya setelah semua tugas lapangan selesai. Proses debriefing bertujuan mendiskusikan dan sekaligus menyarikan hal penting terkait beberapa aspek seperti; kenyamanan fasilitasi, data/quota pusat, alokasi waktu, partisipasi dan tingkat kehadiran peserta, tempat, dukungan pemerintah setempat, peran pihak lain, pemahaman para pihak, pembelajaran dan input/ saran serta rekomendasi terhadap pelaksanaan studi

D.1. Jawa Tengah



Gambar 1. Fasilitator Menuliskan Pembelajaran Dalam Proses Briefing Tim Hybrid di Solo

Untuk proses debriefing tim fasilitator di Wonogiri sempat mengalami berbagai kendala dan tarik ulur. Masalahnya lebih karena rencana pelaksanaannya akan dilakukan antara tanggal 20-26 Maret 2011, sementara pada waktu itu tugas tim fasilitator di lapangan belum selesai. Disamping itu usulan tim

fasilitator untuk melaksanakan proses debriefing di tingkat provinsi juga tidak bisa dikabulkan. Akhirnya bisa disepakati proses debriefing untuk tim Wonogiri dilakukan dalam 2 tahap, yaitu pertama Tim Pendaftaran tanggal 21 Maret 2011, dan kedua Tim Hybrid pada tanggal 25 Maret 2011. Tempat debriefing juga disepakati, yaitu di Kota Solo.

Secara umum proses debriefing di Jawa Tengah berjalan lancar, diikuti seluruh fasilitator (17 orang) sebagai peserta sekaligus narasumber. Proses fasilitasi dilakukan supervisor secara bergantian per metode di setiap kabupaten. Rata-rata waktu proses debriefing per metode sekitar sehari. Umumnya proses dimulai pukul 8.00 (pagi) dan baru selesai pukul 15.00 (sore). Jadwal debriefing tim fasilitator di Jawa Tengah dapat dilihat dalam tabel berikut ini.

Tabel. Jadwal Pelaksanaan Debriefing Tim Fasilitator Jawa Tengah

FASILITATOR	WAKTU	PESERTA	TEMPAT
Metode Pendaftaran Pemalang	19 Maret 2011 (09.00-20.00 WIB)	Ruditho, M.Teguh Ekavianto, Harris Mahendra	Posko Tim Pendaftaran di Kecamatan Ampel Gading
Metode Pendaftaran Wonogiri	21 Maret 2011 (10.00- 19.30 WIB)	Anton Nugroho, Mardlia Ariyanti, Sidik Wisudianto	Hotel Arini Jl Slamet Riyadi Solo
Metode Hybrid Wonogiri	25 Maret 2011 (09.00- 16.00 WIB)	Agus Suryadi, Kusmanto, Zulaikhah, Nur Qiswaty	Hotel Arini Jl Slamet Riyadi Solo
Metode Hybrid Pemalang	27 Maret 2011 (09.00- 15.30 WIB)	Akhmad Hardi, Catur Sigit Prasetyo, Jarwanto, Mitradi Dwi Wibowo, Edi Gunawan, Wida Sulistiani, Irma Yunita	Lesehan Sederhana Taman Wisata Pantai Widuri Pemalang

Sumber: Catatan Supervisor

Hasil Debriefing Fasilitator Jawa Tengah terlampir.

D.2. Lampung



Gambar. Presentasi hasil diskusi kelompok BPS dan Pendamping PKH pada Debriefing Fasilitator Mitra Samya

Kegiatan debriefing fasilitator provinsi Lampung dilaksanakan pada tanggal 31 Maret 2011 di Sekretariat Bersama Pedagang Kaki Lima Kota Bandar Lampung. Peserta yang diundang dalam pertemuan terdiri dari pihak-pihak yang langsung melakukan kegiatan ini ditingkat lapangan jumlahnya sebanyak 35 orang yang terdiri dari 19 orang fasilitator Lapangan

Mitra Samya, 5 orang wakil Badan Pusat Statistik Kota Bandar Lampung dan 8 orang wakil dari Pendamping PKH Dinas Sosial Kota Bandar Lampung dan 4 orang dari Mitra Samya.

Agenda yang dibahas meliputi 2 topik besar, yaitu; pertama terkait dengan materi inti debriefing itu sendiri sebagaimana tujuan diatas, dan yang kedua adalah melihat kembali data-data yang tertulis di format hasil studi hybrid dan pendafaran oleh masing-masing untuk mengecek kelengkapan datanya disetiap pertanyaan ataupun isiannya sudah benar atau belum, sudah lengkap atau belum. Oleh karena itu, sequen waktu yang dibutuhkan adalah 0,5 hari untuk membahas dan berdiskusi dan presentasi tentang materi sebagaimana pertanyaan-pertanyaan yang dipandu dan dijelaskan oleh fasilitator debriefing sebelumnya. Sedangkan 0,5 hari berikutnya adalah untuk mengoreksi hasil-hasil data isian yang dikumpulkan oleh fasilitator lapangan kepada supervisor atau asisten supervisor. Mengingat bahwa waktu yang dibutuhkan ini sangat terbatas, maka kegiatan untuk melakukan check dan recheck atas isian format ini waktunya diperpanjang hingga tanggal 3 April 2011. Fasilitator melakukan check dan recheck serta melengkapi data di rumah masing-masing terhadap data yang telah diperiksa oleh supervisor maupun asisten supervisor sebelumnya. Kemudian pada tanggal 3 April 2011 fasilitator diminta berkumpul dan memperbaikinya bersama-sama kembali bila diperlukan. Oleh karena itu, data yang diserahkan kepada tim entry data dari pusat ini nantinya sudah dipandang lengkap dan tidak menimbulkan pertanyaan-pertanyaan lagi dari tim entry data.

Dalam proses fasilitasi, agar mempermudah memetakan informasi yang diperoleh, maka peserta debriefing dibagi menjadi 3 kelompok besar yaitu: kelompok fasilitator Hybrid, kelompok fasilitator pendafataran dan kelompok Pendamping PKH dan BPS. Masing-masing kelompok ini diminta untuk mendiskusikan beberapa pertanyaan kunci yang telah dipersiapkan.

Hasil Debriefing Propinsi Lampung terlampir.

D.3. Sumatera Selatan

Kegiatan debriefing dilaksanakan selama 1 hari dengan peserta sebanyak 13 orang fasilitator gabungan antara fasilitator Kota Palembang dengan Kabupaten Ogan Komering Ilir. Kegiatan ini di fasilitasi oleh supervisor dan asisten supervisor. Beberapa materi yang dibahas selama melakukan review refleksi terkait dengan **2 metode yaitu Hybrid dan Pendaftaran, tingkat pemahaman masyarakat tentang PKH, kolaborasi dengan aparat pemerintah, ketersediaan data dilapangan.**

Alur proses dan jadwal pelaksanaan kegiatan debriefing Sumatera Selatan adalah sebagai berikut;



Pendokumentasian pengalaman selama pelaksanaan study; masing-masing fasilitator diharapkan membuat tulisan terkait dengan pengalaman-pengalaman selama melakukan proses di lapangan. Tulisan tersebut bentuknya bebas, tema ditentukan oleh masing-masing fasilitator sesuai dengan temuan di lapangan.

Review refleksi pelaksanaan study; beberapa pertanyaan kunci telah dikembangkan oleh tim. Pertanyaan tersebut terkait dengan semua aspek dalam pelaksanaan study dilapangan.

Review refleksi tim di bagi menjadi 2 kelompok yaitu kelompok hybrid dan kelompok pendaftaran. Masing-masing fasilitator dari ke 2 kelompok tersebut diminta untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan kunci yang telah disiapkan oleh supervisor dan asisten supervisor.

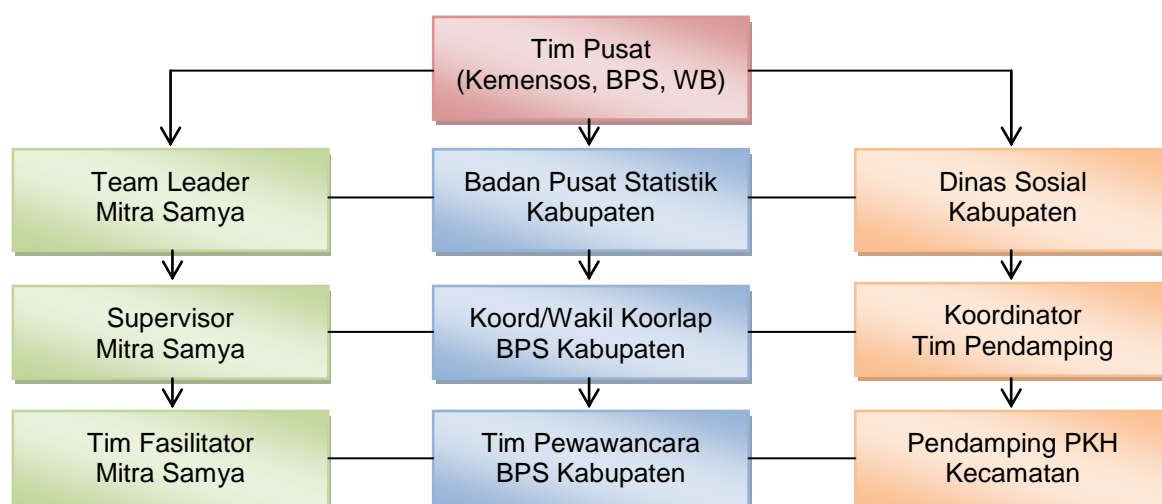
Hasil debriefing fasilitator Sumatera Selatan terlampir.

IV. ANALISIS

A. Pelaksanaan Studi

Proses studi targeting dalam rangka seleksi calon peserta PKH di 6 Kabupaten/Kota telah dilaksanakan. Secara umum implementasi metode pendaftaran dilaksanakan secara kolaboratif oleh Tim Mitra Samya, BPS dan Pendamping PKH. Sementara metode hybrid dilaksanakan oleh Mitra Samya, dan metode PMT dilaksanakan oleh BPS. Selain itu juga terdapat tim pusat yang secara intensif memberikan advice melalui supervisor dan supervisi lapangan. Struktur tim pelaksana kegiatan targeting per kabupaten dapat dilihat pada bagan di bawah ini.

Bagan 3. Struktur Tim Pelaksana Targeting



Tim Fasilitator Mitra Samya; terdiri atas fasilitator hybrid, fasilitator self targeting, 1 supervisor, dan 1 assistant supervisor. Masing-masing memiliki tugas yang berbeda-beda, semua yang terkait dengan persiapan dan pelaksanaan metode di lapangan adalah tanggungjawab mereka. Kinerja tim fasilitator dikoordinir oleh supervisor/ assistant supervisor yang menjadi penanggungjawab metode ditingkat kabupaten. Dalam kondisi tertentu supervisor/assistant berperan memfasilitasi, terutama jika fasilitator sedang mengalami hambatan. Supervisor ini bertanggungjawab kepada Team Leader yang membawahi tim Mitra Samya di 3 provinsi.

Tugas supervisor melakukan advice ditingkat provinsi yang meliputi 2 wilayah kabupaten. Tetapi dalam pelaksanaannya lebih terfokus di satu kabupaten karena di kabupaten lainnya sudah ada assistant supervisor yang mendampingi. Namun demikian, secara rutin supervisor mengalokasikan waktu supervisi antar kabupaten. Selain advice pelaksanaan kegiatan, supervisi juga sekaligus sebagai proses sharing antar fasilitator di 2 kabupaten.

Secara umum kinerja tim fasilitator Mitra Samya sangat baik. Loyalitas mereka terbukti hingga akhir proses dimana semua tugas (sosialisasi, koordinasi, fasilitasi) diselesaikan dengan baik. Fasilitator telah bekerja tepat waktu karena menggunakan jadwal yang telah dibreakdown dari

master schedule. Berbagai persoalan yang dihadapi selalu dikomunikasikan dan dikordinasikan dengan supervisor, sehingga sejauh ini tidak ada persoalan metodologi di lapangan yang belum diselesaikan. Bahkan di Jawa Tengah, fasilitator disipilin mengisi format dan mengumpulkan kepada supervisor setiap selesai per desa.

Pengalaman, kemampuan komunikasi, sikap dan kemauan belajar menjadi modal utama fasilitator untuk mendapat hasil maksimal. Mengingat tidak semua memiliki pengalaman yang memadai, maka dibutuhkan kekompakan untuk saling melengkapi. Beberapa kali fasilitator kesulitan dalam koordinasi ke desa, sosialisasi dan diskusi dengan masyarakat. Tetapi dengan sharing dan kerjasama antar fasilitator, semua itu dapat ditanggulangi.

Tim Pewawancara BPS; Tim BPS di masing-masing Kabupaten terdiri dari 1 Koordinator Lapangan, 1 Wakil Koordinator Lapangan, dan beberapa orang Pewawancara. Sebagai pewawancara calon peserta khusus pada metode self targeting, Tim BPS bekerja setelah tim Mitra Samya selesai melakukan pertemuan di masyarakat. Total hari wawancara bervariasi, tergantung dari jumlah pendaftar. Dalam studi ini, kisaran hari wawancara yaitu 3-7 hari dimana estimasi jadwal didesain pusat berdasarkan komposisi penduduk miskin setiap lokasi. Dalam praktiknya hal ini tidak selalu tepat, terkadang perlu ada tambahan waktu atau sebaliknya beberapa justru berlebihan.

Pada awal proses di hampir seluruh Kabupaten, Tim BPS tampak kewalahan menghadapi pendaftar. Tim BPS sering panik, buktinya sejak awal beberapa diantaranya sudah minta petugas keamanan untuk wawancara. Dengan persiapan yang relatif singkat, kemampuan Tim BPS memahami metode dan mengatasi berbagai persoalan lapangan juga terbatas. Permasalahan yang terjadi juga tidak terlepas dari faktor kesenjangan kinerja. Dengan irama kerja studi yang terkadang membutuhkan waktu ekstra, seringkali menjadi keluhan bagi sebagian Tim BPS.

Untuk kedisiplinan tidak semua Tim BPS memenuhi harapan. Orientasi kerja beberapa oknum petugas masih sebatas menyelesaikan wawancara, bukan untuk melaksanakan metode. Contoh kasus saat antrian sudah tidak ada, mereka sering pulang walaupun waktu belum menunjukkan pukul 17.00 WIB. Sementara dari sosialisasi umumnya warga mengetahui waktu pendaftaran/wawancara dilakukan pukul 08.00-17.00. Akibatnya ketika ada warga miskin yang hanya bisa datang pukul 16.00 misalnya, tentu terlewatkan. Walau sebagian bisa diwawancara keesokan hari, tetapi secara filosofi metode kurang tepat karena warga miskin harus datang berkali-kali. Lebih parahnya kemungkinan juga ada warga miskin yang karena alasan tertentu akhirnya tidak datang lagi.

Tim Pendamping PKH; Tim pendamping yang dimaksud adalah petugas pendamping PKH yang ada di masing-masing kecamatan. Pada tahap awal pelaksanaan studi kerjasama antar tim fasilitator dengan pendamping dan Tim BPS tampak kurang sinergis. Hal ini bisa dipahami karena masing-masing belum memahami porsi tugasnya. Instruksi yang mendadak untuk bergabung dalam proses studi tentu membutuhkan waktu bagi tim pendamping untuk menyesuaikan diri. Semula para pendamping seperti larut dalam tugas masing-masing, sehingga sepiantas kurang peduli dengan proses studi.

Namun setelah memahami hasil studi ini membantu sebagian tugas mereka berangsur-angsur berubah sikap dan kooperatif. Proses pemahaman kepada mereka juga dilakukan melalui koordinator masing-masing. Sehingga dalam secara bertahap semua memahami dan akhirnya saling mendukung. Proses koordinasi dan kerjasama antara tim dirasakan semakin padu.

Koordinasi dalam pelaksanaan studi targeting menjadi sangat penting untuk memperlancar proses. Terkait seleksi calon peserta PKH, Dinsos selaku pelaksana PKH disatu sisi, berharap proses studi berjalan lancar dan tepat waktu. Sementara disisi lain tim studi (Mitra Samya dan

BPS) bermaksud melakukan ujicoba untuk memperoleh metode yang paling efisien dan efektif. Saat implementasi lapangan, semua saling berhubungan termasuk tim pendamping, pemerintah kecamatan dan desa/kelurahan. Untuk menyatukan persepsi dan tujuan masing-masing, tentu peran dan fungsi koordinasi sangat penting.

Koordinasi yang dilakukan oleh Tim Mitra Samya dengan Dinsos dan BPS, dirasakan telah memberikan hasil yang sangat positif. Prosesnya mampu menyatukan persepsi para pihak sehingga satu sama lain saling mendukung. Setelah dilakukan koordinasi tercatat Dinsos Pemalang beberapa kali menjembatani proses koordinasi di kecamatan. Melalui komunikasi intensif antara supervisor dengan koordinator pendamping dan Korlap BPS, tercatat solusi berbagai persoalan di lapangan menjadi lebih mudah.

Setelah proses koordinasi, pihak Dinsos selalu melibatkan tim studi di berbagai proses PKH tingkat kabupaten. Contohnya, di Jawa Tengah saat sosialisasi PKH di Kantor Bappeda Pemalang yang dihadiri para pihak dari kabupaten, kecamatan dan desa/kelurahan. Selain untuk penyamaan persepsi, proses tersebut menjadi legalitas bagi pelaksanaan kegiatan di wilayah. Diskusi internal Tim Mitra Samya dengan Jajaran Dinsos, Pendamping PKH serta Koordinator BPS memberikan hasil positif dan mendukung proses ujicoba.



Saat koordinasi biasanya fasilitator mendapat berbagai pertanyaan dari Kepala Desa dan Camat. Pertanyaan yang sering menyulitkan fasilitator yaitu kalau diminta menjelaskan tentang sampling dan dasar merandom penentuan lokasi. Pemerintah setempat juga terkadang menuntut peran teknis bagi

staf mereka di lapangan, atau mempersoalkan biaya pelaksanaan dengan alasan keberhasilan pembangunan tergantung dari proses yang baik, dan untuk itu diperlukan supporting biaya. Hal-hal semacam ini menuntut kesabaran fasilitator dalam memberikan pemahaman.

Peran jajaran pemerintah Kabupaten baik langsung atau tidak langsung telah memberikan kontribusi cukup berarti. Misalnya di Wonogiri, pada saat studi masih dalam masa transisi pasca pilukada. Kepercayaan masyarakat pada pemerintah yang baru masih besar, dan ini berdampak pada pelaksanaan ujicoba. Tingginya kharisma aparat desa memberi nuansa tersendiri bagi tim fasilitator. Kendati terkadang aparat desa menjadi penghambat, namun secara konsep tidak ada masalah. Kebanyakan mereka hanya trauma kasus BLT yang banyak menimbulkan masalah.

Koordinasi yang kurang mendukung justru tampak antara pusat dan daerah, terutama dilingkup pelaksana PKH. Lemahnya koordinasi tersebut menjadi sinyal lemahnya persiapan di pusat. Hal ini tersirat saat koordinasi awal dengan parapihak di Kabupaten, mereka belum mengetahui kapan dan dimana studi dilaksanakan.

Pelaksanaan Metode Hybrid

Proses seleksi calon peserta PKH dengan metode hybrid telah difasilitasi oleh Tim Mitra Samya. Kerjasama Tim Pendamping hanya terlihat hadir di beberapa SLS karena selama proses sebagian pendamping tengah sibuk dengan tugas validasi atau membantu proses pendaftaran. Umumnya di lokasi hybrid, pendamping tidak banyak terlibat dalam proses/ tahapan yang difasilitasi.

Dengan skema yang telah didesain, kerjasama untuk memfasilitasi metode hybrid sangat terbatas. Saat tidak memfasilitasi di tempat lain atau karena diminta antar fasilitator tampak ada yang saling membantu. Tetapi hal ini jarang sekali karena jadwal fasilitator umumnya sangat padat. Kerjasama dengan supervisor juga terbatas karena biasanya hanya dilakukan saat supervisi. Asistensi oleh supervisor lebih diprioritaskan kepada beberapa fasilitator yang dipandang perlu pendampingan. Kendati demikian, sejauh ini tidak ada persoalan yang berarti dalam proses fasilitasi metode hybrid.

Pihak terkait yang paling kompeten dengan pelaksanaan kegiatan ini adalah Dinas Sosial. Dalam pelaksanaan metode hybrid, dukungan dari instansi ini sifatnya masih sebatas komitmen. Selama proses metode hybrid, Dinsos nyaris tidak pernah ke lokasi. Komunikasi dan informasi perkembangan hanya dilakukan melalui koordinasi dengan supervisor. Dinsos lebih concern membantu di lokasi-lokasi yang mengalami masalah, dan ini banyak terjadi di lokasi metode pendaftaran.

Para pihak yang sangat mendukung pelaksanaan di lapangan adalah Aparat Desa/Lurah beserta jajarannya. Sedangkan dukungan pihak kecamatan sejauh ini masih sebatas ijin pelaksanaan. Umumnya setelah koordinasi di Balai Desa, para Kades/Lurah membantu sosialisasi kepada Kadus/Lingkungan, Ketua RT/RW. Di beberapa SLS Kades dan Kadus hadir di pertemuan tetapi sebatas mengikuti dan tidak ikut campur mengambil keputusan. Dukungan yang paling dirasakan membantu tentu dari Ketua RT/RW, yaitu dalam bentuk menyediakan tempat diskusi/pertemuan dan mengkoordinir peserta diskusi.

Saat koordinasi/sosialisasi, banyak aparat desa/kelurahan yang skeptis. Mereka pesimis, terlebih ketika mendengar untuk pertemuan Ketua RT dan diskusi dengan masyarakat tidak ada support logistik. Umumnya sikap skeptis dan penolakan terjadi karena trauma dengan kasus sebelumnya yaitu BLT yang banyak menimbulkan masalah. Mereka mengatakan BLT telah memecah belah warga, mematikan keswadayaan dan semangat gotong royong, menimbulkan fitnah dsb di masyarakat. Karena itu mereka sangat antipati terhadap berbagai bentuk bantuan, terutama yang sifatnya tunai. Tetapi setelah dilakukan koordinasi kembali dan dialog dengan para tokoh, semua bisa diajak kompromi. Akhirnya proses diskusi di setiap lokasi bisa dilaksanakan, dan rata-rata berjalan dengan lancar. Ternyata semua Ketua RT/RW juga memberikan dukungan yang sangat kooperatif.

Secara umum pelaksanaan studi dengan metode hybrid di semua Kabupaten berjalan lancar. Tim fasilitator telah melaksanakan semua tahapan mulai dari koordinasi Kades/Lurah, fasilitasi pertemuan Ketua RT, dan menyelenggarakan pertemuan tokoh maupun seluruh warga di setiap SLS sesuai manual metodologi. Dari ke-3 tahapan metode hybrid, koordinasi Kades/Lurah dan pertemuan Ketua SLS dianggap paling mudah karena tidak banyak kendalanya. Kesulitan hanya jika Kades/ Lurah dan tokoh tidak menghendaki pelaksanaan kegiatan, Kades tidak kooperatif, Ketua RT dan warga sibuk sehingga sulit menentukan jadwal. Tetapi jika semua pihak mendukung dapat dipastikan proses fasilitasi metode berjalan lancar.

Tahapan terberat justru dirasakan saat memfasilitasi pertemuan masyarakat. Pada tahap ini banyak kendala yang terjadi, seperti peserta mengusulkan diri sehingga cenderung kurang jujur menyampaikan informasi kondisi rumah tangga lain. Umumnya fasilitator bisa menangkap indikasi kebohongan peserta, tetapi karena keputusan ditangan peserta maka fasilitator seringkali tidak dapat berbuat banyak.

Proses fasilitasi pertemuan dengan peserta kebanyakan laki-laki cenderung lebih kondusif daripada pertemuan dengan peserta perempuan. Diskusi yang didominasi perempuan diakui lebih tegas menyuarakan kondisi RTSM, tetapi seringkali justru mengusulkan diri. Pada diskusi tokoh, disamping lebih mudah memahami metode mereka jarang sekali ada yang mengusulkan diri. Kesulitan hanya jika para tokoh bungkam saat diminta menyebut sejumlah RTSM atau tidak berani atau menolak diajak meranking. Selain data pusat banyak yang tidak valid dan sebaran quota tidak selalu sesuai, beberapa lokasi memang sensitif sehingga sulit membedakan satu rumah tangga dengan rumah tangga lainnya.

Untuk kenyamanan fasilitasi, treatment yang dirasakan termudah adalah metode hybrid perbaikan. Umumnya fasilitator menyebut hybrid perbaikan tokoh, tetapi diantara mereka juga menyebut hybrid perbaikan masyarakat. Namun rata-rata alasan yang disampaikan, pada metode hybrid perbaikan pengambilan keputusan sepenuhnya partisipatif. Pada metode ini data pusat yang tidak valid bisa diperbaiki. Umumnya setelah diskusi peserta mengaku sangat puas karena selain menjadi peserta diskusi mereka juga merasa sudah dihargai dengan diberi kesempatan mengambil keputusan.

Sebaliknya metode hybrid tambahan merupakan treatment yang paling banyak mendapat keluhan dari peserta tokoh dan masyarakat. Walaupun semua akhirnya bisa memahami proses ini sebagai ujicoba untuk mendapatkan metode terbaik, namun di beberapa SLS terjadi ketegangan karena peserta tidak mengizinkan hasil diskusi dijadikan acuan PKH. Kasus Jawa Tengah,

peserta diskusi bahkan sampai membuat surat pernyataan menolak, seperti di RT-03 RW-04 Desa Badak Kec Randu Dongkal, RT-03 RW-06 Desa Limbangan Kec Ulujami, dan RT-07 RW-04 Desa Danasari Kec Pemalang. Umumnya protes karena data pusat tidak valid, sehingga jika hendak diusulkan/ditindaklanjuti PKH tanpa boleh direvisi, dikhawatirkan justru menjadi polemik dan perpecahan masyarakat. Terlebih beberapa desa tercatat memiliki sejarah konflik akibat kasus distribusi BLT yang kurang baik. Hal yang sama juga dijumpai di 2 propinsi lainnya.

Terkait dengan data pusat dan quota calon peserta, respon masyarakat dan para pihak di desa cukup beragam. Berdasarkan hasil supervisi dan keterangan dari fasilitator, masalah data pusat ada kalanya mendukung tetapi juga seringkali menjadi kendala terutama pada metode hybrid tambahan. Pada saat melakukan matching fasilitator sering menemukan nama-nama yang tidak



Gambar. Diskusi Hybrid perbaikan tokoh

sesuai atau bahkan salah dalam menulis nama pasangan rumah tangganya. Sebelum dipakai dalam proses targeting, seharusnya data pusat yang akan dipakai diupdate terlebih dahulu. Karena dalam waktu 2-3 tahun, fakta di lapangan tentu banyak mengalami perubahan. Fluktuasi perubahan tidak hanya pada kependudukan, tetapi beberapa wilayah juga ada yang mengalami pemekaran atau bahkan penggabungan wilayah. Seperti di Kabupaten Lampung Tengah, terdapat penambahan RT sebanyak 127 RT, penggabungan wilayah RT sebanyak 125 RT. Untuk wilayah dusun maka terjadi penambahan atau perluasan dusun sebanyak 8 Dusun, peleburan dusun sebanyak 43 dusun. Hal ini berimplikasi terhadap jadwal dan jumlah diskusi bersama masyarakat.

Terkait quota calon peserta juga tidak sedikit pengalaman fasilitator menemukan distribusi yang tidak sesuai kondisi setempat. Beberapa kasus terkait dengan validitas data dan quota yang dijumpai di lapangan, yaitu :

- Ada SLS yang tingkat kesejahteraannya lebih baik justru mendapat quota lebih banyak daripada SLS yang warga miskinnya lebih banyak. Seperti di Desa Tambakrejo Jawa Tengah, dan SLS 31 Kelurahan 1 Ulu Kecamatan Seberang Ulu 1 Kota Palembang.
- Ada nama pasangan yang salah baik suaminya atau istrinya, atau pasangan yang salah seperti pasangannya sama-sama perempuan. Data ini ditingkat lapangan ditemukan ada yang kurang akurat terkait dengan domisili RTSM tersebut. Walaupun terkadang juga ditemukan RTSM ini masih berdomisi didalam wilayah desa/kelurahan bersangkutan. Demikian juga ditemukan ketidak akurat data tersebut umumnya terkait status ekonomi saat ini yang sudah lebih baik, tetapi namanya masih tercantum sebagai calon penerima BLT PKH.
- Nomor ID dari pusat baik yang data dari BPS, maupun data survey meter ditemui dilapangan yang sering tidak ditemukan diantara kedua daftar tersebut. ID yang kurang lengkap ini ditingkat lapangan yang sering terjadi pada data RTSM hasil usulan masyarakat maupun tokoh. Kalau data RTSM dari pusat umumnya ID BPS sudah pasti ada, tetapi ID SM yang sering tidak ada.
- Protes para peserta diskusi baik tokoh maupun masyarakat terkait dengan jumlah quota. Peserta diskusi seperti mengalami shock pada tahap awal diumumkan untuk menyebutkan sejumlah nama RTSM dilingkungannya yang menurutnya terlalu sedikit. Mereka sering mempertanyakan siapa yang menentukan dan kenapa jumlah sedikit. Padahal menurutnya didesa/kelurahan waktu BLT banyak masyarakat yang mendapatkannya. Protes-protes ini umumnya terjadi pada kondisi SLS yang memang disekitarnya cukup banyak RTSM. Tetapi pada lokasi SLS dimana memang RTSMnya sedikit bahkan tidak ada, mereka umumnya bisa menerima dengan baik. Protes yang sering terjadi terkait quota nol. Seperti yang terjadi di Lampung. Kasus quota nol misalnya terjadi di desa payung makmur kecamatan pubian dengan metode hybrid tambahan tokoh di 3 RT, yaitu RT 4,5,6, kepada dusun yang mengikuti proses dari RT 4-6, memprotes, kenapa semua RT didusunnya quota nol. Hal yang sama terjadi di Desa Pajar Bulan Kecamatan Gunung Sugih Lampung Tengah. Begitu juga di Bandar Lampung misalnya di Kelurahan Labuhan Ratu dan berapa tempat lainnya.
- Dalam hal ini fasilitator biasanya hanya menyatakan quota sudah menjadi kewewenangan pusat dan mereka tidak bisa menerangkan dasar penentuannya.
- Waktu matching yang lama untuk mencari ID BPS dan ID SM. Misalnya seringsekali data RTSM yang masuk baik berasal dari data Pusat maupun usulan masyarakat, tidak ditemukan ID nya ketika dilakukan matching. Atau kalaupun ditemukan, maka mereka diurutkan dari garis keturunan salah satu pasangannya misalnya dari suaminya atau ibunya salah satu pasangan. Kasus di Lampung misalnya calon RTSM terdaftar dengan nama aslinya tetapi mereka disekitarnya ternyata lebih dikenal dengan nama sebutan gelar atau sebaliknya. Contohnya di desa Pajar Bulan nama RTSM yang diusulkan menggunakan nama yang ada di KTP, ternyata

ketika dimatching nama KTP tersebut tidak ada di daftar PPLS, tetapi yang justru nama gelar yang ada. Hal demikian ini sering ditemukan dimana nuansa adatnya masih sangat kental sekali. Apalagi tokoh seperti RT yang ikut dalam pertemuan adalah orang baru.

- Nama KK benar tetapi nama pasangan salah atau tidak tepat lagi, salah nama bahkan data pusat merupakan kerabat dari pamong atau kerabat petugas yang melakukan pendataan. Belum lagi ditingkat lapangan juga dijumpai nama KK dan pasangan yang sama lebih dari satu pasangan, tetapi nomor Idnya berbeda. Ketika melakukan matching data dengan aparat RT atau tokoh setempat sering mengalami kesulitan karena terkadang RT atau tokoh setempat tidak bisa membedakan pasangan mana yang dimaksudkan. Kasus-kasus ini ditemui di Bandar Lampung maupun Lampung Tengah.
- Ada kasus ditemukan 4 orang atas nama yang sama dan pasangan yang sama. Berbeda yang ditemukan oleh fasilitator metode pendaftaran, sebelum melakukan sosialisasi pendamping PKH sudah memberikan data kuota kepada masyarakat sehingga warga bingung dengan proses pendaftaran seperti yang terjadi di kelurahan 2 Ulu Kecamatan Seberang Ulu I pada saat sosialisasi tokoh dan ketua RT, salah seorang ketua RT menanyakan “untuk apa dilakukan lagi pendaftaran dan wawancara, karena sudah ada kuota di masing-masing kelurahan bahkan RT” supervisor yang kebetulan mengikuti pertemuan tersebut kemudian menjelaskan alurnya sampai semua peserta mengerti tentang proses pendaftaran.



Gambar. Fasilitator Sedang Menjelaskan PKH Pada Diskusi Metode Hybrid Tambahan

Analisis terhadap data yang diberikan oleh tim BPS dan dilakukan validasi oleh tim Mitra Samya dengan menggunakan metode hybrid dan Pendaftaran, tingkat validitas data PPLS 08 yang digunakan sangat rendah, misalnya $\pm 45\%$ untuk Kota

Palembang dan $\pm 15\%$ untuk Kabupaten Ogan Komering Ilir. Nilai tersebut dianggap masih cukup terutama untuk Kota Palembang daftar RTSM banyak yang sesuai dengan kondisi lokal. Berbeda dengan 15% di Kabupaten Ogan Komering Ilir, dianggap sangat rendah karena data RTSM dari BPS masih belum akurat bahkan dibeberapa lokasi studi terdapat data Nol (0). Hal ini yang membuat fasilitator Mitra Samya kesulitan melakukan matching/pencocokan lapangan.

Faktanya, jika data pusat sesuai kondisi lapangan umumnya peserta (tokoh/ masyarakat) mendukung apapun keputusan yang dihasilkan. Ketua RT/RW dan aparat desa juga merasa aman dan nyaman, karena mereka tidak dituduh terlibat dalam penentuan peserta PKH. Sebaliknya, kalau data pusat tidak valid biasanya banyak peserta kecewa. Mereka tidak akan segan-segan protes sehingga tidak jarang fasilitator menjadi korban dan dicaci maki warga. Seperti pengalaman di Desa Wanamulya Kecamatan Pemalang Jawa Tengah, seorang peserta diskusi

bahkan mengatakan “*data pusat sebenarnya tidak terlepas dari titipan aparat desa dan tokoh. Dari mana pusat bisa mengetahui nama-nama calon peserta kalau tidak mendapatkan masukan dari aparat desa*”, demikian ungkapanya lebih lanjut.

Rata-rata setiap fasilitator metode hybrid telah memfasilitasi pertemuan dengan tokoh/ masyarakat 2 kali sehari. Tetapi di beberapa lokasi ada yang memfasilitasi pertemuan 3 kali sehari. Biasanya hal ini karena permintaan warga atau waktu yang terbatas. Dari segi waktu, umumnya proses fasilitasi pertemuan berlangsung antara 1,5 sampai 2 jam per satu pertemuan tokoh/ masyarakat. Tetapi di beberapa SLS terutama yang dengan peserta masyarakat, terkadang proses pertemuan berlangsung 3-4 jam.

Secara umum partisipasi peserta di setiap pertemuan metode hybrid sangat baik. Tingkat kehadiran peserta masyarakat antara 75-90%, sedangkan pertemuan dengan peserta tokoh antara 80-100%. Pertemuan yang dilakukan pada siang hari umumnya didominasi perempuan, alasannya kaum laki-laki sibuk karena banyak yang menjadi buruh dan tidak bisa meninggalkan pekerjaan. Sebaliknya pertemuan di malam hari umumnya didominasi peserta laki-laki. Alasannya saat malam kaum perempuan banyak yang sibuk dengan urusan rumah dan anak-anak. Selain itu para ibu juga berangkat kalau suami sudah hadir maka suara mereka sudah terwakili dalam pertemuan.

Faktor jarak tidak mempengaruhi tingkat kehadiran peserta dalam proses pertemuan metode hybrid. Hal ini karena pertemuannya ditingkat SLS yang umumnya lingkup RT. Meskipun ada beberapa SLS memiliki wilayah cukup tersebar, namun kehadiran peserta selalu ramai. Berdasarkan catatan fasilitator, hal ini lebih karena masyarakat mengetahui kegiatan menyangkut bantuan tunai. Faktor yang sedikit menghambat kehadiran peserta hanya karena cuaca. Saat hujan lebat biasanya pertemuan harus menunggu peserta, sehingga terkadang waktunya molor.

Tempat pertemuan secara fisik mempengaruhi jalannya diskusi baik itu di perkotaan maupun pedesaan. Untuk diskusi yang melibatkan masyarakat maka ketersediaan tempat diskusi sangat penting karena berpengaruh terhadap kenyamanan peserta sewaktu berpartisipasi dalam diskusi. Terkait dengan hal ini maka dari hasil pemantauan lapangan diperoleh hal-hal sebagai berikut :

- Untuk diskusi yang melibatkan masyarakat, terutama untuk sosialisasi dan diskusi musyawarah baik metode hybrid maupun pendaftaran diperlukan ruangan yang luas. Fakta lapangan menunjukkan bahwa ketika diskusi dengan melibatkan jumlah peserta yang hadir cukup besar. Kehadiran masyarakat ini tidak hanya ibu-ibu dan bapak-bapak melainkan juga anak-anak dan balita. Pada saat diskusi masyarakat pada tahap sosialisasi maupun musyawarah, kegaduhan suara anak-anak sering mengganggu jalannya diskusi. Ibu-ibu juga kurang konsentrasi mengikuti setiap tahap informasi yang disampaikan oleh fasilitator. Oleh karena itu bila tempat pertemuan kurang luas, maka situasi kebisingannya tinggi, begitu pula bila tempatnya terlalu luas tetapi yang hadir sedikit juga terjadi masalah. Kasus-kasus seperti ini berlaku untuk kedua wilayah perkotaan dan pedesaan.
- Untuk wilayah pedesaan umumnya tidak ada masalah yang berarti, karena rata-rata fasilitas umum tersedia seperti kantor dusun atau rumah-rumah masyarakat yang cukup luas halamannya. Bahkan partisipasi tokoh di SLS ini ada yang tidak hanya tempat yang disediakan, tetapi juga memberikan snack dan minuman serta teropong untuk kebutuhan sosialisasi. Namun hal yang berbeda terjadi ditingkat perkotaan yang umumnya fasilitas umum dan halaman rumah masyarakat yang relatif terbatas ketersediaannya, sehingga terkadang dijumpai adanya masyarakat yang hadir lebih banyak dari pada kapasitas ruangnya. Tempat diskusi yang luas dan cenderung terbuka, terkadang juga berpengaruh terhadap efektivitas penyampaian materi sosialisasi PKH. Hasil pemantauan di lapangan didapati, bahwa ketika penyelenggaraan sosialisasi dilaksanakan ditempat terbuka tanpa naungan, maka masyarakat cenderung

bernaung dibawah pohon-pohon yang bersebaran. Sehingga masyarakat kurang fokus dalam menerima materi sosialisasi.

- Untuk diskusi hybrid dan pendaftaran tokoh, tempat umumnya lebih banyak tidak menjadi masalah. Dengan kata lain fasilitas untuk bermusyawarah sangat tersedia baik ditingkat desa maupun kelurahan. Pada waktu pelaksanaan diskusi, umumnya para tokoh memberikan kontribusi tempat di ruang tamu/atau ruang keluarga, emperan rumah atau halaman bahkan kantor desa ataupun dusun. Hal seperti ini terjadi di Bandar Lampung maupun Lampung Tengah. Untuk pertemuan tokoh di metode hybrid tambahan tokoh biasanya diskusi dilakukan di rumah pak RT atau Tokoh dusun. Disini mereka selain berkontribusi tempat juga snack dan minuman ikut dikontribusikan selama proses diskusi berlangsung. Hal ini tentunya sangat bertolak belakang dengan elit ditingkat kelurahan yang diawal-awal diskusi selalu menanyakan masalah kontribusi uang untuk snack dan minuman ketika menghadirkan ke masyarakat, tetapi dengan fakta-fakta lapangan yang seperti ini sebenarnya menunjukkan bukti bahwa masyarakat ketika berdiskusi masalah snack dan minuman tidak menjadi keharusan. Bahkan masyarakat hadir dalam diskusi tersebut lebih penting ketimbang apa yang didapat secara material tersebut.

Berdasarkan hasil supervisi dan laporan dari fasilitator, rata-rata peserta diskusi sangat antusias dalam mengikuti semua tahapan metode. Keseriusan peserta disinyalir karena beberapa faktor, *pertama*; dari sosialisasi mereka mengetahui setelah proses seleksi ini akan ada program tindaklanjut yaitu PKH, *kedua*; mereka juga akan membahas masalah yang berkaitan dengan RTSM di lingkungannya sendiri. Karena itu peserta diskusi tidak berani sembarangan, semua keputusan yang akan diambil harus dipikirkan dengan baik dan dipertimbangkan secara bijaksana.

Pelaksanaan Metode Pendaftaran

Perbedaan proses fasilitasi metode pendaftaran dengan metode hybrid tidak hanya sebatas tahapan, tetapi juga difasilitasi oleh 3 tim yang berbeda yaitu; Tim Mitra Samya (Koordinasi dan Sosialisasi), Tim BPS (Pewawancara) dan Tim Pendamping PKH (Registrasi). Dengan skema tersebut kerjasama antar tim fasilitator dalam proses metode ini mutlak diperlukan. Setelah pelaksanaan tugasnya Tim Mitra Samya wajib mengkoordinasikan hasil sosialisasi kepada Tim BPS khi pendaftaran/ wawancara. Proses ini difasilitasi melalui supervisor, dan sejauh ini telah berjalan dengan lancar.



Gambar. Pendamping PKH melakukan pendaftaran di salah satu kecamatan di Bandar Lampung

Kerjasama di lapangan juga dilakukan dengan aparat desa, terutama Kadus, Ketua RT/ RW dan Tokoh setempat. Para tokoh umumnya banyak membantu, khususnya dengan menyampaikan

kembali point-point sosialisasi kepada masyarakat. Karena itu seluruh warga desa dapat mengetahui informasi pelaksanaan seleksi calon peserta PKH.

Pada tahapan awal studi, proses metode pendaftaran banyak mengalami kendala/permasalahan. Masyarakat sering salah faham menangkap pesan sosialisasi, sehingga ketika ada provokasi Kadus agar semua mendaftar banyak warga yang tidak miskin juga datang mendaftar. Akibatnya tim pewawancara mengalami kewalahan dan tidak dapat menyelesaikan wawancara sesuai jadwal yang ditentukan.

Faktor komunikasi antarpihak yang kurang baik juga menjadi pemicu. BPS selalu menganggap semua ini akibat kesalahan dalam sosialisasi. Di beberapa lokasi awal diakui beberapa fasilitator kurang tegas saat menyampaikan sosialisasi. Tetapi menurut hasil catatan dan pengamatan supervisi, faktor utama sebagai penyebab masalah tersebut yaitu karena; 1). Kesadaran masyarakat untuk memberikan prioritas bagi yang benar-benar sangat miskin mendaftar terlebih dahulu masih sangat rendah, dan 2). Adanya provokasi pihak-pihak tertentu terutama oknum tokoh di desa agar semua warga mendaftar, sehingga dengan demikian tidak ada yang merasa iri atau dibeda-bedakan, dsb.

Berbagai Motivasi warga untuk ikut mendaftar antara lain;

Pertama, masyarakat yang mendaftar dan wawancara dari kategori bukan RTSM. Mereka berasal dari masyarakat yang coba-coba untuk mendapatkan bantuan. Fakta-fakta dilapangan menunjukkan bahwa mereka yang mencoba-coba ini pada waktu datang mendaftar dengan menggunakan sepeda motor, perhiasan, handphone. Bahkan di salah satu desa di Lampung Tengah ada seorang bidan desa yang suaminya bekerja sebagai pegawai pabrik gula GBM datang mendaftar dengan membawa mobil. Walaupun telah diingatkan tentang kriteria yang sudah disepakati oleh pihak pendamping PKH, namun tetap memaksa untuk mengikuti tahapan tersebut.

Kedua, para pendamping juga tidak punya hak untuk menstop/ menolak dengan tegas orang yang mendaftar dan wawancara tersebut yang berasal dari luar RTSM karena bila hal ini dilakukan mereka takut apabila nantinya akan mengalami hambatan ketika pendampingan PKH ditingkat didesa/ kelurahan tersebut.

Ketiga, adanya keterlibatan para pamong yang mengatakan tidak mau terlibat secara aktif memberikan penyadaran kepada masyarakat. Menurut para pamong mereka tidak mau terulang seperti ketika bantuan BLT sebelumnya yang sering dikejar-kejar oleh warga, bahkan terjadi korban anarkisme terhadap pamong. Alasan ini terkadang juga digunakan oleh pamong karena ada motif-motif tertentu dan malah menyuruh masyarakat mendaftar dan mengikuti proses. Toh yang menentukan hasilnya adalah dari hasil wawancara.

Situasi diatas tidak jarang menimbulkan anarkisme, misalnya saja seperti Gedung Harta kecamatan Selagai Linggai Kabupaten Lampung Tengah, tim BPS yang melakukan wawancara dibawah ancaman seperti; kalo tidak selesai wawancara maka tidak menjamin keselamatan jiwanya ketika pulang dan keluar dari desa tersebut. Ancaman tersebut tidak hanya itu, tetapi masyarakat membawa senjata tajam (pisau) yang diletakkan didepan meja tim wawancara BPS sambil digunakan untuk merobek-robek kertas pendaftaran. Kasus ini menandakan bahwa satu-satunya faktor yang bisa menjaring peserta calon PKH dari metode pendaftaran adalah memang wawancara. Oleh karena itu, bila orang-orang non RTSM ini ikut wawancara, dan mereka bisa menjawab dengan benar setiap pertanyaan yang diajukan oleh tim BPS, maka bisa jadi mereka yang akan terjaring, padahal ini tidak sesuai dengan tujuan dari program.

Kendati diawal banyak mengalami permasalahan, namun seiring waktu banyak terjadi perbaikan dan proses fasilitasi berjalan lancar. Secara umum pelaksanaan koordinasi dan sosialisasi telah terlaksana dengan cukup baik. Khusus pada tahapan ini tidak terlalu banyak persoalan karena umumnya gejala di lapangan sering terjadi saat proses pendaftaran/ wawancara.

Pihak terkait yang sangat kompeten atas pelaksanaan seleksi calon peserta PKH adalah Dinas Sosial selaku pelaksana program. Selama proses ujicoba metode khususnya self targeting, dukungan instansi ini cukup besar. Komitmennya sangat jelas, namun karena keterbatasan ruang tidak banyak yang bisa dilakukan kecuali melalui Pendamping. Peran-peran teknis dalam proses ujicoba umumnya terdistribusi kepada Tim Mitra Samya dan Tim BPS.

Selama sosialisasi dan pendaftaran/ wawancara pihak Dinsos jarang ke lapangan. Tetapi saat persiapan, dukungan instansi ini sangat besar. Bahkan di Pemalang, saat pertemuan koordinasi, Kadinsos selalu berpesan untuk menghubungi bila ada kendala lapangan. Kadinsos seringkali turun membantu koordinasi dengan pihak camat.

Umumnya aparat Desa/Lurah dan para staf sangat mendukung pelaksanaan metode self targeting. Meskipun awalnya banyak Kades/Lurah yang mempersoalkan support logistik, tetapi akhirnya semua bisa memahami. Kesempatan memperoleh bantuan masyarakat miskin di wilayahnya dipandang lebih penting. Sementara dukungan pihak kecamatan masih sebatas ijin dan mereka jarang ke lokasi. Setelah koordinasi, para Kades/Lurah turut sosialisasi kepada Kades/Lingkungan dan Ketua RT/RW. Dalam pertemuan tokoh, mereka memberikan pengantar/himbauan kepada tokoh untuk mendukung kegiatan.

Trauma terhadap kasus bantuan sebelumnya banyak menjadi pertimbangan para tokoh dan aparat desa. Dikhawatirkan bantuan PKH yang bersifat tunai akan memecah belah masyarakat, mematikan keswadayaan dan semangat gotong royong, serta menimbulkan fitnah bagi mereka. Namun setelah dilakukan koordinasi ulang dan dialog bersma, semua pihak bisa memahami dan berbalik mendukung. Proses sosialisasi di setiap lokasi bisa berjalan lancar, semua Ketua RT/RW dan tokoh memberikan dukungan kooperatif.

Secara umum pelaksanaan metode self targeting berjalan dengan lancar. Tim fasilitator melaksanakan semua tahapan sesuai manual metodologi, dimulai dari proses koordinasi dengan camat, kades/lurah, memfasilitasi pertemuan tokoh RT, dan mengadakan pertemuan dengan masyarakat. Umumnya semua tahapan yang difasilitasi berjalan dengan lancar.

Dari beberapa tahapan metode ini, pertemuan masyarakat adalah yang dianggap paling mudah. Hal tersebut karena fasilitator berhadapan langsung dengan masyarakat untuk menjelaskan PKH dan mekanisme pendaftaran. Sebagian masyarakat terkadang sudah mengetahui dari tokoh/masyarakat desa sebelah, sehingga tidak banyak persoalan pada tahapan ini. Umumnya masyarakat juga antusias karena selain mendengar dari himbauan tokoh juga bisa langsung tanya jawab dengan fasilitator/ pendamping PKH. Secara umum tidak ada kesulitan berarti dalam melakukan tahapan tersebut. Kesulitan hanya dialami saat banyak warga yang tidak bisa hadir dalam pertemuan karena sibuk/faktor hujan.

Tahapan metode pendaftaran yang terberat justru dirasakan saat melakukan koordinasi camat, kades/lurah. Beberapa camat dan Kades/Lurah trauma dengan kasus BLT yang sebelumnya telah menimbulkan berbagai konflik di masyarakat. Beberapa Kades/Lurah juga meminta support logistik karena konon sudah menjadi adat bilamana mengadakan pertemuan dengan masyarakat. Di Pemalang misalnya, Kades Bojongnangka adalah yang paling keras menuntut logistik, dengan alasan hal tersebut sudah diatur dalam Perda. Sejumlah tokoh juga ada yang menyatakan program ini prosesnya terlalu ribet/bertele-tele.

Menurut fasilitator, treatment yang dirasakan paling nyaman dalam fasilitasnya adalah Metode Pendaftaran oleh Siapa Saja di RW/Dusun. Alasannya dari segi persyaratan dan tempat pendaftaran, masyarakat tidak terbebani dalam mengikuti seleksi. Saat menyampaikan informasi jadwal dan tempat pendaftaran/ wawancara tidak banyak reaksi peserta. Mereka baik-baik saja karena sebagian sudah mengetahui di desa lain ada yang mendaftar atau wawancara di Balai Desa atau Kecamatan. Umumnya di lokasi metode ini pendaftar yang hadir didominasi kaum perempuan.

Sebaliknya metode Pendaftaran oleh Suami Istri di Kecamatan merupakan treatment yang paling banyak dikeluhkan oleh peserta/tokoh. Sebagian besar permasalahan yang terjadi bisa diatasi dan masyarakat bersedia mengikuti prosedur. Namun kasus di Desa Bojongnangka Kabupaten Pemalang, akhirnya para tokoh dan masyarakat memaksa tempat pendaftaran dan wawancara dialihkan ke Dusun/RW. Berbagai upaya untuk memberikan pemahaman ternyata gagal, karena Camat sangat berkeberatan akibat banyak warga yang meminta biaya transport ke rumahnya. Hal ini diperparah lagi dengan sikap Bapak Kepala Desa yang sejak awal memang kurang kooperatif terutama masalah tidak adanya support logistik. Menyikapi kondisi tersebut, Kepala Dinas Sosial juga menyarankan untuk menuruti saja kemauan warga. Jika memaksa dikhawatirkan persoalannya meluas dan menimbulkan situasi kurang kondusif serta bergeser ke ranah politik.

Selain masalah tempat yang jauh, persyaratan mendaftar bersama pasangan juga sering dikeluhkan. Tidak sedikit warga di desa maupun di perkotaan yang meminta keterangan Ketua RT walau berbohong daripada harus mendaftar dengan pasangan. Hal ini terbukti saat supervisi ke tempat pendaftaran/ wawancara, di hari pertama form N2 terkumpul rata-rata 50-60 lembar. Ketika dikonfirmasi, umumnya alasan yang sering dikemukakan yaitu karena pasangannya tidak bisa meninggalkan pekerjaan. Bahkan diantaranya terkadang sampai berbohong mengatakan pasangan bekerja di luar daerah.

Pendapat berbeda dikemukakan oleh BPS di Kota Bandar Lampung. Metode pendaftaran yang paling nyaman menurut BPS adalah metode pendaftaran suami istri lokasi kecamatan. Alasannya adalah karena mereka datang ke tempat pendaftaran dan wawancara bersama dengan suami dan istrinya yang lokasinya ditingkat kecamatan. Lokasi pendaftaran kecamatan agak jauh dari tempat tinggal RTSM sehingga umumnya lebih sedikit yang mendaftar, dan kemungkinan terjadinya kerusuhan bisa diminimalisir. Hal lain adalah, data dan informasi seputar kondisi RTSM lebih baik dibandingkan yang siapa saja. Apabila mereka ditanya umumnya lebih jujur karena bila ada jawaban yang berbeda dari kedua belah pihak akan dapat segera diketahui dan disimpulkan.

Secara umum setiap fasilitator metode pendaftaran telah memfasilitasi proses koordinasi dan sosialisasi PKH di sekitar 10-11 desa/kelurahan. Untuk setiap lokasi desa/kelurahan, rata-rata mereka memfasilitasi satu kali pertemuan tokoh dan sekitar 5-10 kali pertemuan masyarakat. Berdasarkan jadwal diketahui rata-rata setiap hari fasilitator memfasilitasi 2 kali proses sosialisasi di masyarakat. Tetapi di beberapa tempat terkadang karena permintaan warga atau karena waktu yang terbatas, mereka melakukan sosialisasi sebanyak 3 kali dalam sehari.

Di wilayah pedesaan, seperti di Lampung Tengah, Ogan Komering Ilir jarak antar desa yang cukup jauh, terkadang menghabiskan waktu tempuh antara \pm 4-7 jam seringkali menjadi penyebab molornya kegiatan dilapangan. Fasilitator menganggap waktu yang disediakan sangat terbatas. Jika menemukan jarak antar dusun atau SLS terlalu jauh maka idealnya kegiatan pertemuan adalah 1 hari untuk setiap SLS.

Dalam jadwal dan strategi studi, diharapkan fasilitator dapat melakukan koordinasi dengan 2-3 orang Lurah/ Kepala Desa. Tantangan lain adalah seringkali jadwal koordinasi dan pertemuan ketua SLS bertepatan dengan hari sabtu dan minggu yang merupakan hari libur kantor. Strategi

yang dikembangkan adalah dengan berbagi peran dan saling membantu dalam melakukan koordinasi.

Dari segi waktu efektif rata-rata proses koordinasi Camat dan Kades/Lurah berlangsung 30-60 menit, pertemuan tokoh 2-3 jam, dan pertemuan masyarakat 90-120 menit. Terbatasnya waktu yang tersedia menyebabkan pelaksanaan sosialisasi terkesan terburu-buru. Menurut fasilitator agar semua proses berjalan ideal, waktu pelaksanaan di setiap desa sebaiknya 1-2 minggu. Tetapi ini juga sangat tergantung dari sebaran penduduk dan wilayah masing-masing desa/kelurahan.

Secara umum masyarakat sangat serius mengikuti semua tahapan metode pendaftaran ini. Kebanyakan mereka ingin mengetahui kejelasan alur pelaksanaan kegiatan PKH, ingin mendapat informasi lengkap tentang syarat pendaftaran, jumlah bantuan, jadwal dan tempat pendaftaran. Alasan tersebut juga mendorong tingkat kehadiran warga (laki dan perempuan) dalam pertemuan sangat tinggi. Umumnya pada pertemuan disiang hari, tingkat kehadiran peserta didominasi perempuan. Hal ini karena pada siang hari kaum laki-laki banyak yang sibuk bekerja. Sedangkan tingkat kehadiran peserta pada malam hari didominasi laki-laki, tetapi terkadang juga berimbang.

Masih kuatnya animo masyarakat mempertahankan tradisi teposeliro, saling menghormati dan gotong royong, memiliki makna sangat penting dalam proses ujicoba ini. Termasuk di dalamnya tradisi mengundang warga ke tempat pertemuan dengan kentongan, juga menjadi point tersendiri yang sangat membantu fasilitator di lapangan.

B. Manfaat dan Dampak

Secara umum, proses seleksi calon peserta PKH baik dengan metode hybrid maupun self targeting di Provinsi Jawa Tengah dipandang telah memberikan manfaat dan dampak yang sangat positif. Manfaat dan dampak disini tidak hanya dirasakan oleh masyarakat, tetapi juga bagi pemerintah desa dan fasilitator. Adapun beberapa manfaat dan dampak yang telah teridentifikasi antara lain:

Bagi Masyarakat

- Melalui sosialisasi dan penjelasan tentang PKH, masyarakat mendapatkan informasi tentang rencana pelaksanaan PKH di wilayahnya.
- Masyarakat mendapatkan informasi yang jelas tentang komponen PKH, termasuk persyaratan untuk bisa menjadi peserta program bantuan pendidikan dan kesehatan tersebut.
- Memberikan kesempatan bagi rumah tangga sangat miskin (RTSM) yang memenuhi kriteria dan termasuk dalam ranking rumah tangga termiskin untuk diusulkan menjadi peserta PKH.
- Masyarakat mengetahui kondisi kesejahteraan rumah tangga lain di sekitarnya dan secara partisipatif bisa memberikan kesempatan bagi rumah tangga yang termiskin untuk diprioritaskan menjadi peserta PKH terlebih dahulu.
- Meningkatkan thrust/ mengurangi kecurigaan kepada pemerintah desa/kelurahan terkait penyaluran bantuan program kemiskinan.

Bagi Pemerintah Desa/Kelurahan

- Mendapatkan pembelajaran praktis tentang cara menyeleksi calon peserta program penanggulangan kemiskinan yang lebih baik, tepat sasaran dan transparan.

- Meningkatkan rasa aman dan kenyamanan bagi para aparat desa/kelurahan dalam pendistribusian bantuan PKH, karena proses seleksi calon peserta program tersebut dilakukan secara partisipatif.
- Mengurangi ketegangan dengan masyarakat akibat berbagai kasus/ kesalahan dalam proses penyaluran bantuan sosial sebelumnya.

Bagi Fasilitator

- Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan fasilitator dalam memfasilitasi seleksi calon peserta program bantuan kemiskinan dengan metode hybrid.
- Meningkatkan keterampilan fasilitator dalam hal teknik komunikasi dan koordinasi dengan para pihak baik pemerintah desa/kelurahan, para tokoh dan masyarakat.
- Meningkatkan pengalaman dan kapasitas fasilitator dalam management konflik baik dengan pemerintah desa/kelurahan, tokoh dan masyarakat.
- Meningkatkan pengalaman dalam memfasilitasi proses diskusi dengan para tokoh dan masyarakat di wilayah pedesaan dan perkotaan serta wilayah pegunungan dan pesisir yang memiliki kondisi, latar belakang dan SDM yang sangat heterogen.

C. Tantangan dan Strategi

C.1. Jawa Tengah

Khusus untuk metode self targeting, bagaimana memastikan pendaftar benar-benar dari rumah tangga sangat miskin menjadi tantangan yang tidak mudah. Upaya ini dilakukan melalui berbagai cara dan tahapan, seperti; saat sosialisasi kepada aparat desa/ tokoh atau di masyarakat semua harus benar-benar memahami maksud dan tujuan serta bagaimana tahapan kegiatan akan dilakukan.

Upaya lain juga ditempuh dengan berulang kali menegaskan saat penjelasan breakdown 3 faktor utama kriteria kesejahteraan setempat. Dengan cara ini para tokoh dan aparat desa memiliki gambaran yang jelas tentang siapa yang harus dihimbau untuk mendaftar atau sebaliknya. Pada saat pendaftaran/ wawancara di lapangan, tim pendamping juga diminta untuk memberikan pengantar kepada setiap warga yang mendaftar tentang persyaratan mendaftar, implikasi mendaftar jika tidak memenuhi kriteria, dan sebagainya.

Salah satu kondisi di lapangan yang menjadi tantangan dan tidak mungkin dihindari yaitu banjirnya warga yang mendaftar. Dalam situasi seperti ini sangatlah tidak mungkin untuk menolak pendaftar atau tidak mewawancarai mereka. Sehingga strategi yang dilakukan BPS yaitu dengan menambah tim pewawancara agar sebagian tim bisa pindah ke lokasi berikutnya, sementara tim yang lain bisa melanjutkan proses wawancara di lokasi yang belum selesai. Strategi ini ternyata dinilai cukup efektif sehingga pelaksanaan wawancara di semua lokasi berhasil diselesaikan.

Memastikan orang yang hadir dalam proses pendaftaran/wawancara adalah benar-benar perwakilan rumah tangga sangat miskin juga menjadi tantangan tersendiri. Dalam hal ini peran yang sangat diharapkan adalah dari masyarakat dan para tokoh setempat. Masalah ini tidak mungkin dikendalikan langsung oleh fasilitator, karena yang mengenal pendaftar umumnya hanya masyarakat dan tokoh setempat.

Dalam pelaksanaan metode hybrid kualitas hasil diskusi di beberapa SLS meragukan fasilitator. Meskipun mereka berupaya seperti berkali-kali meminta peserta jujur memberi informasi kondisi RTSM, namun keputusan tetap di peserta. Terkadang peserta diskusi berhasil memberikan berbagai alasan untuk menggiring keputusan. Dalam hal ini fasilitator hanya bisa mengatakan bahwa hasil diskusi yang bertanggungjawab adalah masyarakat. Artinya baik buruknya hasil diskusi akan dijalani masyarakat itu sendiri.

Tantangan lainnya bagaimana para pihak mulai kabupaten, kecamatan, desa/ kelurahan hingga dusun dan RT/RW mendukung kegiatan ini. Tanpa dukungan mereka terutama dari tingkat desa dan RT/RW, prosesnya pasti sulit. Untuk memastikan dukungan tersebut strateginya adalah koordinasi intensif. Proses koordinasi dilakukan tim fasilitator bersama supervisor dan pendamping, sehingga beban kegiatan terdistribusi secara merata.

Memastikan tim pelaksana memahami tahapan dan filosofi metode secara komprehensif juga menjadi tantangan khusus. Pada metode self targeting yang difasilitasi bersama (tim gabungan), kesatuan pemahaman terhadap metodologi dianggap sangat penting. Upaya ini terus dilakukan melalui diskusi internal antar tim dan sharing pada saat supervisi.

Kekuatan tim adalah kunci sukses uji metodologi, sehingga ritme dan kebersamaan fasilitator harus dijaga. Upaya ini ditempuh dengan koordinasi formal maupun informal sesering mungkin. Strategi tim tinggal di satu tempat (posko), melakukan sharing berkala dan membangun semangat kekeluargaan dipandang sangat efektif dalam hal ini.

Tantangan terberat dirasakan ketika tidak semua treatment yang dilakukan sesuai dengan kultur setempat. Kondisi ini menuntut kepekaan fasilitator, sehingga treatment diterima masyarakat. Tim fasilitator harus memotivasi diri untuk memahami kultur masyarakat, melakukan komunikasi intensif dengan berbagai elemen. Kendati membutuhkan waktu, namun strategi ini dipandang efektif dalam merespon situasi yang berkembang di lokasi atau daerah yang kebetulan treatmentnya tidak cocok.

Walaupun alokasi waktu cukup panjang namun seringkali terjadi perubahan jadwal dan data pusat juga menjadi tantangan. Fasilitator dituntut menyesuaikan berbagai perubahan secara konsisten dan tidak menyalahi metodologi. Komunikasi yang intensif dengan tim pusat untuk update informasi juga terus dilakukan.

Kondisi alam kedua kabupaten yang menyebar dan sebagian masih berupa perbukitan dengan jarak cukup jauh menjadi tantangan tersendiri. Untuk memaksimalkan waktu, di lokasi-lokasi yang sulit terjangkau dari posko tim fasilitator menyiasati dengan tinggal sementara di lokasi. Cara ini dipandang efektif karena disatu sisi bisa menghemat energi dan disisi lain juga lebih mudah melakukan internalisasi dengan masyarakat.

Beragam respon muncul dari pemerintah desa/kelurahan dalam menyikapi kehadiran tim fasilitator. Saat koordinasi sebagian ada yang menerima begitu saja, tetapi sebagian ada yang menerima tetapi mesti bersitegang dahulu. Kondisi ini menjadi dinamika yang cukup melelahkan, dan biasanya fasilitator mengatasi dengan melakukan komunikasi secara intensif secara langsung maupun via telepon.

Kesadaran masyarakat juga menjadi tantangan tersendiri, karena setiap wilayah memiliki karakter dan kearifan yang bermacam-macam. Dalam kasus begini, umumnya fasilitator melakukan intervensi secara struktural. Mengingat beberapa keputusan sudah menjadi kebijakan pusat, maka untuk membangun kesadaran masyarakat diperlukan pendekatan-pendekatan secara normative berdasarkan adat istiadat setempat. Bahkan pendekatan secara agama juga sering digunakan untuk membangun kesadaran masyarakat.

C.2. Lampung

- Bagaimana memastikan bahwa data hasil musyawarah dengan masyarakat dan tokoh untuk mencalonkan rumah tangga sangat miskin benar-benar mencerminkan yang sebenarnya serta memenuhi target yang diharapkan untuk dicalonkan menjadi calon peserta program keluarga harapan. Oleh karena itu pertanyaannya adalah sejauh mana masyarakat ataupun tokoh yang hadir disetiap pertemuan musyawarah hybrid baik ditingkat RT maupun Tingkat dusun/RW memiliki unsur netralitas yang tinggi atau tidak mengusulkan RTSM karena faktor kedekatan keluarga, ketidaknyamanan karena terpaksa mengusulkan nama yang sebenarnya kurang sesuai tetapi mereka tidak bisa berbuat banyak karena disebabkan adanya tokoh atau masyarakat yang karismatik atau disegani yang hadir dalam pertemuan tersebut.
- Bagaimana memastikan bahwa masyarakat yang hadir untuk mendaftar dan wawancara bagi metode pendaftaran, memang rumah tangga sangat miskin (RTSM) yang sesuai dengan skenario program. Oleh karena itu, pertanyaannya adalah sejauh mana masyarakat yang datang mendaftar dan wawancara tersebut, memang benar-benar keluarga RTSM yang layak dan memenuhi syarat untuk ikut mendaftar dan wawancara dengan pihak Badan Pusat Statistik ditiap-tiap kegiatan pendaftaran dan wawancara baik ditingkat kota maupun kabupaten.
- Bagaimana memastikan bahwa hasil kajian diskusi tentang tingkat klasifikasi kesejahteraan RTSM secara lokal bersama tokoh seluruh SLS ditingkat kelurahan maupun desa dapat menjadi acuan bagi pihak BPS untuk menentukan siapa yang paling berhak mendaftar dan wawancara. Selanjutnya adalah bagaimana pola keterkaitan hasil tersebut dengan pertanyaan-pertanyaan untuk wawancara apakah ada keterkaitan satu sama lain, ataukah bahwa hasil diskusi tersebut hanya sebatas untuk menghadirkan masyarakat RTSM untuk hadir dalam wawancara. Oleh karena itu, bila hal demikian ini yang terjadi berarti bahwa antara hasil diskusi ditingkat SLS dengan seluruh tokoh tidak berhubungan secara langsung dengan pertanyaan yang digunakan oleh pihak pewawancara dari BPS dalam rangka mencari target calon peserta program PKH.
- Bagaimana kegiatan sosialisasi PKH memiliki kekuatan yang mampu meningkatkan kesadaran bagi masyarakat yang tidak tergolong RTSM ini tidak mengikuti kegiatan mendaftar dan wawancara yang dilakukan oleh BPS. Dan bagaimana mendorong pihak-pihak diluar tim fasilitator studi terutama para aparat di tingkat Desa/kelurahan, aparat ditingkat kecamatan dan kabupaten tidak mendorong atau memprovokasi masyarakat yang tidak berhak untuk mendaftar dan sebaliknya justru membantu RTSM yang memenuhi sarat PKH dibantu untuk bisa mengikuti pendaftaran dan wawancara.
- Bagaimana memastikan bahwa kegiatan studi PKH ini setelah selesai tidak diintervensi oleh para pihak untuk kepentingan politik kelompok tertentu. Dan bagaimana pula bahwa masyarakat yang tidak mendapat kesempatan menjadi calon peserta PKH ini menjadi masyarakat yang dengan penuh keikhlasan dan kesadaran tidak memprovokasi kearah cheostik akibat mereka tidak menjadi peserta PKH tahun ini.
- Bagaimana memastikan bahwa penggunaan dana bantuan langsung tunai bagi program pendidikan dan kesehatan untuk RTSM ini benar-benar mampu meningkatkan penggunaannya untuk tujuan kesehatan dan pendidikan anak-anak dilingkungan keluarganya dan tidak membelanjakannya untuk kebutuhan diluar kewajiban PKH tersebut sebagaimana pengakuan

masyarakat dan pamong terhadap penggunaan BLT yang menurutnya tidak tepat karena tidak memiliki sasaran yang jelas.

- Bagaimana merubah image program BLT ditingkat aparat, masyarakat dan tokoh bahwa BLT untuk pendidikan ini berbeda dengan BTL bagi masyarakat miskin dari program pemerintah sebelumnya. Selama pelaksanaan uji coba metodologi ditingkat lapangan masih dijumpai persepsi dan phobia terhadap program BLT sebelumnya dari para aparat dan tokoh. Mereka beranggapan bahwa program BLT sering menimbulkan gejolak keributan pada saat pencairan dananya dan tidak jarang bagi masyarakat yang tidak menerima BLT mereka menjadi sasaran protes dan disertai kekerasan fisik terhadap aparat pemerintah dan tokoh.
- Bagaimana memastikan bahwa para stakeholder ditingkat lapangan mulai dari instansi teknis ditingkat pemerintah kabupaten/kota, mulai dari Dinsos, Camat, Lurah/Kades, RW/Kadus dan RT bisa berkontribusi secara maksimal dalam proses-proses implementasi PKH baik semasa studi sampai pelaksanaannya nanti.

Berangkat dari tantangan tersebut, dikembangkan beberapa strategi sebagai berikut :

Metode Pendaftaran, metode ini hampir disetiap pertemuan, wawancara dan pendaftaran selalu dibanjiri oleh para pendaftar baik, oleh karena itu strategy yang bisa dilakukan adalah; Pertama membuat kreteria lokal tentang tingkat kesejahteraan RTSM yang benar-benar bisa digunakan sebagai acuan dan disepakati oleh seluruh pihak yang hadir dalam pertemuan itu. Berikutnya para tokoh tersebut diminta untuk membantu mensosialisasikan hasil-hasil musyawarah ditingkat tokoh dan memberikan himbauan kepada masyarakat yang bukan RTSM untuk tidak mendaftar. Kedua, adalah strateginya adalah memperbanyak selebaran PKH yang bisa dibaca oleh semua orang ditempelkan ditempat-tempat umum. Ketiga ketika para pendaftar yang hadir banyak maka tim pewawancara bisa ditambah secara fleksibel. Keempat, strategi fasilitator memberikan jasa konsultasi pasca sosialisasi sangat efektif bagi masyarakat yang ingin mengetahui tentang PKH dan programnya serta siapa yang tidak boleh mendaftar. Hal ini seperti yang dilakukan oleh salah satu fasilitator Mitra Samya di Lampung Tengah ternyata dengan cara ini mampu memperkecil jumlah masyarakat yang hadir untuk mendaftar.

Metode hybrid dalam pelaksanaannya juga mendapatkan tantangan yang luar biasa dilapangan, namun demikian ketika fasilitator mampu menjelaskan dan mengelaborasi informasi PKH kepada peserta diskusi ternyata juga membantu pemahaman para peserta diskusi terhadap program tersebut. Strategi komunikasi yang efektif terhadap peserta diskusi ini juga mampu mengusulkan RTSM yang benar-benar memenuhi sarat PKH. Disamping itu, juga kepada para peserta diskusi sewaktu pertemuan diberikan bahan selebaran PKH juga membantu pemahaman mereka. Strategi membuat tingkat klasifikasi kesejahteraan dari 3 faktor utama yang dielaborasi masing-masing faktornya secara mendetail juga mampu berkontribusi terhadap pemahaman peserta diskusi itu sendiri.

Sementara untuk hambatan dan tantangan birokrasi, strategi yang diterapkan dilapangan selama proses studi berlangsung adalah dengan mencoba menjelaskan program PKH kepada para birokrat mulai dari tingkat kabupaten sampai tingkat kelurahan/desa melalui kegiatan koordinasi dan sosialisasi yang intensif oleh supervisor dan asistennya bersama dengan penanggung jawab PKH baik dari Dinsos dan BPS.

C.3. Sumatera Selatan

- **Alur komunikasi antar pihak yang terlibat dalam study.** Alur komunikasi yang terbangun saat melakukan kegiatan studi kurang maksimal. Idealnya komunikasi dengan antar pihak tersebut dilakukan sebelum kegiatan studi dan program PKH berjalan. Namun sebaliknya kegiatan koordinasi dan membangun komunikasi dengan para pihak dilakukan setelah kegiatan studi berjalan. Upaya yang dilakukan oleh tim pusat dengan daerah untuk membangun pemahaman bersama antar pihak di program PKH hanya melalui pendekatan administratif dan surat menyurat saja. Di Propinsi Sumatera Selatan upaya yang dilakukan untuk membangun pemahaman bersama dengan Pendamping PKH, Dinas Sosial, BPS dan fasilitator Mitra Samya adalah melakukan rapat koordinasi. Dalam rapat koordinasi tersebut di bahas beberapa gambaran umum tentang kegiatan studi, hak, tanggung jawab dan dari masing-masing pihak. Sebelum melakukan kegiatan dilapangan para pihak terlebih dahulu memahami peran dan tugasnya masing-masing. Kegiatan koordinasi tidak saja dilakukan pada saat awal kegiatan saja, namun selama kegiatan berjalan sering kali dilakukan koordinasi dengan tim lain.
- **Data FGD mencerminkan kondisi terakhir yang sebenarnya,** Di beberapa lokasi data FGD tidak mencerminkan kondisi terakhir dari wilayah SLS atau kelurahan seperti masalah data masyarakat, Data RTSM dan batasan wilayah serta kultur wilayah. Jika data tidak sesuai dengan kondisi wilayah maka akan berdampak pada hasil studi. Upaya yang dilakukan oleh tim fasilitator untuk menyikapi permasalahan tersebut antara lain melakukan identifikasi awal ke lokasi tersebut. Meskipun akan banyak memakan waktu namun upaya tersebut yang di anggap paling realistis. Jika sudah jelas data warga dan RTSM serta batasan wilayah maka fasilitator langsung melakukan sosialisasi ke masyarakat.
- **Warga yang diwawancara adalah RTSM (Rumah Tangga Sangat Miskin).** Memastikan bahwa data hasil musyawarah dengan masyarakat dan tokoh untuk mencalonkan rumah tangga yang sangat miskin benar-benar mencerminkan yang sebenarnya serta memenuhi target yang diharapkan untuk dicalonkan menjadi calon peserta program keluarga harapan. Upaya yang dilakukan oleh fasilitator adalah menghimbau kepada masyarakat atau tokoh untuk memberikan kesempatan kepada RTSM untuk mendaftarkan dirinya.
- **Menghindari nepotisme dalam diskusi terkait dengan kualitas hasil diskusi,** masyarakat ataupun tokoh yang hadir disetiap pertemuan musyawarah hybrid baik ditingkat RT maupun tingkat dusun memiliki unsur netralitas yang tinggi atau tidak mengusulkan RTSM karena faktor kedekatan keluarga, ketidaknyamanan karena terpaksa mengusulkan nama yang sebenarnya kurang sesuai tetapi mereka tidak bisa berbuat banyak karena disebabkan adanya tokoh atau masyarakat yang karismatik dan disegani yang hadir dalam pertemuan tersebut.
- **Konflik kepentingan,** kepentingan politik terkadang mengganggu proses studi di lapangan. Konflik kepentingan ini datang dari berbagai unsur yang memiliki kepentingan yang berbeda. Agar tidak diintervensi oleh para pihak untuk kepentingan politik kelompok tertentu maka perlu dilakukan koordinasi dengan semua pihak baik yang masuk dalam struktur manajemen program maupun di luar struktur program PKH termasuk masyarakat yang tidak masuk dalam daftar calon penerima program PKH.
- **Dominasi pada saat diskusi dengan aparat dan tokoh masyarakat serta ketua RT dan RW.** Dalam proses diskusi baik dengan masyarakat atau tokoh masyarakat pada metode hybrid masih ditemukan masyarakat atau tokoh yang mendominasi. Dominasi ini biasanya disebabkan karena ketokohan dan status sosial di masyarakat. Hasil yang didapatkannya pun kurang baik ketika ada dominasi didalam diskusi. Biasanya tokoh atau masyarakat yang mendominasi selalu memiliki kepentingan seperti memiliki keinginan supaya keluarga atau saudaranya dapat

masuk sebagai calon penerima bantuan meskipun tidak layak menurut indikator kemiskinan lokal.

Strategi yang dikembangkan selama mengalami tantangan seperti diatas dalam diskusi fasilitator mencoba memberikan kesempatan kepada masyarakat atau tokoh yang lain untuk mengeluarkan pendapatnya. Kata kunci yang sering digunakan oleh fasilitator adalah *“bagaimana dengan bapak-bapak atau ibu –ibu yang lain, apakah kita setuju dengan pendapat tersebut? Kalau belum setuju bagaimana sebaiknya?”*. Hal ini dilakukan agar masyarakat yang lain dapat memeberikan masukan untuk perbaikan hasil diskusi.

- ***Pada metode hybrid tambahan masyarakat atau tokoh***, masyarakat yang non RTSM pun ikut masuk dalam daftar calon penerima bantuan PKH. Hal ini memang sulit untuk dihindari karena memang ketetapan dalam metode hybrid tambahan. Namun terkadang masyarakat tidak memahami ketentuan dalam metode yang diterapkan. Dengan ketidakfahaman masyarakat, terkadang menyalahkan tokoh atau ketua RT setempat. strategi yang di kembangkan oleh fasilitator masyarakat menjelaskan kepada tokoh atau masyarakat terkait dengan metode yang sedang di ujicoba. Tokoh atau masyarakat tidak memiliki hak untuk merubah karena harus mengikuti tahapan dalam metode tambahan.
- ***Tokoh atau ketua RT dan RW masih takut untuk memutuskan dengan menggunakan sistim kuota***. Pengalaman masa lalu membuat bebebrapa tokoh menjadi terauma karena data yang diberikan tidak sesuai dengan kenyataan dilapangan. Selain memberikan penjelasan kepada warga masyarakat, upaya lain yang dilakukan adalah pelibatan masyarakat dalam menentukan warga masyarakat yang layak masuk menajadi calon peserta PKH.
- ***Pengawalan data hasil diskusi***. Terkadang setelah selesai diskusi di masyarakat atau dengan tokoh, masih ada ketikpuasan menerima daftar calon sehingga ada inisiatif untuk mau merubah daftar calon penerima diluar diskusi. Jika terjadi demikian maka fasilitator meminta kepada tokih atau masyarakat yang hadir dipertemuan untuk melakukan pertemuan ulang membahas daftar tersebut. Kebanyakan kasus seperti ini lebih dominan unsur nepotisme dan keberpihakan terhadap seseorang.
- ***Penentuan indikator kemiskinan lokal di dalam wilayah tertentu***. Penentuan indikator lokal dalam masyarakat lebih ditekan kepada sistuasi dan kondisi lokal di daerah tersebut. Namun terkadang indiktaor yang dibuat bukan mencerminkan kondisi lokal RTSM, sehingga akan memberikan peluang kepada masyarakat yang tidak layak untuk mendaftar dan diwawancara. Upaya yang sudah dilakukan dilapangan oleh fasilitator Mitra samay adalah mendiskusin dengan masyarakat indikator lokal yang lebih detail dan lebih rinci.
- ***Daftar warga pendatang dan pindah tidak tercatat dengan baik di ketua RT atau RW***. Terutama di daerah perkotaan, tingkat mobilaisasi warga cukup tinggi. Jumlah warga masyarakat yang keluar dan masuk sangat tinggi dan ini tidak tercatat dengan baik di RW atau dusun. Jumlah warga yang masuk dan keluar di susun tersebut tidak tercatat dengan baik sehingga susah mengidentifikasi warga masyarakat pada saat diskusi.
- ***Bagaimana merubah image program BLT*** ditingkat aparat, masyarakat dan tokoh, bahwa PKH berbeda dengan BTL bagi masyarakat miskin dari program pemerintah sebelumnya. Selama pelaksanaan studi ditingkat lapangan masih dijumpai persepsi dan phobia terhadap program BLT sebelumnya dari para aparat dan tokoh. Mereka beranggapan bahwa program BLT sering menimbulkan gejolak keributan pada saat pencairan dananya dan tidak jarang bagi masyarakat yang tidak menerima BLT mereka menjadi sasaran protes dan disertai kekerasan fisik terhadap aparat pemerintah dan tokoh.

V. REKOMENDASI

Dari proses dan hasil studi, jika ingin melakukan kegiatan yang sama kedepan dapat direkomendasikan sebagai berikut :

- Dalam proses studi kolaborasi, koordinasi antarpihak yang berkolaborasi menjadi faktor utama dalam menentukan keberhasilan di lapangan. Waktu untuk melakukan koordinasi awal harus dialokasikan secara memadai dan difasilitasi oleh tim pusat, sehingga parapihak dapat mengetahui peran dan tanggungjawabnya dalam proses studi.
- Training sebagai bagian seleksi fasilitator cukup efektif untuk mendapatkan fasilitator yang lebih berkualitas dan siap di lapangan. Namun proporsi calon fasilitator cadangan harus lebih banyak, sehingga ketika ada fasilitator yang mengundurkan diri tidak perlu lagi melakukan training khusus kepada fasilitator pengganti.
- Untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap proses partisipasi, harus dipastikan bahwa data RTSM calon peserta PKH yang dihasilkan dalam studi harus digunakan untuk melakukan verifikasi calon peserta PKH.
- Pendamping PKH harus diperkuat kapasitasnya tentang filosofi dan proses implementasi metode targeting yang terpilih sebagai metode penentuan peserta PKH. Metode targeting juga bisa diperluas untuk menjaring calon peserta program anti kemiskinan lainnya.

Lampiran 1.

Sebaran Lokasi Studi (Wilcah) Per Metode

Provinsi Jawa Tengah

1) Kabupaten Wonogiri

Kecamatan	Wilcah (Desa/Kelurahan)		
	Hybrid	Self Targeting	Jumlah Wilcah
Giritontro	2	3	5
Giriwoyo	5	6	11
Tirtomoyo	5	4	9
Bulukerto	3	3	6
Jatipurno	4	4	8
Jatisrono	6	6	12
Wonogiri	5	5	10
Selogiri	3	3	6
Total	33	34	67

2) Kabupaten Pemalang

Kecamatan	Wilcah (Desa / Kelurahan)		
	Hybrid	Self Targeting	Jumlah Wilcah
Belik	4	4	8
Randu Dongkal	6	5	11
Pemalang	5	6	11
Ampel Gading	5	5	10
Comal	6	6	12
Ulujami	6	6	12
Total	32	32	64

Provinsi Lampung

3) Kota Bandar Lampung

Kecamatan	Wilcah (Desa / Kelurahan)		
	Hybrid	Self Targeting	Jumlah Wilcah
Teluk Betung Barat	2	3	5
Teluk Betung Selatan	4	3	7
Panjang	3	2	5
Teluk Betung Utara	3	4	7
Tanjung Karang Timur	3	3	6
Tanjung Karang Pusat	4	4	4
Tanjung Karang Barat	1	2	3
Kemiling	2	1	3
Kedaton	2	2	4
Tanjung Senang	1	1	2
Sukarame	1	2	3
Sukabumi	2	1	3
Rajabasa	1	1	2
Total	29	29	58

4) Kabupaten Lampung Tengah

Kecamatan	Wilcah (Desa / Kelurahan)		
	Hybrid	Self Targeting	Jumlah Wilcah
Selagai Lingga	6	4	10
Sendang Agung	1	3	4
Pubian	6	7	13
Anak Tuha	4	4	8
Bekri	3	3	6
Punggur	3	3	6
Gunung Sugih	5	5	10
Terusan Nunyai	2	3	5
Bandar Mataram	4	3	7
Seputih Surabaya	5	4	9
Total	39	39	78

Provinsi Sumatera Selatan

5) Kota Palembang

Kecamatan	Wilcah (Desa / Kelurahan)		
	Hybrid	Self Targeting	Jumlah Wilcah
Ilir Barat II	2	2	4
Gandus	2	2	4
Sebrang Ulu I	1	1	2
Kertapati	1	1	2
Seberang Ulu II	1	2	3
Plaju	1	1	2
Bukit Kecil	2	1	3
Ilir Timur I	3	2	5
Kemuning	1	1	2
Ilir Timur II	2	1	3
Sematang Borang	1	1	2
Sukarami	0	1	1
Total	17	16	33

6) Kabupaten Ogan Komering Ilir

Kecamatan	Wilcah (Desa / Kelurahan)		
	Hybrid	Self Targeting	Jumlah Wilcah
Tulung Selapan	6	5	11
Pedamaran	4	4	8
Pedamaran Timur	2	2	4
Tanjung Lubuk	7	7	14
Teluk Gelam	4	5	9
Kota Kayu Agung	8	7	15
Sirah Pulau Padang	6	7	13
Jejawu	6	6	12
Pampangan	7	7	14
Total	50	50	100

Lampiran 2.

DAFTAR NAMA DAN ID FASILITATOR EFFECTIVE TARGETING OF ANTI-POVERTY TARGETING II

1. Fasilitator Hybrid

ID Fasilitator	Nama Fasilitator	Kabupaten
Jawa Tengah		
101	Agus Suryadi, SH	Wonogiri
102	Kusmanto, SE	Wonogiri
103	Zulaikha, S.Pt	Wonogiri
104	Nurqiswaty, SE	Wonogiri
105	Mitradi Dwi Wibowo, S.Hut	Pemalang
106	Catur Sigit Prasetyo, S.Pd.I	Pemalang
107	Wida Sulistiani, SE	Pemalang
108	Irma Yunita, SE	Pemalang
109	Budi Susilo, ST	Pemalang
110	Jarwanto, S.Pd	Pemalang
111	Edy Gunawan, SE	Pemalang
Sumatera Selatan		
112	Doni Arya Duta	Palembang
113	Yudo	Palembang
114	Eko Kusuma Putra	OKI
115	Darman	Palembang
116	Elya Fransiska/Sumarlex	Palembang
117	Irkhamiwani Ma'ruf	Palembang
118	Dani Krismanto	OKI
119	Eka Candra	OKI
Catatan : Fasilitator atas nama Elya Friska mengundurkan diri setelah mendapat masalah dilokasi study dan kemudian diambil alternatif untuk menggantikan dengan Sumarlex.		
Lampung		
120	Ahmad Rochfii	Bandar Lampung

ID Fasilitator	Nama Fasilitator	Kabupaten
121	Aulia	Bandar Lampung
122	Agustiawan	Bandar Lampung
123	Bayu Eko Septiadi	Bandar Lampung
124	Alfianto	Lampung Tengah
125	Syauqi Akbar	Lampung Tengah
126	Aang Aprolyansya	Bandar Lampung
127	Eko Budi Santoso	Lampung Tengah
128	Yusron	Lampung Tengah
129	Amirudin Azmi	Lampung Tengah
130	Leny Astuti	Bandar Lampung
131	Ali Taufik	Lampung Tengah

2. Fasilitator Pendaftaran

ID Fasilitator	Nama Fasilitator	Kabupaten
Jawa Tengah		
201	Sidik Wisudianto, SE	Wonogiri
202	Mardlia Ariyanti, ST	Wonogiri
203	Anton Nugroho, SE	Wonogiri
204	Rudito, ST	Pemalang
205	M Teguh Ekavianto, SE	Pemalang
206	Harris Mahendra, ST	Pemalang
Sumatera Selatan		
207	Muhammad Nur	OKI
208	Sri Agustina	Palembang
209	Lidiawati	OKI
210	Yudi Habibi	OKI
211	Ade Rameyani	OKI
212	Iwan Ferosika	OKI
213	Intan Sriwedari	Palembang
Lampung		
214	Rangga Pradipta I	Bandar Lampung

ID Fasilitator	Nama Fasilitator	Kabupaten
215	Rini Tri Utami	Bandar Lampung
216	Wihangga Trisunu	Lampung Tengah
217	Redyson	Lampung Tengah
218	Hary Suhendra	Lampung Tengah
219	Asimah (P)	Lampung Tengah
220	Mai Nilasari	Bandar Lampung

Keterangan :

Kode awal 1 = Hybrid

Kode awal 2 = Pendaftaran

Lampiran 3.a. Hasil Review Refleksi Jawa Tengah

HASIL REVIEW REFLEKSI TIM FASILITATOR SELF TARGETING PEMALANG, TANGGAL 19 MARET 2011

KENYAMANAN PROSES FASILITASI

Metode Apa Yang Dirasakan Paling Nyaman Fasilitasinya? Mengapa?		
Siapapun dusun /RW, karena ada salatu satu/semua desa yang jarak dusun ke balai desa/Kecamatan jauh, yang tidak diharapkan RTSM tidak mau kesana dengan alasan biaya dan tempat terlalu jauh, untuk siapapun bisa anggota RTSM yang bisa mendaftarkan banyak salah satu pasangan suami/istri yang merantau keluar daerah untuk mencari sesuap nasi	Siapapun – kantor desa karena tempat yang terjangkau dan tersedia tempat untuk pendaftaran/wawancara. Masyarakat juga tidak terbebani untuk jarak dari rumah	Siapa saja dusun/RW Alasan: masyarakat tidak merasa terlalu dibebani/ terlalu repot mengikuti proses seleksi PKH, baik syarat ataupun tempat.
Metode Apa Yang Dirasakan Paling Banyak Masalah Fasilitasinya? Mengapa?		
Suami-istri di kecamatan, karena tempatnya terlalu jauh dan perlu ongkos untuk datang mendaftar di kecamatan, dan harus suami-istri perlu ongkos yang cukup padahal mereka belum tentu mendapatkan bantuan tersebut.	Suami istri kecamatan, karena yang datang mendaftar harus berdua dan tempat pendaftaran/wawancara jaraknya jauh, untuk memakan waktu dan harus keluar ongkos meskipun belum tentu lolos jadi peserta	Suami Istri kecamatan: masyarakat mengeluhkan jauhnya tempat pendaftaran dan harus datang dengan dengan pasangan, mereka juga harus mengeluarkan ongkos transport bagi yang rumahnya jauh dari lokasi pendaftaran
Tahapan Mana Dari Metode Yang Dirasakan Paling Mudah?		
Sosialisasi masyarakat, karena kita langsung berhadapan dengan masyarakat untuk memahami masyarakat tentang alur program PKH ini, agar informasi yang diberikan langsung didengar sendiri oleh masyarakat agar tidak terjadi salah informasi.	Pertemuan masyarakat, karena pada tahapan ini sosialisasi PKH dan masyarakat sudah banyak yang mengetahui PKH dari himbauan tokoh masyarakat / perangkat desa	Sosialisasi masyarakat, kita langsung berhadapan dan menjelaskan kepada masyarakat kebanyakan masyarakat antusias dengan program PKH.
Tahapan Mana Yang Dirasakan Paling Banyak Masalah?		
Koordinasi dengan camat dan Kades, karena camat/kades ketakutan akibat bantuan sebelumnya yang menimbulkan konflik di desa dan umumnya kades minta konsumsi. Masalah logistic cukup menghambat saat koordinasi dan pertemuan tokoh, sedangkan saat sosialisasi di masyarakat tidak masalah. Tidak adanya logistic menyebabkan para tokoh tidak mendukung	Koodinasi dengan kepala desa, ada beberapa kepala desa yang meminta untuk dana konsumsi karena ini sudah menjadi adat jika ada pertemuan pasti adan konsumsi.	Pertemuan tokoh: Trauma masa lalu membuat para tokoh menganggap PKH sama dengan program yang lain. Ada sebagian tokoh yang menganggap program ini terlalu ribet dan terlalu panjang prosesnya.

program.		
----------	--	--

KETERSEDIAAN DATA PUSAT DAN QUOTA CALON PESERTA

Adakah Persoalan Terkait Data Pusat Dan Quota Calon Peserta PKH?		
Untuk pendaftaran tidak begitu tahu tentang jumlah quota untuk desa tersebut, tetapi sebagian para tokoh / masyarakat menanyakan hal tersebut dan itu tidak terlalu menjadi persoalan karena RTSM yang memiliki salah satu syarat bisa mendaftarkan dan hasil itu siapa yang menjadi peserta dari hasil pusat.	Masyarakat tidak ada persoalan karena harus sesuai syarat dan pelaksanaan pendaftaran/ pengumpulan hasil belum terjadi.	Tidak ada, ketika pihak desa atau masyarakat menanyakan jumlah quota kita cukup mengatakan itu kebijakan pusat, dan masyarakat bisa langsung memahami.
Apakah Ketersediaan Data Pusat Sangat Mendukung Pelaksanaan Metode?		
Daftar SLS sangat mendukung proses, untuk mengetahui jumlah SLS di desa tersebut. Daftar nama-nama dan jumlah quota tidak begitu menjadi persoalan	Ya, untuk mengetahui jumlah SLS dan data juga dapat dijadikan untuk menentukan jumlah pertemuan di desa tersebut.	Ya, terutama data SLS dan jumlah SLS, sehingga kita bisa atur strategi sebelum ke lapangan, termasuk berapa hari kita bisa menyelesaikan proses.
Bagaimana Respon Masyarakat/ Para Pihak Terkait Data Pusat?		
Untuk masyarakat sendiri tidak terlalu mempermasalahkan tentang data / quota data pusat, yang mempertanyakan kebanyakan dari tokoh dan Kades	Respon cukup mendukung karena dapat mengetahui siapa yang berhak dan tepat sasaran. Yang lebih merespon adalah perangkat desa/ tokoh masyarakat.	Masyarakat tidak terlalu mempersoalkan data dan quota, mereka lebih konsentrasi bisa / tidak bisa ikut mendaftar dan bisa masuk program PKH.
Pihak yang sering Tanya tentang masalah data/quota adalah Kepala desa dan tokoh masyarakat, mereka membandingkan dengan quota jumlah BLT.		

ALOKASI WAKTU YANG TERSEDIA

Apakah Jadwal Yang Dialokasikan Terlalu Ketat, Atau Dianggap Bersifat Fleksible? Apakah Waktu Yang Dialokasikan Untuk Pelaksanaan Metode Dirasakan Cukup?		
Waktu sudah bersifat fleksibel / cukup, dan jadwal tersebut bisa mengetahui kita berapa lama di desa tersebut.	Alokasi waktu fleksibel dan cukup karena dari waktu yang dijadwalkan dapat menentukan berapa lama ada di lokasi, agar pelaksanaan pertemuan/sosialisasi lebih efektif.	Alokasi jadwal cukup fleksible dan untuk melaksanakan semua tahapan proses. Terutama dengan batasan maksimal 3x proses/hari sangat membantu proses di lapangan dan kondisi masyarakat setempat.
Berapa Rata-Rata Waktu Untuk :		
<ul style="list-style-type: none"> Koordinasi Camat, Kades? Pertemuan tokoh/pertemuan seluruh ketua RT? 		

<ul style="list-style-type: none"> • Pertemuan masyarakat/tokoh atau sosialisasi? • Diskusi di Hybrid? 		
Koordinasi Camat ± 30 menit Koordinasi kades ± 45 menit Pertemuan tokoh ± 120 menit Pertemuan masyarakat ± 90 menit	Koordinasi Camat ± 1 jam Koordinasi kades ± 1 jam Pertemuan tokoh ± 2 jam Pertemuan masyarakat ± 1-2 jam	Koordinasi Camat/Kades + 1 jam Pertemuan tokoh: 2-3 jam Pertemuan masyarakat: 1-1'5 jam
Bagaimana Dampak Alokasi Waktu Terhadap Kehadiran Peserta (Laki/Perempuan/Masyarakat/Tokoh) Di Pedesaan Dan Perkotaan?		
Dampaknya yang hadir waktu pertemuan masyarakat yang datang hanya RTSM dan yang mempunyai salah satu syarat, baik laki-laki atau perempuan dan perwakilan dari tiap-tiap RT.	Dampaknya adalah pada pertemuan masyarakat tingkat kehadirannya hanya sebagian besar masyarakat yang ikut sosialisasi, tidak bisa tercover semua.	Rata-rata kehadiran peserta didominasi ibu-ibu terutama pertemuan pagi dan siang hari. Itu terkait alokasi jadwal yang terbatas, sehingga harus melaksanakan pagi, siang/malam.
Bagaimana Idealnya Alokasi Waktu Menurut Fasilitator?		
Idealnya diberikan waktu yang cukup dan sesuai dengan besar kecilnya lokasi di desa tersebut/banyak sedikitnya jumlah RT di desa tersebut.	Idealnya disesuaikan dengan kondisi masyarakat dan diperkirakan 1-2 minggu dalam satu desa	Idealnya waktu fleksible sesuai dengan kondisi masyarakat setempat, sehingga masyarakat lebih banyak yang datang. Alokasi waktu ideal untuk SLS dibawah 35 → 6 hari, untuk SLS diatas 35 waktu yang dibutuhkan 10 hari.
Tahapan Mana Yang Paling Membutuhkan Waktu? Mengapa?		
Pertemuan masyarakat, karena ada desa yang lokasinya luas dan jumlah RT-nya banyak dan yang diharapkan semua masyarakat memahami betul tentang program PKH	Sosialisasi di masyarakat karena diharapkan semua masyarakat dapat mengetahui / paham PKH	Sosialisasi masyarakat, karena harus turun ke masyarakat di satu desa tersebut, dan memastikan seluruh masyarakat bisa mengakses informasi, terutama desa dengan jumlah SLS banyak dan lokasi yang saling berjauhan antar SLS.

PARTISIPASI DAN TINGKAT KEHADIRAN PESERTA

Apakah Peserta Serius Mengikuti Semua Tahapan Metodologi?		
Sebagian besar masyarakat mengikuti semua tahapan dengan serius, karena ingin mengetahui betul bagaimana alur kegiatan program PKH tersebut	Hampir sebagian besar peserta serius mengikuti tahapan karena pada proses pendaftaran / wawancara yang mendaftar lebih teratur dan efektif.	Rata-rata peserta serius saat sosialisasi karena mereka ingin tahu informasi lengkap baik syarat pendaftaran, jumlah bantuan dan jadwal pendaftaran.

Bagaimana Tingkat Kehadiran Peserta Di Setiap Tahapan Proses?		
Sebagian besar banyak datang untuk pertemuan masyarakat, karena masyarakat ingin tahu sendiri/ingin dengar sendiri apa itu PKH, agar masyarakat menyadari yang diperoleh saat ini.	Sebagian besar masyarakat datang karena ingin tahu dan jelas tentang PKH agar tidak terjadi salah informasi.	Tingkat kehadiran peserta sosialisasi didominasi ibu-ibu, di pendaftaran berimbang. Peserta yang datang saat sosialisasi rata-rata diatas 50 tahun.
Bagaimana Tingkat Kehadiran Peserta Laki-Laki Dan Perempuan Dalam Setiap Proses?		
Untuk waktu pagi,siang dan sore kebanyakan yang hadir di pertemuan masyarakat adalah ibu-ibu, karena umumnya bapak-bapak melakukan aktifitas sehari-hari. Tapi di malam hari sebagian besar yang hadir bapak-bapak.	Tingkat kehadiran laki-laki untuk pada waktu malam dan untuk siang hari lebih dominan kaum perempuan.	Tingkat kehadiran peserta laki/perempuan tergantung waktu pelaksanaan, untuk pelaksanaan pagi dan siang kebanyakan yang hadir ibu-ibu, untuk pelaksanaan malam berimbang laki/perempuan. Secara umum perempuan lebih mendominasi jumlah peserta perempuan.
Apa Yang Dirasakan Fasilitator Terhadap Kehadiran Peserta (Laki Dan Perempuan) Jika Dikaitkan Dengan Efektifitas Waktu Dan Kualitas Keputusan Yang Diambil?		
Untuk peserta sebagian yang hadir ibu-ibu lebih efektif dan sebagian besar yang menerima dan paham karena program PKH ini untuk RTSM yang memenuhi salah 1 syarat. Ada masyarakat sebelum sosialisasi selesai ada yang langsung pulang karena sudah menyadari itu untuk RTSM, dan ada yang orang-orang jompo sampai menangis karena dia tahun bahwa dia tidak bisa mendaftar apalagi dapat bantuan.	Lebih aktif perempuan daripada laki-laki karena PKH lebih terfokus pada kaum perempuan. Adanya yang tidak puas dengan PKH karena untuk orang jompo yang RTSM tidak bisa ikut karena kurangnya syarat.	Ketika pertemuan didominasi peserta perempuan, suasana lebih hidup dan aktif, ibu-ibu lebih berani bertanya dibanding bapak.
Tahapan Mana Yang Paling Seru Dan Membutuhkan Konsentrasi?		
Pertemuan tokoh, karena dipertemuan ini kita harus benar-benar memahami dengan para tokoh agar bisa menghimbau warganya dan tidak salah informasi dan menentukan jadwal wawancara dan pertemuan masyarakat.	Pertemuan tokoh karena pada pertemuan ini harus jelas pada sosialisasi dan tokoh juga akan menghimbau warganya agar pada proses selanjutnya dapat berjalan lancar.	Pertemuan tokoh, terutama tokoh yang kritis dengan tingkat pendidikan tinggi, mereka lebih banyak bertanya teknis kegiatan, sehingga kita dituntut lebih siap untuk paham materi, sebagai pemecah kebuntuan saat ada perdebatan.

TEMPAT / LOKASI KEGIATAN

Apakah Masyarakat Di Lokasi Perkotaan Dan Pedesaan Memberikan Respon Yang Berbeda Terhadap Pelaksanaan Ujicoba?		
Untuk respon masyarakat di pedesaan lebih respon daripada masyarakat di perkotaan, masyarakat desa	Masyarakat di pedesaan memberikan respon dan tanggapan yang lebih besar dari pada di perkotaan. Di	Lokai di desa atau di kota tidak terlalu berpengaruh terlalu berpengaruh terhadap

lebih antusias karena masyarakat di desa kebanyakan merasa RTSM belum mempunyai kesadaran diri kalau dirinya cukup mampu.	pedesaan lebih antusias karena merasa dirinya sangat miskin tapi kebanyakan masyarakat jika ada program bantuan merasa dirinya miskin	antusiasme atau respon masyarakat ikut berpartisipasi dalam program PKH
Apakah Factor Jarak Menjadi Masalah Yang Berpengaruh Terhadap Efektifitas Dan Efisiensi Pelaksanaan Metode?		
Untuk jarak tidak terlalu menjadi beban atau tidak mempermasalahkan jarak tempat untuk mengikuti sosialisasi PKH, karena masyarakat ingin tahu apa itu program PKH.	Jarak tidak berpengaruh pada proses sosialisasi menurut masyarakat tapi yang agak sulit adalah mencari tempat untuk sosialisasi yang ideal	Jarak tidak berpengaruh terhadap efektifitas pelaksanaan, yang paling berpengaruh adalah waktu pelaksanaan sosialisasi (pagi, siang, malam) tapi secara umum yang paling berpengaruh atas kehadiran warga adalah saat mengundang warga, menyeluruh / sebagian

PERAN PIHAK LAIN

Bagaimana Koordinasi Dengan Pihak Pendamping, Dinsos Dan BPS?		
Untuk koordinasi dengan pendamping tidak ada masalah sangat bagus bisa membantu fasilitator untuk menjalankan sosialisasi. Untuk dinsos dan BPS untuk koordinasi kurang baik, karena pihak tersebut belum paham betul alur PKH	Koordinasi dan BPS masih agak kurang karena mungkin kepentingan sendiri-sendiri. Pihak pendamping sangat bagus dalam koordinasi dan dapat membantu / mendampingi fasilitator pada saat sosialisasi	Secara umum koordinasi dengan pihak terkait bagus terutama para pendamping, mereka sangat kooperatif dan mendampingi setiap kita berproses. Pihak BPS paling susah diajak koordinasi terutama saat pelaksanaan wawancara dan ketepatan jadwal (jam) pelaksanaan wawancara.
Bagaimana Peran BPS Dalam Pelaksanaan Ujicoba?		
Peran BPS dalam program ini ada sedikit kasus di Randu Dongkal (Kreyo) keluar dari metodologi, tidak suami istri tetapi suruh membawa form N2, dan yang mendaftar diharuskan bawa KK/KTP.	Peran BPS cukup bagus untuk proses pendaftaran tapi untuk kedisiplinan waktu pada proses pendaftaran kurang bagus karena banyak memotong waktu pelaksanaan pendaftaran (Sidorejo)	Peran BPS masih sebatas melaksanakan tugas sebagai pewawancara, selebihnya susah diatur, terutama ketepatan jadwal saat mulai (molor) dan pulang lebih cepat terutama saat peserta mulai sedikit yang datang.
Peran-Peran Mana Yang ... Mendukung? Adakan		
Peran yang mendukung adalah peran dari pendamping, pendamping sudah melakukan tugasnya dengan baik, yang menyimpang adalah BPS, dalam satu bangunan rumah ada 3 RT SM, tetapi waktu	Peran yang sudah bagus dan mendukung adalah peran pendamping sesuai dengan tugasnya. Peran yang masih kurang adalah peran BPS pada proses pendaftaran dan wawancara karena banyak	Peran pendamping sangat mendukung selama proses dilapangan, walaupun ada beberapa mengambil porsi lebih diluar job mereka (mereka ikut bicara banyak saat sosialisasi dan

pendaftaran yang mendaftar disuruh salah satu (perwakilan) dan diharuskan membawa KK/KTP.	memotong waktu yang ditentukan.	menjelaskan kurang lengkap
Bagaimana Peran Pendamping Dan Peran Dinsos Dalam Pelaksanaan Ujicoba?		
Peran pendamping dan dinsos dalam pelaksanaan program ini cukup bagus hanya beberapa pendamping yang belum paham betul PKH itu apa.	Peran pendamping dan dinsos cukup bagus tapi ada juga pendamping yang tidak melaksanakan tugas dengan baik (belik). Untuk dinsos, kurangnya pemahaman terhadap metode terjadi pemindahan tempat pendaftaran yang semula di kecamatan di pindah ke kantor desa (Bojongnangka)	Peran pendamping sangat bagus, dari mulain pendampingan saat koordinasi desa pertemuan tokoh, pertemuan masyarakat, sampai tahap pendaftaran, kecuali koordinasi pendamping kecamatan Ulu Jami yang terlalu sibu dengan kerja sampingan dan susah diajak koordinasi

TINGKAT PEMAHAMAN

Bagaimana Tingkat Pemahaman Fasilitator Terhadap Manual Dan Metodologi?		
Untuk pemahaman manual dan metodologi cukup baik dan memahami konsep tentang program PKH ini.	Pemahaman tentang manual dan metodologi cukup baik	Sangat paham dengan metodologi dan manual sebagai dasar pelaksanaan tugas di lapangan, sehingga proses yang dijalani terasa menyenangkan dan enjoy.
Apakah Manual Cukup Mudah Untuk Dipahami Dan Dilaksanakan?		
Untuk manual book cukup mudah untuk dipahami, tapi terkadang manual dan kenyataan di lapangan tidak sama, kondisi lapangan tidak bisa sama akan berbeda-beda.	Manual cukup mudah dipahami dan dilaksanakan serta diterapkan di masyarakat	Manual cukup simple sehingga tidak sulit dipahami.
Bagaimana Tingkat Pemahaman Para Pihak (Masyarakat, Tokoh, Pemerintah Desa/Kec/Kab, Pendamping Dan BPS)?		
Untuk pemahaman masyarakat, tokoh, kades, kecamatan bisa memahami tentang program PKH, kalau BPS belum memahami betul tentang apa tugasnya dan seperti apa tugasnya pada saat proses pendaftaran.	Tingkat pemahaman di masyarakat baik dan mudah dilaksanakan. Tingkat pemahaman di kecamatan dan kabupaten masih kurang karena kurang adanya sosialisasi. Tingkat pemahaman pendamping dan BPS masih kurang karena sering menyimpang dari metodologi.	Pemahaman pemerintah kecamatan dan BPS (sebagai pelaksana di lapangan masih kurang). Untuk masyarakat cenderung mudah diarahkan asal tidak ada provokasi di tengah masyarakat. Untuk tokoh kadang susah dipahami terutama yang merasa pintar mereka kadang pakai logika penalaran sendiri.
Apakah Internalisasi Metode Ditingkat Setiap Pelaksana Dianggap Kurang/Cukup Memadai/Bagus/Sangat Bagus?		
Fasilitator bagus, pendamping bagus, dinsos cukup bagus. BPS kurang bagus, belum memahami betul dan perlu	Fasilitator bagus Pendamping cukup memadai Dinsos cukup memadai	Untuk para fasilitator sangat bagus. Untuk pendamping bagus Untuk Depsos cukup memadai.

dipahamkan betul agar tidak ada beda informasi	BPS kurang karena sering menyimpang dari metodologi	Untuk BPS kurang dan mereka harus lebih banyak belajar dan mau lebih banyak mendengar masukan pihak lain.
Bagaimana Peran Dan Pengaruh Dari Para Tokoh Kunci (Key Person) Terhadap Pelaksanaan Ujicoba Dilapangan?		
Para tokoh kunci sangat bagus bisa memahami tentang program PKH dan bisa menghimbau warganya supaya menaati siapa yang harus mendaftar	Peran tokoh kunci sangat penting karena himbauan dan informasi dari tokoh lebih banyak di dengar/dipercaya oleh masyarakat.	Peran key person sangat berpengaruh terhadap keberhasilan program karena mereka lebih didengar oleh lingkungan sekitar. Jika yang dikatakan para key person baik maka makin berhasil proses selanjutnya, begitu juga sebaliknya.

PEMBELAJARAN PENTING

Pembelajaran Menarik Apa Saja Yang Telah Didapat Selama Pelaksanaan Mulai Sejak Persiapan Hingga Implementasi (Positif Dan Negative) Metode Targeting?		
<ul style="list-style-type: none"> • Ternyata untuk mengendalikan masyarakat tidak begitu mudah, karena setiap ada bantuan masyarakat ingin mendapatkan semua walaupun RT tersebut dikatakan sudah cukup mampu. • Ternyata rumah tangga yang sudah cukup mampu sama antusiasnya dengan RTSM untuk mendapatkan bantuan. • Kesadaran masyarakat belum bisa timbul, tetapi setelah ada sosialisasi di masyarakat, kesadaran mereka bisa timbul dan memahami tujuan program PKH ini. • Tidak semua kepala desa mudah untuk mendukung mendukung program PKH, karena merasa trauma atas kejadian dengan program-program sebelumnya. • Peran tokoh dan Kades sangat mempengaruhi pemahaman masyarakatnya agar mematuhi apa yang ada di program PKH. • Ternyata pemahaman BPS tidak begitu bagus sehingga terjadi beda pendapat, yang seharusnya tidak diwajibkan malah sebaliknya. 	<ul style="list-style-type: none"> • Ketakuta kepala desa terhadap program pemerintah. Ada kepala desa yang merasa takut/trauma terhadap program karena sebelumnya ada program pemerintah yang sampai survey saja tetapi realisasi tidak ada sehingga kades di kejar orang masyarakat. • Masyarakat tidak mempermasalahkan tentang konsumsi. Menurut warga lebih focus tentang penjelasan program daripada konsumsi dan konsumsi ini ditakutkan perangkat desa karena sudah adat di masyarakat. • Tingkat antusias warga tinggi walaupun cuaca tidak mendukung (hujan). Warga yang cukup banyak meski hujan dan lampu mati penting untuk meningkatkan taraf hidup RTSM. • Ternyata susah untuk mengumpulkan warga pada siang hari karena kesibukan dengan aktifitas lainnya. Kebanyakan yang datang pada saat sosialisasi adalah tidak RTSM. 	<ul style="list-style-type: none"> • Warga miskin cenderung lebih mudah diarahkan dan diberi pengertian dibanding warga kaya yang cenderung tidak mau mendengar saat diarahkan. • Masih banyak warga non RTSM ikut mendaftar, mereka masih berpikir coba-coba dan untung-untungan. • Peran tokoh masyarakat terutama yang punya pengaruh besar di masyarakat sangat menentukan keberhasilan pelaksanaan di masyarakat misal: di suatu tempat dimana kehidupan religi bagus masyarakat akan sangat menurut dengan apa yang dikatakan oleh kyai, sehingga masyarakat di saat para kyai menghimbau warga kaya untuk tidak mendaftar, mereka benar-benar tidak datang mendaftar.

INPUT DAN SARAN

Metode Mana Yang Paling Direkomendasikan (Di Hybrid Apa Dan Di Pendaftaran Apa)?		
Siapapun di dusun / RW. Tempat pendaftaran tidak terlalu jauh dan tidak mengeluarkan banyak ongkos. Tidak harus suami-istri dan bisa salah satu yang mendaftar, karena kebanyakan salah satu pasangan menjadi buruh dan sulit untuk ditinggalkan.	Siapapun – dusun/RW, Masyarakat tidak terlalu jauh dan tidak keluar ongkos saat pendaftaran. Petugas pemerintah dalam wawancara juga lebih mendekat ke masyarakat. Suami/istri tidak harus datang semua dan bisa melakukan aktifitas lain.	Metode siapa saja Dusun/RW, Masyarakat miskin mudah menjangkau tempat pendaftaran dan tidak butuh waktu dan biaya transport saat mendaftar.
Rekomendasi Apa Saja Yang Ingin Disampaikan Terkait Pelaksanaan Metode : (Tahapan, Waktu, Kerjasama Tim/Dukungan Pihak Lain, Alat Dan Bahan,DII)?		
Untuk pihak lain di mohon benar-benar paham agar tidak beda apa yang dilakukan. Untuk alat-alat dan bahan diminta untuk dilengkapi. Untuk waktu pada proses sosialisasi bisa disesuaikan besar kecil lokasi desa tersebut.	Fasilitator alat dan bahan lebih dilengkapi. Waktu lebih diperpanjang untuk sosialisasi masyarakat agar tercover semua. Pihak lain diharapkan benar-benar paham terhadap metode agar pelaksanaan dilapangan bisa lancar.	Lengkapi alat-alat pendukung untuk para fasilitator (fashion) Biaya transport dan komunikasi ditambah. Siapkan lebih matang koordinasi dengan pihak-pihak terkait (instansi) sehingga saat pelaksanaan mereka paham tugas dan kewajiban masing-masing dengan segala toleransinya/ konsekuensinya

DUKUNGAN PEMERINTAH SETEMPAT

Bagaimana Respon Pemerintah (Kab, Kec, Desa, Dusun, RW/RT) Terhadap Ujicoba Metode?		
Untuk respon pemerintah dari kab-RW/RT sangat baik dan mendukung adanya program PKH, karena kebanyakan besar masyarakat tidak terlalu memikirkan pendidikan dan kesehatan anak, terutama untuk RTSM karena keterbatasan biaya.	Respon pemerintah kabupaten sampai RW/RT cukup baik mendukung adanya program kemiskinan yang ada. Respon di masyarakat juga sangat antusias karena pemerintah desa mendukung penuh adanya program kemiskinan.	Respon pihak pemerintah dari kabupaten – kecamatan masih rendah dan melihat masih sebatas menjalani proses kegiatan. Untuk pemerintah desa dan dusun bagus sepanjang bisa memberi pemahaman yang jelas kepada mereka
Bagaimana Tingkat Pemahaman Pemerintah (Kab, Kec, Desa, Dusun, RW/RT) Terhadap Ujicoba Metode?		
Tingkat pemahaman dari kabupaten dan kecamatan belum begitu paham dengan program PKH ini seakan-akan semua bantuan itu akan menimbulkan kondisi yang tidak menyenangkan.	Tingkat pemahaman di tingkat kabupaten dan kecamatan sangat kurang karena tidak adanya sosialisasi dan hanya koordinasi. Untuk tingkat desa, dusun dan RW/RT cukup baik dan pengertian warga	Secara umum pemahaman pemerintah dan instansi terkait masih rendah, seolah PKH bukan program pemerintah yang perlu di dukung instansi (Depsos dan BPS) juga masih rendah

Untuk BPS belum mengerti betul untuk melakukan tugasnya dengan baik.	juga sangat baik.	pemahaman metodenya, padahal mereka terlibat langsung di program PKH.
Tahapan Mana Dari Setiap Metode Yang Dirasakan Paling Rawan Dan Mutlak Perlu Dukungan Pihak Pemerintah?		
Yang perlu dukungan pemerintah saat pertemuan tokoh dan masyarakat untuk menghimbau / bisa menjelaskan kepada masyarakatnya agak bisa memahami dan menyadari itu untuk RTSM yang ada salah 1 dari 3 syarat.	Tahapan koordinasi dan sosialisasi tokoh karena dari proses awal ini sosialisasi dan pemahaman ke masyarakat menjadi lebih lancar.	Sosialisasi, dukungan yang paling kita butuhkan adalah pendampingan saat sosialisasi dan saat para tokoh ikut member himbauan kepada masyarakat sebgus apapun sosialisasi tapi muncul provokator di tengah masyarakat semua akan sia-sia, sosialisasi sangat berpengaruh kepada proses selanjutnya.

**HASIL REVIEW REFLEKSI TIM FASILITATOR HYBRID
PEMALANG, TANGGAL 27 MARET 2011**

TINGKAT PEMAHAMAN

Bagaimana Tingkat Pemahaman Fasilitator Terhadap Manual Dan Metodologi, Apakah Manual Cukup Mudah Untuk Dipahami Dan Dilaksanakan Dilapangan?						
Cukup paham manual ataupun metodologi pada saat di pertemuan bicara keras dan jelas.	Cukup mudah dipahami dan diakutualisasikan karena sudah bisa dilakukan dalam proses bermasyarakat dan berorganisasi.	Sudah cukup paham dengan metodologi dan pemahaman manualnya. Alasannya kita sebagai fasilitator bisa mengerti dan bisa menjelaskan kepada tokoh/masyarakat pada saat diskusi.	Cukup paham, baik manual maupun metodologi yang penting saat di forum / audien bicaranya keras... pelan. Pemahaman masyarakat saat kita menjelaskan cukup jelas, walau ada yang kurang tapi mereka bertanya dan kita jelaskan sesuai kapasitas kita.	Sudah sangat jelas tapi kenyataannya di lapangan untuk menerapkannya agak sulit.	Pemahaman manual sudah jelas, alasan: bisa menjelaskan / mensosialisasikan ke masyarakat / tokoh.	Baik/mudah karena keterangannya mudah dipahami
Apakah Internalisasi Metode Ditingkat Setiap Pelaksana Dianggap Kurang/Cukup Memadai/Bagus/Sangat Bagus?						
Pemahaman pendamping cukup, tergantung kapasitas pendamping dan tidak terlibat dalam proses	Internalisasi metode: pemahaman PKH bertambah saat sharing dengan pendamping, pemahaman metode sudah cukup paham.	Cukup paham untuk pendamping dalam pemahaman metode, Cuma dalam metode kita pendamping tidak terlalu dominan dalam pelaksanaannya jadi hanya sekali-kali ikut mendampingi.	Pemahaman pendamping (tokoh) terhadap metode cukup dan tergantung kapasitas pendampingnya, karena peran pendamping tidak begitu dominan diproses / tidak terlibat dalam proses.	Internalisasi metode: bagus karena dengan metode ini akan tepat sasaran. Pendamping: mereka kurang paham terhadap metode ini.	Internalisasi metode ada masukan tokoh di desa bahwa metode bertele-tele. Contoh untuk 2 RTSM kenapa harus memilih 4. Secara umum masyarakat menerima metode & alur PKH	Cukup bagus karena mudah dipahami oleh pendamping

Bagaimana Peran Dan Pengaruh Dari Para Tokoh Kunci (Key Person) Terhadap Pelaksanaan Ujicoba Dilapangan?						
Peran tokoh kunci: di beberapa desa mereka cukup mendukung dalam mengumpulkan warga untuk kumpulan serta dalam proses mereka ingin terlibat karena takut disalahkan.	Tokoh kunci sangat kooperatif dengan ikut mendampingi sebagian proses dan berperan aktif memobilisasi peserta diskusi.	Peran tokoh kunci sangat mendukung, pak kadus dan pak RT bersama-sama mengikuti dan ikut mengorganisir warganya untuk ikut diskusi. Pak Kades juga membantu mensosialisasikan bersama pak RT.	Peran tokoh kunci (RT, RW, Kadus, lurah) relatif, ada yang cukup berperan membantu mengumpulkan/ mengorganisir warga ke sosialisasi /seleksi. Bahkan mereka “saat proses” tidak ingin terlibat terlalu jauh, karena takut disalahkan seperti saat BLT dulu. Tetapi ada juga “Pak RT” yang ikut dan sangat dominan ingin memasukkan keluarganya.	Tanggapan tokoh kunci (RT/RW) mereka sangat kooperatif dalam kegiatan ini, dan mereka sangat berpengaruh dalam proses sosialisasi.	Peran tokoh kunci: beberapa tokoh kunci dilapangan ada yang kurang membantu, karena di salah satu desa si kadus malah memprovokasi agar PKH itu dihilangkan dengan alasan trauma dengan program BLT. Tapi secara umum tokoh membantu.	Pengaruhnya cukup, karena mereka memfasilitasi tempat dan mengundang warga/tokoh masing-masing RT. Kadus / ketua RT kooperatif karena ikut mendampingi.
Bagaimana Tingkat Pemahaman Para Pihak (Masyarakat, Tokoh, Pemdes, Pemkec, Pemkab, Pendamping Dan BPS)?						
Pemahaman masyarakat saat kita menjelaskan jelas, walaupun ada yang kurang jelas mau bertanya dan kita jelaskan sesuai yang kita pahami.	Pemahaman pihak terkait, cukup paham setelah kita melakukan proses sosialisasi dan seleksi.	Pemahaman tokoh, pemdes, masyarakat terkait dengan metodologi tersebut mereka cukup jelas dan bisa memahami, walaupun ada sebagian masyarakat terutama masyarakat yang SDM-nya kurang atau punya sifat pokok agak kurang mau mengerti.		Pemahaman tokoh/masyarakat: baik karena mereka sangat antusias untuk ikut sosialisasi	Pemahaman tokoh/masyarakat sudah baik, alasannya masyarakat /tokoh menerima program PKH di lingkungan SLS	Sudah cukup paham, karena setelah proses mereka langsung memahami, tapi kadang kala ada masyarakat yang tidak paham karena tujuannya harus dapat bantuan.

ALOKASI WAKTU YANG TERSEDIA

Apakah Waktu Pelaksanaan Metode Dirasakan Cukup? Bagaimana Idealnya Menurut Fasilitator?						
Sangat cukup untuk pertemuan desa dan tingkat RT.	Alokasi waktu yang diagendakan dari koordinasi → proses masing-masing RT sudah sangat cukup waktu.	Sangat cukup sekali, waktu pertemuan ketua RT, pertemuan di RT / diskusi karena rata-rata 1-2 jam	Waktu di RT, Desa rasanya kurang cukup, ya walau jadwal pada melelahkan sehingga perlu hiburan biar fresh	Waktu cukup sekali untuk setiap koordinasi tiap desa dan untuk tiap proses	Alokasi waktu tingkat RT (Pert SLS/diskusi 1,5-2 jam). Jadwal pertemuan perdesa dirasa cukup. Jadwal proses keseluruhan juga cukup.	Cukup mulai dari koordinasi dari kades, pertemuan ketua RT dan pertemuan masyarakat/ tokoh.
Apakah Jadwal Yang Dialokasikan Terlalu Ketat Atau Dianggap Fleksible?						
Jadwal teratur dan tidak ketat serta fleksibel dan bisa mengatur di lapangan.	Alokasi waktu cukup fleksible karena teknis pertemuan dijadwalkan sesuai musyawarah.	Jadwal tidak ketat, tapi teratur dan fleksible tinggal jadwal disesuaikan dengan kondisi lapangan. Apalagi minggu juga bisa libur / dipakai diskusi.	Jadwal cukup teratur ketat dan fleksible sangat sistematis sehingga perlu strategi untuk mengatur / mengkondisikan di lapangan (desa)	Fleksibel karena jumlah harinya dengan jumlah SLS cukup	Jadwal yang diberikan fleksible karena waktu pelaksanaan pertemuan kita buat sendiri.	Cukup fleksible karena pertemuannya sesuai dengan jadwal.
Apa Dampak Alokasi Waktu Terhadap Kehadiran Peserta (Laki/Perempuan/Masyarakat Tokoh Di Pedesaan & Perkotaan)						
Secara umum: pagi/siang yang paling banyak perempuan, malam pesertanya kebanyakan bapak-bapak, tapi ada di beberapa desa waktu malam perempuan dan laki-laki.	Dampak alokasi waktu di pedesaan, pagi kurang maksimal laki-laki kerja, sore/malam lebih maksimal karena waktu lebih luang	Secara umum: pertemuan pagi/siang kebanyakan yang hadir ibu-ibu. Untuk malam pun ibu-ibu ikut hadir karena dari awal waktu sosialisasi PKH tujuan untuk pendidikan dan kesehatan ibu dan anak. Sehingga ibu-	Secara umum: biasanya pertemuan pagi/siang kebanyakan hadir peserta perempuan dan malam lebih banyak laki-laki. Tetapi di desa pemutih di beberapa desa lain saat malam hari juga banyak	Dampak alokasi waktu: Desa, pertemuan pagi jumlah yang hadir pria dan perempuan seimbang, pertemuan malam juga seimbang antara laki dan perempuan. Kota, pertemuan pagi jumlah yang banyak	Dampak alokasi waktu: untuk pertemuan pagi cenderung yang datang ibu-ibu karena laki-laki bekerja. Pertemuan malam cenderung bapak-bapak karena ibu harus menunggu rumah dan anak (di desa → petani).	Pertemuan pagi kebanyakan yang datang ibu-ibu, sedangkan pertemuan malam yang hadir laki-laki.

		ibu banyak yang hadir. Bapak-bapak pagi, siang, sore atau malam juga hadir	peserta perempuan yang hadir, karena menurut bapak-bapak program ini lebih ke perempuan	perempuan sedangkan pertemuan malam lebih banyak laki-laki.	Di kota: pertemuan lebih efektif di sore/malam, karena kebanyakan pegawai kantor.	
Berapa Rata-Rata Waktu Untuk Koordinasi Camat/Kades? Pertemuan Tokoh? Pertemuan Masyarakat / Sosialisasi?						
Koordinasi kades 45 menit Pertemuan tokoh 1,5 jam. Pertemuan masyarakat 1-2 jam.	Waktu koordinasi camat/kades 1 jam. Tokoh 2 jam, sosialisasi /seleksi 1 ¼ - 2 jam	Waktu koordinasi: Kades 30-60 menit Pertemuan tokoh 1-2 jam Pertemuan masyarakat 1-2 jam	Koordinasi kades paling lama 1 jam, tetapi harus tepat waktu karena kades tidak selalu di tempat. Pertemuan masyarakat paling lama 105 menit.	Koordinasi kades 1-2 jam. Pertemuan tokoh 1-1,5 jam Pertemuan masyarakat waktu 1-2 jam.	Rata-rata waktu koordinasi: kades 1-2 jam. Pert tokoh 90-120menit. Pert masyarakat/ sosialisasi 1,5 – 2 jam	Koordinasi Kades 1-2 jam. Pertemuan tokoh waktu 1-2 jam. Pertemuan masyarakat 2-3 jam.
Tahapan Mana Dari Metode Yang Paling Membutuhkan Banyak Waktu? Mengapa?						
Tahapan yang paling lama: pertemuan masyarakat, apalagi kalau jumlah quota banyak serta dalam penentuan RTSM.	Yang paling butuh waktu koordinasi dengan ketua SLS karena ketua SLS banyak meminta waktu sore/malam	Tahapan paling lama pada saat pertemuan masyarakat, terutama saat mengusulkan serta merangking RTSM	Tahapan paling lama adalah pertemuan masyarakat, apalagi kalau quota banyak saat perangkian alat	Tahapan yang paling lama: pada saat pertemuan dengan masyarakat karena akan lebih banyak usulan	Tahapan paling membutuhkan waktu : pertemuan masyarakat karena dalam perangkian semua mengaku paling miskin.	Pertemuan dengan masyarakat, karena pada saat perangkian calon peserta RTSM.

DUKUNGAN PEMERINTAH SETEMPAT

Bagaimana Respon Pemerintah (Kab, Kec, Desa, Dusun, RW/RT) Terhadap Ujicoba Metode Ini?						
Respon pemerintahan desa, dusun, RW/RT secara umum sangat mendukung dalam uji metode. Namun ada beberapa dea yang khawatir terjadi seperti BLT.	Respon pemdes terhadap metode cukup bagus apalagi setelah mengikuti proses, metode baru dan pas terutama metode perbaikan	Respon pemerintahan desa, dusun, RT/RW secara umum mendukung walaupun kadang-kadang ada kekhawatiran dari satu-dua kades pada kasus BLT terjadi lagi	Pemdes mendukung tapi cukup khawatir dengan kejadian dulu, BLT di demo masyarakat tapi seteah tahu proses mereka sangat setuju dengan metode PM	Respon pemdes, dusun, RT/RW mereka khawatir / trauma kalau ada bantuan takut seperti kejadian BLT. Tapi setelah melihat proses seleksi mereka setuju menggunakan	Respon Pemdes:Kades, ada beberapa tidak sepenuh hati menerima program ini karena trauma BLT. Tapi secara keseluruhan menerima dengan	Responnya sangat bagus terhadap metode baru, baik kec, kades, dusun, RT/RW tapi ada kekhawatiran seperti bantuan BLT yang rebut.

				metode ini karena akan tepat sasaran tapi kuota yang kurang	baik. <i>Dusun, RW dan RT</i> secara keseluruhan mendukung program karena langsung menyentuh dari bawah.	
Tahapan Mana Dari Metode Yang Dirasakan Paling Rawan Dan Mutlak Perlu Dukungan Pihak Pemerintah?						
Tahapan yang paling rawan “pertemuan masyarakat” terutama metode tambahan banyak karena data dari pusat tidak dapat dirubah.	Paling rawan metode tambahan masyarakat apabila daftar pusat sudah cukup mampu.	Tahapan yang paling rawan adalah pada tahapan pertemuan masyarakat dengan menggunakan metode tambahan masyarakat karena dengan metode ini data dari pusat tidak bisa dirubah dan nama yang muncul RT-nya kesejahteraannya sudah cukup baik/mampu itu yang kadang-kadang menimbulkan masalah apalagi kuota sedikit.	Tahapan yang paling rawan saat “pertemuan masyarakat” karena data dari pusat tidak bisa dirubah, apalagi quotanya sedikit “2 orang”	Tahapan dari metode yang paling membutuhkan dukungan dari pemerintah pertemuan dengan masyarakat dengan metode tambahan masyarakat	Metode yang paling rawan: Hybrid tambahan tokoh atau masyarakat karena di beberapa kasus banyak kejadian orang yang sudah mampu yang tertera di daftar pusat dan tidak bisa diganti.	Paling rawan metode tambahan masyarakat/tokoh karena daftar dari pusat tidak bisa diganti manakala dianggap tokoh/masyarakat sudah dianggap mampu.

PERAN PIHAK LAIN

Bagaimana Koordinasi Dengan Pendamping, Dinsos Dan BPS?						
Koordinasi pendamping di Ampel Gading, Comal, Ulujani sangat cukup	Koordinasi dengan pendamping intens. Dinsos, BPS cukup baik dengan surat	Koordinasi dengan pendamping kurang baik karena pendamping	Koordinasi dengan pendamping di Ampel Gading –Comal-Ulujami cukup baik membantu	Koordinasi dengan Dinsos dan BPS kurang	Koordinasi dengan pendamping kurang baik karena pendamping kurang focus di	Koordinasi dengan pendamping cukup intens. BPS dan dinsos baik dengan

baik. Tapi di kecamatan lain tidak pernah bertemu.	edaran secara structural.	cenderung focus ke pendaftaran. Dinsos dan BPS cukup baik dengan adanya surat edaran	dan mendukung yang sebelumnya tidak jelas bahwa di Randu Dongmal malah bikit “ruwet”	koordinasinya. Pendamping cukup baik.	pendaftaran. Dinsos dan BPS cukup baik dengan surat edaran yang di layangkan meskipun terlambat.	adanya surat edaran secara structural.
Bagaimana Peran Pendamping Dan Pihak Dinsos Dalam Pelaksanaan Ujicoba Ini?						
Peran pendamping sangat membantu di lapangan. Menemani, menunjukkan tempat pertemuan serta diajak diskusi	Peran pendamping cukup kooperatif dengan mengikuti proses untuk ingin mengerti metode	Peran pendamping cukup baik tapi hanya di 2 kecamatan yang ikut mendampingi yaitu desa bulahan dan Botekan, di Mejangong Lawang Rejo, Pengongsoran, Ampel Gading dan Comal pendamping tidak pernah mendampingi.	Peran pendamping cukup membantu di lapangan, apalagi kalau pendampingan “CW” cukup menghibur untuk dijadikan teman diskusi.	Peran pendamping sangat membantu dalam pelaksanaan di lapangan terkecuali pendamping Kejene tidak pernah.	Peran pendamping: Tanpa pendamping (Randu Dongkal, Ampel Gading). Di damping tapi secara umum tidak cukup membantu karena hanya datang dan diam, tapi ada juga yang aktif.	
Bagaimana Peran BPS Dalam Pelaksanaan Ujicoba?						
Peran BPS kurang berperan dalam metoder ini.	Peran BPS kurang aktif, karena tidak pernah ikut proses untuk bahan evaluasi BPS sendiri.	Peran BPS kurang karena memang BPS tidak terlibat dalam metode ini/kegiatan dilapangan.	BPS perannya? Tidak tahu, tidak jelas, tidak pernah ketemu tapi kan kita ada data dari BPS, katanya..	Peranan BPS kurang karena tidak pernah ikut/terlibat ke lapangan	Peran BPS dalam ujimetode kurang berperan di Metode Hybrid karena tidak bersentuhan langsung.	Peran BPS kurang karena tidak ikut proses diskusi
Peran-Peran Mana Mendukung Dan Adakah Peran Yang Dipandang Keluar Ddari Konsep / Metodologi?						
Peran yang mendukung adalah Kades, RW, RT yang membantu mensosialisasikan PKH. Peran yang menyimpang: adanya pertemuan tokoh	Peran keluar: pendamping sosialisasi di public sebelum kita koordinasi ke desa (Ambo Kulon) di pengajian Fatayat	Peran yang membantu: Kades, Kadus, RT/RW ikut mensosialisasikan PKH yang menyimpang. Di desa Lawang Rejo Sekdesnya sempat minta usul pada saat diskusi di gabung per-	Peran pemdes (Kades, Kadus, RT) sangat mendukung membantu mengkondisikan masyarakat untuk kumpul bahkan ada desa yang bantu konsumsi	Kadus 2 desa Limbangan untuk menyarankan yang menentukan calon PKH hanya kadusnya saja tapi ada diskusi di tiap-tiap SLS. Peran yang paling mendukung adalah	Peran yang mendukung dalam koordinasi untuk semua ketua SLS, cenderung mengurutkan jadwal pertemuan per SLS-nya untuk mempermudah jangkauan kerja.	Kepala desa menyarankan mendata rumah tangga yang punya criteria PKH. Ketua RT salah menginformasikan PKH.

menjadi pertemuan masyarakat di desa Gandu.		Kadus. Di desa Pegsr, Kadus 5 juga mengusulkan digabung satu kadus dalam diskusi.	pertemuan masyarakat	RT karena mereka yang menjadi ujung tombak di tiap-tiap desa.	Peran yang menyimpang: pertemuan tokoh yang hadir di masyarakat.	
---	--	---	----------------------	---	--	--

PARTISIPASI DAN TINGKAT KEHADIRAN PESERTA

Apakah Peserta Serius Mengikuti Semua Tahapan Metodologi? Tahapan Mana Yang Paling Seru Dan Membutuhkan Konsentrasi?						
Peserta serius apalagi dengan sifatnya bantuan. Tahapan yang paling seru: usulan RTSM dan perangkingan karena masing-masing mengaku miskin.	Peserta sangat serius dalam tahapan metodologi. Tahapan paling seru pada tahap perangkingan.	Peserta sangat serius mengikuti tahapan metode. Tahapan paling seru saat diskusi yaitu mengidentifikasi usulan peserta PKH serta saat merangking karena sulit membedakan RTSM.	Peserta “sangat serius” apalagi ini bantuan. Tahapan paling seru di saat perangkingan berusaha saling menjatuhkan... selesai ... tapi setelah itu..diluar masih ada grundel.	Peserta sangat serius dalam mengikuti tahapan metodologi. Tahapan dalam perangkingan karena mereka sulit untuk membedakan RTSM.	Peserta serius dan antusias mengikuti tahapan metode kecuali nenek-nenek. Tahapan paling seru yaitu saat memilih indikator, menentukan dan perangkingan.	Peserta sangat serius mengikuti tahapan metodologi. Paling konsentrasi pada saat perangkingan.
Bagaimana Tingkat Kehadiran Peserta Di Setiap Tahapan Proses?						
Tingkat kehadiran peserta : Pertemuan masyarakat 75 % – 90%	Tingkat kehadiran masyarakat 80% dari jumlah RT di SLS, tokh 100% (6-7 orang)	Tingkat kehadiran peserta: Pertemuan masyarakat 75% - 90%. Tokoh = 100% (6-7 orang)	Kehadiran peserta cukup relative banyak kalau waktunya “pas” ya cukup banyak secara umum rata-rata diatas 75% kehadiran di tiap RT	Tingkat kehadiran masyarakat atau tokoh dalam setiap proses rata-rata diatas 80%.	Tingkat kehadiran peserta: Tokoh = 100% Masyarakat = $\geq 75\%$	Kehadiran masyarakat 75% - 90% dari jumlah rumah tangga. Tokoh 100%
Bagaimana Tingkat Kehadiran Peserta Laki-Laki Dan Perempuan Dalam Setiap Proses?						
Tingkat kehadiran peserta laki-laki dan perempuan: Dipertemuan didominasi oleh perempuan kalau siang dan sore hari.	Tingkat kehadiran: Pada pertemuan malam laki-laki 80% dan perempuan 20%. Pertemuan sore laki-laki 40% dan perempuan 60%.	Pada pertemuan masyarakat yang hadir kebanyakan ibu-ibu apalagi pagi, siang dan sore hari. Pada pertemuan tokoh yang hadir	Kehadiran di setiap pertemuan “lebih banyak perempuan di banding laki-laki”	Kalau pertemuan masyarakat jumlah perempuannya lebih banyak. Kalau pertemuan tokoh jumlah laki-lakinya lebih banyak.	Pertemuan Tokoh pada pagi, siang dan sore hari dihadiri laki-laki 80% dan perempuan 20%. Pertemuan masyarakat: pagi dihadiri 10% laki-laki dan 90% perempuan,	Kebanyakan yang hadir adalah perempuan pada saat pertemuan masyarakat. Tokoh, peserta yang hadir kebanyakan

Di pertemuan malam didominasi oleh laki-laki.	Pada pertemuan pagi laki-laki 20% dan perempuan 80%.	perempuan dengan laki-laki sama banyaknya.			siang dihadiri 20% laki-laki dan 80% perempuan 20%, sedangkan malam laki-laki 75% dan perempuan 25%	laki-laki.
Apa Tanggapan Fasilitator Terhadap Kehadiran Peserta (Laki & Perempuan) Terkait Dengan Waktu Pertemuan & Keputusan Yang Diambil?						
Saat pertemuan perempuan lebih berani dan aktif dibandingkan laki-laki.	Keputusan lebih obyektif jika diskusi dihadiri lebih banyak laki-laki karena laki-laki jarang yang mengajukan diri sendiri.	Tokoh: pagi, siang dan sore (kehadiran bapak-bapak dan ibu-ibu sama).Pengambilan keputusan lebih obyektif pada laki-laki. Kalau ibu-ibu lebih dominan / egois sendiri	Perempuan lebih dominan saat pertemuan, lebih aktif, lebih jujur, lebih terbuka, lebih asyik juga.	Dalam pengusulan RTSM laki-laki yang paling berperan dan mereka paling berpengaruh dalam perangkan.	Tokoh (pagi, siang, sore) cenderung yang datang kebanyakan laki-laki dan pengambilan keputusan menurut saya lebih tepat karena bisa meredam egois.	Peserta dominan perempuan dalam perangkan lama, kalau peserta laki-laki dan perempuan imbang lebih mudah. Keputusan yang diambil lebih obyektif laki-laki.

KETERSEDIAAN DATA PUSAT DAN QUOTA CALON PESERTA

Apakah Ketersediaan Data Pusat Dengan Mendukung Pelaksanaan Metode?						
Mendukung dalam pencocokan ID	Ketersediaan data pusat mendukung terutama untuk matching	Ketersediaan data pusat sangat mendukung dalam pelaksanaan metode terutama dalam matching data	Ketersediaan data pusat cukup mendukung untuk melihat respon masyarakat terhadap data tersebut selama ini cukup lancar	Sangat mendukung dengan adanya data dari pusat dalam proses matching	Ketersediaan data pusat sangat mendukung dalam pelaksanaan metode untuk pencocokan ID	Data pusat mendukung untuk proses matching setelah proses diskusi
Apakah Persoalan Terkait Data Pusat Dan Quota Calon Peserta PKH Di Lapangan?						
Kebanyakan data (quota) dari pusat banyak yang tidak masuk kriteria PKH. Data pusat banyak yang mampu setelah	Persoalan data pusat terkadang sudah mampu tidak bisa dirubah (tambahan) ada complain dari peserta dianggap tidak transparan.	Data dari pusat terutama pada metode tambahan yang tidak bisa dirubah ada complain dari peserta diskusi karena	Rata-rata responnya quota kurang banyak	Rata-rata daftar yang dari pusat sekarang sudah mampu. Setiap RT mengatakan	Persoalan terkait data pusat dilapangan: Orang yang sudah meninggal masih di data. Nama yang sama, sama-	Persoalan data pusat menjadi persoalan apabila data pusat sudah dianggap mampu. Tentang quota masyarakat mengeluhkan jumlah

Tahapan pertemuan semua RT dan saat penentuan jadwal pertemuan	Tahapan paling mudah: 1. Sosialisasi PKH di tokoh → tingkat pemahamannya cenderung lebih tinggi. 2. Menentukan indikator pembeda rumah tangga → peserta tidak sungkan menyebutkan.	Tahapan pada pertemuan semua ketua RT/SLS karena setelah kita mensosialisasikan PKH dengan semua ketua RT dengan cepat / mudah pak RT menyakiti jadwal pertemuan dalam masing-masing RT.	Tahapan pertemuan SLS hanya 1x satu desa..yang hadir tokoh, lebih mudah memahami.	Sosialisasi dari program PKH apalagi waktu menjelaskan bahwa yang boleh mengambil bantuannya adalah ibu	Tahapan sosialisasi tentang PKH karena sudah ada flipchart, kita tinggal beragumen dan kebanyakan peserta focus.	Sosialisasi PKH karena pesertanya serius untuk mendengarkan.
Tahapan Mana Yang Dirasakan Paling Banyak Masalah?						
Tahapan pertemuan SLS dalam menyepakati jadwal.	Perangkingan calon peserta terutama jika calon berasa di tempat. Jika indicator beda tipis	Tahapan pada saat perangkingan, karena sulit membedakan tingkat kesejahteraannya antara RT yang satu dengan RT yang lainnya yang bedanya tidak banyak (hampir sama)	Perangkingan karena semuanya ingin dapat dicalonkan semua.	Perangkingan karena sulit membedakan kesejahteraan RTSM satu dengan yang lainnya, keadaan mereka hanya beda-beda tipis dan semua layak dibantu	Perangkingan pada metode H. perbaikan masyarakat karena semua mengaku miskin (tidak obyektif)	Tahapan koordinasi: ada 2 kades yang susah nepati jadwal pertemuan SLS
Metode Apa Yang Dirasakan Paling Banyak Masalah Dalam Fasilitasinya? Mengapa?						
Metode tambahan masyarakat, karena data tidak dapat dirubah.	Tambahan masyarakat: peserta mengajukan sendiri, saat rangking cenderung enggan karena peserta / calon ditempat, banyak energi	Tambahan masyarakat data dari pusat tidak bisa dirubah dan nama yang tercantum sudah mampu dibandingkan yang tidak diusulkan atau tidak lolos rangking. Quotanya sedikit.	Tambahan masyarakat dan tokoh, sebab data pusat tidak bisa dirubah, padahal saat itu orang tersebut kondisinya lebih baik dari yang lain.	Tambahan tokoh karena data dari pusat didapat diganti sehingga mereka sering protes dan membuat surat pernyataan, seperti di desa Danasari ketua RT Yusuf, desa Limbangan (RT3/RW	Tambahan masyarakat karena ketika data kuota yang keluar orang yang sudah mampu dan tidak bisa diganti. Terutama untuk orang tua yang tidak bisa menangkap sosialisasi yang	Tambahan masyarakat karena data pusat jika dianggap mampu tidak diperbaiki.

				6, RT 3/RW 7)	disampaikan.	
--	--	--	--	---------------	--------------	--

TEMPAT / LOKASI KEGIATAN

Apakah Masyarakat Di Lokasi Perkotaan Dan Pedesaan Memberikan Respon Yang Berbeda Terhadap Pelaksanaan Ujicoba?						
Masyarakat di desa lebih semangat dalam adanya ujicoba metode ini. Masyarakat kota lebih cuek dengan ujicoba metode ini	Masyarakat perkotaan lebih ingin banyak tahu /kritis terhadap data pusat. Masyarakat pedesaan lebih cenderung terhadap quota.	Masyarakat di desa lebih antusias dengan adanya ujicoba metode tersebut karena adanya bantuan tunai dari PKH.	Masyarakat di kota lebih kritis dibandingkan masyarakat pedesaan	Masyarakat desa lebih menerima dibandingkan masyarakat kota yang banyak kritik dan lebih ramai diskusi.	Masyarakat desa cenderung lebih antusias untuk ikut sosialisasi PKH. Masyarakat kota cenderung cuek karena masyarakatnya homogeny dan lebih banyak sibuk dengan urusan sendiri.	Masyarakat kota lebih kritis, banyak masukan lebih menarik.
Apakah Factor Jarak Menjadi Masalah Yang Berpengaruh Terhadap Efektifitas Dan Efisiensi Pelaksanaan Metode?						
Jarak tidak untuk menjadikan masalah, yang penting bisa menjadi peserta PKH dan harapannya bantuan.	Factor jarak penyebaran peserta tidak mempengaruhi antusias peserta untuk mengikuti musyawarah. Factor cuaca mempengaruhi terhadap waktu pelaksanaan jadi molor terutama musim hujan	Tidak karena dengar adanya bantuan tunai dari PKH	Tidak masalah, karena mereka mendengarkan ada bantuan maka jarak tidak masalah	Tidak karena mereka mendengar ada program bantuan maka mereka antusias untuk ingin tahu.	Kendala ketika jarak jauh, malam hari, hujan dan medan kurang mendukung tapi secara umum factor jarak tidak menjadi kendala.	Secara umum jarak tidak begitu berpengaruh rela jalan kaki yang penting bisa ikut pertemuan

PEMBELAJARAN PENTING

Pembelajaran Menarik Apa Saja (Positif & Negative) Yang Didapat Selama Pelaksanaan Sejak Persiapan Hingga Implementasi Metode Targeting?						
<p>Ternyata ada kepala dusun yang tidak memperhatikan jadwal sehingga jadwalnya menjadi kacau di desa menjadi RW 05.</p> <p>Ternyata banyak orang miskin yang tidak bisa diusulkan menjadi RTSM.</p> <p>Ternyata jumlah quota yang sedikit terjadi pada desa yang miskin.</p> <p>Ternyata banyak masyarakat yang meminta tambahan jumlah quota.</p> <p>Ternyata saat untuk mengusulkan RTSM tidak mudah, karena masing-masing orang mengusulkan dirinya sendiri untuk bisa menjadi peserta PKH</p>	<p>Ternyata kekhawatiran kades berlebihan akan ada kecemburuan social dalam program.</p> <p>Ternyata belajar ikhlas susah ya... dicaci maki (di Wanamulya) dianggap tidak transparan. Belajar pada seorang nelayan yang memberikan kesempatannya pada orang lain.</p> <p>Ternyata ada RT (H.P. Tokoh) menolak karena quota terlalu sedikit (Badak, Jurang Jero).</p> <p>Dukungan pemdes sepenuh hati dengan konsumsi yang disiapkan dari dana desa.</p>	<p>Ternyata ada satu RT yang sudah diusulkan dan dia lolos rangking sempat menolak untuk diusulkan karena katanya dia sudah mendapat BLT tidak enak dengan warga lainnya, itu terjadi di desa Mejangong.</p> <p>Ternyata data dari pusat sering menimbulkan masalah terutama pada metode tambahan nama yang muncul sudah mampu.</p> <p>Ternyata ada pak kadus di kadus 3 desa pegang saran minta untuk pertemuan diskusinya digabung perkadus karena takut kejadian BLT terulang.</p> <p>Ternyata pak kades dan Pak RT sangat mendukung program PKH terutama pak RT tanpa akomodasi mau menyiapkan konsumsinya juga untuk peserta diskusi.</p>	<p>Ternyata ada juga pendamping yang baik hati, cantik, manis dan tidak sombong.</p> <p>Ternyata di desa banyak janda.</p> <p>Ternyata ada juga kades yang suka ingkar janji bikin repot.</p> <p>Ternyata ada juga masyarakat yang marah.</p> <p>Ternyata dukungan logistic saat pertemuan cukup banyak dan di support oleh desa.</p> <p>Tadinya ketakutan sekarang jadi baik banget.</p> <p>Ternyata saat penentuan RTSM yang diurutkan tidak mudah pada mengusulkan diri sendiri... pada "reang".</p> <p>Ternyata..oh ternyata ada juga ketua RT perempuan... energik (gintung & pemutih).</p> <p>Ternyata oh ternyata melelahkan..bikin</p>	<p>Ternyata setiap ketua RT sangat menyambut baik program ini/siap menyediakan tempat untuk diskusi walaupun tidak ada biaya konsumsi.</p> <p>Ternyata data dari pusat itu belum tentu RTSM di SLS tersebut.</p> <p>Ternyata jadi fasilitator tidak mudah harus lebih banyak sabar dan ikhlas dalam menghadapi masyarakat dan tokoh</p>	<p>Ternyata tokoh untuk menunjuk RTSM susah karena masyarakat sensitive di desa Bulakan Kec. Belik.</p> <p>Ternyata tidak semua tokoh di tokohkan karena pak RT dengan rumah yang bagus mengusulkan diri di desa Bumirejo/Ulujami.</p> <p>Ternyata tidak semua kepala desa menerima program ini baik karena trauma BLT di desa Pegasoran/ Pemalang</p> <p>Ternyata kuota yang diberikan dari pusat masih banyak kurangnya karena masih banyak RTS di kab. Pemalang.</p> <p>Ternyata fasilitator butuh kesabaran yang tinggi untuk menghadapi masyarakat/tokoh.</p> <p>Ternyata di desa Bumirejo kec. Ulujami seorang tokoh (Darkum, kepala sekolah SD)</p>	<p>Ternyata konsumsi bermasalah di pemerintah desa dan ketua RT tapi di masyarakat/ tokoh tidak masalah.</p> <p>Ternyata data pusat sudah mampu.</p> <p>Ternyata kuotanya kurang.</p> <p>Ternyata sabar dan ikhlas ternyata penting karena sering dianggap tidak transparan kalau metodenya tambahan masyarakat.</p>

			sedikit stress... tapi asyik..sampai di pijat harus sabar ya...		mengatakan “sales panci” karena metodenya berbelit.	
--	--	--	---	--	---	--

INPUT DAN SARAN

Treatment Apa Yang Paling Direkomendasikan Untuk						
Perbaikan masyarakat: masyarakat lebih terbuka dan puas dalam menentukan RTSM secara sehat.	Hybrid perbaikan tokoh: data pusat bisa diranking, pemahaman tokoh lebih cepat, tidak banyak energy.	Hybrid perbaikan tokoh: Data dari pusat bisa diubah. Tokoh tidak egois / mengajukan dirinya sendiri. Tokoh lebih objektif dalam perangkingan dan pengsulatan.	Hybrid perbaikan masyarakat karena data pusat bisa diperbaiki dan semua masyarakat tahu semua.	Hybrid perbaikan masyarakat karena: data dari pusat dapat di ubah, masyarakat mengetahui semua.	Hybrid perbaikan tokoh: kesepakatan untuk memilih RTSM lebih focus. Diskusi lebih mudah dan focus.	Perbaikan masyarakat karena lebih terbuka masyarakat 1 RT bisa hadir semua dan data pusat bisa diperbaiki.
Rekomendasi Apa Lagi Yang Ingin Disampaikan Terkait Pelaksanaan Metode (Tahapan, Waktu, Kerjasama Tim/Dukungan Pihak Lain, Alat Bahan, Dll)?						
Kesejahteraan fasilitator diperhatikan. Alangkah baiknya ke depan untuk review di gabung agar bisa bertukar pengalaman	Kesiapan pihak lain (BPS, Dinsos) koordinasi lebih awal secara vertical kedinasan. Pemberitahuan ke desa lebih awal. Sample metode ditambah. Fasilitator diasuransikan selama kontrak. Breafing 2 mingguan.	Dalam pelaksanaan review sebaiknya dilaksanakan tingkat nasional minimal tingkat provinsi agar kita dapat berbagi pengalaman. Dukungan dan pendamping PKH perlu ditingkatkan waktu kerjasamanya jangan hanya 3 bulan / diperpanjang	Dari awal kesiapan pihak yang terkait (BPS, Dinsos) harus maksimal. Review seharusnya tingkat nasional biar tambah pengalaman. Pelatihannya ditambah karena 2 hari. Uji metode ditambah lokasinya.	Sebaiknya sebelum pusat menentukan kuota tiap SLS, pusat (BPS) sudah berkoordinasi dengan pemerintah desa karena ada suatu desa yang jumlah RTSM-nya banyak atau RT jumlahnya banyak tapi kuotanya sedikit.	Dalam pelaksanaan review sebaiknya dilaksanakan nasional untuk lebih menambah pengetahuan dan pengalaman di lapangan. Dukungan dari BPS kurang menyentuh ke Hybrid. Pendamping kurang perhatian ke tim hybrid. Honor ditambah	Review mestinya lokasinya lebih representative lagi, di hotel terus digabung dengan wilayah lain biar bisa sharing. Ada evaluasi / studi lagi di tengah atau diakhir program PKH. Tentang dampak PKH terhadap kesejahteraan masyarakat. Honor ditambah. Transport ditambah.

					dong... Pulsa jangan 1 kali.	Pulsa jangan hanya sekali, baiknya tiap minggu.
--	--	--	--	--	---------------------------------	---

HASIL REVIEW REFLEKSI TIM FASILITATOR SELF TARGETING SOLO, TANGGAL 21MARET 2011

KENYAMANAN PROSES FASILITASI

Metode Apa Yang Dirasakan Paling Nyaman Dalam Fasilitasinya? Mengapa?		
Siapapun didusun/RW, karena yang datang wawancara boleh siapapun tidak harus berpasangan serta tempat wawancara mudah di jangkau oleh warga	Metode pendaftaran siapaun di RW/dusun, karena: <ul style="list-style-type: none"> • Dari masyarakat tidak ada keluhan tentang jarak pendaftaran • Dan kesulitan menghadirkan suami / istri 	Pendaftaran siapapun di Dusun/RW, karena dekat tempat mendaftarnya dari yang hadir bisa siapa saja.
Metode Apa Yang Dirasakan Paling Banyak Masalah Dalam Fasilitasinya? Mengapa?		
Suami istri di kecamatan, karena yang harus datang suami istri	Metode pendaftaran suami/istri kecamatan, karena banyak keluhan tentang jarak tempat pendaftaran dan kesulitan menghadirkan pasangan	Pendaftaran suami-istri di Kecamatan, karena tempat jauh dan harus suami-istri yang hadir, bagi RTSM sangat memberatkan
Tahapan Mana Dari Metode Yang Dirasakan Paling Mudah?		
Tahapan di pertemuan masyarakat	Koordinasi kepala desa, banyak dari kepala desa yang sudah tahu tentang PKH	Pertemuan masyarakat, peserta sangat antusias ingin mendaftar, sehingga kita menjelaskannya mudah
Tahapan Mana Yang Dirasakan Paling Banyak Masalah?		
Tahapan di koordinasi kades dan pertemuan tokoh → maunya mereka yang tentukan calon peserta, kebetulan kades sulit mengerti	Pertemuan tokoh dan masyarakat, ketakutan menentukan criteria karena kasus bantuan yang lalu	Tahapan pertemuan tokoh, kekhawatiran para tokoh dan perangkat desa, kalau seperti program BLT yang tidak tepat sasaran karena mereka diancam masyarakat.
<ul style="list-style-type: none"> • Ada kadus yang menyarankan semua warganya untuk mendaftar seperti yang dilakukan ibu BBNTK di desa Dlepin, Pager Gunung, Desa Pidekso, Tanjung, Ketua RW Bulusulur, Bapak Carik Telogosari (mertua) • Tokoh tidak mau repot • Tidak adanya logistic membuat para tokoh kurang mau mendukung • Kondisi di masyarakat sangat berbeda dengan tokoh 		

- Ketakutan tokoh dengan program BLT
- Kasus di Keluarga Giripurwo pensiunan PNS dan Pegawai Koperasi serta aparat desa juga daftar
- Kades ikut daftar yang menyebabkan semua daftar, kades selomarto menyarankan untuk semua mendaftar

KETERSEDIAAN DATA PUSAT DAN QUOTA CALON PESERTA

Apakah Ketersediaan Data Pusat Sangat Mendukung Pelaksanaan Metode?		
Data SLS mendukung saat pembuatan jadwal dan pengisian format.	Ketersediaan data pusat tidak berpengaruh untuk metode ST (data survey meter) Data SLS membantu saat menentukan jadwal pertemuan	Data SLS sangat berguna Data SM tidak berpengaruh, ada atau tidak
Adakah Persoalan Terkait Data Pusat Dan Data Quota Calon Peserta PKH Di Lapangan?		
Data nama SLS ada yang tidak sesuai dengan kenyataan di lapangan	Kesalahan cetak nomor urut data SLS Kesalahan nama dusun	Tidak ada persoalan yang berarti, paling Cuma nama dusun atau SLS yang berbeda
Bagaimana Respon Masyarakat/Para Pihak Terhadap Data Pusat?		
Banyak warga/tokoh yang menanyakan tentang kuota	Sering dari anggota masyarakat dan aparat desa yang menanyakan kuota perdesa	Untuk kuota jumlah penerima bantuan, para aparat desa dan masyarakat ingin tahu Kadus di desa Sendang Mulyo Kec. Tirto Myo ingin tahu kuota dengan cara empat mata

PARTISIPASI DAN TINGKAT KEHADIRAN PESERTA

Apakah Peserta Serius Mengikuti Semua Tahapan Metodologi? Tahapan Mana Yang Paling Seru Dan Membutuhkan Konsentrasi?		
<ul style="list-style-type: none"> • Peserta serius pada saat sosialisasi kecuali kalau sosialisasi berbarengan dengan arisan ibu-ibu dan posyandu. • Setelah dengar kriteria RTSM/PKH ada yang langsung pergi dari forum • Di pertemuan masyarakat pesertanya sangat aktif dan banyak pertanyaan 	Sebagian besar masyarakat serius saat mengikuti sosialisasi tapi untuk tingkat pertemuan masyarakat keantusiasan dalam memberikan pertanyaan kurang Tahapan menentukan kriteria kemiskinan dan penjelasannya	Sebagian besar peserta sering mengikuti tahapan metodologi dan karena ingin mendaftar wawancara
Bagaimana Tingkat Kehadiran Peserta Laki-Laki Dan Perempuan Dalam Setiap Proses?		

Kalau pertemuan pagi-sore kebanyakan perempuan, sedangkan pada malam hari yang hadir laki-laki	Tingkat kehadiran secara umum lebih banyak kaum perempuan tapi untuk pertemuan tokoh lebih banyak laki-laki	Pada siang/pagi yang hadir banyak perempuan Pada malam hari yang hadir laki-laki
Bagaimana Tingkat Kehadiran Peserta Di Setiap Tahapan Proses?		
Kalau undangan untuk semua warga banyak yang ngobrol sendiri Kebanyakan warga masih malu untuk bertanya. Kemudian yang bertanya lebih ke Pak RT/Kadus/Tokoh.	Secara umum tingkat kehadiran masyarakat cukup tinggi karena dikaitkan dengan bantuan	Pada pertemuan tokoh mereka aktif bertanya dan member komentar, saat pertemuan masyarakat kebanyakan diam dan mendengarkan
Apa Tanggapan Fasilitator Terhadap Kehadiran Peserta (Laki & Perempuan) Terkait Dengan Waktu Pertemuan Dan Keputusan Yang Diambil?		
Diskusi lebih hidup saat bapak-bapak Kalau ada laki-laki dan perempuan, perempuan cenderung pasif	Kehadiran peserta laki-laki tingkat partisipasi dalam memberikan pertanyaan lebih tinggi Peserta perempuan lebih sungkan untuk langsung bertanya tapi biasanya diskusi sendiri	Peserta perempuan sangat berarti sekali karena perempuan lebih obyektif saat memandang kriteria kemiskinan ewuh-pekwuh/sungkan

ALOKASI WAKTU YANG TERSEDIA

Apakah Waktu Pelaksanaan Metode Dirasakan Cukup? Bagaimana Idealnya Menurut Fasilitator?		
Tidak cukup, karena kita juga harus menyesuaikan dengan kondisi lapangan	Waktu pelaksanaan metode dirasa kurang karena sosialisasi membutuhkan waktu yang tepat agar semua masyarakat dapat hadir dipertemuan	Cukup, Cuma waktu koordinasi dan persiapan harusnya diberi jeda untuk mengundang tokoh dan masyarakat
Apakah Jadwal Yang Dialokasikan Terlalu Ketat Atau Dianggap Fleksibel?		
Terlalu ketat karena butuh waktu untuk mengundang tokoh dan masyarakat	Jadwal alokasinya terlalu ketat karena untuk membuat kesepakatan jadwal pertemuan ada yang tidak bisa dalam 1 hari	Terlalu ketat karena tidak boleh melebihi jadwal yang sudah ditentukan karena akan bersamaan dengan desa yang lain
Berapa Rata-Rata Waktu Untuk (Koordinasi Camat/Kades, Pertemuan Tokoh, Pertemuan Masyarakat / Sosialisasi)?		
Koordinasi camat ± 1 jam Koordinasi Kades 30 menit – 2 jam Pertemuan tokoh 2-3 jam	Untuk koordinasi camat dan kades sekitar 1 jam Pertemuan tokoh 2 jam Pertemuan masyarakat 45 jam	Koordinasi camat/kades 30 menit – 1 jam Pertemuan tokoh 2 – 2,5 jam Pertemuan masyarakat 1-1,5 jam Kepala desa Gemantar Kec. Selogiri, pergi ke Jakarta sehingga koordinasinya mundur karena sekdes tidak bisa memberi keputusan
Apa Dampak Alokasi Waktu Terhadap Kehadiran Peserta (Laki/Perempuan/Masyarakat/ Tokoh) Di Pedesaan Dan Perkotaan?		
Kalau di pedesaan karena musim panen sangat susah	Ada dampak alokasi terhadap peserta kalau pagi (ibu),	Pada pertemuan pagi yang hadir perempuan lebih

menghadirkan warga untuk pertemuan pagi Diperkotaan, karena banyak yang bekerja/pegawai susah pertemuan pagi dan siang	sore/malam (bapak) Untuk diperkotaan alokasi waktu tidak bisa dibawah jam 14.00 wita	dominan kebanyakan ibu rumah tangga sehingga mereka bisa hadir. Kalau malam hari yang hadir dominan laki-laki karena perempuan mengurus keluarga dirumah.
Tahapan Mana Dari Metode Yang Paling Membutuhkan Banyak Waktu? Mengapa?		
Tahapan di pertemuan tokoh	Karena banyak masyarakat dan tokoh yang menyanyakan tentang criteria kemiskinan. Tahapan pertemuan tokoh saat penentuan criteria kemiskinan Tahap pertemuan masyarakat saat menjelaskan criteria kemiskinan	Saat pertemuan tokoh karena identifikasi criteria kemiskinan dan jadwal pertemuan masyarakat, diskusinya sangat alot dan lama

TEMPAT / LOKASI KEGIATAN

Apakah Masyarakat Di Lokasi Perkotaan Dan Pedesaan Memberikan Respon Yang Berbeda Terhadap Pelaksanaan Ujicoba?		
Iya, pedesaan (mereka lebih welcome), sedangkan perkotaan butuh waktu untuk menjelaskan tentang pelaksanaan metode karena mereka lebih kritis dan sudah mencari info dari mana saja termasuk dari internet	Respon masyarakat kota lebih kritis dan ngotot dibanding masyarakat pedesaan yang cenderung lebih menurut	Di perkotaan, masyarakat disini tidak ada (kurang) kesadarannya untuk member kesempatan pada RTSM untuk mendaftar.
Apakah Factor Jarak Menjadi Masalah Berpengaruh Terhadap Efektifitas Dan Efisiensi Pelaksanaan Metode?		
Saat wawancara, jarak tidak berpengaruh, warga rela melakukan apapun untuk sebuah bantuan.Selama ini jarak tidak begitu berpengaruh. Selama ada undangan untuk warga saat sosialisasi	Factor jarak pertemuan berpengaruh semakin jauh jarak semakin sedikit yang datang dan biasanya hanya bapak-bapak / yang punya motor saja	Tidak berpengaruh karena mereka tetap hadir, yang mendaftarpun banyak sekali

DUKUNGAN DARI PEMERINTAH SETEMPAT

Bagaimana Respon Pemerintah (Kab, Kec, Desa, Dusun, RW/RT) Terhadap Ujicoba Metode Ini?			
<ul style="list-style-type: none"> Kecamatan, mendukung tapi tidak ada tindakan nyata dalam setiap kegiatan Desa; mendukung banget 	<ul style="list-style-type: none"> Secara umum tanggapan terhadap metodologi baik, tapi BPS yang sering mengeluh mengenai metodologi (ex: mengeluh saat sosialisasi untuk tidak menyebutkan nominal) 	<ul style="list-style-type: none"> Kabupaten mendukung, BPS mengikuti beberapa pertemuan masyarakat. Kecamatan mendukung, pihak kecamatan (Camat) mengundang 	<ul style="list-style-type: none"> Masyarakat lebih setuju kalau proses mendaftar sendiri daripada di data Masyarakat ingin semua RT diverifikasi yang mendaftar

<ul style="list-style-type: none"> Kabupaten: Dinsos (kurang begitu cocok dengan metode pendaftaran), BPS (ada yang merasa terbebani dengan adanya proses wawancara). Dalam hal prinsip tentang batasan rumah tangga masih ada perbedaan dengan BPS. Dusun / RW: sangat tertarik karena berhubungan dengan bantuan untuk warga, tapi untuk perkotaan mereka agak cuek dengan kegiatan ini 		<ul style="list-style-type: none"> para kades untuk sosialisasi Desa mendukung, mereka antusias untuk menghadirkan tokoh dan masyarakat. Dusun mendukung setiap pertemuan masyarakat diadakan di tempat Kadus. RT/RW kurang mendukung, untuk tempat dan pertemuan, masing-masing RW/RT ini tidak bisa dilakukan 	<ul style="list-style-type: none"> Tanggapan dari pihak pemerintah desa terhadap metodologi sangat baik karena tidak melibatkan mereka dalam bantuan peserta PKH Karena ada survey maka kebanyakan warga ingin mendaftar bukankah yang menentukan pemerintah pusat
Tahapan Mana Dari Metode Yang Dirasakan Paling Rawan Dan Mutlak Perlu Dukungan Pihak Pemerintah?			
<ul style="list-style-type: none"> Tahapan wawancara karena dukungan pemerintah setempat sangat berpengaruh bagi warga yang akan mendaftar 	<ul style="list-style-type: none"> Tahapan koordinasi sangat buruh dukungan dari kecamatan dan pendamping karena sifatnya yang birokratis 	<ul style="list-style-type: none"> Saat pertemuan masyarakat, menghadirkan apartat desa untuk memberikan himbauan, benar-benar mengena pada masyarakat 	

PERAN PIHAK LAIN

Bagaimana Koordinasi Dengan Pendamping, Dinsos, Dan BPS?		
Dengan pendamping koordinasi sangat baik Dengan BPS, kurangnya koordinasi maka sangat berpengaruh dengan kerja lapangan Dengan pendamping, beliau menemani saat sosialisasi, dan mempermudah dalam pencarian lokasi	Koordinasi dengan pendamping sangat baik, pendamping sering datang saat sosialisasi dan membantu saat menjelaskan PKH ke masyarakat. Koordinasi dengan BPS sering terjadi ketidak sesuaian biasanya terkait masalah jadwal wawancara dan waktu mendaftar suka dirubah sepihak.	Koordinasi dengan pendamping lancar, mereka bisa diajak kerjasama dan saling mendukung.
Bagaimana Peran Pendamping Dan Pihak Dinsos Dalam Perencanaan Ujicoba Ini?		
Peran pendamping ikut dalam sosialisasi tapi tidak setiap pertemuan terkadang menjawab pertanyaan terkait dengan realisasi bantuan PKH	Peran pendamping sudah sesuai mereka juga ikut partisipasi dalam metode: <ul style="list-style-type: none"> Saat pendaftaran Sosialisasi masyarakat 	Pendamping sangat membantu dalam pertemuan masyarakat dalam hal segi teknis.
Bagaimana Peran BPS Dalam Pelaksanaan Ujicoba?		
Peran BPS: ada beberapa yang kelihatan terpaksa dalam melaksanakan tugas dan kadang	Sebenarnya peran BPS sangat vital dalam metodologi tapi dalam prakteknya mereka sering keluar dari	Kurang bersemangat, karena jadwal wawancara mulai jam 08.00 s/d 17.00 kurang dilaksanakan, jam 10.00

menggabungkan jadwal wawancara tanpa koordinasi terlebih dahulu dengan tim fasilitator.	metode: menggabung jadwal dan pulang sebelum waktu pendaftaran usai	baru buka, lalu jam 15.00 semua tutup/selesai.
Peran-Peran Mana Yang Bersifat Mendukung Dan Adakah Peran Yang Dimainkan Dipandang Keluar Dari Konsep/Metodologi?		
<p>Di desa Kopen, dusun Pelang terjadi penggabungan jadwal.</p> <p>Di desa Hargosari dan Purwosari juga.</p> <p>Peran tokoh dalam menghimbau bagi warga yang sesuai dengan criteria saja yang boleh mendaftar.</p> <p>BPS mengharuskan membawa KK</p> <p>BPS menyarankan pendaftaran di pagi hari saja.</p> <p>Ada tokoh yang menyarankan semua warganya untuk mendaftar.</p>	<p>Peran yang keluar dari metode adalah BPS yang mengharuskan mendaftar bawa KK.</p> <p>Yang mendukung adalah peran pendamping PKH untuk lebih bisa menjelaskan PKH lebih detail.</p> <p>Peran kades untuk aktif menghimbau yang mendaftar PKH untuk yang sangat miskin</p>	<p>Pendamping PKH, sangat mendukung sekali, mereka melakukan sosialisasi ke desa dan puskesmas serta sekolah sebelum kita masuk desa itu.</p> <p>Adanya sentiment masyarakat kepada salah satu / beberapa warga atau kelompok tertentu, sehingga mereka tidak diundang.</p>

TINGKAT PEMAHAMAN

Bagaimana Tingkat Pemahaman Fasilitator Terhadap Manual Dan Metodologi?		
Apakah Manual Cukup Mudah Untuk Dipahami Dan Dilaksanakan Di Lapangan?		
Fasilitator cukup memahami terhadap metode ini. Manual bisa dipahami tapi belum cukup untuk menjelaskan ke warga.	<p>Pemahaman fasilitator sudah baik terhadap manual dan metodologi tapi dalam lapangan sering berbeda. Susah koordinasi karena kendala hari yang sangat mepet.</p> <p>Manual cukup mudah dipahami tapi dalam pelaksanaannya di lapangan tidak bisa dilaksanakan 100% seperti: jadwal yang tidak sesuai dengan banyak SLS dan koordinasi ada yang lebih dari 1 hari.</p>	Mudah dipahami dan dilaksanakan, pada tahapan-tahapan penjelasan kepada masyarakat dan aparat terkait tidak ada hambatan / kendala yang berarti.
Apakah Internalisasi Metode Di Setiap Pelaksana Dianggap Kurang/Cukup Memadai/Bagus/Sangat Bagus?		
Masih kurang, setelah berjalan di lapangan BPS masih sering protes terhadap jadwal dan yang datang ke wawancara pendamping disini juga masih kebingungan dengan diadakannya metode ini, karena tugas mereka hanya mendampingi warga yang mendapat bantuan.	<p>Pemahaman metode di pihak fasilitator bagus tapi di pihak lain masih kurang seperti:</p> <p>BPS yang sering gabung jadwal, tidak tepat waktu.</p> <p>Ada sebagian dari pemerintah desa yang menyuruh semua warga untuk mendaftar.</p>	Cukup memadai, bagi fasilitator dan pendamping karena metode dilaksanakan sesuai dengan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis.
Bagaimana Peran Dan Pengaruh Para Tokoh Kunci (Key Person) Terhadap Pelaksanaan Ujicoba Di Lapangan?		
Perangkat desa sangat berpengaruh dalam hal mengundang warga dan menghimbau warga dalam	Peran dan pengaruh tokoh kunci adalah di tingkat desa (Kades & RW) karena dalam kesuksesan metode	Perangkat desa sangat berpengaruh dalam pemberian himbauan, sehingga nantinya yang mendaftar itu

mendaftar tapi ada juga malah yang sengaja menyuruh warganya untuk mendaftar.	ditingkat masyarakat sangat berpengaruh. Himbauan untuk tidak mendaftar bagi yang mampu akan berhasil jika kadus tegas melakukannya.	sesuai dengan criteria PKH
Bagaimana Tingkat Pemahaman Para Pihak (Masyarakat, Tokoh, Pemdes, Pemkec, Pemkab, Pendamping Dan BPS)?		
Masyarakat kurang paham dengan adanya metodologi, yang penting dapat bantuan. Pendamping cukup paham, setelah ada penjelasan dari fasilitator. Tokoh yang sudah paham, beliau langsung menghimbau warga. Ada yang belum paham. BPS belum paham, karena masih sering mengeluhkan tentang kegiatan.	Tingkat pemahaman para pihak terkait sudah cukup bagus untuk tingkat pemkab tapi untuk tingkat desa kurang karena sering dari Pemdes tidak tegas dalam menghimbau hanya RTSM yang layak daftar.	Pendamping begitu paham dengan menjalankan tugasnya dengan baik. Aparat desa kurang paham kadang himbauannya malah mengundang semua RT untuk mendaftar.

PEMBELAJARAN PENTING

Pembelajaran Menarik Apa Saja (Positif Dan Negative) Yang Didapat Selama Pelaksanaan Sejak Persiapan Hingga Implementasi Metode Targeting?		
Ternyata dalam penyusunan jadwal harus lebih melihat kondisi di masyarakat. Adanya daftar hadir saat pertemuan tokoh. Ternyata cara kita berbicara dengan Kades dan tokoh sangat berpengaruh dalam metode ini. Ternyata masih kurangnya koordinasi antara tim kita dengan BPS tentang PKH terutama dilapangan. Ternyata bertemu dengan warga tidak semenegangkan waktu wal mau terjun. Ternyata di perkotaan masih belum / kurangnya kesadaran untuk berbagi dengan yang RTSM. Ternyata beberapa tokoh masih memaksakan keinginan mereka dalam hal pertemuan masyarakat.	Positif : <ul style="list-style-type: none"> • Masyarakat tidak memperlumahkan biaya konsumsi • Adanya kartu keluarga saat mendaftar sangat membantu proses pendaftaran Negative: <ul style="list-style-type: none"> • Perbedaan pemahaman tentang besaran bantuan PKH antara fasilitator dan pendamping • Perbedaan definisi rumah tanggal antara BPS dan fasilitator • Ternyata desa yang tingkatannya RW dulu baru dusun untuk tingkatan SLS 	Ternyata masyarakat inginnya itu kalau pertemuan saat malam hari karena sudah tidak ada aktifitas/bekerja Ternyata masyarakat sangat antusias menghadiri pendaftaran/wawancara walaupun letak tempat pendaftaran jauh dan harus menghadirkan suami-istri.

INPUT DAN SARAN

Treatment Mana Yang Paling Direkomendasikan Di Metode Pendaftaran?

Supaya warga lebih dekat saat mendaftar. Metode pendaftaran suami istri di dusun/RW.	<p>Suami istri dusun</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dengan jarak yang tidak jauh dari tempat tinggal sehingga tidak membebani RTSM dalam mendaftar • Dengan kehadiran pasangan akan sangat membantu dalam proses wawancara 	<p>Siapun di Dusun atau RW.</p> <p>Untuk memudahkan masyarakat / RTSM saat mendaftar karena tempat wawancara dekat dan tidak menghadirkan pasangan, sehingga pasangan bisa mencari nafkah/bekerja.</p>
Rekomendasi apa lagi yang ingin disampaikan terkait pelaksanaan metode (tahapan, waktu, kerjasama tim/dukungan pihak lain alat bahan, dll)?		
<ul style="list-style-type: none"> • Penyusunan jadwal harus lebih diperhatikan. • Peran tokoh sangat penting. • Harus lebih ada koordinasi antar tim supaya kerjasama baik. 	<ul style="list-style-type: none"> • Saran; melakukan koordinasi dengan pihak terkait lebih matang. • Perlu pemberian himbauan kepada Pemdes yang sifatnya hirarkis dari tingkat yagn lebih tinggi ke kecamatan tentang PKH dan sistematika pendaftaran. • Jadwal terlalu singkat/padat sehingga sering tidak sesuai dengan jumlah SLS. • Tokoh kunci adalah tokoh masyarakat, pemdes untuk menghimbau RSTM yang layak mendaftar 	<p>Kepala SLS harusnya memberikan himbauan agar yang mendaftar itu RTSM, jangan membiaskan suatu kasus dengan cara mengundang semua RT untuk wawancara. Seperti di dua Sirnoboyo, Kec. Giriwoyo kepala desanya memberikan himbauannya sangat mengena pada masyarakat sehingga yang mendaftar RTSM saja.</p> <p>Kalau desa Selo Marto, Kec. Giriwoyo kepala desanya malah menyarankan agar RT mendaftar semua.</p> <p>Waktu/jadwal disesuaikan dengan kondisi di lapangan, sehingga waktu/jadwal tidak berkesan mendadak tapi terkoordinir dengan baik.</p> <p>Seperti di desa Gemantar, Kec. Selogiri, kepala desa ke Jakarta dan jadwal mundur 3 hari.</p>

HASIL REVIEW REFLEKSI TIM FASILITATOR HYBRID SOLO, TANGGAL 25 MARET 2011

TINGKAT PEMAHAMAN

Bagaimana Tingkat Pemahaman Para Pihak (Masyarakat, Tokoh, Pemerintah Desa/Kec/Kab, Pendamping Dan BPS)?			
Pelaksanaan studi berdampak pada hasil sosialisasi karena dari kegiatan studi banyak tahu PKH. Masyarakat memahami metode ini lebih baik dari penentuan BLT. Ada masyarakat yang tahu tetapi tidak mau tahu karena tidak masuk daftar. Pemdes awalnya sulit memahami karena trauma BLT, tapi setelah pertemuan mereka senang dengan metode ini.	Setelah lihat metodologi mereka sangat bisa memahami dan menilai bisa tepat sasaran.	Tokoh, masyarakat, pemdes sudah memahami proses dan metode. Pemkec dan pemkab tidak paham karena mereka tidak pernah mengikuti proses Pendamping PKH sangat paham karena mereka ikut	Tokoh, mereka tertarik metode ini. Bantuan lebih tepat sasaran dan senang diajak berdiskusi seperti sekolah lagi dapat pembelajar baru. Pendamping, ada pendamping yang bingung dengan metode ini dan belum jelas PKH.
Bagaimana Tingkat Pemahaman Fasilitator Terhadap Manual Dan Metodologi?			
Cukup dipahami. Masukan supervisor sebaiknya disampaikan sebelum pertemuan.	Sudah memahami waktu memandu proses diskusi bisa berjalan lancar.	Fasilitator cukup memahami, buktinya fasilitator mampu menyampaikan dan tokoh masyarakat bisa memahami.	Sudah cukup memahami sehingga diskusi berjalan baik dan yang ikut berdiskusi bisa jelas
Apakah Manual Cukup Mudah Untuk Dipahami Dan Dilaksanakan Di Lapangan?			
Mudah dipahami, pelaksanaannya harus berimprovisasi seperti apakah dalam seleksi RTSM harus menyebut kuota/ tidak. Mengawal konsistensi peserta diskusi agar mematuhi kriteria. Tokoh berpengalaman di program lain kadang mencampur aduk dengan metode	Metodologi sudah lengkap tetapi substansi PKH kurang	Metodologi sudah lengkap tetapi substansi fasilitator seringkali mendapat pertanyaan tentang PKH yang belum bisa di jawab karena tidak paham secara teknis di lapangan.	Manual mudah dipahami dan dilaksanakan tetapi substansi PKH kurang dan sering diprotes peserta diskusi

program lain			
Bagaimana Peran Dan Pengaruh Dari Para Tokoh Kunci (Key Person) Terhadap Pelaksanaan Ujicoba Dilapangan?			
Peran tokoh kunci: 1. Untuk diskusi tokoh perlu seleksi tokoh jangan tokoh yang bawa kepentingan pribadi 2. Masih ada dominasi tokoh dalam diskusi	Kepala desa sebagian mengintruksikan ke ketua SLS untuk mendaftarkan semua rumah tangga yang ada criteria PKH	Kepala desa sebagian besar hanya menginstruksikan agar ketua SLSS tidak ikut menyeleksi warga. Tetapi hanya mengundang tokoh dan masyarakat saja.	Kepala desa kebanyakan setuju dengan metode ini tapi ada yang keberatan karena takut mengganggu kerukunan warga. Ketua SLS senang karena tidak jadi sasaran amuk warga, ada juga yang minta aparat desa yang mendata.
Apakah Internalisasi Metode Ditingkat Setiap Pelaksana Dianggap Kurang/Cukup Memadai/Bagus/Sangat Bagus?			
Metode sangat baik dipahami oleh para ketua SLS. Mereka terlibat langsung dan yakin metode ini yang paling tepat.	Kepala desa pemahamannya sebatas siapa yang akan diundang saat pertemuan ditingkat SLS	Kepala desa hanya sebagian yang mengikuti proses sehingga masih dianggap kurang. Ditingkat Kepala dusun, RT, RW sudah sangat baik karena sudah terlibat langsung dalam proses pelaksanaan metode di lapangan.	Metode sudah baik dan valid tapi kalau pas tambahan banyak yang protes

ALOKASI WAKTU YANG TERSEDIA

Berapa Rata-Rata Waktu Untuk (Koordinasi Camat/Kades, Pertemuan Tokoh, Pertemuan Masyarakat / Sosialisasi)?			
Koordinasi Kades 1 jam. Pertemuan tokoh 1,5 jam Pertemuan masyarakat 2 jam.	Sosialisasi Kades 30 menit Ketua SLS 90 menit Pertemuan 105 menit	Sosialisasi dengan kepala desa 30 menit Pertemuan tokoh / ketua SLS rata-rata 1 jam 45 menit. Sosialisasi / pertemuan masyarakat rata-rata 30 menit	Koordinasi kepala desa 60 menit Pertemuan ketua SLS 90 menit. Pertemuan tokoh/masyarakat 100 menit
Tahapan Mana Dari Metode Yang Paling Membutuhkan Banyak Waktu? Mengapa?			
Paling banyak waktu pertemuan masyarakat/ sosialisasi. Alasannya karena merupakan proses sosialisasi, ada diskusi/ tanya jawab, menunggu masyarakat yang belum hadir, dan harus memberi pemahaman banyak orang.	Pertemuan di SLS karena untuk penentuan criteria kemiskinan setempat biasanya mereka ragu menyampaikan dan perangkanan agak sulit.	Pertemuan ditingkat SLS karena waktu yang dibutuhkan untuk diskusi indikator kemiskinan dan seleksi RTSM membutuhkan waktu yang lama.	Yang paling lama pertemuan masyarakat /di SLS karena mereka kesusahan identifikasi sejumlah RTSM dan saat perangkanan.
Apakah Waktu Pelaksanaan Metode Dirasakan Cukup? Bagaimana Idealnya Menurut Fasilitator? Apakah Jadwal			
Cukup, hanya sulit menyesuaikan jadwal dengan agenda di masyarakat,	Tidak cukup. Waktu koordinasi dengan pertemuan	Tidak cukup, Alasannya karena waktu untuk koordinasi dengan kepala desa dan	Waktunya cukup tapi kalau pas penjadwalan dan koordinasi mepet itu

sebaiknya fasilitator tidak perlu diberi jadwal tapi target waktu saja.	ketua SLS sebaiknya minimal 3-4 hari Yang paling optimal 1 hari hanya 2 pertemuan SLS	prtemuan ketua SLS sering mundur karena harus mengundang dulu dan butuh waktu 2-3 hari. Pelaksanaan sosialisasi membutuhkan waktu optimal antara 1 hari sampai 2 pertemuan, belum lagi kalau ada satu/dua SLS yang jadwalnya dimundurkan.	yang susah. Kalau kelamaan di 1 desa, metode bocor dan warga jadi malas diskusi
Apa Dampak Alokasi Waktu Terhadap Kehadiran Peserta (Laki/Perempuan/Masyarakat/ Tokoh) Di Pedesaan Dan Perkotaan?			
Masyarakat tidak punya pilihan waktu: pertemuan siang dihadiri peserta perempuan saja, sedangkan pertemuan malam didominasi laki-laki. Di perkotaan pertemuan harus sore atau malam, karena pagi/siang mereka tidak bisa meninggalkan pekerjaan. Mengundang tokoh lebih mudah DPRD mengundang masyarakat.	Di sebagian SLS pedesaan, jika waktu pertemuan pagi mayoritas yang hadir ibu rumah tangga, untuk tokoh kesulitan penjadwalan.	Untuk di pedesaan waktunya siang sore, mereka / peserta banyak yang hadir (baik laki-laki maupun wanita). Untuk perkotaan waktunya hanya bisa sore-malam dan yang datang laki-laki.	Perkotaan pertemuan dilakukan sore setelah mereka kerja atau malam karena kebanyakan ketua SLS itu guru dan polisi, perempuan dan laki-laki sama sesuai tokoh di SLS itu.

TEMPAT / LOKASI KEGIATAN

Apakah Masyarakat Di Lokasi Perkotaan Dan Pedesaan Memberikan Respon Yang Berbeda Terhadap Pelaksanaan Ujicoba?			
Diperkotaan respon sangat positif, ketua-ketua SLS dan masyarakat langsung mempersiapkan diri untuk melaksanakan metode seperti sosialisasi di pertemuan RT, di posyandu, pertemuan PKK, dll. Mereka juga mempersiapkan daftar RTSM yang sudah dirangking dan sudah dibahas dalam pertemuan masyarakat tingkat SLS. Di pedesaan masyarakat antusias tapi lebih karena adanya bantuan tunai, antusiasme bukan ke metode.	Berbeda: Di pedesaan: masyarakat menilai bisa tepat sasaran. Di perkotaan: masyarakat kurang bisa memahami dan keberatan prangkinan dan berhadap pihak ke-3 ada.	Ya, respon berbeda untuk di pedesaan respon bagus dan setiap pertemuan selalu dihadiri oleh tokoh / masyarakat dan partisipasi baik. Untuk di perkotaan respon sangat kurang, pertemuan masyarakat hanya dihadiri oleh beberapa tokoh di tingkat RT.	Perkotaan (tokoh) metode ini valid, nanti kalau ada bantuan lagi diharapkan menggunakan metode seperti ini (hybrid perbaikan). Di desa responnya baik baik hanya bingung dengan pemahaman bahasa senang seperti sekolah tapi agak kecewa dengan konfirmasi hasil akhir.
Apakah Factor Jarak Menjadi Masalah Yang Berpengaruh Terhadap Efektifitas Dan Efisiensi Pelaksanaan Metode?			

<p>Sangat berpengaruh pada tingkat partisipasi masyarakat, khususnya perempuan.</p> <p>Yang ideal pertemuan tingkat RT (SLS RT) selain partisipasi akan lebih tinggi juga diskusi akan lebih focus.</p> <p>Jarang jauh, biasanya yang hadir hanya perwakilan tiap RT. Sulit untuk menyeleksi RTSM → akhirnya muncul usulan untuk “pemerataan”</p>	<p>Berpengaruh; jika jauh peserta yang datang lebih sedikit, waktu pelaksanaan jadi molor, dan tidak saling mengenal.</p>	<p>Di pedesaan: Ya, jarak lokasi sangat berpengaruh, karena bila jarak terlalu jauh, waktunya sering mundur sampai lama (± 1 jam). Kehadiran peserta bila terlalu jauh juga kurang. Pada saat selesai dan perangkingan juga berpengaruh karena kurang / tidak kenal.</p> <p>Di perkotaan: tidak berpengaruh nyata karena transportasi tidak masalah bagi warga.</p>	<p>Jarak berpengaruh kalau pertemuan di tingkat dusun. Semua warga belum tentu hadir dan mereka kesulitan dalam perangkingan karena tidak tahu semua kehidupan di dusun.</p>
---	---	--	--

DUKUNGAN PEMERINTAH SETEMPAT

Bagaimana Respon Pemerintah (Kab, Kec, Desa, Dusun, Rw/Rt) Terhadap Ujicoba Metode Ini?			
<p>Pemerintah Tingkat Desa / Ke Bawah Biasanya Merespon Dengan Penuh “Kekhawatiran” Akan Program Bantuan Tunai Karena Trauma Dengan Dampak BLT.</p> <p>Tapi Setelah Melihat Metodenya Mereka Sangat “Happy”, Karena Paling Tidak Bisa Menghindarkan Mereka Dari Konflik Mereka Mendukung Penuh Metode Ini.</p>	<p>Kepala Desa Bulu Rejo (Bapak Sunaryo) Sangat Bagus Menilai Metode Yang Diterapkan Bisa Tepat Sasaran Dalam Penentuan Rumah Tangga Sasaran.</p>	<p>Respon Kepala Kelurahan Wuryo Rejo (Bapak Sukirno) Sangat Mendukung Metode Ini, Karena Selalu Mengikuti Setiap Pertemuan Di Tingkat RW.</p> <p>Menurut Beliau Metode HPM Sudah Sangat Cocok Sudah Sesuai Dengan Keadaan Yang Sebenarnya Dan Pemerintah Desa Akan Aman Karena Tidak Akan Di Demo Oleh Masyarakat Seperti Kasus BLT Dulu.</p>	<p>Paling Baik Respon Kepala Desa Jatisrono. Beliau Mendukung Metode Ini Karena Dianggap Valid Dan Tepat Sasaran. Bapak Kepala Desa Selalu Ikut Dalam Setiap Diskusi Mengantar Fasilitator.</p>
Tahapan Mana Dari Metode Yang Dirasakan Paling Rawan Dan Mutlak Perlu Dukungan Pihak Pemerintah?			
<p>Pertemuan Ketua SLS, Harus Mendapatkan Ijin Dan Dukungan Dari Pemdes.</p>	<p>Pertemuan Ketua SLS, Harus Mendapat Ijin Dan Harus Dengan Undangan/Instruksi Dari Kepala Desa</p>	<p>Di Pertemuan Dengan Ketua SLS, Karena Harus Ada Ijin Dari Kepala Desa. Dan Tiap Ketua SLS Harus Mendapat Undangan Resmi Dari Pemerintah Desa</p>	<p>Pertemuan Ketua SLS Harus Ada Ijin Dari Kepala Desa Dan Persetujuan Aparat Desa.</p>

PERAN PIHAK LAIN

Bagaimana Koordinasi Dengan Pendamping, DINSOS, Dan BPS?
--

Jarang interaksi hanya pendamping kec. Jatisrono yang beberapa kali ikut pertemuan dan mereka membantu koordinasi dengan camat dan kades	Koordinasi pemdamping = sering menanyakan waktu dan tempat pertemuan di wilayahnya. Sedangkan Dinsos dan BPS tidak	Koordinasi dengan BPS dan dinsos tidak pernah. Koordinasi dengan pendamping PKH baik. Beberapa kali pendamping member gambaran desa, letak desa, jadwal pertemuan, dll.	Tidak pernah koordinasi dengan pendamping hanya pendamping Tirtomoyo yang selalu ikut dalam diskusi dan mencatat jadwal semua pertemuan.
Bagaimana Peran Pendamping Dan Pihak Dinsos Dalam Pelaksanaan Ujicoba Ini?			
Pendamping membantu koordinasi dengan camat, pemdes. Membantu pengenalan wilayah/lokasi studi. Membantu cari base camp dan info cara akses fasilitas.	Pendamping = mereka membantu koordinasi dengan camat memberi gambaran letak lokasi desa	Koordinasi dengan pendamping PKH bagus. Pendamping PKH tiap kec, bebeapa kali ikut pertemuan dan membantu koordinasi dengan pihak kec dan desa.	Membantu pengenalan wilayah/lokasi pertemuan. Ada yang selalu ikut diskusi jadi membantu menjawab pertanyaan-pertanyaan di luar wewenang fasilitator.
Bagaimana Peran BPS Dalam Pelaksanaan Ujicoba?			
Dalam metode ini BPS kurang ambil peran	Peran BPS, interaksi hanya sebatas kenalan.	Dalam ujicoba ini peran BPS kurang berperan.	Tidak pernah koordinasi dengan BPS sehingga dalam metode ini BPS kurang berperan.
Peran-Peran Mana Yang Mendukung Dan Peran Yang Dipandang Keluar Dari Konsep/ Metodologi?			
Yang keluar dari konsep: ketua SLS pada pertemuan masyarakat hanya mengundang tokoh-tokoh dari tiap RT dan RTSM. Tidak mengundang seluruh masyarakat (dusun Ngantup, Purworejo). Peran ketua SLS mendukung: sosialisasi tentang metode ke masyarakat atau tokoh.	Widodo= RT 01 dusun Embung, Gondang Sari, Jatisedau. Pertemuan masyarakat yang di undang dalam pertemuan hanya RT yang ada criteria PKH.	Peran yang keluar konsep: untuk desa sendang, menurut ibu kepala desa pendamping PKH sudah sosialisasi dan menyatakan bahwa di desa Sendang Metode yang digunakan adalah pendaftaran sehingga fasilitator harus menjelaskan lebih detail lagi. Untuk desa Wuryorejo, pertemuan masyarakat hanya dihadiri beberapa wakil dari RT.	Di desa Giriyoso, karena takut terjadi rusuh di diskusi jadi yang diundang hanya ketua RT dan wakil RT.

KENYAMANAN PROSES FASILITASI

Metode Apa Yang Dirasakan Paling Nyaman Dalam Fasilitasinya? Mengapa?			
Perbaikan Tokoh, SLS tingkat RT dan urban. Tokoh mudah memahami	HPT = proses diskusi lebih interaktif Tanya-jawab terkait program dan	Metode hybrid perbaikan masyarakat tingkat RT: diskusi lebih hidup karena	Metode Hybrid perbaikan tokoh tingkat RT, karena data ddari pusat bisa diganti

metode dan tidak membawa kepentingan pribadi. Tokoh benar-benar peduli dengan kemiskinan. Yang penting tidak salah pilih yaitu tokoh yang benar-benar mewakili kepentingan warga. Diskusi tokoh biasanya lebih focus, terarah dan mendalam.	metodologi.	RTSM yang diusulkan oleh masyarakat dikenal oleh semua masyarakat. Peserta yang datang hanya 1 lingkup RT.	dan mereka tahu persis kehidupan disekitarnya. Diskusi lebih hidup.
Tahapan Mana Dalam Metode Yang Dirasakan Paling Mudah?			
Paling mudah koordinasi dengan kepala desa, karena biasanya kadesa sudah mendapat sosialisasi dari camat/ pendamping. Sehingga fasilitator tinggal penegasan saja dan meminta dukungan untuk pertemuan ketua SLS.	Koordinasi dengan kades, karena sudah ada sosialisasi sebelumnya dan kepala desa sangat antusias adanya program	Tahap yang paling mudah koordinasi dengan kepala desa, karena kepala desa kebanyakan sudah tahu akan program itu dan semua sudah welcome tinggal minta dukungan dari kepala desa.	Tahapan paling mudah koordinasi dengan kepala desa karena mereka langsung menyambut program lain dan metode ini serta member dukungan.
Tahapan Mana Yang Dirasakan Paling Banyak Masalah?			
Pertemuan ketua SLS karena mereka masih “trauma” dari konflik BLT sehingga perlu banyak diskusi. Bahkan mereka kadang enggan metode yang akan digunakan.	Pertemuan ketua SLS karena mereka menilai kalau ada pendataan bantuan kalau sampai tidak tepat mereka akan jadi sasaran kemarahan warga.	Pertemuan dengan ketua SLS karena tiap SLS minta pertemuan di gabung dengan SLS lain	Pertemuan ketua SLS mereka kebanyakan ingin pertemuan digabung saja jadi terlalu lama untuk menentukan jadwal.
Metode Apa Yang Dirasakan Paling Banyak Masalah Dalam Fasilitasinya? Mengapa?			
Hybrid tambahan masyarakat: daftar dari pusat biasanya diprotes untuk diganti, masyarakat mengusulkan dirinya sendiri untuk dimasukkan ke dalam daftar RTSM. Diskusi kurang focus kurang terarah, suara gaduh. Criteria kemiskinan yang disepakati kadang tidak dipatuhi / digunakan dalam perangkian	HTM: di desa Bulurejo, ada sms dari warga (085229554514) yang menginformasikan daftar dari pusat tidak tepat sasaran di RW 07	Hybrid tambahan masyarakat karena data pusat yang sudah mampu tapi masuk karena tidak bisa diganti dengan RTSM usulan masyarakat. Di desa Jatisari RT 04/05 ada kasus RTSM RTSM data dari pusat sudah dianggap mampu sehingga ada warga yang akan demo bila RTSM tersebut mendapat bantuan PKH.	Metode hybrid tambahan masyarakat: data dari pusat dianggap sudah mampu sehingga menimbulkan kecemburuan dimasyarakat.

KETERSEDIAAN DATA PUSAT DAN QUOTA CALON PESERTA

Apakah Ketersediaan Data Pusat Sangat Mendukung Pelaksanaan Metode?

Untuk data base studi, data dari pusat kurang mendukung karena banyak data khususnya daftar RTSM dari masyarakat yang tidak ada dalam daftar PPLS / SM. Daftar RTSM dari pusat >90% di protes oleh masyarakat khususnya dalam metode hybrid tambahan.	Ya, karena bisa memberi gambaran umum tahapan metodologi secara kuantitatif bisa memberikan gambaran terhadap rumah tangga sasaran program kepada masyarakat.	Kurang mendukung, karena banyak data RTSM yang tidak tercantum dalam PPLS dan ada beberapa RTSM yang tidak tercantum dalam data SM	Data SM tidak akurat dan tidak lengkap padahal satu desa cuma satu SLS. Data PPLS harusnya dilengkapi alamat lengkap agar tidak salah. Kalau metode tambahan data tidak mendukung. Untuk matching, data dari pusat sangat mendukung meskipun banyak yang kurang daftar PPLS.
Bagaimana Respon Masyarakat/Para Pihak Terhadap Data Pusat?			
Masyarakat biasanya memprotes daftar RT dari pusat yang tidak sesuai dengan criteria kemiskinan → diusulkan untuk diganti terutama pada quota 0 jika kita menyampaikan bahwa di SLS ini tidak ada RTSM menurut pusat. Ada tokoh yang secara terang-terangan jika data yang digunakan adalah data dari BPS bahwa rumah tangga yang menolak untuk dikatakan RTSM menurut pusat.	Kepala desa = datanya tidak akurat karena menilai data lama yang belum dimutakhirkan. Masyarakat menilai data dari pusat salah dan menanyakan asal usul data tersebut.	Masyarakat seringkali menolak data pusat, apalagi bila data pusat “0”, mereka akan langsung komentar data dari pusat tidak sesuai dengan kenyataan di lapangan. Di RW 05 kelurahan Wuryorejo ada yang mengatakan banyak data pusat hanya pas untuk statistic dan tidak pas untuk kepentingan masyarakat. Di RW 02 kel. Wuryorejo quota nol tetapi ada tokoh yang menyatakan data tersebut tidak pas dengan kenyataan dan tidak ada tim yang langsung ke lokasi untuk survey langsung.	Ada yang mengeluh, kalau data dari pusat itu data dari BPS biasanya tidak valid karena BPS kalau buat data hanya mengarang tidak benar dengan keadaan sesungguhnya. Semua SLS yang dinyatakan tidak ada RTSM criteria PKH semua itu tidak benar.
Adakah Persoalan Terkait Data Pusat Dan Quota Calon Peserta PKH Di Lapangan?			
Data tidak up to date: data salah ketik/tulis masih dijumpai. Data tidak sesuai dengan harapan / jika quota 0 tidak menggambarkan kondisi yang sebenarnya. Di Kel. Wonogiri RW I RT 01 dan 02, RW X RT 04 mengakui bahwa di SLS tersebut benar-benar tidak ada rumah tangga miskin. Jumlah quota juga selalu dikatakan “bahas quota” kurang oleh masyarakat. Jika quota 0, tidak ada RTSM menurut	Ada data yang tidak akurat karena ternyata di lapangan ada yang sudah tinggal di SLS tersebut, ada yang ternyata bukan rumah tangga yang miskin lagi, sehingga program di nilai tidak tepat sasaran. Quota masyarakat menilai jumlah kurang/belum seluruh rumah tangga miskin yang ada dapat bantuan padahal kesejahteraannya hampir sama/mirip.	Ada kasus di RT 04/ RW 5 desa Jatisari dengan metode HTM, dimana data pusat ada RTSM yang sudah dianggap mampu, sehingga RTSM tersebut dapat bantuan PKH akan di demo oleh beberapa warga. Untuk quota, jumlah quota jumlah sering kali menimbulkan masalah seperti kasus di desa Sendang, quota “0” semua. Padahal menurut beberapa tokoh di desa Sendang masih banyak RTSM yang memiliki kriteria PKH.	Data dari pusat kalau metode tambahan selalu menjadi polemic di diskusi. Data dari pusat selalu ditanya peserta diskusi, itu data tahun berapa karena sekarang data yang dari pusat sudah rumah tangga mampu kadang ada yang pindah atau sudah meninggal.

pusat menimbulkan keresahan masyarakat.		Data dari pusat ada yang sudah meninggal dan ada yang sudah pindah sehingga sering kali ditanyakan data darimana? Tahun berapa?	
---	--	---	--

PARTISIPASI DAN TINGKAT KEHADIRAN PESERTA

Apakah Peserta Serius Mengikuti Semua Tahapan Metodologi? Tahapan Mana Yang Lain Seru Dan Membutuhkan Konsentrasi?			
<p>Peserta cukup serius secara umum, hanya jarang terjadi diskusi untuk membahas kriteria PKH. Diskusi kewajiban lebih sering terjadi di perkotaan.</p> <p>Diperkotaan lebih senang antusias dalam menyeleksi RTSM.</p> <p>Masih ada budaya “ewuh pakewuh” dalam diskusi seleksi RTSM di pedesaan.</p> <p>Tahapan untuk menyeleksi RTSM paling seru, khususnya dalam perangkingan dan konfirmasi akhir. Ada yang sangat emosional marah, bahkan menangis.</p>	<p>Serius dalam mendengarkan sosialisasi program terutama sasaran bantuan kriteria yang mendapatkan, namun pada saat identifikasi rumah tangga termiskin terkadang Cuma mencoba mengusulkan nama sebanyak mungkin, namun untuk menyeleksinya terkadang pada diam.</p> <p>Yang serius proses perangkingan karena mereka menilai hampir sama miskinnya.</p>	<p>Peserta rata-rata serius dalam mendengarkan penjelasan dan proses diskusi.</p>	<p>Mulai menentukan 3 faktor utama sampai perangkingan yang benar-benar harus konsentrasi dan membutuhkan kesabaran yang penuh karena saat perangkingan pasti terjadi perdebatan apalagi kalau pertemuan masyarakat. Kalau pertemuan tokoh semua serius memperhatikan tapi kalau masyarakat biasa yang duduk di depan saja yang serius.</p>
Bagaimana Tingkat Kehadiran Peserta Di Setiap Tahapan Proses?			
<p>Untuk pertemuan tokoh yang baik, sesuai ketentuan metode. Dari awal sampai akhir pertemuan selalu ikut diskusi pada pertemuan masyarakat secara umum kehadiran cukup baik.</p> <p>Hanya saja biasanya pada akhir pertemuan jumlah berkurang karena nama mereka tidak masuk dalam daftar mereka pulang lebih awal.</p>	<p>Untuk pertemuan masyarakat pada saat awal sosialisasi yang hadir selalu ramai namun setelah tahu rumah tangga sasaran program dan proses identifikasi yang tidak lolos kriteria sebagian pulang.</p>	<p>Untuk setiap proses selalu banyak tetapi di beberapa SLS, banyak warga yang meninggalkan forum sebelum selesai proses, alasannya namanya tidak tercantum dalam RTSM yang diusulkan.</p> <p>Untuk pertemuan tokoh jumlah yang hadir sudah sesuai dengan ketentuan.</p> <p>Untuk pertemuan masyarakat di pedesaan jauh lebih banyak daripada di perkotaan.</p>	<p>Dari awal diskusi hingga pertengahan peserta masih banyak tapi saat identifikasi RTSM ada pulang karena tidak masuk kriteria. Saat perangkingan, peserta diskusi makin berkurang karena tidak enak memiskinkan tetangganya, takut mereka tersinggung.</p>
Bagaimana Tingkat Kehadiran Peserta Laki-Laki Dan Perempuan Dalam Setiap Proses?			

Perempuan: pada pertemuan siang hari biasanya perempuan lebih banyak yang hadir meskipun diskusi lebih diwarnai oleh laki-laki. Laki-laki: lebih dominan dalam diskusi pertemuan di pedesaan, pada malam hari peserta laki-laki lebih banyak yang hadir.	Perempuan jika diskusi pada pagi hari peserta Tanya hampir 90% perempuan, pada sore hampir setengah peserta perempuan dan laki-laki. Malam hari hampir 100% laki-laki. Namun untuk pertemuan tokoh selalu dengan kehadiran tokoh perempuan tidak terpengaruh waktu pertemuan.	Di perkotaan: tingkat kehadiran peserta, dan hampir semua di dominasi oleh kaum laki-laki hanya beberapa perempuan saja yang hadir. Di pedesaan: kehadiran peserta di pertemuan pada pagi-siang hari di dominasi oleh kaum perempuan. Untuk malam/sore di dominasi oleh laki-laki.	Kalau tokoh biasanya hadir semua yang diundang. Kalau masyarakat yang pertemuan siang kebanyakan yang datang ibu-ibu dan membawa anaknya tapi kalau malam kebanyakan yang datang bapak-bapak. Kalau yang datang semua ibu-ibu diskusi lebih ramai dan terjadi perdebatan yang sengit tapi kalau semua bapak-bapak diskusi lancer tetapi datar-datar saja.
Apa Tanggapan Fasilitator Terhadap Kehadiran Peserta (Laki-Laki & Perempuan) Dengan Waktu Pertemuan & Keputusan Yang Diambil?			
Malam hari: peserta laki-laki biasanya lebih banyak yang hadir untuk menyeleksi RTSM kadang ada rasa ewuh pekewuh, rasa sungkan dan setelah pertemuan selesai baru kadus, tokoh masyarakat menceritakan kondisi sebenarnya. Hanya di desa Jaten Kec. Selogiri kelompok laki-laki yang lugas dalam menyampaikan pendapat. Pagi-siang: peserta perempuan lebih banyak yang hadir. Dalam seleksi RTSM, kelompok perempuan lebih terbuka dalam menyampaikan pendapat sehingga keputusan lebih cepat dan tidak dimasukkan,	Jika pertemuan mayoritas perempuan rata-rata hasil keputusannya langsung final, namun jika pesertanya laki-laki rata-rata setelah konfirmasi akhir terkadang masing mengusulkan. Rumah tangga termiskin atau mengusulkan perubahan hasil rangking dengan alasan kemasyarakat rumah tangga tersebut.	Untuk pertemuan tokoh biasanya di dominasi oleh kaum laki-laki. Dalam pengambilan keputusan seringkali banyak pertimbangan, misalnya kaitannya dengan kegiatan gotong-royong dan kepemilikan KK. Untuk pertemuan masyarakat, pagi-siang sering didominasi oleh kaum perempuan, keputusan yang diambil seringkali lebih tegas daripada kaum laki-laki. Untuk malam hari seringkali di dominasi oleh kaum laki-laki, keputusan yang diambil seringkali banyak pertimbangan.	Ibu-ibu yang diskusi banyak yang mendaftarkan diri sendiri tapi saat perangkingan ibu-ibu lebih valid karena lebih tahu kehidupan sekitarnya dan sering gossip di tetangga. Kalau yang datang semua laki-laki berjalan datar dan banyak pertimbangan social dalam ambil keputusan.

PEMBELAJARAN PENTING

Pembelajaran Menarik Apa Saja (Positif & Negative) Yang Didapat Selama Pelaksanaan Sejak Persiapan Hingga Implementasi Metode Targeting?			
Ternyata masyarakat lebih suka dengan metode hybrid dari pada metode lain yang dilaksanakan di desa lain. Ada SLS yang benar-benar tidak memiliki RTSM. Kelurahan Giritirto RW 01 RT 01,	Ternyata pemahaman bapak Kades terhadap metodologi sebagian kurang sehingga ada yang menganjurkan keseluruhan rumah tangga yang ada criteria PKH didaftarkan. Ternyata	Ternyata tidak semua kades memahami metodologi seperti di desa Sendang, harus 2x koordinasi karena kades belum memahami metodologi. Ternyata Wonogiri lokasinya tidak	Ternyata quota "nol" lebih baik dari pada quota "2" Ternyata jadi fasilitator tidak sesulit yang dibayangkan. Ternyata metode ini lebih dianggap baik

<p>02 dan RW 10 RT 04.</p> <p>Ternyata masyarakat lebih suka dengan metode hybrid dari pada metode lain yang dilaksanakan di desa lain.</p> <p>Masyarakat dan ketua SLS bisa berswadaya untuk melaksanakan dan memfasilitasi pertemuan.</p> <p>Masyarakat lebih tertarik menanyakan jumlah bantuan daripada diskusi tentang kewajiban PKH dan akar masalah dalam pelaksanaan dan kewajiban.</p> <p>Masyarakat cukup bisa menerima tentang perbedaan kesejahteraan kekhawatiran tentang konflik / kecemburuan karena bantuan tunai sepenuhnya tidak terbukti.</p> <p>Tidak semua tokoh masyarakat lebih memperdulikan masyarakat miskin daripada kepentingan sendiri/keluarganya.</p> <p>Ada ketidakpercayaan masyarakat terhadap data yang disajikan oleh pemerintah (BPS).</p>	<p>setelah penyampaian quota walaupun Cuma 2 masyarakat tetap bisa legowo menerima.</p> <p>Ternyata tingkat kehadiran tokoh pendidikan kurang dalam diskusi.</p> <p>Ternyata masyarakat mau berswadaya mendukung konsumsi pertemuan tokoh</p>	<p>sengeri yg dibayangkan</p> <p>Ternyata masyarakat di pedesaan bisa aktif dalam proses diskusi indicator sampai perangkingan.</p> <p>Ternyata data SM tidak semuanya lengkap</p> <p>Ternyata tidak semua data pusat itu valid</p> <p>Ternyata peran kepala desa, dusun RW, RT sangat berperan dalam mendukung metodologi.</p>	<p>daripada pendaftaran.</p> <p>Ternyata warga desa Jaten sama dengan warga di kecamatan lain, tak kira lebih aktif atau lebih pintar ternyata sama saja berebut miskin.</p> <p>Ternyata masih ada sentiment warga sehingga tidak didaftar calon peserta PKH.</p> <p>Ternyata tidak semua kepala desa menyetujui metode ini.</p> <p>Ternyata ada yang menanyakan dana konsumsi untuk pertemuan.</p>
---	---	---	---

INPUT DAN SARAN

Treatment Apa Yang Paling Direkomendasikan Untuk Metode Hybrid?			
<p>Hybrid perbaikan masyarakat atau hybrid tokoh dengan seleksi tokoh yang benar-benar pro rakyat miskin.</p> <p>SLS tingkat RT diskusi lebih focus, terarah dan mudah menyeleksi RTSM dengan quota sedikit SLS tingkat RT tidak akan timbulkan kecemburuan.</p> <p>Data hasil diskusi di verifikasi dengan</p>	<p>HPT tetapi SLS-nya tingkat RT karena para tokoh lebih mengetahui kondisi RT di banding SLS RW/Dusun karena terkadang tokoh tidak tahu kondisi rumah tangganya.</p>	<p>Hybrid perubahan masyarakat tingkat RT, karena lebih transparan, lingkup tidak terlalu luas, jumlah rumah tangga tidak terlalu banyak, masing-masing rumah tangga bisa saling menikai tingkat kesejahteraan masing-masing.</p>	<p>Hybrid perbaikan masyarakat, karena mereka sendiri menentukan calon peserta PKH.</p> <p>Metode ini dianggap lebih baik karena transparan tanpa ada rekayasa dan mengurangi kecemburuan masyarakat.</p>

criteria kemiskinan hasil diskusi juga.			
Rekomendasi Apa Lagi Yang Ingin Disampaikan Terkait Pelaksanaan Metode (Tahapan, Waktu, Kerjasama Tim/Dukungan Pihak Lain, Alat Bahan, Dll)?			
Alat untuk pendokumentasian setiap kegiatan di pegang setiap fasilitator. Kalau bisa satu wilcah diselesaikan bersama dalam satu waktu. Semua SLS di desa waktu / jadwal jangan terlalu berselang lama. Pihak terkait dipastikan tahu dan tupoksinya.	Sebaiknya target waktu dibuat fleksible sehingga pertemuan di tingkat SLS jadwalny tidak ada yang pagi agar kehadiran peserta sesuai yang diharapkan metode. Perlu dibuat penjadwalan bersama dengan pendamping, Dinsos, BPS dan desa sehingga pelaksanaan diskusi dapat dihadiri semua pihak yang terkait. Sebaiknya fasilitator dibekali materi PKH sehingga lebih menguasai lebih detail tentang substansi PKH	Sebaiknya jadwal untuk koordinasi dan pertemuan ketua SLS dibuat lebih longgar. Jadwal pelaksanaan dibuat fleksible. Sebaiknya ada koordinasi antar dinsos, BPS dan fasilitator sampai di tingkat bawah. Sebaiknya ada flipchart yang lebih lengkap sehingga tidak menimbulkan pertanyaan. Sebaiknya ada pendamping PKH saat sosialisasi PKH. Perlu adanya asuransi (kecelakaan kerja)	Seharusnya ada jarak waktu koordinasi dan pertemuan dimasing-masing SLS. Sebaiknya sebelum fasilitator masuk ke desa-desa kepala desa sudah dapat sosialisasi di Kecamatan. Sebaiknya flipchart di copy untuk di kasih dipertemuan tokoh atau ketua SLS. Sebaiknya alat-alat sudah tersedia sebelum berangkat pertemuan.

Lampiran 3.b.

**HASIL DISKUSI DEBRIEFING
PROVINSI LAMPUNG**

A. Kelompok BPS dan Pendamping PKH

KENYAMANAN MEMFASILITASI	WAKTU	INPUT & SARAN	TEMPAT	PARTISIPASI & TINGKAT KEHADIRAN PESERTA	DUKUNGAN PEMERINTAH SETEMPAT	PEMBELAJARAN	DATA & QUOTA
<ul style="list-style-type: none"> Proses fasilitasi yang nyaman adalah metode Hybrid Proses fasilitasi yang banyak bermasalah adalah metode pendaftaran Metode yang direkomendasikan yaitu metode hybrid dengan sIs RT 	<ul style="list-style-type: none"> Sesuai dengan jadwal Waktu yang optimal untuk metode Hybrid : 10 hari dan metode Pendaftaran : 15 hari Yang membutuhkan waktu yang lebih banyak adalah metode pendaftaran dibandingkan hybrid Jumlah masyarakat yang mengikuti wawancara tidak bisa diduga 	<ul style="list-style-type: none"> Metode pendaftaran : penentuan kriteria RTSM sebaiknya dilaksanakan mulai dari tingkat yang paling bawah (RT), setelah prose situ kemudian dilaksanakan musyawarah warga ditingkat kelurahan sehingga usulan-usulan warga dapat terakomodir (partisipatif warga terakomodir dengan baik) 	<ul style="list-style-type: none"> Jarak sangat berpengaruh Tempat juga berpengaruh <ul style="list-style-type: none"> Kehadiran RTSM lebih banyak di tingkat Kecamatan dibandingkan Kelurahan Kenyamanan petugas self targeting lebih nyaman ketika di tingkat kecamatan Semakin jauh jarak lokasi wawancara semakin sedikit jumlah RTSM yang ikut wawancara 	<ul style="list-style-type: none"> Tingkat kehadiran perempuan masih kurang Partisipasi warga miskin sangat diperlukan dalam menentukan kriteria RTSM Kehadiran : <ul style="list-style-type: none"> perlakuan /metode any one lebih tinggi tingkat kehadiran masyarakat perlakuan/metode suami-istri lebih efektif dalam metode pendaftaran 	<ul style="list-style-type: none"> Self Targeting (metode pendaftaran) donk!!! baik 	<ul style="list-style-type: none"> Self Targeting (pendaftaran) : tingkat kesadaran masyarakat dalam menilai siapa yang masuk criteria RTSM, perlu adanya penyadaran masyarakat (pendampingan) Hybrid : transparansi, demokrasi dan akuntabel (pertanggung jawaban) sudah terbangun dengan baik, tetapi perlu adanya pengawasan yang baik untuk siapa yang hadir dalam musyawarah tersebut karena sangat vital dalam menentukan calon peserta PKH 	<ul style="list-style-type: none"> Temuan : <ul style="list-style-type: none"> Data PPLS tidak sama RTSM yang hadir RTSM yang hadir yang masuk SM tidak ada didaftar SM Data SM sering berubah-ubah Respon Lapangan <ul style="list-style-type: none"> RTSM tidak dapat BLT tapi namanya ada di data PPLS Data BPS <ul style="list-style-type: none"> BPS hanya mempunyai data <ul style="list-style-type: none"> ✓ PPLS 2008 syarat PKH ✓ Data SM dari WB Quota RTSM. PKH → Anggaran Departemen Kementrian Sosial

	<ul style="list-style-type: none"> • Waktu sedikit : respon aktif 	<ul style="list-style-type: none"> • Metode hybrid : <ul style="list-style-type: none"> ➢ Penentuan kriteria RTSM setelah dirumuskan ditingkat RT perlu ditindaklanjuti kriteria RTSM ditingkat kelurahan dengan harapan tingkat partisipasi, transparansi dan demokrasi berjalan baik ➢ Waktu, dibutuhkan relative panjang/lama • Untuk waktu diharapkan bisa lebih lama/panjang agar dalam penentuan kriteria RTSM melibatkan seluruh komponen masyarakat 					
--	--	--	--	--	--	--	--

		karena waktu yang relative singkat masih banyak warga yang tidak mengetahui program PKH sehingga tidak bisa untuk mendaftar dan mengikuti wawancara.					
--	--	--	--	--	--	--	--

B. Kelompok Fasilitator Hybrid

Metode Yang Paling Nyaman Saat Fasilitasi	Metode Yang sering bermasalah Saat Fasilitasi	Tahapan Metode Yang Paling Mudah	Tahapan Metode Yang Paling Susah
<ul style="list-style-type: none"> Metode perbaikan masyarakat Alasan : <ul style="list-style-type: none"> ➢ Data dari BPS pusat bisa ditambahkan atau dikurangi karena data BPS pusat dan data usulan masyarakat sama-sama dilakukan perengkingan. ➢ Data dari BPS pusat bisa ikut di rangking sehingga masyarakat dapat menilai/merengking semua usulan yang ada baik itu usulan masyarakat maupun BPS, karena kebanyakan data RTSM BPS pusat dibandingkan usulan masyarakat tingkat kehidupannya jauh lebih baik. ➢ Kenapa harus semua masyarakat 	<ul style="list-style-type: none"> Metode tambahan masyarakat Alasan : <ul style="list-style-type: none"> ➢ Data dari BPS pusat tidak bisa dirubah setelah dilakukan akurasi ➢ Data dari BPS pusat sering diperotes oleh masyarakat karena bukan termasuk RTSM ➢ Adanya ketakutan pemerintah desa yang dianggap yang memberikan data tersebut ➢ Ketika proses pengusulan RTSM masyarakat lebih cenderung mengusulkan diri sendiri atau keluarganya ➢ Ketika proses perengkingan akan lebih banyak membutuhkan waktu karena selalu menganggap sama 	<ul style="list-style-type: none"> Tahapan sosialisasi Alasan : <ul style="list-style-type: none"> ➢ Tahapan sosialisasi dengan menggunakan flip chat karena hanya membaca dan sedikit improvisasi ➢ Tahapan sosialisasi PKH karena hanya menerangkan PKH secara rinci ➢ karena selain kita transfer informasi dan tanggapan masyarakat baik Tahapan Brainstorming Alasan : <ul style="list-style-type: none"> ➢ Pada tahapan ini warga/tokoh pada umumnya sangat jujur dalam mengutarakan apa yang menjadi keluhan tiap hari/faktor pembeda dan selain itu tahapan ini yang paling sedikit waktu yang dibutuhkan ➢ Menentukan indikator terkait kesejahteraan/ kemiskinan setempat karena masyarakat sangat detail memberikan informasi 	<ul style="list-style-type: none"> Tahapan menentukan ciri detail pembeda/brainstorming Alasan : <ul style="list-style-type: none"> ➢ Saat menentukan ciri detail terkait dengan penghasilan/pendapatan terkadang masyarakat tidak mau menyebut besaran penghasilan karena tidak menentu ➢ Ketika menentukan hari kerja masyarakat susah menentukan jumlah hari kerja karena bekerja tidak tentu dalam satu bulan ➢ Besaran antara 2 besaran pendapatan yang tidak sama ➢ Banyak terjadi perbedaan pendapat antar tokoh/masyarakat menentukan mana 3 faktor utama yang membedakan sehingga membutuhkan waktu yang agak lama Tahap perengkingan Alasan : <ul style="list-style-type: none"> ➢ Jika dilingkungan orang Jawa biasanya sulit, karena karakter orang Jawa adalah

<p>yang hadir dalam diskusi karena agar semua masyarakat bisa mengetahui secara langsung bagaimana proses mulai dari proses pengusulan sampai dengan proses perengkian.</p> <ul style="list-style-type: none"> ➢ Karena prosesnya lebih terbuka sehingga jika ada data dari BPS yang tidak sesuai kriteria RTSM bisa tidak diloloskan setelah dilakukan perengkian. ➢ Disebagian daerah/desa tidak banyak yang memiliki tokoh sehingga yang hadir juga perwakilan dari masyarakat ➢ Pamong desa lebih tenang dan lebih menerima karena prosesnya dilakukan sendiri oleh masyarakat baik dari penentuan kriteria RTSM, proses seleksi dan semua hasil disepakati oleh masyarakat. ➢ Masyarakat benar-benar berpartisipasi untuk ikut menentukan calon peserta program namun ada kelemahan yaitu masyarakat yang merasa tidak sesuai kriteria RTSM atau PKH cenderung tidak hadir dalam pertemuan ➢ Jika masyarakat yang diundang dalam proses musyawarah maka proses intraksi langsung dengan masyarakat akan lebih kuat dan benar-benar partisipatif dan kesadaran masyarakat melalui proses rasionalisasi. 	<p>antar RTSM sehingga harus dijelaskan kembali perbedaan antar RTSM dan dibandingkan dengan masing-masing indikator pembeda sehingga banyak waktu yang dibutuhkan</p> <ul style="list-style-type: none"> ➢ Karena harus menjelaskan lebih rinci bahan sosialisasi dan menggunakan bahasa yang mudah dimengerti dan pahami oleh masyarakat ➢ Proses mencari atau menentukan indikator pembeda Rumah tangga waktu yang dibutuhkan lebih lama karena harus lebih banyak mengarahkan untuk menentukan pembeda ➢ Masyarakat sering memperotes ketika disebutkan quota karena terlalu sedikit dan data-dat dari BPS pusat tidak bisa dirubah, selain itu karena bila dibandingkan dengan data BPS pusat RTSM yang diusulkan oleh masyarakat lebih miskin 	<ul style="list-style-type: none"> • Pertemuan dengan semua ketua SLS <ul style="list-style-type: none"> ➢ Karena dibantu oleh aparat desa dalam mengkoordinasikan pamong desa/dusun ➢ Ketua SLS relatif lebih cepat tanggap terhadap apa yang disosialisasikan • Koordinasi dengan kepala desa <ul style="list-style-type: none"> ➢ Karena hanya menjelaskan dengan 1-3 orang saja sehingga mudah menjelaskan 	<p>“ewoh pekewoh (sungkan/tidak enakan)” sehingga pada saat ditanya mana diantara RTSM yang direnking pasti dijawab sama sedangkan jika dilingkungan orang pribumi (suku lampung) semua masyarakat mengaku miskin sehingga hasil renking kurang maksimal</p> <ul style="list-style-type: none"> ➢ Kurang mengenal ekonomi yang direnking ➢ Masyarakat/tokoh yang hadir agak kurang menyebutkan mana yang lebih miskin dan apa alasannya ➢ Masyarakat/tokoh sulit membandingkan mana yang lebih miskin <ul style="list-style-type: none"> • Tahapan pengusulan RTSM <ul style="list-style-type: none"> ➢ Kesungkian masyarakat untuk menyebutkan nama karena takut orang yang diusulkan tersinggung disebut sangat miskin ➢ Banyak masyarakat yang ngotot ingin diusulkan karena melihat jumlah nominal bantuan padahal sebenarnya dia tidak termasuk RTSM
--	--	---	--

<ul style="list-style-type: none"> ➤ Memiliki partisipasi dan nilai tawar yang kuat dalam memperbaiki data kemiskinan dengan kondisi objektif diwilayahnya ➤ Penilaian lebih meluas dan bagi masyarakat yang tidak jujur akan ketahuan oleh masyarakat yang lin dan ketika diperbaiki data juga akan lebih akurat 			
<ul style="list-style-type: none"> • Metode perbaikan tokoh Alasan : <ul style="list-style-type: none"> ➤ Data dari BPS pusat dapat dilakukan perengkingan bersama data usulan masyarakat ➤ Diskusi relative lebih lancer karena tidak banyak kepala dan mulut ➤ Lebih fair ➤ Lebih akurat untuk mendapatkan data dan lebih efisien ➤ Lebih epeltif, objektif ➤ Lebih sedikit waktu yang dibutuhkan dalam proses sosialisasi karena mereka akan lebih mudah mengerti dengan bahan sosialisasi ➤ Ketika proses pengusulan RTSM lebih mudah karena tidak akan mengusulkan masyarakat yang tidak memenuhi kriteria RTSM yang sudah disepakati ➤ Dalam proses perengkingan akan lebih mudah karena sudah memahami tingkat perbedaan RTSM 	<ul style="list-style-type: none"> • Metode tambahan tokoh Alasan : <ul style="list-style-type: none"> ➤ Data dari BPS pusat tidak bisa dirubah dan tidak dilakukan perengkingan ➤ Tidak semua tokoh masyarakat mengetahui kriteria PKH dari RTSM seperti (jumlah anak, status sekolah anak, tentang kehamilan) ➤ Tokoh ada kekhawatiran dijadikan orang yang mempertanggung jawabkan hasil musyawarah karena takut disalahkan oleh masyarakat, sehingga banyak tokoh yang tidak mau bertanggung jawab dengan hasil ➤ Tidak ada jaminan tokoh akan mensosialisasikan kepada masyarakat hasil pertemuan ➤ Tokoh yang seharusnya dihadirkan dalam pertemuan terkadang tidak terpenuhi ➤ Kurang mewakili persentasi dari masyarakat karena banyak tokoh yang kurang paham tentang 		

	<p>kondisi RTSM diwilayahnya</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Terkadang tokoh-tokoh yang dihadirkan memiliki kepentingan pribadi dan sering mengusulkan RTSM dari kalangan keluarganya ➤ Tokoh juga sering mengusulkan dirinya sendiri, sedangkan tokoh yang lain tidak enak untuk menolak sehingga kadang dalam proses perengkingan dia yang menjadi rengking 1 		
--	--	--	--

PARTISIPASI dan TINGKAT KEHADIRAN PESERTA

Bagaimana Tingkat Kehadiran Peserta Laki-Laki dan Perempuan Dalam Setiap Proses?	Bagaimana Tingkat Kehadiran Peserta Di Setiap Tahapan Proses (Metode Hybrid) dan Tahapan Proses (Metode Pendaftaran)?	Apa Yang Dirasakan Fasilitator Terhadap Kehadiran Peserta (Laki Dan Perempuan) Jika Dikaitkan Dengan Efektifitas Waktu Dan Kualitas Keputusan Saat Pengambilan Keputusan Diskusi?
<ul style="list-style-type: none"> • Tingkat kehadiran perempuan lebih banyak yaitu rata-rata 75% dalam setiap pertemuan • Tingkat partisipasi antara laki-laki dan perempuan yaitu 40% : 60 % • Berimbang • Lebih banyak ibu-ibu yang dihadirkan dalam pertemuan karena pemahamannya program ini untuk ibu-ibu • Partisipasi perempuan rata-rata 50 %-70 % • Persentase kehadiran dalam pertemuan lebih banyak perempuan karena jadwal pertemuan biasanya bertepatan dengan jam kerja laki-laki • Tingkat kehadiran <ul style="list-style-type: none"> ➤ Ada yang 50 : 50 ➤ Ada 100% perempuan yang hadir ➤ Ada 20 % perempuan yang hadir • Kadang mayoritas perempuan yang hadir atau sebaliknya 	<ul style="list-style-type: none"> • Sangat butuh partisipasi perempuan karena perempuan yang lebih paham kondisi kemiskinan • Selama melakukan kegiatan fasilitasi tingkat kehadiran peserta sangat antusias • Lebih efektif jika peserta yang hadir lebih banyak laki-laki karena diskusinya akan lebih hidup • Jika pesertanya kebanyakan perempuan ketika proses diskusi mereka kebanyakan ngobrol sendiri • Peserta perempuan lebih mengenal keadaan ekonomi tetangganya karena biasanya antar perempuan sering ngobrol • Lebih efektif jika yang hadir perempuan karena lebih mengetahui kriteria yang dimiliki RTSM yang diusulkan dan lebih mudah melakukan prengkingan RTSM • Jika dalam pertemuan tokoh lebih banyak laki-laki yang hadir • Lebih enak, lebih cepat dan lebih akurat laki-laki 	<ul style="list-style-type: none"> • Jika pesertanya laki-laki akan lebih tegas dalam mengambil keputusan • Jika pesertanya perempuan prosesnya akan lebih cepat sedangkan jika pesertanya kebanyakan laki-laki maka prosesnya lebih lama karena banyak terjadi debat • Tingkat kehadiran lebih banyak perempuan dibandingkan laki-laki dalam setiap pertemuan masyarakat terutama jika waktu pertemuannya pagi hari • Lebih nyaman jika tingkat kehadiran peserta mencapai 75% atau lebih karena akan lebih mudah dalam pengambilan keputusan • Jika dalam pertemuan masyarakat kehadiran peserta lebih adil jika laki-laki dan perempuan sama-sama dalam pengambilan keputusan • Jika dalam pertemuan tokoh lebih dominan laki-laki yang mengambil keputusan

<ul style="list-style-type: none"> • Tingkat kehadiran laki-laki dan perempuan yaitu 45 : 55 • Sebagian besar wanita yang lebih banyak hadir dalam pertemuan 	<p>dibanding perempuan</p> <ul style="list-style-type: none"> • Warga yang hadir berkurang sejalan dengan waktu sosialisasi khususnya quota nol dalam satu kelurahan • Ketika dalam pertemuan lebih banyak laki-laki yang hadir maka perempuan yang lebih banyak diam • Jika hanya perempuan yang hadir dalam pertemuan akan lebih banyak waktu yang dibutuhkan untuk menentukan indikator pembeda antar rumah tangga • Partisipasi peserta untuk hadir minimal 50% dari jumlah KK tetapi juga melihat waktu pertemuan karena jika waktu pertemuan berbenturan dengan mencari nafkah maka bisa dipastikan jumlah yang hadir tidak banyak. 	<ul style="list-style-type: none"> • Antara laki-laki dan perempuan sama aktif dalam pengambilan keputusan dalam pertemuan • Pagi hari dan siang sulit untuk menghadirkan masyarakat di wilayah lingkungan/desa yang berdekatan dengan PT/pabrik • Pada pagi, siang dan malam lebih banyak warga yang hadir dibandingkan pada sore hari karena warga lebih banyak aktifitas mencari pakan ternak pada sore hari didaerah yang mayoritas suku jawa • Kehadiran kurang maksimal karena pilihan waktu yang disediakan terlalu minim/singkat
--	---	--

WAKTU

Bagaimana Dampak Alokasi Waktu Terhadap Tingkat Kehadiran Peserta (Laki/Perempuan/ Masyarakat/Tokoh) Di Pedesaan dan Perkotaan?	Apakah Waktu Yang Dialokasikan Untuk Pelaksanaan Metode (Persiapan/Pelatihan, Koordinasi, Dan Pelaksanaan Lapangan) Dirasakan Mencukupi? Bagaimana Idealnya Alokasi Waktu Menurut Fasilitator?	Tahapan Mana Yang Paling Membutuhkan Waktu, Apa Alasannya?	Berapa waktu rata-rata yang dibutuhkan untuk pelaksanaan: Koordinasi (Camat, Kades)? Pertemuan tokoh/ pertemuan seluruh Ketua RT? Pertemuan masyarakat/ tokoh (Sosialisasi di Pendaftaran, diskusi di Hybrid)?
<ul style="list-style-type: none"> • Tingkat kehadiran peserta dipengaruhi oleh waktu pelaksanaan yaitu hari dan jam • Tidak ada dampak yang negatif karena mengumpulkan tokoh atau masyarakat sangat mudah khususnya lampung tengah • Mengkondisikan langsung jadwal ke RT yang tidak hadir dalam 	<ul style="list-style-type: none"> • Pelatihan : <ul style="list-style-type: none"> ➢ Waktu yang diberikan untuk pelatihan sebenarnya cukup hanya pemantapan metodologinya perlu lebih ditekankan ➢ Sangat baik karena semuanya sudah terjadwal dan kita dapat mempersiapkan diri dengan baik 	<ul style="list-style-type: none"> • Diskusi indikator kemiskinan terutama jika pertemuannya masyarakat karena perlu mengarahkan masyarakat untuk memberikan informasi dan juga menggunakan bahasa yang mudah dimengerti oleh masyarakat • Pertemuan masyarakat karena harus menyesuaikan dengan aktivitas/kegiatan masyarakat di setiap wilayah • Koordinasi dengan lurah/kepala kampung karena sering sulit dihubungi karena kesibukan terutama di wilayah lampung 	<ul style="list-style-type: none"> • Koordinasi dengan camat/lurah : <ul style="list-style-type: none"> ➢ Waktu yang dibutuhkan minimal 2 hari karena mengantisipasi pak lurah tidak ditempat ➢ Untuk koordinasi dengan kades cukup membutuhkan waktu 1 jam namun untuk memberikan waktu untuk kades mengundang semua ketua SLS membutuhkan waktu minimal 1 hari karena biasanya ada dusun yang lokasinya jauh dari pusat desa ➢ Waktu yang dibutuhkan untuk koordinasi

<p>pertemuan SLS karena sering tidak semua ketua SLS bisa hadir disebabkan karena lokasi RT/dusun lokasinya jauh dari pusat desa</p> <ul style="list-style-type: none"> • Banyak ketua RT/ Kadus yang sulit ditemui dan harus dijelaskan dari awal • Tingkat kehadiran masyarakat semakin lama semakin sedikit yang datang karena informasi yang cepat berkembang dimasyarakat sehingga yang tidak termasuk RTSM dan tidak memiliki kriteria PKH tidak akan datang dalam pertemuan • Tingkat kehadiran 60% - 80% • Tingkat kehadiran tergantung lingkungan • Waktu pertemuan sangat mempengaruhi tingkat kehadiran • Dampak waktu terhadap kehadiran peserta, jika pertemuan dilakukan pada pagi hari atau siang yang lebih banyak hadir ada perempuan dan jika pada malam hari tingkat kehadirannya seimbang • Tergantung dari tingkat kemiskinan di masing-masing SLS, jika banyak RTSM di SLS tersebut maka akan banyak masyarakat yang hadir dalam pertemuan • Kalau di wilayah kampung mau kapan saja tidak masalah karena masyarakat selalu membeludak karena terkait bantuan 	<ul style="list-style-type: none"> ➢ Waktu pelatihan sangat singkat karena sedikit sekali dalam ujicoba/praktek memfasilitasi langsung sebelum turun kemasyarakat ➢ Waktunya cukup ➢ Persiapan terlalu singkat ➢ Persiapan/pelatihan minimal 10 hari <ul style="list-style-type: none"> • Koordinasi : <ul style="list-style-type: none"> ➢ pada setiap koordinasi baik dengan lurah maupun Kadus/RT dibutuhkan waktu yang seefisien mungkin karena jatah waktu yang hanya 2 hari ➢ sering kita temukan saat proses koordinasi kepala desa sering tidak ada ditempat atau terlalu sibuk sehingga waktu menjadi molor dari waktu yang sudah ditentukan dijadwal ➢ waktunya sangat singkat ditambah lagi terkadang asisten supervisor belum berkoordinasi dengan camat sehingga kepala desa tidak mengetahui informasi tentang program ➢ informasi tentang adanya program tidak semua kepala desa mengetahui karena tidak semua mendapat informasi dari kecamatan ➢ kurangnya waktu karena tidak bisa menentukan apakah langsung bisa bertemu dengan 	<p>tengah karena rata-rata kantor kepala kampung itu dirumah masing-masing kepala kampung</p> <ul style="list-style-type: none"> • Perengkingan karena masyarakat biasanya menganggap sama dan perlu mencari perbedaan dengan menggunakan indikator satu persatu sehingga membutuhkan waktu yang lebih lama • Matching karena terkadang pak RT tidak paham nama masyarakatnya dan selain itu kebiasaan masyarakat dikenal dengan nama panggilan • Pertemuan masyarakat karena dari proses pembukaan sampai dengan konfirmasi akhir membutuhkan waktu yang lama • Pertemuan tokoh karena sering hanya bisa dilakukan pada malam hari 	<p>dengan lurah/kades cukup 1-2 jam karena hanya menjelaskan tentang program namun lama menunggu waktu untuk bisa bertemu dengan kades/lurah</p> <ul style="list-style-type: none"> ➢ Koordinasi dengan kades/lurah cukup 30 menit <ul style="list-style-type: none"> • Pertemuan tokoh/ pertemuan semua SLS : <ul style="list-style-type: none"> ➢ Membutuhkan waktu 2-3 jam ➢ Untuk pertemuan ketua SLS kalau hanya satu hari dari koordinasi terlalu singkat karena butuh waktu untuk mengundang semua ketua SLS agar bisa hadir sehingga membutuhkan waktu kurang lebih 2 hari, sedangkan untuk pertemuan ketua SLS tidak terlalu banyak membutuhkan waktu karena hanya mensosialisasikan program dan menyusun jadwal kira-kira 1-1,5 jam ➢ Pertemuan tokoh membutuhkan waktu 1-1,5 jam ➢ Pertemuan tokoh SLS membutuhkan waktu 1,5-2,5 jam • Pertemuan masyarakat : <ul style="list-style-type: none"> ➢ Membutuhkan waktu kurang lebih 2-3 jam karena biasanya proses perengkingan membutuhkan waktu yang lebih lama terutama pertemuan masyarakat ➢ Untuk pertemuan sosialisasi membutuhkan waktu 1-2 jam ➢ Pertemuan masyarakat antara 1-4 jam ➢ Pertemuan masyarakat membutuhkan waktu 1,5-2,5 jam untuk metode pendaftaran
---	---	---	---

	<p>kepala desa atau karena lokasi yang jauh</p> <ul style="list-style-type: none"> ➢ koordinasi dengan lurah jangan dijadwalkan hari sabtu atau minggu karena hari libur <ul style="list-style-type: none"> • Pelaksanaan lapangan : <ul style="list-style-type: none"> ➢ Dalam setiap pertemuan masyarakat/tokoh diharapkan kita sudah hadir minimal 25 menit sebelum pelaksanaan pertemuan ➢ Waktu kegiatan dilapangan terkadang ada disuatu desa waktunya cepat/singkat namun ada juga waktu yang dibutuhkan lama ➢ Waktu lumayan efisien dan efektif tetapi agak kurang pas jadwal yang diberikan oleh pusat, misalnya untuk kelurahan yang jumlah SLS banyak tidak sesuai dengan waktu yang diberikan, seperti di kelurahan Labuhan Ratu dengan jumlah SLS 42 hanya diberikan waktu 12 hari 		
--	--	--	--

TEMPAT

Apakah Masyarakat Di Lokasi Perkotaan dan Pedesaan Memberikan Respon Yang Berbeda Terhadap Pelaksanaan Ujicoba?	Apakah Faktor Jarak Menjadi Masalah Yang Berpengaruh Terhadap Efektifitas Dan Efisiensi Pelaksanaan Metode?
<ul style="list-style-type: none"> • Baik di Desa maupun di Kota masyarakat responnya sangat baik dengan program ini • Berbeda, tergantung tingkat kesejahteraan masyarakat • Jika di kota mungkin lebih pada efisiensi waktu warga untuk ikut dalam diskusi karena terkait dengan waktu mereka beraktifitas, karena di daerah 	<ul style="list-style-type: none"> • Jarak tidak berpengaruh terhadap efisiensi dan efektifitas pelaksanaan metode • Berpengaruh terhadap efisien dan efektifitas jika jarak terlalu jauh • Semakin jauh jarak lokasi dan semakin susah medannya semakin lambat pula mobilisasinya • Di Desa jarak sangat mempengaruhi efektifitas dan efisiensi kerja karena terkadang jarak satu dusun/RT satu dengan yang lainnya lokasinya berjauhan

<p>kota mayoritas pekerjaannya adalah buruh sehingga untuk menentukan jadwal pertemuan kita harus menyesuaikan dengan waktu senggang mereka</p> <ul style="list-style-type: none"> • Jelas berbeda karena pertemuan ini membutuhkan diskusi, jika didesa masyarakatnya cenderung mengikuti diskusi sedangkan di kota masyarakatnya lebih kritis • Pasti berbeda karena terkait tingkat pemahaman pola pikir dan kondisi sosial budaya 	
---	--

DUKUNGAN PEMERINTAH SETEMPAT

Bagaimana Respon Pemerintah (Kabupaten, Kecamatan, Desa, Dusun, Rw/Rt) Terhadap Pelaksanaan Ujicoba Metode?	Bagaimana Tingkat Pemahaman Pemerintah (Kabupaten, Kecamatan, Desa, Dusun, Rw/Rt) Terhadap Ujicoba Metode?	Tahapan Mana Dari Setiap Metode (Hybrid/Pendaftaran) Yang Dirasakan Paling Rawan Dan Mutlak Membutuhkan Dukungan Pihak Pemerintah?
<ul style="list-style-type: none"> • Masyarakat <ul style="list-style-type: none"> ➢ Masyarakat desa responnya baik dan lebih bisa terkondisikan ➢ Kalau masyarakat kota responnya baik tapi terkadang ada yang agak cuek juga dan lebih kritis ➢ Respon masyarakat sangat baik namun mereka minta prosesnya di hybrid ini sampai tahapan survey langsung kerumah masing-masing calon peserta PKH ➢ Antara masyarakat desa dengan kota berbeda karena masyarakat di kota cenderung egois dan sedangkan di desa lebih bisa menerima metode yang dipakai ➢ Masyarakat sangat mendukung program ini terutama metode hybrid karena informasi disampaikan langsung kepada masyarakat dan semua proses dilakukan dengan proses musyawarah sehingga data dan informasi yang diperoleh bisa benar-benar akurat ➢ Masyarakat sepakat dengan proses ini karena 		<ul style="list-style-type: none"> • Koordinasi dengan pihak Pemda • Koordinasi dengan pihak Pendamping PKH • Koordinasi dengan ketua SLS/RT/Dusun • Tahap koordinasi sampai pertemuan tingkat RT, pasti membutuhkan dukungan aparat/pamong meski bentuk dukungannya hanya sebatas member tempat menginap dan mengundang masyarakat/tokoh • Koordinasi dengan pihak kecamatan karena sering sekali pihak kecamatan tidak menyampaikan tentang adanya program ini kepada kepala desa • Koordinasi dengan lurah karena untuk memperlancar proses pertemuan dimasing-masing SLS, karena jika lurah memberikan dukungan yang penuh maka masing-masing ketua SLS akan melaksanakan dengan baik • Koordinasi dengan kadus/lurah/ketua SLS karena dukungan penuh dari pamong desa sangat berpengaruh dalam menentukan keberhasilan pada tingkat pertemuan masyarakat • Koordinasi dengan pihak kecamatan karena akan memudahkan fasilitator untuk masuk ke Desa karena para kepala desa sudah memperoleh informasi tentang program ini dari pihak kecamatan dan untuk pihak kelurahan harus sudah mendapat tembusan dari pihak kecamatan • Pendampingan dari kadus/RT sangat diperlukan terkait mencari lokasi pertemuan namun masukannya kalau bisa ada transport baik dari pemerintah/ MS untuk pamong yang membantu

<p>tidak sama dengan proses-proses yang dilakukan sebelumnya yang hanya mendata diatas meja dan hanya melibatkan pemong desa tanpa melibatkan masyarakat</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Secara umum masyarakat mendukung dan merespon baik karena prosesnya dilakukan secara terbuka (partisipatif dan transparan <ul style="list-style-type: none"> • RT/Dusun <ul style="list-style-type: none"> ➤ Mereka sangat lebih senang proses seperti ini i karena mereka tidak dibebani lagi terkait pendataan sehingga tidak dipersalahkan lagi seperti BLT ➤ Mereka sangat mendukung karena masyarakat yang menentukan sendiri sehingga jika ada maslah kemudian hari seperti kasus BLT BBM mereka tidak disalahkan oleh masyarakat • Respon Pemda <ul style="list-style-type: none"> ➤ Sangat mendukung karena ujicoba metode ini lebih akurat, transparansi, partisipatif ➤ Banyak yang khawatiran terhadap dampak yang ditimbulkan ➤ Pemerintah daerah ikut mensosialisasikan/koordinasikan kepada camat/kades bahwa aka ada tim pendataan yang akan masuk dengan program PKH ➤ Pihak Pemda mendukung metode Hybrid ➤ Awalnya mereka was-was karena ketakutan program ini prosesnya sama dengan program BLT namun setelah dijelaskan mereka sangat menerima program ini • Pihak kecamatan <ul style="list-style-type: none"> ➤ Kami fasilitator kurang mengetahui respon kecamatan karena untuk koordinasi ke pihak 		
---	--	--

<p>kecamatan bukan tugas fasilitator</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pihak kades/lurah <ul style="list-style-type: none"> ➢ Ada yang baik dan ada yang kurang baik akibat trauma program BLT ➢ Sangat baik karena uji metode ini merupakan hal baru bagi pamong dan semua masyarakat yang menentukan sehingga pamong tidak akan disalahkan oleh warga ➢ Ada beberapa kades hanya sebatas member tempat menginap dan mengundang ketua SLS ➢ Ada beberapa RT/Kadus/tokoh/masyarakat yang menolak program ini karena quota yang sedikit sehingga ada kekhawatiran masyarakat yang tidak mendapat bantuan akan menyalahkan pamong Desa ➢ Ada yang sangat mendukung namun ada juga yang kurang merespon 		
--	--	--

PEMBELAJARAN dan HAMBATAN

Pembelajaran Menarik Apa Saja Yang Telah Didapat Selama Pelaksanaan Mulai Sejak Persiapan Hingga Implementasi (Positif dan Negatif) Metode Targeting?	Hambatan Apa Yang Dialami Selama Proses Ujicoba Metode Ini ?
<ul style="list-style-type: none"> • Banyak mendapat pembelajaran bagaimana ketika berhadapan dengan masyarakat • Semakin meningkatkan pengetahuan dan kapasitas dalam memfasilitai ditingkat masyarakat • Menambah pengetahuan bagaimana melakukan pendataan langsung kemasyarakat dan melibatkan banyak pihak dalam prosesnya • Pembelajaran tentang retorika dan mengetahui kondisi masyarakat sebenarnya dilapangan • Meningkatkan kemampuan dan pengetahuan tentang kondisi social dan ekonomi masyarakat, tentang memfasilitai pertemuan dimasyarakat dan metode pendataan program • Meningkatkan pembelajaran dalam bersikap dihadapan pamong dan masyarakat 	<ul style="list-style-type: none"> • Yang sering menjadi hambatan adalah pada tahapan koordinasi dengan kadus/lurah karena sering tidak ada ditempat atau karena sibuk sehingga waktu sering menjadi molor • Koordinasi dengan lurah/kadus sering tidak bertemu karena tidak ditempat atau kesibukannya sehingga untuk menyesuaikan dengan hari kerja pada jadwal sering membuat pertemuan lebih dari 2 pertemuan sehari agar tetap sesuai jadwal yang sudah ditentukan • Penjadwalan waktu sosialisasi • Jumlah masyarakat yang hadir dalam pertemuan yang tidak mencapai 50% • Kendala alam seperti hujan, mati lampu, jalan berlumpur dan lokasi yang berjauhan antar dusun/RT • Proses perengkingan, sering terjadi perdepatan yang lama, sering tidak terima sehingga membuat pusing

<ul style="list-style-type: none"> • Kesabaran bersiam di desa yang minim fasilitas • Meningkatkan rasa jiwa social • Meningkatkan kapasitas dalam manajemen konflik • Menambah pengalaman soal membaca kondisi psikologis orang per orang • Meningkatkan kemampuan dalam trik menghadapi masyarakat yang berbeda-beda dan strategi-strategi untuk mengatasi RT yang belum terjadwal • Meningkatkan kemampuan dalam perbaikan mental dan memecahkan persoalan terkait tingkat status ekonomi • Meningkatkan kemampuan dalam beretika dalam berkomunikasi dengan pihak-pihak lain 	<ul style="list-style-type: none"> • Ketika jadwal dicancel secara mendadak • Jadwal yang berubah-ubah • Penentuan hari libur yang mendadak • Ketika ada pihak yang tidak mendukung/menolak • Medan yang kurang baik atau tidak mendukung, lokasi yang terlalu jauh dan daerah pegunungan • Masyarakat/tokoh tidak menerima jumlah quota yang ditetapkan • Ada masyarakat yang tempramen dan tidak mau menerima hasil pertemuan • Trauma dengan program BLT sehingga sering pamong desa kurang merespon • Menemui ketua SLS yang tidak hadir dalam pertemuan SLS • Ketua SLS malas mengadakan pertemuan • Ketua SLS yang menolak tidak mau membuat surat pernyataan • Ketua SLS takut untuk mengundang semua masyarakat karena tidak semua masyarakat yang akan memperoleh bantuan • Pemahaman masyarakat yang tidak mau tau dan ingin semua masyarakat dapat agar rata • Tingkat pemahaman masyarakat yang berbeda-beda • Data yang kurang update • Kekuatan jasad, ruhuliyah dan fikriyah labil kadang enak kadang tidak
---	--

DATA dan QUOTA

DATA	QUOTA
<ul style="list-style-type: none"> • Pada dasarnya data pusat tidak bisa digunakan sebagai data awal karena data pusat banyak yang tidak sesuai dengan kondisi lapangan, misalnya data RTSM dari pusat setelah ditanyakan kepada masyarakat/tokoh ternyata bukan termasuk RTSM • Data pusat banyak tidak akurat karena data dari pusat banyak yang salah RT atau salah dusun atau bahkan sudah meninggal atau tidak lagi berdomisili diwilayah tersebut • Data pusat lebih banyak yang tidak akurat dibandingkan yang akurat • Pada saat proses matching banyak data usulan RTSM dari masyarakat tidak ada didata PPLS padahal RTSM tersebut sudah lama berdomisili diwilayah tersebut • Banyak data pusat yang salah dalam penulisan nama 	<ul style="list-style-type: none"> • Jumlah quota tidak sesuai dengan kondisi lapangan, misalnya diwilayah yang banyak RTSMnya jumlah quotanya sedikit dan biasanya itu yang menjadi masalah karena masyarakat meminta untuk menambahkan jumlah quotanya dan sebaliknya diwilayah yang kondisi kehidupannya baik jumlah quotanya banyak • Tidak ideal dalam menentukan quota seperti quota nol, setelah dilakukan diskusi ternyata diwilayah tersebut ada bahkan banyak yang termasuk RTSM • Quota terlalu sedikit • Jumlah quota yang disediakan tidak sesuai dengan kondisi kesejahteraan masyarakat yang ada

<ul style="list-style-type: none"> • Banyak data yang tidak sesuai dengan criteria RTSM dan criteria PKH • Banyak masyarakat/tokoh/pamong desa yang memperotes data dari pusat • Jika dalam metode perbaikan kebanyakan data pusat bila direngking dengan data usulan masyarakat akan jauh berada dibawah dan tidak masuk rengking • Ketika metode tambahan karena data pusat tidak bisa dirubah sedangkan data dari pusat tersebut bukan termasuk RTSM maka itu yang sering menjadi masalah dilapangan karena diprotes oleh masyarakat/tokoh yang hadir dalam pertemuan • Data pusat banyak ditemukan merupakan kerabat pamong atau kerabat petugas yang melakukan pendataan ketika program BLT 	
---	--

INPUT dan SARAN

Metode Mana Yang Paling Direkomendasikan (Di Hybrid Apa Dan Di Pendaftaran Apa)?	Rekomendasi Apa Saja Yang Ingin Disampaikan Terkait Pelaksanaan Metode: (Tahapan, Waktu, Kerjasama Tim/Dukungan Pihak Lain, Alat dan Bahan, Dll)?
<ul style="list-style-type: none"> • Metode hybrid <ul style="list-style-type: none"> ➢ Metode Perbaikan Masyarakat ➢ Metode Perbaikan Tokoh • Metode pendaftaran <ul style="list-style-type: none"> ➢ Metode pendaftaran suami atau istri di Dusun ➢ Metode Pendaftaran suami-istri di Dusun ➢ Metode Pendaftaran suami-istri di Desa ➢ Metode pendaftaran suami atau istri di Desa 	<ul style="list-style-type: none"> • Flipchat yang no 2 tidak perlu ditampilkan karena itu yang membuat masyarakat ingin mendaftar karena melihat jumlah nominal yang akan didapatkan • Komunikasi antar fasilitator perlu ditingkatkan • MS (asisten supervisor), camat dan kades serta pendamping harus meningkatkan koordinasi dan komunikasi agar lebih memudahkan fasilitator • Untuk memastikan bahwa data usulan RTSM dari masyarakat harus ada survey untuk metode hybrid agar lebih falid/akurat • Untuk kerjasama tim karena tidak ada coordinator lapangan terkadang ada yang mendominasi tim seolah-oleh sebagai korlap • Supervisor lebih banyak kaku dalam mengingatkan tugas dibanding perhatian kondisi fasilitator dan memberikan motivasi • Refleksi perlu dilakukan disetiap kecamatan untuk perbaikan proses dikecamatan selanjutnya sangat perlu ditingkatkan karena akan membantu dengan proses sering imformasi antar fasilitator atau asisten SV • Koordinasi tim harus lebih diperkuat tentang jadwal pertemuan dari amsing-masing fasilitator • Koordinasi dengan asisten SV dan supervisor ketia ada temuan harus diperkuat untuk mempermudah proses dilapangan • Koordinasi diperkuat dan jika ada imfo terbaru cepat disampaikan

- Waktu dibuat lebih longgar
- Adakan bantuan dana untuk usaha
- Dalam menentukan metode dimasing-masing kampung/desa agar kiranya bisa disesuaikan dengan adat/watak/karakteristik masyarakat dari masing-masing kampung tersebut agar proses bisa berjalan sesuai yang diharapkan

C. Kelompok Fasilitator Pendaftaran

KENYAMANAN MEMFASILITAS I	WAKTU	INPUT & SARAN	TEMPAT	PARTISIPASI & TINGKAT KEHADIRAN PESERTA	DUKUNGAN PEMERINTAH SETEMPAT	PERAN PIHAK LAIN	PEMBELAJARAN	HAMBATAN
<ul style="list-style-type: none"> • Proses fasilitasi yang nyaman <ul style="list-style-type: none"> ➢ Semua metode oke ➢ Siapa saja kelurahan • Proses fasilitasi yang banyak bermasalah <ul style="list-style-type: none"> ➢ Tidak ada yang bermasalah ➢ Suami istri kecamatan • Kenapa ? <ul style="list-style-type: none"> ➢ Jarak 	<ul style="list-style-type: none"> • Alokasi waktu pelaksanaan ujicoba <ul style="list-style-type: none"> ➢ Alokasi waktu yang disediakan untuk kegiatan lapangan terlalu mepet ➢ Rata-rata koordinasi dengan camat waktunya 1 jam ➢ Waktu untuk pertemuan tokoh 	<ul style="list-style-type: none"> • Apa yang dirasakan fasilitator terhadap kehadiran peserta antara laki-laki dan perempuan? <ul style="list-style-type: none"> ➢ Jika pesertanya ibu-ibu mereka kurang focus ➢ Jika pesertanya laki-laki akan lebih fokus ➢ Lebih 	<ul style="list-style-type: none"> • Apakah masyarakat dikota/desa memberikan respon yang berbeda pada ujicoba metode ini <ul style="list-style-type: none"> ➢ Respon masyarakat bagus (Desa →umbulan/ talang) ➢ Respon masyarakat baik (untuk dikota/desa) • Jarak 	<ul style="list-style-type: none"> • Bagaimana dampak waktu terhadap tingkat kehadiran peserta <ul style="list-style-type: none"> ➢ Kalau pertemuan masyarakat di malam hari waktunya agak sempit ➢ Pertemuan tokoh pada malam hari waktunya sempit , tetapi 	<ul style="list-style-type: none"> • Tahapan yang membutuhkan dukungan <ul style="list-style-type: none"> ➢ Diseluruh tahapan membutuhkan dukungan dari pemerintah ➢ Tahapan pertemuan masyarakat (kadus) • Respon pemda dalam uji coba <ul style="list-style-type: none"> ➢ Respon pemerintah baik hanya 	<ul style="list-style-type: none"> • Koordinasi mana yang perlu diperkuat kedepannya <ul style="list-style-type: none"> ➢ Koordinasi dengan pihak lain (BPS & Pendamping) ➢ Koordinasi diawal kegiatan yang harus diperkuat, agar masing-masing tidak salah persepsi 	<ul style="list-style-type: none"> • Menambah ilmu tentang pemahaman sosiologi di masyarakat • Diawal harus paham benar dengan kegiatan yang akan kita laksanakan • Koordinasi harus ditingkatkan 	<ul style="list-style-type: none"> • Hambatan dalam proses uji coba metode ini <ul style="list-style-type: none"> ➢ Jarak ➢ Komunikasi (bahasa daerah) ➢ Kondisi medan/lokasi ➢ Perubahan jadwal ➢ Dukungan pemerintah setempat yang kurang di beberapa tempat ➢ time schedule yang berubah-ubah (contoh jadwal wawancara)

<p>tempuh</p> <ul style="list-style-type: none"> ➢ Ongkos duble ➢ Waktu (karena harus bekerja) ➢ Jarak pendaftaran lebih mudah terjangkau ➢ Tidak memberatkan pasangan yang ingin bekerja 	<p>minimal 2 jam</p> <ul style="list-style-type: none"> ➢ Waktu untuk pertemuan masyarakat minimal 1,5 jam ➢ Waktunya sempit (pelatihan – Refresh – pelaksanaan Lapangan) ➢ Waktu koordinasi dengan aparatur pemerintah rata-rata lebih dari 1 jam ➢ Waktu pertemuan tokoh minimal 2 jam ➢ Waktu untuk pertemuan masyarakat rata-rata 2 jam <p>• Tahapan</p>	<p>banyak alasan jika ibu-ibu yang hadir</p> <ul style="list-style-type: none"> ➢ Jika laki-laki yang hadir lebih banyak menerima saja <p>• Bagaimana tingkat kehadiran peserta laki-laki/perempuan disetiap proses diskusi</p> <ul style="list-style-type: none"> ➢ Tingkat kehadiran peserta perempuan (ibu-ibu) lebih banyak ➢ Perempuan lebih banyak hadir dibandingkan laki-laki <p>• Saran</p> <ul style="list-style-type: none"> ➢ Tepat waktu pada proses 	<ul style="list-style-type: none"> ➢ Sangat berpengaruh terutama untuk desa yang terisolir ➢ Jarak sangat berpengaruh dalam efektivitas uji coba <p>• Metode mana yang direkomendasikan</p> <ul style="list-style-type: none"> ➢ Bila tidak berjalan normal, metode terbaik pendaftaran siapa saja kelurahan ➢ Jika berjalan normal, metode pendaftaran suami istri ditingkat dusun ➢ Metode pendaftaran 	<p>banyak tokoh yang hadir</p> <p>• Bagaimana tingkat kehadiran peserta disetiap proses kegiatan</p> <ul style="list-style-type: none"> ➢ Di pertemuan masyarakat ada konflik internal (kadus tidak disukai warga), sehingga peserta/warga yang hadir sedikit ➢ Jika pertemuan masyarakat pagi dan siang lebih banyak ibu-ibu yang hadir 	<p>beberapa saja yang tidak mendukung</p> <ul style="list-style-type: none"> ➢ Sebagian baik, sebagian tidak 	<p>dan memahami juknis masing-masing (MS, BPS & Pendamping PKH)</p> <ul style="list-style-type: none"> ➢ Koordinasi dengan pihak lain (BPS & Pendamping) <p>• Koordinasi dengan para pihak selama uji coba</p> <ul style="list-style-type: none"> ➢ Sering terjadi miss komunikasi ➢ Koordinasi cukup baik walau diawal agak kurang ➢ Sering terjadi miss komunikasi 		
---	---	---	---	--	---	--	--	--

	<p>mana yang membutuhkan waktu ? kenapa ?</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Koordinasi dengan lurah karena rata-rata lurahnya super sibuk ➤ Pertemuan tokoh karena waktu yang lama pada saat diskusi dan musyawarah. 	<p>wawancara</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Fixing jadwal (terutama untuk tanggal merah/hari libur) ➤ Koordinasi diperkuat (all tim) ➤ Dukungan pihak lain contohnya pemerintah sangat diperlukan untuk kelancaran kegiatan ➤ Koordinasi perlu ditingkatkan ➤ Waktu harus fix, jadwal jangan berubah-ubah 	n siapa saja kelurahan					
--	---	--	------------------------	--	--	--	--	--

Lampiran 3.c.

**HASIL TABULASI REVIEW REFLEKSI
SUMATRA SELATAN**

NO	PERTANYAAN	HIBRID	PENDAFTARAN
1	PEMAHAMAN		
	1. Bagaimana tingkat pemahaman fasilitator terhadap manual dan metodologi	<ul style="list-style-type: none"> - Baik karena dapat dipahami dengan mudah, - Dalam pengisian form juga sangat jelas - Cukup dimengerti output yang akan dicapai dalam metode - Sangat mudah dipahami sehingga membantu pekerjaan dilapangan - Simple dan tepat dikembangkan dalam program ini - Sangat baik karena dalam manual tertulis secara rinci dan itu memudahkan fasilitator memahami - Pemahaman tentang manual bisa dimengerti tetapi penjabaran terlalu banyak sehingga kadang dalam melakukan dilapangan dapat membingungkan <p>1. Bentuk diagram sangat membantu 2. Mekanisme dalam mendampingi ketua RT dalam mengundang tokoh harus diperjelas</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Sangat memahami namun ada beberapa kalimat yang perlu pengulangan kembali - Cukup dipahami maksud dan tujuan dari setiap metode sehingga sangat membantu pelaksanaan ketika dilapangan - Cukup mudah dipahami dan diterapkan dilapangan - Disaat pelatihan masih banyak yang kurang dipahami hanya yang dilakukan simulasi saja yang dipahami, sehingga memang harus mempelajari ulang manual sehingga semakin hari semakin lancar bahkan tanpa melihat lagi plifchar yang tertempel didinding. <p>1 Hanya focus pada metode yang disimulasikan</p>
	2. Apakah manual cukup mudah untuk dipahami dan dilaksanakan	<ul style="list-style-type: none"> - Mudah dipahami karena jelas, cara kerjanya (tahapan) berurutan, cukup dibaca saja - Cukup mudah namun perlu waktu yang cukup untuk melaksanakan metode - Mudah tapi perlu penyesuaian karena hanya berupa teks bukan gambar - Sangat mudah dipahami karena tahapan setiap metode cukup jelas, 	<ul style="list-style-type: none"> - Cukup mudah sehingga sangat membantu pelaksanaan dilapangan - Cukup mudah dan hampir tidak ada kendala dilapangan ketika manual dipahami dengan benar.

	<p>3. Bagaimanakah tingkat pemahaman para pihak (masy, tokoh, pemdes/pemkec/ pemkab/pendamping dan BPS)</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Lumayan mengerti para tokoh sehingga pada saat deadlock tokoh turut menjelaskan dan mengarahkan - Pemahaman sangat baik, sehingga mudah diterima dimana metode yang digunakan dianggap tepat sasaran - Cukup baik terutama dalam mengundang warga untuk hadir yang memenuhi criteria kemiskinan - Semua pihak dapat mengerti dengan metode ini tetapi hanya butuh proses - Kurangnya interaksi antara fasilitator dengan pendamping - Tingkat pemahaman dari pendamping sangat kurang bahkan ada yang tidak memahami sama sekali - Ada pendamping yang paham meskipun kurang koordinasi dengan fasilitator - Cukup bagus karena para tokoh dan masyarakat dapat terlibat langsung dalam diskusi <p>1. Apakah data Survey Meter dapat direkayasa dalam artian aparat desa bisa menentukan dimana lokasi yang menjadi baseline Survey Meter</p> <p>2. Harus ada pemahaman yang sama dengan pendamping, fasilitator dan BPS</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Belum maksimal, karena ada yang belum paham tentang program ini - Pemdes disaat koordinasi ada yang belum paham, ketika mereka mengikuti sosialisasi di masyarakat mereka baru memahami - 50% pendamping memahami dengan baik dan 50% kurang memahami - Pendamping kurang memahami jobdesk - 50% tokoh paham dengan baik dan 50% masih kurang paham sehingga kadang tidak peduli - Ketika terjadi sosialisasi di masyarakat mereka cukup aktif sehingga menurut saya mereka cukup aktif - Bagi tokoh yang memahami mereka juga ikut membantu kerja fasilitator - Masyarakat dan tokoh cukup baik merespon program ini - Masih kurang karena para tokoh biasanya menginginkan semua warganya bisa daftar
	<p>2. Apakah internalisasi metode ditingkat masing-masing pelaksana dianggap kurang/cukup memadai/bagus/sangat bagus</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Lumayan dipahami sehingga mampu diterapkan dilapangan - Cukup baik untuk metode perbaikan hanya pada metode tambahan masih kurang - Cukup baik sehingga dalam pelaksanaan dilapangan mampu mengetahui watak masyarakat yang berbeda-beda 	<ul style="list-style-type: none"> - Cukup bagus sehingga fasilitator mampu menjelaskan kepada warga sehingga masyarakat paham dan mereka sadar bahwa yang mendaftar adalah mereka sendiri - Cukup baik apalagi semakin lama semakin paham dan semakin mempermudah kegiatan dilapangan - Baik, sehingga mampu memberikan pemahaman progam dengan baik, melalui kata-kata yang mudah dimengerti

		<ul style="list-style-type: none"> - Cukup bagus karena pada dasarnya metode ini digunakan untuk menentukan sasaran yang tepat hanya saja quota yang terbatas - Cukup bagus karena mampu mencari solusi ketika terjadi masalah dilapangan <p>1. Ada perbedaan quota antara nol dan dua (2)</p>	<p>masyarakat,</p> <p>1. Menyambungkan hasil dari tokoh dengan kroiteria kemiskinan program</p>
	2. Bagaimana peran dan pengaruh dari para tokoh kunci terhadap ujicoba dilapangan	<ul style="list-style-type: none"> - Dapat menentukan keadaan warga setempat - Cukup baik terutama saat akurasi data BPS (matching) - Sangat berpengaruh karena disaat akan melakukan diskusi para tokoh kunci mengundang warga hadir, - Menyiapkan tempat yang refresentatif dan menjamu warga dengan baik - Dapat menetralisasi keadaan yang agak sangat panas terutama disaat perankingan apalagi para tokoh bersifat netral 	<ul style="list-style-type: none"> - Sangat berpengaruh karena pembicaraan mereka selalu didengarkan oleh waraga - Sangat berperan Karena biasanya para tokoh yang mengundang warga untuk hadir - Tokoh kunci sangat membantu menjekaskan tentang RTSM pada masyarakat, mengutamakan RTSM untuk datang disaat sosialisasi - Sangat membantu karena para tokoh kunci dapat menentukan batas wilayah
II	TEMPAT		
	1. Apakah masyarakat di lokasi perkotaan dan pedesaan memberikan respon yang berbeda terhadap pelaksanaan ujicoba	<ul style="list-style-type: none"> - Sambutannya masyarakat sangat berbeda dimana masyarakat kota semi kritis dan masyarakat desa mudah diajak kerjasama - Respon masyarakat diperkotaan sangat baik karena metode ini melibatkan masyarakat sehingga warga menganggap akan tepat sasaran 	<ul style="list-style-type: none"> - Ya, masyarakat desa lebih respon tapi lebih sulit dipahami - Ya sangat berbeda karena masyarakat desa lebih kooperatif
	2. Apakah factor jarak menjadi masalah yang berpengaruh terhadap efektifitas dan efisiansi pelaksanaan metode	<ul style="list-style-type: none"> - Sama antusiasnya - Sangat berpebgaruh apalagi kehadiran masyarakat dan fasilitator terutama bagi desa yang aksesnya melalui jalan sungai (laut) karena fasilitator harus menginap didesa 	<ul style="list-style-type: none"> - Ya, jarak jauh membuat jadwal pertemuan jadi molor - Yang jaraknya jauh lebih terinci memberikan penjelasan

		<ul style="list-style-type: none"> - Jarak yang jauh membuat warga susah berkumpul (sebaran rumah) - Tidak ada masalah karena semua pertemuan dilakukan di rumah ketua SLS 	
III	WAKTU		
	1. Apakah waktu yang dialokasikan untuk pelaksanaan metode (persiapan/pelatihan, koordinasi dan pelaksanaan lapangan) di rasakan mencukupi? Bagaimana idealnya alokasi waktu menurut fasilitator	<ul style="list-style-type: none"> - Waktunya sangat singkat apalagi jarak yang jauh - Cukup, tetapi harus menyesuaikan jadwal aparat desa terutama untuk kelurahan - Untuk pelatihan/persiapan masih kurang sehingga membutuhkan waktu yang untuk mengulang lagi sehingga pada saat dilapangan tidak mengalami kesulitan karena biasanya yang ada dilapangan berbeda dengan apa yang diperoleh saat pelatihan - Waktu antara koordinasi dengan pertemuan seluruh ketua sls sangat sempit - Idealnya 2 sls 1 hari <p>1. Harus ada jeda antara koordianasi dan pertemuan ketua SLS</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Alokasi waktu masih kurang banyak sehingga memang memerlukan tambahan waktu - Alokasi waktu harus disesuaikan dengan jumlah SLS di setiap desa <p>1. Sebaiknya ada hari tambahan saat pelatihan untuk tryout</p>
	2. Apakah jadwal yang dialokasikan terlalu ketat atau bersifat fleksibal	<ul style="list-style-type: none"> - Fleksibel, ketika diakhir kegiatan - Terlalu ketat seharusnya 1 hari untuk 2 SLS sehingga tidak terburu-buru karena SLS berikutnya sudah menunggu <p>1. Disesuaikan dengan jumlah SLS</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Terlalu ketat, karena kadang aparat desa selalu meminta waktu satu hari untuk mengundang para tokoh - Sudah cukup rata-rata 1 kelurahan 1 minggu - Fleksibel jika fasilitator mampu mengefrktifkan waktu <p>1. Sebaiknya ada jeda waktu setelah koordinasi dengan aparat desa untuk mengundang para tokoh)</p>
	3. Bagaimana dampak alokasi waktu terhadap tingkat kehadiran peserta	<ul style="list-style-type: none"> - Pertemuan pagi sedikit yang hadir, pertemuan malam tidak kondusif, idealnya 1 hari 1 kali 	<ul style="list-style-type: none"> - Tidak masalah - Jadwal pertemuan disesuaikan dengan kondisi

	(laki-laki/perempuan,masyarakat/tokoh) dipedesaan dan perkotaan	<p>pertemuan</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sangat berpengaruh karena butuh rentang waktu untuk mengundang para tokoh/masyarakat - Biasanya pertemuan para tokoh dilakukan malam hari jika pertemuan masyarakat dilakukan sore/malam - Jika pertemuan dilakukan pagi hari yang datang adalah sebagian besar kaum perempuan karena para bapak-bapak bekerja <p>1. Pada dasarnya waktu sangat berpengaruh pada tingkat kehadiran peserta dimana ketika pertemuan malam hari yang hadir hanya laki-laki dan ketika dilakukan pagi atau siang hari maka yang hadir kaum ibu-ibu karena para bapak sedang bekerja.</p>	masyarakat
	4. Tahapan mana yang membutuhkan waktu, apa alasanya	<ul style="list-style-type: none"> - Koordinasi terutama pengaturan jadwal pada hari sabtu dan minggu dimana hari itu adalah hari libur sehingga harus menunggu hari kerja - Koordinasi karena tidak ada yang dapat mewakili jika Kepala kelurahan tidak ada ditempat. 	<ul style="list-style-type: none"> - Pertemuan masyarakat (rata-rata penjelasan program hanya 1,5 – 2 jam tetapi , proses Tanya jawab memerlukan waktu yang lama karena hampir 3 jam karena semua yang bertanya dengan cara satu persatu dan biasanya mewakili diri sendiri) - Koordinasi terutama diwilayah perkotaan (lurah) terkadang para lurah tidak ada sehingga penentuan jadwal pertemuan seyogyanya dilakukan pada hari ke 2 mundur karena koordinasi belum bisa dilakukan
	<p>5. Berapa waktu rata-rata yang dibutuhkan untuk pelaksanaan</p> <ul style="list-style-type: none"> - Koordinasi (camat, Kades) - Pertemuan tokoh/seluruh ketua RT - Pertemuan masyarakat/tokoh 	<ul style="list-style-type: none"> - Koordinasi camat 1-2 jam - Koordinasi kades 1- 1,5 jam - Pertemuan ketua SLS 2 jam - Pertemuan masyarakat 2 jam jika Quota sedikit tetapi jika banyak maka akan membutuhkan waktu 3-4 jam 	<ul style="list-style-type: none"> - Rata-rata waktu untuk koordinasi 1-2 hari - Waktu pertemuan tokoh 1 hari - Waktu pertemuan masyarakat 4 hari tergantung SLS - Secara keseluruhan rata-rata 1 minggu 1` desa

	(sosialisasi pendaftaran, diskusi hybrid)	<ul style="list-style-type: none"> - Rata-rata koordinasi 3 hari sementara pertemuan setiap SLS 4 hari tergantung jumlah SLS - 1. Sebaiknya pertemuan 1 hari untuk 2 SLS) 	
IV	KENYAMANAN FASILITASI		
	1. Metode mana yang dirasakan paling nyaman difasilitasi (sertai alasan)	<ul style="list-style-type: none"> - Pertemuan tokoh karena lebih fair dan lebih objektif, daya tangkap para tokoh sangat mudah dibanding masyarakat sehingga penjelasan bisa cepat (3 org) - Perbaikan karena data quota RTSM masih bisa berubah ketika dilakukan pertemuan dengan masyarakat sehingga program bisa tepat sasaran (2 org) 	<ul style="list-style-type: none"> - Pendaftaran siapapun dikelurahan karena yang mendaftar adalah 1 orang dengan letak yang netral (2 org) - Suami istri karena data bisa lebih akurat ketika mereka mendaftar apalagi harus ada bukti kuat yaitu N1 bagi pasangan tidak sempat (3 org)
	2. Metode apa yang paling bermasalah	<ul style="list-style-type: none"> - Tambahan masyarakat apalagi kalau Quota nol dan jika ada quota maka daftar usulan tersebut tidak dapat diubah (5 org) 	<ul style="list-style-type: none"> - Pendaftaran suami istri dikantor kecamatan karena jaraknya yang jauh apalagi harus ada N2 bagi yang pasangannya tidak dapat ikut daftar, apalagi ketika waktu pendaftaran harus melakukan koordinasi ulang dan kadang terhambatoleh tempat dan izin dari staf kecamatan. (2 org) - Siapa saja karena informasi yang diberikan pada saat pendaftaran bisa tidak akurat (2 org)
	3. Tahapan mana yang dirasakan paling mudah	<ul style="list-style-type: none"> - Koordinasi dengan lurah/kades (3 org) - Pertemuan ketua SLS (1 org) - Pertemuan tokoh/masyarakat (1 org) 	<ul style="list-style-type: none"> - Pertemuan tokoh karena para tokoh sangat mudah (2 org) memahami penjelasan program - Koordinasi kades /lurah (1 org) - Pertemuan masyarakat (2 org)
V	PERAN PIHAK LAIN		
	1. Bagaimana koordinasi dengan pihak pendamping, dinsos, BPS	<ul style="list-style-type: none"> - Kurang koordinasi sehingga setiap pihak berjalan dengan sendiri-sendiri (4 org) 	<ul style="list-style-type: none"> - Kalau dengan pendamping sangat kurang, bahkan bisa dikatakan sangat jarang (1 org) - Untuk pendamping lebih banyak membantu pada saat

		1. sebaiknya ada koordinasi ditingkat kecamatan antara pihak pendamping, BPS, Dinsos dan para kepala desa/lurah	proses wawancara (1 org) - Koordinasi dengan pendamping cukup baik bahkan mereka sampai mengikuti proses disetiap kegiatan di desa mulai dari koordinasi dengan kades sampai pada tahapan sosialisasi di masyarakat, bahkan disaat proses wawancara terkadang coordinator lapangan dari pihak Dinsos turun langsung kelapangan mengamati proses
	2. Bagaimana peran pendamping dan pihak Dinsos dalam pelaksanaan ujicoba	- Para pendamping kurang berperan bahkan ada yang tidak mau hadir meskipun sudah disampaikan jadwal kegiatan, mungkin ini disebabkan karena setiap pendamping memiliki pekerjaan yang lebih dari 2 sehingga sangat sulit dalam membagi waktu (2 org) - Tidak ada masalah karena tidak pernah bertemu dengan pendamping (3 org)	- Sangat sedikit bahkan jarang sekali apalgì pendamping kurang memahami jobdesk (3 org)
	3. Bagaimana peran BPS dalam pelaksanaan ujicoba	- Sangat sedikit karena memang antara fasilitator dan BPS serta pendamping kurang koordinasi - Seharusnya data yang diberikan dari BPS harus akurat sehingga tidak ada complain dari masyarakat atau tokoh disaat pertemuan dalam menentukan calon peserta PKH (3 org)	- BPS hanya terlibat langsung pada saat proses wawancara
	4. Peran-peran mana yang bersifat mendukung? Adakah peran yang dimainkan dipandang keluar dari metodologi	- Tetap berjalan sesuai metodologi (2 org) - Meminta nomor kontak para kades kepada pendamping lapangan terutama bagi pendamping yang bekerja sebagai staf di kecamatan (2 org) 1. Perlunya duduk bersama oleh para pihak yang terlibat dalam program untuk menyamakan pemahaman.	- Disaat koordinasi atau sosialisasi dimasyarakat sebaiknya menggunakan bahasa local sehingga mudah dipahami (3 org)

VI	PARTISIPASI DAN TINGKAT KEHADIRAN WARGA		
	1. Apakah peserta serius mengikuti semua tahapan metodologi? Tahapan mana yang paling seru dan membutuhkan konsentrasi	<ul style="list-style-type: none"> - Peserta sangat serius terutama dalam melakukan perangkingan, menentukan indikator kemiskinan local dan seleksi RTSM bagi Quota dari BPS (6 org) 	<ul style="list-style-type: none"> - Hampir semua peserta sangat serius mengikuti karena mereka ingin tahu bagaimana cara mendapatkan bantuan tersebut , (3 org) - Pertemuan masyarakat (2 org) - Tahapan menentukan kriteria kemiskinan (2 org) - Representatif tergantung desa (1 org)
	2. Bagaimanakah tingkat kehadiran peserta disetiap tahapan proses (Metode Hybrid dan Pendaftaran)	<ul style="list-style-type: none"> - Cukup banyak karena hampir setiap pertemuan yang dilakukan oleh masyarakat pesertanya cukup banyak bahkan terkadang ruangan penuh (2 org) - Jika pertemuan dilakukan pada malam dan sore hari maka jumlah peserta cukup banyak (1 org) - Kebanyakan peserta yang hadir adalah kaum perempuan dan mereka sangat antusias dan aktif dalam mengikuti proses (2 org) 	<ul style="list-style-type: none"> - Tergantung tahapan ketika itu pertemuan tokoh maka yang datang hanya sesuai permintaan yaitu 7-10 orang, tetapi ketika pertemuan masyarakat maka peserta biasanya cukup banyak (3 org) - Tetapi ketika sosialisasi sudah dilakukan di beberapa SLS terkadang tinggal sedikit warga yang datang di hari-hari terakhir sosialisasi karena informasi sudah menyebar jangankan dalam desa bahkan antar desa (2 org)
	3. Bagaimanakah tingkat kehadiran peserta laki-laki dan perempuan dalam setiap tahapan	<ul style="list-style-type: none"> - Jika pertemuan dengan masyarakat maka biasanya kaum perempuan yang lebih banyak hadir (8 org) - Jika pertemuannya tokoh maka pesertanya hampir semua laki-laki (3 org) <p>1. Tokoh yang diundang lingkup Dusun, jika para tokoh trauma/tidak dipercaya maka para tokoh mengundang warga apalagi kalau dalam satu dusun para tokoh kurang disegani</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Rata-rata penuh tetapi yang dominan adalah kaum perempuan, rata-rata pertemuan tokoh ± 50 orang sedangkan pertemuan tokoh ± 7-10 org (5 org)
	4. Apa yang dirasakan fasilitator terhadap kehadiran peserta (laki-laki dan perempuan) jika dikaitkan dengan efektifitas waktu dan kualitas keputusan saat	<ul style="list-style-type: none"> - Lebih akurat keputusan laki-laki dibanding perempuan karena kebanyakan perempuan memaksakan kehendaknya (3 org) - Lebih efektif perempuan apalagi jika perempuan lebih banyak yang hadir disetiap pertemuan (2 org) 	<ul style="list-style-type: none"> - Lebih akurat laki-laki dan lebih berani berpendapat (1 org) - Lebih efektif laki-laki dibanding perempuan karena laki-laki lebih menggunakan logika sedangkan perempuan lebih banyak menggunakan perasaan (3 org)

	pengambilan keputusan diskusi	<ul style="list-style-type: none"> - Lebih efektif perempuan karena biasanya perempuan lebih paham dan mereka lebih banyak berperan dalam program ini (1 org) 	
VII	DUKUNGAN PEMERINTAH SETEMPAT		
	1. Bagaimanakah respon pemerintah (Kab, Kec, Desa, Dusun RW/RT) terhadap pelaksanaan ujicoba metode	<ul style="list-style-type: none"> - Mereka cukup merespon karena mereka dilibatkan dalam setiap tahapan mulai tingkat kec. sampai RT (3 org) - Respon aparat desa cukup baik meskipun masih timbul keraguan sebelum pelaksanaan karena rasa takut ketika saat pertemuan berlangsung muncul gejala di masyarakat. (1 org) 	<ul style="list-style-type: none"> - 50% lurah merespon dengan setengah hati bahkan kadang meminta untuk mempersingkat alur/tahapan (2 org) - 50% merespon dengan baik bahkan cukup aktif dengan memberikan himbauan, undangan dan informasi tentang program diluar pertemuan (3 org)
	2. Bagaimanakah tingkat pemahaman pemerintah (Kab, Kec, Desa/Lurah, Dusun, RW/RT) terhadap ujicoba metode?	<ul style="list-style-type: none"> - Cukup baik karena dari penjelasan mereka bisa membedakan antara PKH dan BLT yang banyak menimbulkan masalah (3 org) - Tergantung jika quota di SLS cukup banyak maka mudah mereka pahami tetapi ketika quota kecil maka mereka sulit untuk menerima (2 org) 	<ul style="list-style-type: none"> - Secara keseluruhan pemahaman pemkab (Kec, Lurah/Desa RW/RT) dikatakan 80% paham ketika mendapat penjelasan dari fasilitator (4 org) 1. Masih ada aparat desa yang meminta apakah bantuan ini bisa dibagi rata kepada yang tidak mendapatkan seperti dengan BLT
	3. Tahapan mana dari setiap metode (Hybrid/pendaftaran) yang dirasakan paling rawan dan mutlak membutuhkan dukungan pihak pemerintah	<ul style="list-style-type: none"> - Disaat mengidentifikasi criteria kemiskinan setempat (3 org) - Tahapan pemutusan jumlah quota apalagi jika metode tambahan (2 org) 	<ul style="list-style-type: none"> - Identifikasi kemiskinan (1 org) - Pada pertemuan tokoh (1 org)
VIII	DATA DAN QUOTA		
	1. Apakah ketersediaan data pusat sangat mendukung dalam pelaksanaan metode? Adakah persoalan terkait data pusat dan	<ul style="list-style-type: none"> - Kebanyakan tidak mendukung apalagi ketika quota sedikit sementara masyarakat banyak yang hadir (2 org) - Data amburadul, tidak akurat terutama PPLS-Quota- 	<ul style="list-style-type: none"> - Sangat mendukung jika sudah ada quota yang dipegang oleh fasilitator (2 org) 1. Jumlah quota kadang diumumkan oleh pendamping

	quota calon peserta PKH?	<p>SM, bahkan banyak yang menanyakan kapan pendataan terakhir yang dilakukan sehingga muncul data (4 org)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Quota dari BPS kadang rumah tangga kaya bukan agi RTSM sehingga menimbulkan protes bagi warga atau tokoh (2 org) - Cukup mendukung sebagai acuan dilapangan (1 org) <p>1. Pendamping menginformasikan jumlah quota)</p>	kepada masyarakat.
	2. Bagaimana respon masyarakat/para pihak dalam hal tersebut diatas	<ul style="list-style-type: none"> - Kecewa apalagi quota sedikit bahkan marah ketika quota tersebut adalah rumah tangga bukan sangat miskin (3 org) - Karena quota yang terbatas dan mereka tidak masuk maka rasa kecewa muncul (1 org) - Protes bahkan ada yang meminta untuk dilakukan pendataan atau survey langsung kelapangan (2 org) 	- Masyarakat meminta kejelasan dari jumlah quota (2 org)
IX	INFUT DAN SARAN		
	1. Metode mana yang paling direkomendasikan (Hybrid apa dan pendaftaran apa) ?	<ul style="list-style-type: none"> - Metode perbaikan dimasyarakat (5 org) - Metode perbaikan tokoh (4 org) 	<ul style="list-style-type: none"> - Pendaftaran suami istri dikelurahan (2 org) - Pendaftaran siapapun di RW karena tempat pendaftaran mudah dijangkau oleh masyarakat (2 org) - Siapapun di Desa (1 org) -
	2. Rekomendasi apa saja yang ingin disampaikan terkait pelaksanaan metode (Tahapan, waktu, kerjasama tim, dukungan pihak lain, alat dan bahan dll)	<ul style="list-style-type: none"> - Terkait jadwal yang sering berubah-ubah (3 org) - Tahapan koordinasi yang terlalu sempit terkadang 2 desa 1 hari sementara jarak yang cukup jauh dan membutuhkan waktu tempuh 1 hari (2 org) - Sebaiknya ada pertemuan rutin antara tim agar terjadi saling tukar pengalaman (1 org) - Waktu : jika quota banyak maka membutuhkan waktu yang lama, jangan membuat jadwal di hari 	<ul style="list-style-type: none"> - Jadwal jangan berubah-ubah (2 org) - Perlu dukungan data yang akurat (1 org)

		libur (2 org) - Pada dasarnya metode cukup baik hanya saja quota yang tidak akurat dan terbatas dari pusat (1 org) - Tingkat akurasi data lebih tepat (80%) (1 org) - Fotocopy form terkadang kurang (1 org) - Perlu pematangan/kesiapan pelaksanaan program terkait jadwal, kode SM, koordinasi dengan pihak terkait (1 org) - Jadwal terlalu padat (3 org) - Fasilitator bertugas ganda karena ada banyak data quota yang bermasalah (1 org)	
X	PEMBELAJARAN		
	1. Pembelajaran menarik apa saja yang telah didapat selama pelaksanaan mulai sejak persiapan hingga implementasi (positif dan negative) metode Targeting?	- Positif: dapat mengetahui criteria indikator kemiskinan secara luas yang setiap desa sangat berbeda (3 org) - Negative : masih ada masyarakat yang marah dan mengamuk ketika tidak masuk sasaran (2 org) - Dapat bertemu dan memahami karakter masyarakat yang berbeda (2 org)	- Sosialisasi yang efektif - Pembelajaran metode yang sistematis - Dapat meningkatkan teknik fasilitasi - Dapat membantu masyarakat dalam menentukan calon peserta PKH
XI	APA YANG PERLU DIPERBAIKI DARI MITRA SAMYA		
	PENDAFTARAN - Koordinasi tingkat pusat mulai dari BPS dan Dinsos - Kesejahteraan fasilitator perlu di tingkatkan - Alat ATK kurang terutama format - GPS memakan baterai		

	<p>HYBRID</p> <ul style="list-style-type: none">- Mitra Samya harus memperjelas data sebelum sampai ke fasilitator karena terkadang data harus dibenahi oleh fasilitator yang membutuhkan banyak waktu sedangkan tidak ada dalam jadwal untuk perbaikan data- Transpor jangan pakai subsidi lagi- Cukup puas jika ada kerjaan lagi tolong hubungi kami
--	--